

REKAM JEJAK

1950

1977

1981

1991

1993

1996

1999

2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 **TAHUN**
INDONESIA
UNESCO
1950 - 2020

REKAM JEJAK



TIM REDAKSI

Penasehat:

Arrmanatha C Nasir
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Prancis, Andorra
dan Monako/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO

Penulis Kehormatan:

Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro
Prof. Dr. Bambang Soehendro
Dr. Tresna Dermawan Kunaefi
Prof. Dr. Aman Wirakartakusumah
Prof. Dr. Carmadi Machchub
Prof. Dr. T.A. Fauzi Soelaiman
Prof. Dr. Bambang Hari Wibisono
Prof. Dr. Surya Rosa Putra
Dr. Ananto Kusuma Seta
Prof. Dr. Enny Sudarmonowati
Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti
Kamapradipta Isnomo, BA, MA

Kontributor Data dan Informasi Khusus:

Prof. Dr. Y. Purwanto (Cagar Biosfer),
Dr. Daud Tanudirjo (Warisan Budaya Dunia),
Ir. Wahjudi Wardoyo, M. Sc (Warisan Alam Dunia),
Dr. Harry Waluyo (Warisan Budaya Tak Benda)

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Surya Rosa Putra (Ketua)
Dikmas Sulistio
Evy Margaretha
Ari D. Kasiyanto
Nanda Bratawijaya
Apriyagung
Dina Arian
Hardam Rezeqi Saputro
Afina Iskandar
Zhalsa Dianora Ayu Limagara
Kevlin Susanto

Tim Grafis dan Penata Letak:

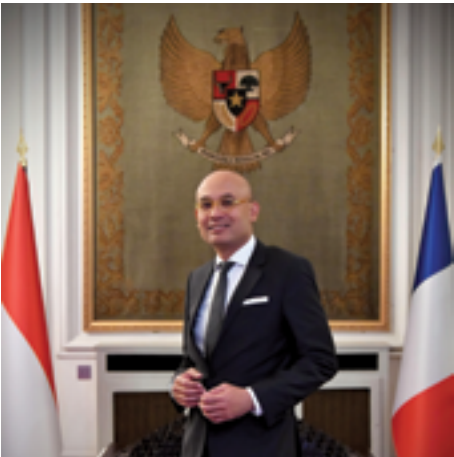
Muhammad Ridwan Martuah
Fina Fitriyani Karlina

KANTOR DELEGASI TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK UNESCO
1, rue Miollis 75015 Paris

Paris, 2020

SAMBUTAN

DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH (LBBP)
REPUBLIK INDONESIA UNTUK PRANCIS, ANDORRA, MONAKO
SERTA WAKIL TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK UNESCO



Tidak banyak yang menyadari bahwa Indonesia menjadi anggota UNESCO pada tanggal 25 Mei 1950, beberapa bulan sebelum Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Keanggotaan Indonesia pada UNESCO ini adalah bentuk komitmen tinggi pendiri bangsa terhadap pendidikan bagi pembangunan bangsa, serta pentingnya kerja sama internasional di bidang seperti pendidikan dan kebudayaan dalam berkontribusi pada perdamaian dunia.

UNESCO, yang konstitusinya menekankan visi dan misi untuk membangun perdamaian dunia melalui pendidikan, kerja sama sains dan kebudayaan, memiliki kesamaan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Merujuk pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, setidaknya, tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” berhubungan dengan pendidikan berkualitas UNESCO dan tujuan “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” terkait dengan misi perdamaian UNESCO itu sendiri. Para pendiri bangsa menyakini bahwa keanggotaan Indonesia di UNESCO di satu sisi, akan berkontribusi pada pengembangan proses pendidikan Indonesia, dan di sisi lain, akan meningkatkan peran Indonesia dalam membangun dunia yang damai dan berkelanjutan.

Visi dan misi yang sejalan inilah yang mendorong komitmen dan kontribusi tinggi Indonesia terhadap UNESCO. Kerja sama awal Indonesia-UNESCO dititikberatkan pada bidang Pendidikan, yang berkontribusi menurunkan angka buta huruf Indonesia dengan sangat drastis selama program 10 tahun (1951-1960) penurunan angka buta huruf di Indonesia. Periode berikutnya (1973-1986), UNESCO memberikan dukungan dalam pengembangan sistem pendidikan Indonesia, yang akhirnya melahirkan Kurikulum 1975. Saat ini, kerja sama bidang pendidikan dengan UNESCO, mencakup program dan kegiatan untuk mendukung SDG 4 (*quality education*) dan *Education for Sustainable Development (ESD)*.

Kerja sama awal Indonesia-UNESCO juga meliputi bidang sains kelautan (Oceanografi) dan sains hayati-lingkungan hidup. Kerjasama UNESCO-Indonesia di kedua bidang ini berkontribusi terhadap terbentuknya kerja sama antar pemerintah dalam bidang kelautan (*Intergovernmental Oceanographic Comission*), kerjasama dalam program *Man and Biosphere* (MAB) dan kerjasama dalam program *International Hydrological* (IHP) dengan satu pusat kategori-2 APCE (*Asia Pacific Center for Ecohydrology*). Di bidang kebudayaan, kerja sama awal Indonesia-UNESCO telah berkontribusi pada terbentuknya mekanisme multilateral dalam melindungi dan melestarikan warisan dunia. Restorasi Borobudur menjadi salah satu kampanye global untuk menyusun Konvensi 1972 UNESCO tentang Perlindungan Warisan Dunia (Warisan Budaya dan Warisan Alam), dan terbentuknya konvensi-konvensi kebudayaan lain, seperti Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Tak Benda, dan Konvensi 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya.

Kini Indonesia tercatat memiliki 9 Warisan Dunia, 10 Warisan Dunia Tak Benda, 16 Cagar Biosfer, 5 Geopark, serta 8 *Memory of the World*. Semua ini berkontribusi terhadap pembangunan sosio-ekonomi nasional, seperti melalui sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Disaat yang sama kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi

berbagai warisan budaya tersebut untuk generasi yang akan datang.

Sejak awal menjadi anggota UNESCO, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam *governance* UNESCO, berkontribusi memberikan gagasan dan idea untuk mengawal dan mengimplementasikan visi, misi dan mandat UNESCO. Peran tersebut direfeleksikan dengan keanggotaan Indonesia di berbagai badan UNESCO, seperti *Executive Board* UNESCO, *Intergovernmental Council of the Management of Social Transformations (MOST)*, *International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere (MAB)*, serta pada badan-badan antar pemerintahan lain di UNESCO.

Buku ini bertujuan menampilkan 70 tahun rekam jejak hubungan Indonesia-UNESCO dari 1950-2020. UNESCO telah banyak berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial nasional tidak hanya melalui pendidikan dan sains tetapi juga melalui kebudayaan. Di sisi lain, peran aktif Indonesia di berbagai badan-badan UNESCO, telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi UNESCO dalam pencapaian berbagai visi dan misinya.

Tentunya data dan informasi yang ditampilkan tidaklah sempurna atau pun lengkap karena begitu banyaknya catatan capaian dan kerja sama yang dihasilkan. Namun, diharapkan beberapa *milestones* yang disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman untuk pengembangan hubungan Indonesia-UNESCO ke depan.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada para Wakil Tetap maupun sebagai Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, yang telah memberikan catatan tentang berbagai capaian hubungan Indonesia-UNESCO pada periode masing-masing. Terima kasih juga saya tujukan kepada narasumber yang telah memberikan pengantar tentang konteks hubungan Indonesia-UNESCO dengan kebijakan-kebijakan nasional. Tidak lupa, terima kasih juga kepada para pakar atas kesediaannya berbagi data dan informasi yang akurat.

Akhir kata, apresiasi yang tinggi saya berikan kepada Tim Penyusun, Tim Editor dan Tim Penata letak atas semangat, dedikasi dan komitmennya dalam menyusun buku ini.

Arrmanatha C Nasir

Duta Besar LBBP/Wakil Tetap RI untuk UNESCO

SAMBUTAN

KETUA HARIAN KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK UNESCO (KNIU)



Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sejak dibentuk pada 16 November 1945, *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) bertujuan untuk menciptakan perdamaian melalui pembentukan dialog antarbudaya dan masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai bersama. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi UNESCO “*that since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that defenses of peace must be constructed*”. Karena perang dimulai dari pikiran manusia, maka dari pikiran manusialah harus dibangun pertahanan perdamaian, dimulai dari berpikir kita dapat menghindari terjadinya perang. Oleh karena itu melalui visi ini, dibentuklah visi global pembangunan berkelanjutan yang turut mengawasi terlindunginya hak asasi manusia, rasa saling menghormati, dan pemberantasan kemiskinan, yang seluruhnya merupakan tujuan utama dari misi dan aktivitas UNESCO.

Menyusul keanggotaan Pemerintah Indonesia di UNESCO pada tahun 1950, pada tahun 1952 Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibentuk untuk melaksanakan mandatnya guna menjembatani antara program UNESCO dengan Pemerintah Republik Indonesia dan begitu pun sebaliknya, menjembatani antara program Pemerintah Republik Indonesia dengan UNESCO demi tercapainya keberhasilan program dan kerja sama keduanya. KNIU Kemendikbud dalam menjalankan programnya, terlibat dalam kegiatan UNESCO, bekerja sama dengan badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi dan individu yang bekerja untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi dan informasi demi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam proses implementasi program, KNIU Kemendikbud memfasilitasi koordinasi serta mendorong partisipasi, dan menyebarluaskan informasi tentang tujuan program dan kegiatan UNESCO dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah di Indonesia.

Sebagai bagian masyarakat global, KNIU Kemendikbud merupakan bagian dari komunitas 199 Komisi Nasional untuk UNESCO lainnya di dunia. UNESCO, yang saat ini beranggotakan 193 negara anggota dan 11 anggota asosiasi merupakan satu-satunya badan PBB yang memiliki dan mewajibkan anggotanya membentuk Komisi Nasional di negara-negara anggotanya. 183 negara anggota juga telah membentuk Perwakilan Tetap UNESCO di Markas Besar UNESCO, Paris, salah satunya Indonesia dengan pembentukan Kantor Wakil Tetap Republik Indonesia di UNESCO (KWRIU), Paris pada tahun 1972. Bersama KWRIU dan Kementerian Luar Negeri, KNIU Kemendikbud turut aktif berperan di tingkat global sebagai partisipasi Indonesia dalam pertemuan, persidangan maupun kegiatan internasional UNESCO. Di tingkat nasional, KNIU Kemendikbud berkomitmen untuk memfasilitasi dan memperkuat koordinasi serta senantiasa mendorong

pelaksanaan kegiatan program bidang UNESCO di tingkat nasional/lokal. Di level Nasional, hingga saat ini Pemerintah Indonesia melalui KNIU Kemendikbud telah menjalin kerja sama dengan setidaknya 24 kementerian/lembaga yang merupakan *National Point of Contact Representatives* (NPCR) dan setidaknya 13 Komite Khusus dalam mengimplementasikan program-program UNESCO di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi dan informasi. Kami sadar bahwa peran kami masih jauh dari kata maksimal dan pekerjaan ini masih memiliki banyak kekurangan, banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami terus berupaya meningkatkan peran kami, dengan penuh keterbukaan, mengharapkan masukan dan rekomendasi yang membangun dari semua pihak.

Di tahun 2020 ini, pada umur keanggotaan dan kerja sama yang ke-70 Indonesia-UNESCO, Indonesia patut berbangga. Secara konkret kita dapat melihat capaian-capaian luar biasa yang telah diraih oleh Indonesia dalam seluruh sektor UNESCO sejak 1950 hingga saat ini yang meliputi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi dan informasi baik dalam hal nominasi program UNESCO, *prize/awards*, keanggotaan Indonesia pada Organ dan Komite UNESCO maupun kesuksesan menjadi Tuan Rumah Sidang/Kegiatan UNESCO. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang diperhitungkan dalam peta kehidupan global, secara khusus di antara negara anggota UNESCO. Capaian-capaian/*milestones* ini merupakan hasil ikhtiar, hasil dari dedikasi, kerja bersama yang melibatkan banyak pihak/*stakeholders*.

Selain itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan UNESCO di bidang pendidikan berdampak positif bagi Indonesia dan selaras dengan kepentingan nasional, di antaranya: program *Literacy* UNESCO menjadi *standard setting* dalam program pengentasan buta huruf di Indonesia; UNESCO juga merekomendasikan negara anggota memiliki komitmen finansial untuk pendidikan dengan porsi yang jelas, sehingga dengan berbagai kajian, maka pada tahun 2003 di Indonesia ditetapkan alokasi APBN dan APBD untuk pendidikan sebesar 20%; dalam kaitan dengan Kebijakan UNESCO akan pengarusutamaan gender telah menginspirasi 71,5% kota/kabupaten di Indonesia memiliki kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan.

Buku 70 Tahun Kerjasama Indonesia-UNESCO ini, kami harapkan menjadi pengingat mandat kita sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, sebagai negara anggota UNESCO. Di umur yang tidak bisa dibilang muda ini, angka 70 tahun merupakan bukti konsistensi dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pelaksanaan program UNESCO. Melalui informasi isu-isu penting global dari UNESCO, kajian kebermanfaatan keanggotaan dan rencana strategis Indonesia di UNESCO yang termuat dalam buku ini, diharapkan Indonesia dapat lebih lagi

menggali manfaat kerja sama Indonesia-UNESCO, lebih meningkatkan perannya dalam kerja sama internasional, dalam waktu bersamaan menjadikannya rujukan/referensi dalam memformulasikan arah pengembangan program bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan komunikasi informasi di Indonesia.

Akhir kata, izinkan saya, dalam kapasitas sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, mengucapkan sekali lagi selamat atas Pelaksanaan Hubungan Diplomasi Indonesia-UNESCO yang ke-70 dan selamat atas peluncuran Buku 70 Tahun Kerja Sama Indonesia-UNESCO. Kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya demi transformasi kehidupan yang lebih baik dan pembentukan budaya damai, tidak Hanya di Indonesia dalam skala nasional namun juga global melalui keanggotaan kita di UNESCO yang telah memasuki usia 70 Tahun ini. Kerja keras dan kerja sama ini, niscaya, akan membuat Indonesia semakin diakui, dikenal, dihormati, dan bermartabat di mata dunia. Kiranya semua yang telah dicapai dan digariskan dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama.

Prof. Dr. Arief Rachman, M. Pd

Ketua Harian
Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

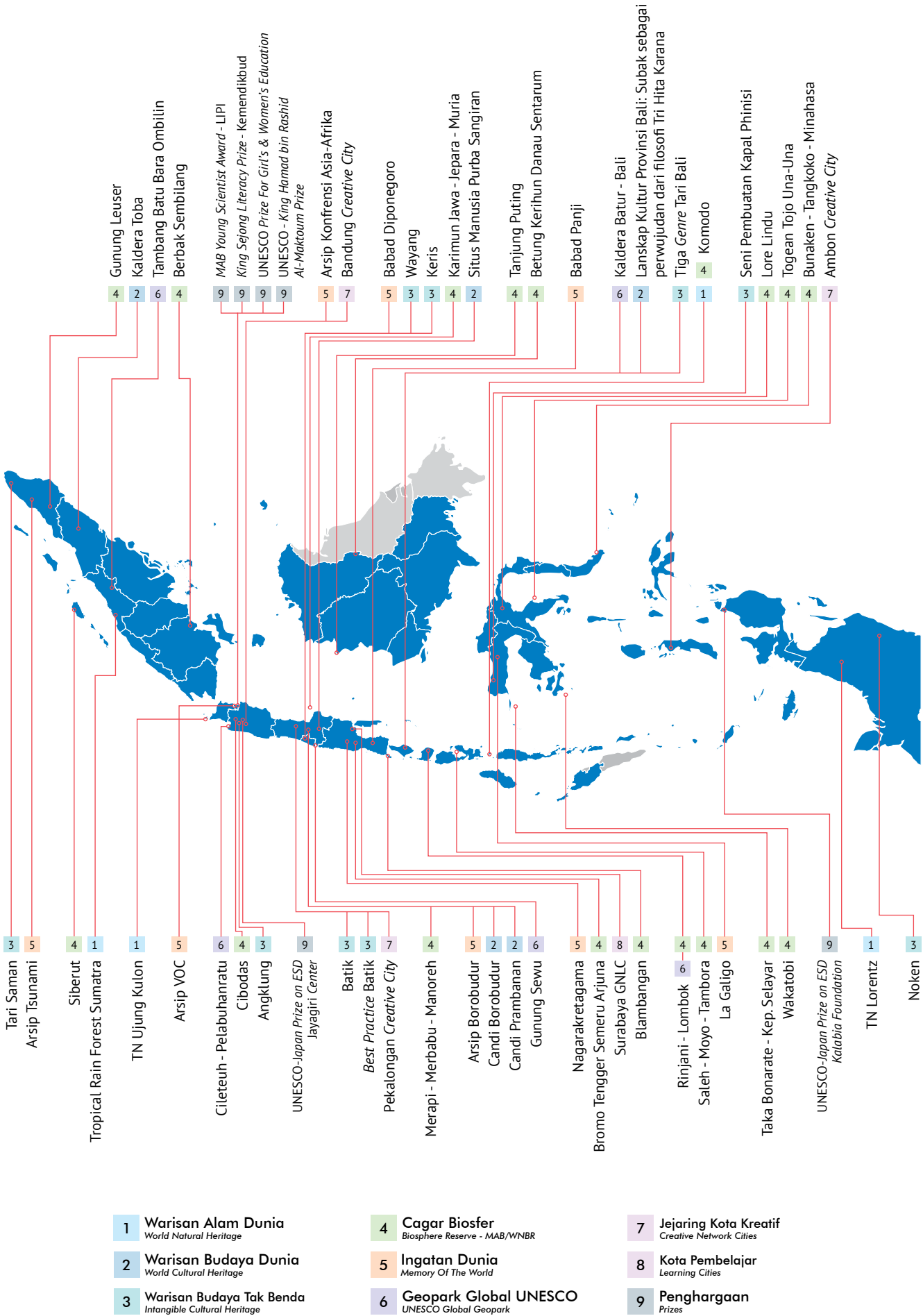
“Building peace in the minds of
men and women”
-UNESCO

PROFIL 70 TAHUN INDONESIA DI UNESCO

KONVENSI DAN PROTOKOL UNESCO YANG DIKUTI INDONESIA

Konvensi	Tanggal Deposit	Jenis Deposit
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention. The Hague, 14 May 1954.	10/01/1967	Ratification
Convention concerning the International Exchange of Publications. Paris, 3 December 1958.	10/01/1967	Acceptance
Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between States. Paris, 3 December 1958	10/01/1967	Acceptance
Convention against Discrimination in Education. Paris, 14 December 1960.	10/01/1967	Acceptance
Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954.	26/07/1967	Ratification
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris, 16 November 1972.	06/07/1989	Acceptance
Protocol to amend articles 6 and 7 of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Regina, Canada, 28 May 1987.	08/04/1992	Ratification
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Ramsar, 2 February 1971.	08/04/1992	Ratification
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 October 2003.	15/10/2007	Acceptance
Convention on Technical and Vocational Education. Paris, 10 November 1989.	30/01/2008	Ratification
Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific. Bangkok, 16 December 1983.	30/01/2008	Ratification
International Convention against Doping in Sport. Paris, 19 October 2005.	30/01/2008	Ratification
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Paris, 20 October 2005.	12/01/2012	Accession

PETA SEBARAN TETAPAN UNESCO



TIMELINE PENGESAHAN TETAPAN DAN PENGHARGAAN UNESCO

1950	Indonesia resmi menjadi anggota UNESCO		
1977	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> - Komodo - Tanjung Puting - Cibodas - Lore Lindu		
1981	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> - Gunung Leuser - Siberut		
1991	Warisan Budaya Dunia <i>World Cultural Heritage</i> - Candi Borobudur - Candi Prambanan	Warisan Alam Dunia <i>World Natural Heritage</i> - TN Ujung Kulon - TN Komodo	
1993	Penghargaan <i>Prizes</i> Avicenna Prize Presiden Soeharto		
1996	Warisan Budaya Dunia <i>World Cultural Heritage</i> Situs Manusia Purba Sangiran		
1999	Warisan Alam Dunia <i>World Natural Heritage</i> TN Lorentz		
2004	Warisan Alam Dunia <i>World Natural Heritage</i> Hutan Hujan Tropis Sumatra	Beasiswa FWIS Internasional Ines Atmosukarto	Ingatan Dunia <i>Memory Of The World</i> Arsip VOC
2007	Beasiswa FWIS Internasional Fenny M Dwivany		
2008	Warisan Budaya Tak Benda <i>Intangible Cultural Heritage</i> - Keris - Wayang	Beasiswa FWIS Internasional Made Tria Penia K	
2009	Warisan Budaya Tak Benda <i>Intangible Cultural Heritage</i> - Batik - Best Practice Batik	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> Giam Siak Kecil - Bukit Batu	Pusat Kategori II <i>Category II Center</i> APCE Cibinong
2010	Warisan Budaya Tak Benda <i>Intangible Cultural Heritage</i> Angklung		
2011	Warisan Budaya Tak Benda <i>Intangible Cultural Heritage</i> - Tari Saman Ingatan Dunia <i>Memory Of The World</i> - La Galigo	Beasiswa FWIS Internasional Sidratun Naim	International Program On Landslide UGM 2011-2014

2012	Warisan Budaya Tak Benda <i>Intangible Cultural Heritage</i> - Noken - Papua Geopark Global UNESCO <i>UNESCO Global Geopark</i> - Kaldera Batur - Bali Proyek IFCD - TN Siberut	Beasiswa FWIS Internasional - Sri Fatmawati Warisan Budaya Dunia <i>World Cultural Heritage</i> - Lanskap Kultur Provinsi Bali: Subak sebagai perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> - Wakatobi Penghargaan <i>Prizes</i> <i>King Sejong Leteraly Prize</i> Dit Dikmas Kemendikbud
2013	Ingatan Dunia <i>Memory Of The World</i> - Babad Diponegoro - Nagarakretagama	ASPAC Heritage Award Wae Rebo	
2014	Jejaring Kota Kreatif <i>Creative Network Cities</i> Pekalongan	International Program On Landslide UGM 2014-2017	
2015	Geopark Global UNESCO <i>UNESCO Global Geopark</i> - Gunung Sewu Ingatan Dunia <i>Memory Of The World</i> - Arsip KAA Jejaring Kota Kreatif <i>Creative Network Cities</i> - Bandung	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> - Bromo Tengger Semeru Arjuna - Taka Bonarate - Kep. Selayar	Penghargaan <i>Prizes</i> ESD Prize P2 PAUD DIKMAS Jayagiri
2016	Penghargaan <i>Prizes</i> <i>Girl's & Women's Educational Prize</i> Dit PAUD Kemendikbud	Kota Pembelajaran <i>Learning Cities</i> Surabaya	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> Belambangan
2017	Ingatan Dunia <i>Memory Of The World</i> - Arsip Tsunami - Arsip Borobudur - Babad Panji	Warisan Budaya Tak Benda <i>Intangible Cultural Heritage</i> Seni Pembuatan Kapal Pinisi	Pusat Kategori II <i>Category II Center</i> CHEADSEA
2018	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> - Berbak Sembilang - Betung Kerihun - Danau Senatrum - Gunung Rinjani - Lombok	Geopark Global UNESCO <i>UNESCO Global Geopark</i> - Cileteuh - Pelabuhanratu - Rinjani - Lombok	
2019	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> - Togean Tojo Una-Una - Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA) Geopark Global UNESCO <i>UNESCO Global Geopark</i> - Kaldera Toba	Warisan Alam Dunia <i>World Natural Heritage</i> Tambang Batu Bara Ombilin - Sawahlunto	Warisan Budaya Tak Benda <i>Intangible Cultural Heritage</i> Tradisi Pencak Silat
2020	Cagar Biosfer <i>Biosphere Reserve - MAB/WNBR</i> - Merapi - Merbabu - Manoreh - Karimun Jawa - Jepara - Muria - Bunaken - Tangkoko - Minahasa		

SEKILAS TENTANG UNESCO

- 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM UNESCO
- 5 GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI UNESCO

CATATAN-CATATAN

- 9 Catatan Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Periode 1995 – 1999, Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro
- 13 Catatan Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Periode 2000 – 2003, Prof. Dr. Bambang Soehendro
- 15 Catatan Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Periode 2004 – 2008, Prof. Dr. Aman Wirakartakusumah
- 19 Catatan Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Periode 2009 – 2013, Prof. Ir. Tresna Dermawan Kunaefi
- 23 Catatan Duta Besar / Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Periode 2011 – 2014, Prof. Dr. Carmadi Machbub
- 29 Catatan Duta Besar / Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Periode 2015 – 2017, Prof. Dr. T.A. Fauzi Soelaiman
- 33 Catatan Duta Besar / Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Periode Januari 2018 – Juli 2018, Prof. Dr. Bambang Hari Wibisono
- 37 Catatan Duta Besar / Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Periode 2018 – , Prof. Dr. Surya Rosa Putra

UNESCO DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

- 43 ARAH, TUJUAN, SASARAN oleh Dr. Ananto Kusuma Seta
- 47 MILESTONES PENDIDIKAN INDONESIA-UNESCO

UNESCO DAN PENGEMBANGAN SAINS INDONESIA

- 57 UNESCO DAN PENGEMBANGAN SAINS INDONESIA, oleh Prof. Dr. Enny Sudarnomowati
- 65 *Management of Social Transformation* (MOST) UNESCO, Paradigma Penting bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora di Indonesia oleh Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti
- 69 SEKILAS TENTANG PROGRAM CAGAR BIOSFER UNESCO
- 71 TETAPAN CAGAR BIOSFER INDONESIA DI UNESCO
- 72 KOMODO
- 74 TANJUNG PUTING
- 76 CIBODAS
- 78 LORE LINDU
- 80 GUNUNG LEUSEUR
- 82 SIBERUT
- 84 GIAM SIAK BUKIT BATU
- 86 WAKATOBI
- 88 BROMO TENGGER SEMERU - ARJUNA
- 90 TAKA BONARATE - KEPULAUAN SELAYAR
- 92 BELAMBANGAN
- 94 BERBAK SEMBILANG
- 96 BETUNG KERIHUN DANAU SENTARUM
- 98 RINJANI – LOMBOK
- 100 TOGEAN TOJO UNA – UNA
- 102 SALEH - MOYO - TAMBORA (SAMOTA)
- 104 BUNAKEN - TANGKOKO - MINAHASA
- 106 KARIMUN JAWA - JEPARA – MURIA
- 108 MERAPI – MERBABU – MANOREH
- 111 SEKILAS TENTANG PROGRAM UNESCO GLOBAL GEOPARK
- 113 TETAPAN UNESCO GLOBAL GEOPARK DI INDONESIA
- 114 KALDERA BATUR – BALI
- 116 GUNUNG SEWU
- 118 CILETEUH – PELABUHAN RATU
- 120 RINJANI – LOMBOK
- 122 KALDERA – TOBA

UNESCO DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA

- 127 PENGANTAR
- 129 SEKILAS TENTANG WARISAN DUNIA
- 131 TETAPAN WARISAN BUDAYA DUNIA DI INDONESIA
- 132 CANDI BOROBUDUR
- 134 CANDI PRAMBANAN
- 136 SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN
- 138 LANSKAP KULTUR PROVINSI BALI: Subak sebagai perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana
- 141 TAMBANG BATU BARA OMBILIN SAWAHLUNTO
- 143 TETAPAN WARISAN ALAM DUNIA DI INDONESIA
- 144 TAMAN NASIONAL KOMODO
- 146 HUTAN HUJAN TROPIS SUMATRA
- 148 TAMAN NASIONAL LORENTZ
- 150 TAMAN NASIONAL UJUNG KULON
- 153 SEKILAS TENTANG KONVENSI 2003
- 157 TETAPAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI INDONESIA
- 158 KERIS
- 160 WAYANG
- 162 BATIK
- 164 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN BATIK BAGI SISWA SEKOLAH DASAR, MENENGAH DAN KEJURUAN BEKERJASAMA DENGAN MUSEUM BATIK PEKALONGAN
- 166 ANGKLUNG
- 168 TARI SAMAN
- 170 NOKEN PAPUA
- 172 TIGA GENRE TARI BALI
- 174 SENI PEMBUATAN KAPAL PINISI
- 176 PENCAK SILAT
- 178 SEKILAS TENTANG KONVENSI 2005
- 181 SEKILAS TENTANG PROGRAM JEJARING KOTA KREATIF UNESCO
- 182 AMBON, KOTA MUSIK
- 184 BANDUNG, KOTA KREATIF DESAIN
- 176 PEKALONGAN, KOTA KREATIF KERAJINAN DAN KESENIAN RAKYAT

UNESCO DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI INDONESIA

- 191 PENGANTAR
- 193 TETAPAN ARSIP SEJARAH INDONESIA DI DALAM *MEMORY OF THE WORLD REGISTER*
- 194 ARSIP VOC (*VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE*) (*ARCHIVES OF THE DUTCH EAST INDIA COMPANY*)
- 196 LA GALIGO
- 198 BABAD DIPONEGORO
- 200 NEGARAKERTAGAMA
- 202 ARSIP KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA)
- 204 BABAD PANJI
- 206 ARSIP TSUNAMI SAMUDRA HINDIA
- 208 ARSIP BOROBUDUR

UNESCO DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN MULTILATERAL INDONESIA

- 213 Arah Kebijakan dan Capaian Program Indonesia-UNESCO di Bidang Hubungan Multilateral, oleh Kamapradipta Isnomo
- 217 KEANGGOTAAN INDONESIA PADA BADAN SUBSIDIER UNESCO
- 221 BEBERAPA CATATAN PERAN INDONESIA DALAM PERTEMUAN ORGAN-ORGAN PENGARAH UNESCO
- 222 PERNYATAAN UMUM INDONESIA DALAM GENERAL CONFERENCE
- 226 PERNYATAAN UMUM INDONESIA DALAM BEBERAPA SIDANG EXECUTIVE BOARD
- 230 CATATAN AKTIFITAS DELEGASI INDONESIA DALAM PERTEMUAN WORLD HERITAGE COMMITTEE KE-43, BAKU, AZERBAIJAN, 2019
- 231 PENUTUP
- 233 REFERENSI UTAMA

SEKILAS TENTANG UNESCO

VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM UNESCO



UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB yang berupaya membangun perdamaian melalui kerja sama internasional dalam Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya. Organisasi ini didirikan secara resmi pada tanggal 16 November 1945.

Visi UNESCO adalah sebagai badan dunia utama yang membangun perdamaian dan pembangunan berkelanjutan melalui dialog, saling pengertian, dan solidaritas intelektual dan moral. Pernyataan Misi UNESCO yang terkait dengan visi ini adalah :

Sebagai badan khusus PBB, UNESCO, sesuai dengan konstitusinya, memberikan kontribusi dalam membangun perdamaian dunia, memberantas kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dialog antarbudaya melalui pendidikan, sains, budaya, komunikasi dan informasi.

Misi ini diwujudkan dengan cara mengembangkan instrumen pendidikan untuk membantu kehidupan manusia sebagai warga global yang bebas dari kebencian dan intoleransi. UNESCO bekerja sehingga setiap anak dan setiap orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas; memperkuat ikatan antarbangsa dengan mempromosikan warisan budaya dan martabat yang setara dari semua budaya; mendorong program dan kebijakan ilmiah sebagai *platform* untuk pengembangan dan kerja sama antar negara; membela kebebasan berekspresi, sebagai hak fundamental dan syarat utama bagi demokrasi dan pembangunan; mengembangkan fungsi sebagai laboratorium gagasan dalam rangka membantu negara-negara mengadopsi standar internasional dan mengelola program-program yang mendorong arus bebas gagasan dan berbagi pengetahuan.

Dengan demikian, UNESCO, paling tidak memiliki lima fungsi utama, yakni sebagai laboratorium ide, sebagai wadah pengembangan agenda global, penyusunan norma dan standar, sebagai agen untuk menguatkan kerja sama internasional dan institusi konsultatif.

Tujuan UNESCO menurut Konstitusi UNESCO adalah:

untuk memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan dunia dengan cara mempromosikan kerja sama antar negara di bidang pendidikan sains dan budaya dalam kerangka menciptakan respek universal dalam keadilan, hukum, hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang diberlakukan untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama sesuai dengan piagam PBB.

Tujuan umum ini kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam sidang *General Conference*.

Antara tahun 1996 dan 2001, tujuan UNESCO adalah pengembangan dan berkontribusi pada pembangunan perdamaian, misalnya dengan mempromosikan pembelajaran seumur hidup untuk semua, meningkatkan warisan budaya, mempromosikan budaya yang hidup, dan mendorong kreativitas. Pembangunan perdamaian dilakukan dengan mempromosikan hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi atau mendorong pluralisme budaya dan dialog antarbudaya.

Strategi jangka menengah di periode 2002-2007 berfokus pada sektor aktifitas UNESCO. Sebagai contoh di bidang pendidikan adalah mempromosikan pendidikan sebagai hak fundamental sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; di bidang ilmu pengetahuan, untuk mempromosikan norma etik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta transformasi sosial; di bidang budaya, UNESCO mendorong penyusunan dan penerapan instrumen penetapan *standard-setting* di bidang budaya; serta di bidang informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan arus ilmu dan pengetahuan yang terbuka dan akses universal ke informasi.

Antara tahun 2008-2013, UNESCO menetapkan lima tujuan utama yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua dan pembelajaran seumur hidup, memobilisasi kebijakan dan pengetahuan sains untuk pembangunan berkelanjutan, mengatasi tantangan *ethics* dan hubungan sosial, membina keragaman budaya, dialog antarbudaya dan budaya damai, membangun *knowledge society* inklusif melalui informasi dan komunikasi.

Untuk periode 2014 hingga 2021, Strategi Jangka Menengah UNESCO (37C/4) diprioritaskan pada Afrika dan Kesetaraan Gender. Strategi ini memiliki 6 Tujuan Strategis.



Markas Besar UNESCO, 7 Place de Fontenoy, Paris

STRATEGI JANGKA MENENGAH 2014–2021 (37 C/4)			
MISI	Sebagai badan khusus PBB, UNESCO, sesuai dengan konstitusinya, memberikan kontribusi dalam membangun perdamaian dunia, memberantas kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dialog antarbudaya melalui pendidikan, sains, budaya, komunikasi dan informasi		
TUJUAN UMUM	Perdamaian	Pembangunan setara dan berkelanjutan	
PRIORITAS	Afrika	Kesetaraan Gender	
TUJUAN STRATEGIS	Mendukung negara anggota untuk mengembangkan sistem pendidikan menuju pendidikan jangka panjang untuk semua yang berkualitas tinggi dan inklusif (TS-1)	Mendorong para pembelajar sebagai warga global yang kreatif dan bertanggung jawab (TS-2)	Mengembangkan Pendidikan untuk Semua dan mengemas Agenda Pendidikan Internasional Masa Depan (<i>Future International Education Agenda</i>) (TS-3)
	Memperkuat sistem dan kebijakan sains, teknologi dan inovasi secara nasional, regional dan global (TS-4)	Mempromosikan kerja sama internasional yang berhubungan dengan tantangan kritis dalam pembangunan berkelanjutan (TS-5)	Mendukung pembangunan sosial yang inklusif, menumbuhkan dialog lintas budaya untuk pendekatan budaya dan mempromosikan prinsip-prinsip etis (TS-6)

Secara operasional, tujuan strategis tersebut diterjemahkan dalam program-program sekretariat, institut dan pusat (*category-1 centre*) serta program-program internasional atau antar-pemerintahan.

Program sektor pendidikan UNESCO meliputi 23 item, di antaranya: pendidikan usia dini, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, perencanaan dan kebijakan pendidikan, laporan pemantauan pendidikan global, pendidikan tinggi, guru, TIK dalam pendidikan, keaksaraan, pendidikan vokasi dan kejuruan, dan lain-lain. Program-program ini dilaksanakan oleh sekretariat dan 7 institut dan pusat UNESCO. Untuk berbagi pengalaman dan komunikasi, UNESCO menyediakan jejaring *UNESCO Associated Schools Network*, *UNESCO-UNEVOC Network* dan *UNITWIN / UNESCO Chairs Programme*. Di samping itu, UNESCO juga memberikan penghargaan-penghargaan seperti *UNESCO International Literacy Prizes*, *UNESCO-Japan Prize* untuk pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan, *UNESCO Prize for girls' and women's education* dan *UNESCO King Hamdan Bin Isa Al Khalifa Prize* untuk penggunaan TIK dalam Pendidikan.

Program sektor Sains Alam (*Natural Sciences*) tersebar dalam tema-tema Sains dan Teknologi, Rekayasa, Pendidikan Sains, Sains Dasar, Energi Terbarukan, Sains Kelautan, Sains Kebumihan, Keanekaragaman Hayati, Sains Lingkungan, Perubahan Iklim, Sains Air, dan lain-lain. Sebagian program adalah program internasional yang melibatkan badan konsultatif yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota. Program-program tersebut meliputi MAB (*Man and Biosphere Programme*) untuk Sains Lingkungan, IGGP (*International Geoscience and Geopark Programme*), IHP (*International Hydrological Programme*) dan IBSP (*International Basic*

Science Programme) serta WAS (*Water Assessment Programme*) untuk Sains Air. Di samping itu sains alam juga memiliki IOC (*Intergovernmental Oceanographic Commission*) untuk sains kelautan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan program-program bersama di antara negara anggota.

Program sektor Sains Sosial (*Social and Human Sciences*) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, standar dan kerja sama intelektual dalam memfasilitasi transformasi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai universal keadilan, kebebasan dan harkat manusia. Tema-tema program meliputi, tema-tema transversal, etika (sains dan teknologi, bioetik, dan sebagainya), Hak azasi manusia, transformasi sosial (budaya dan perdamaian, dialog antar budaya, jalur sutra, program MOST, dan lain-lain), dan olah raga (*anti-doping* dan pendidikan jasmani dan *sport*).

Program sektor Kebudayaan, sebagian besar, merupakan program-program yang terkait dengan implementasi dan monitoring konvensi-konvensi yang diratifikasi oleh negara-negara anggota. Konvensi-konvensi tersebut meliputi:

- *The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (2005)
- *The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003)
- *The Universal Declaration on Cultural Diversity* (2001)
- *The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* (2001)
- *The Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (1972)
- *The Convention on the Protection of Copyright and Neighboring Rights* (1952, 1971)

- *The Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Traffic of Cultural Property (1970)*
- *The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)*

Selain itu, UNESCO juga memiliki program *Creative Cities Network* yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan dan sesama kota yang memiliki kreaftas, faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Program sektor Komunikasi dan Informasi mencakup promosi *Open Educational Resources*, pengembangan kurikulum media dan informasi keaksaraan, pengembangan indikator universal untuk internet, program *Memory of the World*, dan lain-lain. Program-program ini didukung oleh IPDC (*International Programme for the Development of Communication*) dan IFAP (*the Information for all Programmes*).

Tata Kelola, Organisasi dan Tata Kerja UNESCO

UNESCO dikelola oleh tiga organ utama, yakni *General Conference* (GC, Sidang Umum), *Executive Board* (EB, Majelis Eksekutif) dan sebuah Sekretariat. Di luar itu, UNESCO memiliki organ-organ pelaksana program berupa *institute* dan *center* kategori 1 yang tersebar di beberapa negara anggota, konvensi-konvensi internasional serta badan-badan yang berhubungan (antara lain: Konvensi 1972 tentang Proteksi Warisan Budaya dan Warisan Alam, dengan badan *World Heritage Committee*), serta Komisi, Komite dan Progam Internasional dan Antar-negara (antara lain: *Intergovernmental Oceonographic Comission* dengan *Executive Council*).

General Conference. GC terdiri dari perwakilan seluruh negara anggota (195). Mereka bertemu setiap dua tahun bersama negara-negara pengamat, organisasi antar-negara, organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Tugasnya antara lain menyetujui kebijakan, program dan anggaran organisasi, memilih Direktur Jenderal dan anggota *Executive Board*.

Executive Board. EB adalah badan konsultatif organisasi yang dipilih oleh GC. Anggotanya 58 negara, mewakili secara proporsional setiap wilayah yang ada di UNESCO. Tugas utamanya, antara lain menyiapkan agenda GC, mengevaluasi program dan anggaran organisasi serta mengeksekusi program yang telah disetujui GC. EB bersidang dua kali dalam setahun.

Secretariat. Sekretariat terdiri dari Direktur Jenderal, Deputi Direktur Jenderal, beberapa Asisten Direktur Jenderal yang terkait dengan sektor-sektor UNESCO serta pejabat operasional lainnya. Fungsinya adalah menjalankan program dan anggaran. Direktur Jenderal dinominasikan oleh *Executive Board*.

Komisi Nasional. UNESCO adalah satu-satunya organisasi PBB yang memiliki jaringan badan nasional global yang disebut *National Commissions for UNESCO* (Komisi Nasional untuk UNESCO). Badan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi.

Sesuai dengan Konstitusi UNESCO, Komisi Nasional berfungsi dalam mengorganisir berbagai institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dalam pendidikan, sains, budaya dan komunikasi dalam kerangka melaksanakan misi dan tugas UNESCO. Secara lebih detail, Komisi Nasional adalah agen konsultasi, penghubung dan sumber informasi serta komisi untuk memobilisasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan UNESCO pada tingkat nasional.

Komisi Nasional harus bertindak sebagai badan konsultatif untuk delegasi *General Conference*, *Executive Board* dan juga untuk pemerintah yang diwakilinya. Saat ini terdapat 199 Komite Nasional yang terhubung dalam jaringan kerja sama yang kuat.

Delegasi Tetap (Permanent Delegation). Delegasi Tetap yang ada di kantor pusat UNESCO sifatnya opsional sehingga perannya pun sangat tergantung pada masing-masing negara anggota. Namun demikian, secara umum, organ ini berperan dalam memastikan hubungan antara Sekretariat dengan negara anggota. Beberapa negara besar seperti Prancis dan Jepang memiliki Delegasi Tetap yang sangat *powerful*. Mereka memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam mempengaruhi strategi dan program-program UNESCO. Sementara, beberapa negara lain menempatkan Delegasi Tetap hanya sebagai fasilitator penghubung.

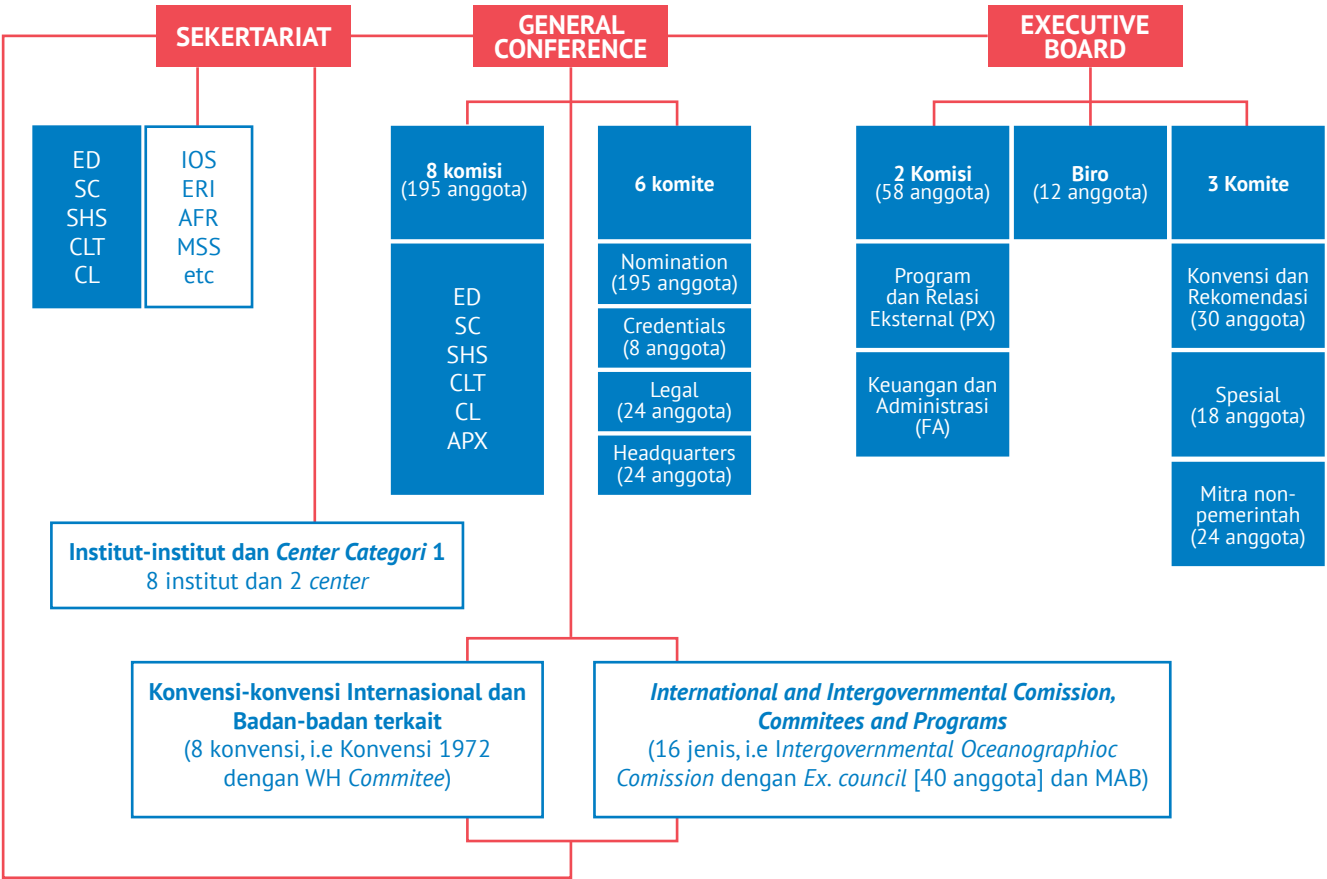
Sebagai institusi diplomatik, Delegasi Tetap dipimpin oleh diplomat dengan *rank* tertinggi. Umumnya adalah Duta Besar.

Organisasi lengkap dari UNESCO dapat dilihat pada Gambar Struktur Organisasi.

Kegiatan dan program UNESCO dilaksanakan oleh Sekretariat, Institut dan *Center* Kategori 1, *International and Intergovernmental Comission, Committee and Programmes* (16 institusi dan program) serta badan-badan yang terkait dengan konvensi internasional (ada 8 konvensi).

Lembaga dan Pusat Kategori 1 UNESCO terdiri dari:

- Institut Statistik UNESCO (UIS), Montreal, Kanada.
- Biro Pendidikan Internasional (IBE), Jenewa, Swiss.
- Institut Internasional UNESCO untuk Perencanaan Pendidikan (IIEP), Paris, Prancis.
- Institut UNESCO untuk Pembelajaran Seumur Hidup (UIL), Hamburg, Jerman.
- Institut UNESCO untuk Teknologi Informasi dalam Pendidikan (IITE), Moscow, Rusia.
- Institut Internasional UNESCO untuk Pengembangan Kapasitas di Afrika (IICBA), Addis Ababa, Etiopia.
- Institut Internasional UNESCO untuk Pendidikan Tinggi di Amerika Latin dan Karibia (IESALC), Caracas, Venezuela.
- Institut Mahatma Gandhi Pendidikan untuk Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan (MGIEP), New Delhi, India.
- Pusat Pendidikan Hydrology UNESCO-IHE



GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI UNESCO

- (UNESCO-IHE), Westvest, Belanda.
- Pusat Internasional untuk Fisika Teoritis Abdus Salam (ICTP), Trieste, Italia.

Konvensi Internasional dan badan-badan terkait terdiri dari:

- Konvensi menentang diskriminasi di bidang Pendidikan (1960)
- Konvensi Internasional melawan doping dalam olahraga (2005)
- Konvensi tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam peristiwa Konflik Bersenjata (1954)
- Konvensi tentang Cara Larangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Kekayaan Budaya (1970)
- Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (1972)
- Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air (2001)
- Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (2003)
- Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya

CATATAN
-
CATATAN

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE 1995 s.d. 1999

Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro



Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menduduki jabatan Duta Besar/Wakil RI pada UNESCO dari bulan Januari 1995 sampai dengan Mei 1999.

Banyak suka duka yang saya alami bersama istri, baik dalam masalah kedinasan maupun dalam kehidupan sosial selama berada di kota Paris, dari 5 Januari 1995 sampai 5 Mei 1999. Namun tugas saya didampingi oleh isteri menjadi ringan dan menyenangkan, berkat kerja sama, dukungan dari rekan-rekan *home staff* dan *local staff* di Kantor Wakil Republik Indonesia pada UNESCO (KWRI UNESCO), yang dengan penuh dedikasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik, demi menaikkan citra dan keharuman bangsa Indonesia di dalam forum internasional. Masa-masa kelabu dalam mempertahankan harkat bangsa di dalam persidangan-persidangan tertentu telah dapat kita hadapi dengan penuh ketabahan. Masa gembira, seperti diraihnya kemenangan masuknya Indonesia menjadi anggota *Executive Board* dengan perolehan suara sangat gemilang dari semua calon yang ada, merupakan kebanggaan yang tidak mudah terlupakan.

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai KWRI UNESCO selama kurun waktu 1995-1999 yang masih terekam didalam benak saya adalah sebagai berikut:

Keanggotaan Indonesia pada Badan-badan UNESCO

Konferensi Umum Ke-28 UNESCO telah memilih anggota sejumlah organ dan badan subsider. Indonesia telah berhasil terpilih pada tiga badan yaitu (a) Program Manusia dan Biosfer; (b) Anggota Komite Kantor Pusat; dan (c) *Staff Pension Committee*. Dengan demikian maka selama kurun waktu 1995-1999 Indonesia telah menjadi anggota pada delapan (8) badan-badan UNESCO sebagai berikut:

- Dewan Eksekutif (1995–1999)
- Program Manusia dan Biosfer (MAB) (1995–1999)
- Program Oseanografi (IOC) (1995–1997, 1997–1999)
- Komite Urusan Kantor Pusat UNESCO (1995–1999)
- Komite Urusan Pensiun Staf UNESCO (1995–1997, 1997–1999)
- Komite Bersama UNESCO/UNICEF tentang Pendidikan (1995–1999)
- Program Hidrologi Internasional (IHP) (1993–1997)
- Program Internasional Pengembangan Komunikasi (IPDC) (1993–1997, 1997–2001)



Prof. Dr. Soedarso bersama Federico Mayor Zaragoza, Direktur Jenderal UNESCO dari tahun 1987 sampai 1999



Foto dokumen arsip Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro

Program Partisipasi

Program Partisipasi merupakan program bantuan tambahan dana dari UNESCO kepada Negara Anggota yang melakukan kegiatan dalam bidang kompetensi Organisasi. Alokasi dananya adalah USD 25 juta per tahun. Setiap negara dapat mengajukan paling banyak 15 usul Program Partisipasi. Besarnya adalah maksimal USD 26.000 untuk proyek berlingkup nasional dan maksimal USD 35.000 untuk proyek berskala sub-regional, regional atau antar-regional.

Selama kurun waktu 1995-1999 Indonesia telah berhasil memperoleh jumlah proyek sebagai berikut:

- Periode 1994–1995, 10 proyek senilai USD 208.000
- Periode 1996–1997, 6 proyek senilai USD 140.000
- Periode 1998–1999, 5 proyek senilai USD 114.000

Di samping itu, dalam tahun 1997 kami telah berhasil mendapatkan bantuan dari *World Heritage Centre* sebesar USD 30.000 guna tambahan biaya untuk pembelian kapal untuk monitoring bagi Taman Nasional Komodo.

Hadiah Noma Literacy Prize kepada PKK

Noma Literacy Award tahun 1995 diberikan kepada Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai pengakuan atas sumbangsih PKK dalam upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia, khususnya di kalangan wanita dan penduduk pedesaan. Penghargaan itu diterima oleh Ibu Yogi Suardi Memet, Ketua PKK dalam acara yang diselenggarakan UNESCO pada tanggal 8 September 1995, di Beijing, bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Dunia Ke-4 tentang Wanita.

Hadiah Madanjeet Singh Prize kepada Pramudya Ananta Toer

Pada tanggal 21 Oktober 1996, UNESCO telah memberikan “*Honourable Mention*” UNESCO untuk “*Tolerance and Non-violence*” kepada Pramodya Ananta Toer.

Sangiran Early Man Site

Usaha yang intensif telah menghasilkan *Sangiran Early Man Site* diterima sebagai situs budaya pada Sidang Ke-20 *World Heritage Committee* yang berlangsung di Merida, Mexico, Desember 1996.

Anggota Dewan Eksekutif

Indonesia telah mencalonkan untuk menjadi Anggota Dewan Eksekutif periode 1995-1999. Pada pemilihan tersebut Indonesia secara gemilang terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif periode 1995-1999 dengan mendapatkan suara terbanyak dari kawasan Asia Pasifik (154 suara) dengan mengalahkan pesaing lainnya, termasuk Jepang, dan sekaligus meraih suara kedua terbanyak dari semua calon yang ada.

Kemenangan Indonesia yang meyakinkan ini merupakan pencerminan penghargaan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

Pada Konferensi Umum ke-29, Indonesia terpilih untuk menduduki salah satu jabatan wakil ketua Dewan, mewakili Kelompok Elektoral Asia Pasifik.

Prof. Dr. Moegiadi, MA sebagai Direktur Kantor Regional UNESCO

Di tahun 1995 Pemerintah RI melalui KWRI UNESCO, telah gagal mencalonkan Prof. Dr. Moegiadi, MA untuk jabatan Kepala Kantor Regional UNESCO (PROAP) di Bangkok. Namun setahun kemudian kami berhasil meyakinkan Direktur Jenderal UNESCO, sehingga akhirnya Direktur Jenderal memutuskan mengangkat Prof. Dr. Moegiadi, MA sebagai Kepala Kantor Regional UNESCO di Islamabad, Pakistan (1996). Setahun kemudian Prof. Dr. Moegiadi, MA diangkat sebagai Kepala Kantor Regional UNESCO di New Delhi, India, yang mencakup pula wilayah Bhutan, Maldives, Nepal dan Sri Lanka.

Keberhasilan ini merupakan catatan tersendiri dalam sejarah partisipasi dan sumbangsih Indonesia di



Delegasi Indonesia pada sesi ke-29 UNESCO General Conference

UNESCO, dimana setelah hampir satu dasawarsa, kembali ada putra Indonesia menduduki jabatan tinggi di UNESCO.

Jabatan Direktur Jenderal UNESCO periode 1999-2005

Jabatan Direktur Jenderal UNESCO yang saat itu dijabat oleh Mr. Federico Mayor Zaragoza (Spanyol) selama dua periode (1987-1993, 1993-1999) akan berakhir pada waktu Konferensi Umum UNESCO ke-30 (Oktober-November 1999).

Pemerintah RI telah memutuskan untuk mencalonkan Prof. Dr. Makaminan Makagiansar untuk jabatan Direktur Jenderal UNESCO periode 1999-2005. Beliau dikenal sebagai “orang lama” UNESCO karena sudah berkecimpung di UNESCO sejak tahun 1967. Pernah menjabat sebagai *Assistant Director General* (ADG) UNESCO untuk bidang Kebudayaan dan Komunikasi (1976-1981), ADG UNESCO untuk Kantor Regional Asia dan Pasifik di Bangkok (1986-1989), dan duduk sebagai Wakil RI dalam Dewan Eksekutif (1995-1999) sekaligus sebagai wakil Ketua mewakili Kelompok Elektoral ASPAC. Dengan pengalaman yang luas dan lama ini Prof. Makagiansar mempunyai peluang yang lebih baik dibandingkan dengan 8 calon-calon lainnya.

Namun banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan, a.l. faktor usia Prof. Makagiansar yang akan mencapai 71 tahun pada saat pemilihan tahun 1999; terpecahnya dukungan khususnya dari kawasan ASEAN dan ASPAC sendiri; masalah percaturan politik dunia yang akan mempengaruhi sikap Negara-negara Anggota dalam memberikan dukungan pada salah seorang calon; biaya kampanye pencalonan jabatan pimpinan organisasi internasional yang sangat mahal, karena harus melibatkan *lobby* tingkat tinggi baik di lingkungan UNESCO, maupun ke berbagai kawasan di dunia.

Akhirnya dengan sangat menyesal KWRI UNESCO belum berhasil dalam perjuangannya mencalonkan beliau untuk jabatan Direktur Jenderal UNESCO. Direktur Jenderal UNESCO periode 1999-2005. Jabatan tersebut akhirnya dimenangkan dan dijabat oleh *Mr. Koïchiro Matsuura*, Duta Besar LBBP Jepang untuk Prancis.

Kelompok Elektoral Asia Pasifik (ASPAC) dan Kelompok 77(G-77)

Indonesia secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok ASPAC dan kelompok G-77. Secara rutin kelompok ini menyelenggarakan pertemuan dan *working groups*, dan berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi pada berbagai sidang-sidang di UNESCO maupun sidang-sidang internasional lainnya.

Kegiatan Perwakilan Tetap Negara-negara ASEAN di UNESCO

Walaupun hubungan antara Perwakilan Tetap Negara-negara ASEAN di UNESCO tidak ditampung dalam suatu wadah tertentu, namun hubungan tersebut tetap terjalin dengan baik dan erat, baik secara individu maupun kolektif. Dengan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan UNESCO yang menjadi kepentingan bersama ASEAN, maka demi menyelaraskan dan melancarkan kerja sama, konsultasi antara sesama Negara ASEAN, secara berkala diadakan.

Pembinaan Diplomat Muda RI

Dalam rangka pembinaan diplomat muda yang bertugas di KBRI Paris, kami telah memberikan kesempatan untuk memanfaatkan Perwakilan RI pada UNESCO sebagai sarana pelatihan guna membantu mereka mengetahui prosedur dan tata cara pembahasan masalah *multilateral*. Kegiatan ini dilakukan dengan mengikut sertakan mereka pada Delegasi RI, termasuk dalam pembuatan naskah kawat dan laporan persidangan yang diikuti.

Melihat manfaat yang diperoleh, kiranya kegiatan ini hendaknya dilanjutkan dan direncanakan secara teratur oleh KBRI Paris.

Penguji untuk memperoleh gelar doctor dari Mahasiswa Indonesia

Selama bertugas di Paris, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi Penguji Luar (*External Examiner*) bagi dua orang Mahasiswa Indonesia untuk memperoleh gelar Doctor, yaitu:

- Sdr. Syafsir Akhlus, belajar di l'Institut National Polytechnique De Lorraine, Nancy. Pada tanggal 24 Januari 1998, mempertahankan Thesis berjudul: “*Couplage entre génie photochimique et séparation chromatographique*”, dengan hasil “*Trés honorable avec felicitation*” (Cum Laude). Beliau adalah staf pengajar di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Dengan jalannya waktu beliau sudah menjadi Guru Besar, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc. pernah menjabat sebagai *Atase Pendidikan* dan Kebudayaan (Atdikbud) di KBRI Paris. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang (2012-2020)
- Sdr. Agoes Soegianto, belajar di l'Université d'Aix-Marseille III, Marseille. Pada tanggal 19 September 1998, mempertahankan Thesis berjudul : “*Impact de polluants métalliques sur la structure des tissus de la cavité branchiale chez la crevette Penaeus Japonicus*”, dengan Hasil “*Trés honorable*” (Sangat memuaskan). Beliau adalah staf pengajar di Universitas Airlangga, Surabaya, Dengan jalannya waktu beliau sudah menjadi Guru Besar. *Prof Dr Ir Agoes Soegianto* adalah pakar Ekotoksitologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya.

Demikianlah sekilas pintas pelaksanaan tugas saya sebagai Duta Besar/ Wakil RI untuk UNESCO selama kurun waktu 1995–1999. Semoga badan ini tetap sukses mewakili negara Republik Indonesia serta mengangkat harkat bangsa di tengah percaturan dunia dalam bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE 2000 s.d. 2003

Prof. Dr. Bambang Soehendro



UNESCO sebagai organisasi dunia sangat bermanfaat bagi negara anggota, terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Banyak isu yang merupakan masalah bersama yang terkait dengan pendidikan, sains, budaya dan komunikasi; dapat dicarikan solusi dengan merujuk berbagai kesepakatan yang dirumuskan UNESCO. Masalah yang timbul akibat perkembangan iptek yang sangat cepat, perubahan iklim, pemenuhan hak warganegara dan lainnya, didiskusikan dalam berbagai forum yang difasilitasi UNESCO. UNESCO bermanfaat tidak saja dalam penyusunan standar/deklarasi/kesepakatan bersama, tetapi juga membantu negara anggota untuk mampu mengimplementasikan sesuai dengan kondisi setempat, terutama melauai kerja sama antarnegara anggota.

Bagi Indonesia, Deklarasi UNESCO banyak dirujuk untuk perumusan kebijakan pemerintah. Deklarasi Pendidikan Untuk Semua (*Declaration of Education for All*, EFA), dirujuk untuk menetapkan prioritas dalam peningkatan akses, kualitas dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah. Manfaat lain yang pernah diperoleh Indonesia adalah penetapan *World Heritage Sites*, seperti Candi Borobudur, berupa bantuan tenaga ahli dan dana dalam upaya restorasi maupun pelestariannya. Pengalaman restorasi Borobudur memungkinkan Indonesia mampu berperan (tenaga ahli dan dana) dalam upaya UNESCO merekonstruksi candi di Kamboja pada awal tahun 2000-an. Berikut contoh dampak UNESCO dalam pembangunan Indonesia, dalam kurun waktu saya bertugas sebagai Wakil Tetap RI di UNESCO.

Saya bertugas di UNESCO dari tahun 1999 sampai dengan 2004, pada masa presiden Bapak Habibie, Bapak Abdurrachman Wahid dan Ibu Megawati. Pada awal tugas, Timor Timur masih menjadi masalah internasional yang berpengaruh juga pada suasana kerja, terutama hubungan dengan wakil-wakil negara pendukung kemerdekaan Timor. Suatu saat, pagar UNESCO penuh tulisan yang antara lain menganalogikan masalah Timor setara dengan *genocide* di Rwanda. Dua tahun kemudian, terjadi peristiwa Bom Bali yang merenggut lebih dari 200 jiwa, banyak diantaranya turis asing dari Australia. Sehari kemudian, dalam salah satu sidang negara-negara Asia Pasifik saya meminta agar sidang dihentikan sebentar, untuk melakukan *Moment of Silence* selama satu menit untuk menghormati korban. Selama tugas memang muncul masalah politik yang “Non-UNESCO”. Dalam menghadapinya, kami banyak mendapat bantuan KBRI Prancis.

Pada tahun 2000, saya mengikuti *World Education Forum* di Dakar Senegal. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Dakar, yang antara lain



Prof. Dr. Bambang Soehendro dengan Menteri Pendidikan Nasional RI, Prof. Abdul Malik Fadjar menghadiri sidang UNESCO

menyebutkan bahwa: Tidak satupun negara yang kurang mampu yang benar-benar memprioritaskan pendidikan, dibiarkan sendirian melaksanakan pendidikan tanpa dibantu oleh negara-negara anggota UNESCO lainnya. Meskipun tidak secara eksplisit kriteria “memprioritaskan pendidikan” dicantumkan dalam Deklarasi, namun sebagian besar peserta sepakat minimal 20% anggaran negara dialokasikan untuk pendidikan. Pada pertemuan dengan delegasi DPR (Komisi IX, bidang pendidikan) yang berkunjung di Paris dan dalam sidang Dengar Pendapat di DPR Jakarta, saya sampaikan bila kita memprioritaskan pendidikan, Harus dialokasikan anggaran minimal 20% APBN. Ketentuan ini jadi salah satu ketetapan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lain, kita juga mendapat bantuan UNESCO. Dalam penyusunan UU 20 tahun 2003, seorang Pakar Pendidikan UNESCO datang ke Jakarta dan berdiskusi dengan Tim Penyusun Depdikbud, membahas pasal-pasal yang direncanakan. Demikian pula, Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk seluruh jenjang pendidikan (pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi) oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dalam perumusannya banyak menggunakan referensi UNESCO. Tahun 2005-2006 sebagai Ketua BSNP pada saat itu, saya meminta agar Tim Penyusun Standar memperhatikan ketentuan-ketentuan UNESCO dan unit pendukung *internal* UNESCO (seperti UNESCO *International Institute for Educational Planning* (IIEP), *The UNESCO International Bureau of Education* (IBE), *the UNESCO Institute for Education* (UIE) dan, *the UNESCO Institute for Statistics* (UIS). Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirumuskan BSNP pada 2006, sangat dipengaruhi oleh empat pilar pendidikan (*learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together*) yang dikembangkan Komisi Pendidikan UNESCO yang dipimpin Jacques Delors.

Pada tahun 2001, UNESCO memulai program *World Heritage* Tak Benda (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*), untuk bahasa, kesusasteraan, musik, tarian, *handicraft* dan seni lainnya untuk mendampingi program *World Heritage* yang

berupa Benda yang telah ada sejak 1972. Peluang ini digunakan Indonesia untuk mengajukan Wayang (Wayang Kulit Purwa Jawa Tengah, Wayang Parwa Bali, Wayang Golek Sunda, Wayang Palembang, Wayang Banjar dari Kalimantan Selatan) yang kemudian disetujui UNESCO pada Daftar *World Heritage batch* kedua pada Nopember 2003. Proses pengusulan berjalan panjang, dimotori oleh SENAWANGI (Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia), PARADI (Persatuan Dalang Indonesia) dan Depdikbud. Pada penetapan Hadir Bapak Ki Manteb Soedarsono, dalang wayang kulit terkenal, langsung menerima sertifikat dari Dirjen UNESCO Matsura. Kedatangan Dalang Ki Manteb disertai dengan seperangkat gamelan dan penabuhnya lengkap, dan langsung memperagakan pertunjukan wayang kulit (yang dipersingkat dalam kurang dari dua jam). Pertunjukan di Fontenoy berjalan sukses, penuh pengunjug yang sengaja diundang Watapri. Satu malam yang membanggakan, memperkenalkan salah satu kebudayaan kita yang telah diakui sebagai Warisan Dunia.

Aktivitas UNESCO dalam bidang Bioetik dimulai tahun 1994 dengan mendirikan Internasional *Bioethics Comitee* (IBC), yaitu kelompok 36 pakar bioetik yang diangkat berdasarkan *personal capacity*. *Inter-Governmental Bioethic Committee* (IGBC) didirikan pada 2001, terdiri atas 36 wakil negara anggota. Kedua lembaga ini merumuskan kebijakan UNESCO untuk disepakati di dalam *General Conference* UNESCO, beberapa diantaranya berhasil menjadi deklarasi. Indonesia mempunyai perhatian yang besar pada bioetik dengan menjadi salah satu anggota IGBC pada awal pembentukannya, dengan menunjuk unit bioetik UGM sebagai wakil RI di lembaga ini. Indonesia selalu aktif dalam kegiatan ini, *Vice Chairman* pada 2003-2005 dijabat oleh Prof. Dr. Soenarto Sastrowiyoto yang selanjutnya seiring dengan meningkatnya peran Indonesia dalam bioetik, beliau menjadi salah satu pakar dalam kelompok IBC pada 2006-2001. Perkembangan bioetik di Indobesia berjalan lancar, pada tahun 2004 didirikan Komisi Bioetik Nasional sebagai koordinator kegiatan bioetik secara nasional. Selain itu, Bioetik diundangkan menjadi UU No 20 tahun 2013 yang mewajibkan bioetik sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa kedokteran.

Demikian pula pada tingkat universitas, bioetik terus berkembang lancar. Sebagai contoh UGM, unit yang awalnya mengasuh mata kuliah bagi mahasiswa UGM, pada 2003 berkembang menjadi *Center for Bioethics and Medical Humanities* (CBMH). Pada tahun 2010 CBMH menyelenggarakan pendidikan bersertifikat yang diikuti oleh praktisi kesehatan seluruh Indonesia dan menjadi program studi magister bioetik pada 2018. CBMH terus berkembang dalam Sumber Daya Manusia dan berbagai kegiatan pelatihan dan penelitian, baik dalam kerja sama dengan UNESCO maupun mandiri, berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Indonesia maupun institusi luar negeri. Dengan perkembangan ini, CMBH memenuhi syarat dan statusnya segera dapat ditetapkan menjadi salah satu UNESCO *CHAIR*.

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE 2004 s.d. 2008

Prof. Dr. M. Aman Wirakartakusumah

Guru Besar Emeritus IPB University, Ketua Akademi Ilmu Pangan dan Gizi AIPI, Rektor IPB 1998-2002, Ketua BSNP 2010-2013, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI, President-Elect IUFoST 2020-2022, Presiding Officer IAFoST 2020-2022, Anggota Grup Ilmiah Sekjen PBB Food System Summit 2021.



Peran Indonesia di UNESCO

Secara langsung maupun tidak langsung hubungan Indonesia-UNESCO selama periode 2004–2008 dapat dicerminkan dalam bentuk keterlibatan Indonesia pada Badan-badan Antar Pemerintah UNESCO, keterlibatan dalam sistem governansi UNESCO seperti Sidang Umum, Dewan Eksekutif dan Penasehat bagi Dirjen UNESCO, serta keterlibatan dalam 8 Kelompok/ Gerakan Regional, Group.

Indonesia terlibat sebagai anggota aktif di tujuh dari 15 badan antar pemerintah UNESCO. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Anggota Dewan Biro International untuk Pendidikan (IBE) 2007-2011
- Anggota Dewan Antar-Pemerintah untuk Program Informasi bagi Semua (IFAP) 2003-2007
- Anggota Dewan Antar-Pemerintah untuk Program Hidrologi Internasional (IHP) 2007-2009
- Anggota Dewan Koordinasi Internasional untuk Program Manusia dan Biosfer (MAB) 2007-2011
- Anggota Komisi Antar-Pemerintah untuk Bioetik (IGBC) 2007-2009,
- Anggota Dewan Antar-Pemerintah untuk Program Manajemen Transformasi Sosial (MOST) 2007-2011
- Anggota dan Dewan Eksekutif Komisi Antar-Pemerintah untuk Oseanografi (IOC) 2007-2009.

Catatan penting peran Indonesia dalam sistem tata kelola (*governance*) antara lain adalah terpilihnya Ketua Delri Mendiknas, Prof. Bambang Sudibyo sebagai Wakil Ketua Sidang Umum ke-34 tahun 2007. Di samping itu, Indonesia juga berperan aktif sebagai anggota *Executive Board* dari tahun 2003-2007. Beberapa tenaga ahli Indonesia dipercaya menjadi penasehat Dirjen UNESCO, masing-masing: Dr. Wahyudi Wardoyo, penasehat program *Man and the Biosphere* (MAB). Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoyo, penasehat di bidang Bioetik, Prof. Dr. Jajah Koswara, penasehat bidang *Community Science*, dan Prof. Dr. Dodi Nandika, Sekjen Depdiknas, sebagai penasehat untuk program *Education for All* (EFA).

Kelompok Regional dan gerakan dimana Indonesia merupakan bagian dan terlibat secara aktif adalah Kelompok ASEAN-UNESCO *Committee* (AUC) (terbentuk secara resmi tanggal 31 Maret 2006), *Asia Pacific Electoral Group IV* (ASPAC), E-9, Kelompok 77+Tiongkok, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam dan *Circle Delegates*.



Foto dokumen arsip dari Prof. Dr. M. Aman Wirakartakusumah



Terkait dengan ASPAC, Indonesia menjadi Ketua pada tahun 2006. Pada periode ini, pembahasan lebih difokuskan, antara lain pada isu program nuklir damai Iran dan *Thematic Debate* dalam sidang-sidang UNESCO dan Persiapan *Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for International Conference on Education*, di Bali Indonesia.

Sebagai anggota Kelompok G-77+Tiongkok, pada periode ini, Indonesia ikut aktif membahas *Draft Konvensi Perlindungan Keragaman Ekspresi Budaya*; Pencapaian target Program Pendidikan Untuk Semua; Hubungan antara 3 badan utama UNESCO; Konvensi Internasional *anti-doping* di bidang olah raga; Kerja sama Selatan-Selatan di UNESCO; Konvensi *Intangible Cultural Heritage*, Implementasi dan tindak lanjut dari pilot proyek kerja sama Selatan-Selatan di bidang pendidikan, pembentukan kelompok kerja di bidang ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, pengembangan pilot proyek untuk Afrika, ASPAC dan GRULAC, serta Pembuatan *website* G-77+Tiongkok.

Sebagai anggota OKI, Indonesia juga aktif membahas isu-isu, antara lain, resolusi UNESCO terkait dengan pemuatan kartun Nabi Muhammad pada beberapa media Barat, serangan Israel ke Libanon yang merusak sekolah-sekolah dan objek budaya, serta upaya negara OKI untuk mencegah Israel menjadi tuan rumah pertemuan *World Heritage Committee*.

Pada tahun 2008 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Pertemuan Para Menteri Pendidikan dari Negara-negara E-9 ke 7 di Bali pada bulan Maret 2008. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Bali dengan upaya utama untuk pendidikan dan pelatihan guru dan berhasil membuat *website* untuk E9 dengan alamat <http://e9.depdiknas.go.id/>.

Isu-isu utama UNESCO

Selama periode 2004-2008, isu-isu yang mengemuka di UNESCO antara lain: *Future of UNESCO*, dan Restrukturisasi dan Reformasi UNESCO, representasi

negara dalam sidang-sidang UNESCO, pencapaian target EFA dalam bidang pendidikan (Pendidikan), *anti-doping* dalam sport (Pendidikan), *Tsunami Early Warning and Mitigation System* (Sains), perlindungan *Human Genome* dan *bioethics* (Sains), keinginan mengubah Konvensi 1972 (Kebudayaan), Konvensi 2005, perlindungan Bahasa yang terancam punah, serta masalah pembuatan karikatur Nabi Muhammad.

Masa Depan UNESCO menjadi isu penting setelah evaluasi kritis tentang peran UNESCO dalam Forum Refleksi "*What UNESCO for the Future*" (2006). Restrukturisasi dan Reformasi UNESCO adalah kelanjutan inisiatif yang sudah dimulai sejak era Direktur Jenderal Koichiro Matsuura pada tahun 1999. Representasi Negara di UNESCO menjadi isu juga menyusul duduknya Duta Besar Jerman sebagai wakil delegasi Inggris dan Duta Besar Austria sebagai wakil delegasi Hungaria pada Pokja Pembahasan Karikatur Nabi Muhammad.

Di sektor Pendidikan, *Education for All* (EFA) tahun 2015 yang disepakati dalam *World Education Forum* di Dakar, Senegal tahun 2000, menjadi agenda utama setiap sidang *governance* UNESCO. Periode ini juga menandai inisiasi Indonesia untuk Deklarasi UNESCO tentang *Right to Basic Education* dan ratifikasi Konvensi tentang *Anti-doping* dalam *Sport* pada tahun 2008.

Di sektor sains, *Tsunami Early Warning and Mitigation System* menjadi pokok pembahasan menyusul tragedi tsunami yang melanda negara-negara di kawasan Samudera Hindia pada tanggal 26 Desember 2004. Salah satu manfaat sistem ini bagi Indonesia adalah lahirnya *Master Plan Tsunami Early Warning System* Indonesia.

Isu lain dalam sektor sains, perlindungan *Human Genome* dan Bioetik adalah antisipasi dari penyalahgunaan hasil pemetaan gen manusia yang diumumkan tahun 2000. UNESCO melalui *International Bioethic Committee* (IBC) menginisiasi penyusunan *International Declaration on Human Genetic Data*. Sebagai anggota komite IBC



Foto dokumen arsip dari Prof. Dr. M. Aman Wirakartakusumah

Indonesia terlibat aktif dalam penyusunan deklarasi ini.

Isu utama dalam sektor kebudayaan, keinginan mengubah Konvensi 1972, berangkat dari ketidakseimbangan representasi kawasan dalam komite *World Heritage*. Isu lain adalah lanjutan pembahasan Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (Konvensi 2005), yang akhirnya disahkan pada Sidang Umum UNESCO tahun 2005 dan diberlakukan sejak Maret 2007.

Periode ini juga ditandai oleh adanya isu pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW yang menjadi bahan perdebatan dalam sidang-sidang UNESCO pada tahun 2006. Sidang *Executive Board* pada tahun itu akhirnya menyepakati keputusan tentang *Respect for freedom of expression and respect for sacred beliefs and values and religious and cultural symbols*.

Catatan tambahan

Selain catatan utama di atas, pada periode yang sama, terdapat beberapa tonggak capaian yang bermanfaat, baik bagi Indonesia maupun bagi UNESCO, antara lain:

1. Keris sebagai *Masterpiece of Oral and Intangible Culture of Humanity* yang diberikan kepada Indonesia pada bulan November 2005, setelah sebelumnya pada tahun 2004, Wayang juga telah mendapatkan penghargaan serupa.
2. Jakarta *Declaration* sebagai hasil dari *International Conference on the Right to Basic Education as a Fundamental Human Right and the Legal Framework for its Financing* di Jakarta pada tanggal 3-5 Desember 2005.
3. Indonesia menyerahkan empat instrumen ratifikasi konvensi UNESCO sbb:
 - *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
 - *International Convention against Doping in Sport*.
 - *Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific*
 - *Convention on Technical and Vocational Education*
4. Penandatanganan *Joint Communique* mengenai kerja sama Indonesia-UNESCO untuk masa empat tahun mendatang yang dilakukan oleh Mendiknas RI dan Dirjen UNESCO pada tanggal 16 Oktober 2007.
5. Peran aktif Indonesia sebagai anggota *drafting committee* UNESCO's *Medium Strategy for 2008-2013* yang telah disahkan oleh Sidang Umum UNESCO ke-34.
6. Hasil pertemuan *Global Forum: The Power of Peace* yang diselenggarakan

di Bali pada tanggal 21–23 Januari 2007 berupa Deklarasi “*Bali Spirit*”. Pertemuan merupakan peran media dalam melaksanakan dialog antar-kebudayaan. Kemudian UNESCO menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan program *Power Peace Network*.

7. Penyusunan Indonesia UNESCO *Country Programming Document 2008-2011* berikut *action plan*, *timetable* dan rencana anggarannya yang melibatkan seluruh instansi terkait di Indonesia.
8. Indonesia menjadi Tuan Rumah E-9 *Ministerial Review Meeting* di Bali yang menghasilkan *Bali Declaration*.
9. Christine Hakim terpilih sebagai UNESCO *Goodwill Ambassador* untuk pencapaian target EFA di wilayah Asia Tenggara.
10. Prof. Yohannes Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung terpilih sebagai UNITWIN *Professorial Chair* dalam bidang *Right to Education*.
11. Perolehan Research Grant L'Oreal oleh para peneliti muda wanita Indonesia.
12. Proses nominasi *Cultural Landscape Bali Province* belum berhasil.

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE 2009 s.d. 2013

Dr. Ir. Tresna Dermawan Kunaefi



Selama periode 2009-2013 banyak prestasi yang diraih Indonesia yang tidak lepas dari peran kami sebagai Duta Besar RI untuk UNESCO di Paris. Capaian tersebut sekaligus juga sebagai tantangan mengingat adanya tanggung jawab dan komitmen besar dibalik prestasi yang diraih tersebut.

Capaian utama dan tantangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Batik Indonesia masuk kedalam *Representative List of Intangible Culture Heritage of Humanity*.
2. Pada Sidang Umum negara-negara anggota *Intergovernmental Oceanographic Commission* (IOC) bulan Juni 2009, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif IOC sampai tahun 2011.
3. Pada periode di atas, Indonesia menyerahkan empat instrumen ratifikasi konvensi UNESCO
 - *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*
 - *International Convention against Doping in Sport*
 - *Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific*
 - *Convention on Technical and Vocational Education*
4. Berperan aktif sebagai anggota *drafting committee UNESCO's Medium Strategy for 2008-2013* yang telah disahkan oleh Sidang Umum UNESCO ke-34.
5. Indonesia menjadi Tuan Rumah E-9 *Ministerial Review Meeting* di Bali yang menghasilkan *Bali Declaration*.

Terdapat dua capaian yang perlu diangkat, yaitu nominasi Batik Indonesia dan peran Indonesia dalam memajukan pendidikan melalui program *Education for All*.

Nominasi Batik Indonesia ke dalam *Representative List of Intangible Culture Heritage UNESCO*

Pada tanggal 30 September 2009, Batik Indonesia telah dimasukkan ke dalam *Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity of UNESCO* menyusul Wayang dan Keris. Pada bulan September 2008, Keris yang sebelumnya diakui sebagai *Masterpiece of Oral and Intangible Culture of Humanity* pada bulan November 2005, dan pada tahun 2004 Wayang dimasukkan ke dalam *Representative List of ICH* menyusul diberlakukannya Konvensi UNESCO tentang *Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH).



Foto dokumen arsip dari Dr. Ir. Tresna Dermawan Kunaefi

Proses diterimanya Batik tersebut cukup panjang, dimulai dengan pembahasan dokumen Batik bersama dengan 110 usulan lainnya, oleh 6 negara anggota *subsidiary body* pada bulan Mei 2009 di Markas Besar UNESCO Paris, untuk kemudian disahkan oleh Komite pada pertemuan sesi ke-4 di Abu Dhabi, UAE, tanggal 28 September – 1 Oktober 2009.

Perdebatan dengan nuansa politis yang sangat kental dapat terjadi dalam penentuan *representative list* oleh *subsidiary body* maupun oleh Komite. Dalam kaitan ini, Deplu berdasarkan masukan dari kami, telah menyusun strategi pendekatan/kampanye kepada anggota *subsidiary body* dan Komite agar pengusulan tersebut berhasil. Untuk tahap awal dengan tenggat waktu sampai bulan Mei 2009, telah dilakukan pendekatan terhadap Turki, Estonia, Meksiko, Korea Selatan, Kenya, dan Uni Emirat Arab.

Pendekatan dilakukan oleh perwakilan RI di enam negara tersebut di atas agar pesan dapat langsung diterima oleh pejabat yang duduk di *subsidiary body*. Bentuk pendekatan yang dilakukan antara lain berupa pengiriman nota diplomatik, jamuan makan, pagelaran budaya termasuk demonstrasi membuat Batik tulis dan seminar terkait Batik.

Tahap kedua adalah Pendekatan kepada 24 negara anggota Komite melalui pengiriman nota diplomatik dan apabila memungkinkan dengan melakukan jamuan makan, pagelaran budaya termasuk demonstrasi membuat Batik tulis dan seminar terkait Batik.

Pengakuan UNESCO terhadap Batik Indonesia tersebut telah menjadikan Batik Indonesia sebagai identitas Indonesia. Warga Indonesia di dalam negeri makin mencintai Batik, sementara warga Indonesia di luar negeri dengan bangga memakai Batik sebagai identitas Indonesia. Hal ini juga telah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi para pengrajin dan pelaku industri Batik di dalam negeri.



Foto dokumen arsip dari Dr. Ir. Tresna Dermawan Kunaefi

Program Pendidikan untuk Semua

Indonesia aktif dalam program utama di bidang pendidikan UNESCO, yaitu *Education for All* (EFA). Setiap tahun para menteri pendidikan bertemu untuk membicarakan pemajuan pendidikan melalui *High Level Group (HLG) on EFA*. Pada periode 2009-2010 Indonesia adalah ketua E-9 (Sembilan negara yang mempunyai penduduk terbesar) dan sebagai *Co-Chairs Teacher Task Force* (TTF) bersama Uni Eropa.

Untuk mengisi peran tersebut kami senantiasa berkoordinasi dengan Sekretariat UNESCO dan KNIU Depdiknas. Dengan Sekretariat UNESCO terus dipantau mengenai agenda pertemuan dan peran Indonesia, terutama Menteri Pendidikan, yang biasanya akan menjadi ketua di dalam salah satu sesi. Isi dari *Chairman Note* juga perlu dibicarakan dengan pihak Sekretariat UNESCO, dengan memperhatikan rekomendasi dari *Working Group on EFA*. Dengan KNIU Depdiknas dikoordinasikan mengenai bahan intervensi atau pidato ketua Delri, susunan Delri untuk didaftarkan ke pihak Sekretariat UNESCO.

Beberapa pertemuan penting dimana kami turut berperan antara lain adalah Pertemuan ke-9 *HLG on EFA* yang diadakan di Ethiopia pada bulan Februari 2010. Untuk mempersiapkan pertemuan tersebut telah dilaksanakan *Working Group on EFA* di Markas Besar UNESCO Paris, 9-11 Desember 2009. Kemudian Pertemuan ke-8 *E-9 Ministerial Review Meeting on EFA* di Nigeria 2010. Selaku ketua E-9, kami bersama dengan Perwakilan Nigeria untuk UNESCO dan Sekretariat UNESCO mengadakan pertemuan koordinasi para Duta Besar dari negara-negara E-9 untuk mempersiapkan pertemuan tingkat menteri tersebut.

Selaku Ketua, kami melaporkan kegiatan selama menjadi Ketua E-9 berdasarkan kesepakatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik tingkat menteri maupun tingkat *Senior Official* (SOM). Kegiatan yang sudah

disepakati tercantum dalam tabel tentang *Collaboration Programmes Among E-9 Countries E-9 Senior Official Meeting*, Jakarta 22-23 Oktober 2008. Indonesia melaporkan tentang *Symposium and Visit on Madrasah Education in Indonesia*, 3 - 6 Nopember 2009, dan *International Symposium on Open, Distance and E-Learning (ISODEL)*, in Yogyakarta, Indonesia, dari 8-11 Desember 2009.

Dari Hasil *Symposium and Visit by E-9 on Madrasah Education in Indonesia*, para peserta yang hadir menekankan pentingnya madrasah yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian EFA *Goals* di negara-negara tertentu. Perwakilan negara-negara di UNESCO juga berkomitmen untuk membantu pendidikan madrasah dan mendorong Sekretariat UNESCO untuk membantu negara-negara yang memiliki madrasah. Bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh UNESCO antara lain adalah pelatihan guru dan kurikulum madrasah. Peran UNESCO dalam pendidikan madrasah tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak menyinggung agama, tetapi memfokuskan pada upaya pencapaian tujuan-tujuan *Education for All*. Hal ini untuk menghindarkan resistensi dari negara-negara tertentu, meskipun negara Barat seperti Amerika Serikat dan Australia secara informal mendukung keterlibatan UNESCO dalam pembangunan pendidikan madrasah.

Masih banyak kegiatan lain yang bisa diperdalam. Namun mengingat keterbatasan ruang, kami kira kedua kegiatan tersebut telah merefleksikan peran kami pada periode di atas. Perlu juga disampaikan bahwa peran kami tersebut tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari staf Kantor Wakil RI UNESCO dan KBRI Paris. Salah satu staf yang membantu kami diawal periode kami bertugas pada tahun 2009 adalah Sdr. Dindin Wahyudin, yang saat ini telah dipercaya oleh Presiden RI untuk menjadi Duta Besar LBBP-RI di Dakar, Senegal.

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL DELEGASI TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE 2011 s.d. 2014

Prof. Dr. Carmadi Machbub



Terdapat dua situasi yang mewarnai suasana kerja selama masa penugasan. Pertama adalah suasana perubahan kepemimpinan di sisi Kantor Perwakilan RI di UNESCO di Paris disingkat KWRIU dan kedua adalah suasana pengetatan anggaran di sisi UNESCO.

Situasi pertama: Saya bertugas di KWRIU sejak awal Oktober 2011 sampai dengan akhir Januari 2014. Itulah pertamakalinya Kementerian Luar Negeri RI menempatkan dua orang Duta Besar di KWRIU. Kepala Perwakilan RI (KBRI) untuk Republik Prancis, Andorra, dan Keharyapatihan Monaco, yang saat itu dijabat oleh diplomat senior Duta Besar LBBP Drs. Rezlan IsHar Jenie, diberi amanah merangkap sebagai Wakil Tetap RI disingkat Watapri untuk UNESCO, sedangkan saya bertugas sebagai Duta Besar/*Alternate Permanent Delegate* RI atau Deputy Wakil Tetap RI disingkat Dewatapri untuk UNESCO. Sementara itu KWRIU diintegrasikan ke dalam KBRI Paris dengan menempatkan Dewatapri untuk UNESCO sebagai salah satu unsur pimpinan di KBRI Paris di samping Wakil Kepala Perwakilan yang bertugas mewakili atau membantu Kepala Perwakilan. Sebelumnya tugas memimpin KWRIU dilaksanakan oleh seorang Duta Besar sebagai Delegasi Tetap yang mandiri. Sebagai catatan, dari 183 negara anggota UNESCO yang memiliki kantor perwakilannya di Paris, pada saat saya bertugas terdapat hanya 3 negara dengan kantor Delegasi Tetap yang memiliki struktur seperti KWRIU yakni perangkapan *Permanent Delegate* oleh Duta Besar bilateral dibantu oleh seorang Duta Besar sebagai *Alternate Permanent Delegate*. Ketiga negara tersebut adalah Indonesia, Laos dan Austria.

Situasi kedua: terjadinya krisis finansial yang dihadapi UNESCO sebagai akibat penerimaan Palestina sebagai Negara Anggota UNESCO pada Sidang Umum (SU) ke-36 November 2011. Amerika Serikat tidak membayar iuran tetapnya yang jumlahnya cukup signifikan yakni sekitar USD 145 juta atau 22% dari anggaran rutin *biennium* UNESCO sebesar USD 653 juta. Hal ini berakibat terjadinya pemotongan dan pengetatan anggaran pada *biennium* 2012-2013 dan terus berlanjut pada *biennium* berikutnya. Amerika Serikat tidak membayar iuran tersebut berdasarkan peraturan dalam negerinya yang diundangkan pada tahun 1990 dan 1991 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa bila organisasi PBB atau yang berafiliasi dengannya mengakui Palestina sebagai negara anggotanya maka Pemerintah Federal AS dilarang memberikan bantuan kepada organisasi tersebut. Alasan inilah disampaikan oleh Mr. David Killion, Duta Besar AS untuk UNESCO, ketika berkunjung ke KWRIU menjelang SU ke-36 guna meminta dukungan RI untuk menolak keanggotaan Palestina



Prof. Dr. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO (2009-2017)



Acara selebrasi inskripsi Lanskap Kultur Provinsi Bali: Subak sebagai Warisan Dunia



Foto dokumen arsip dari Prof. Dr. Carmadi Machbub

tersebut. Tentu saja saya menyatakan bahwa RI selalu dalam posisi mendukung Palestina sebagaimana dipahaminya juga. Sebagai catatan, dapat dikemukakan bahwa pada saat pengambilan suara pada SU ke-36 untuk penerimaan Palestina sebagai Negara Anggota UNESCO, saya mewakili Delri (Delegasi RI) menyatakan persetujuan untuk itu, sementara Prof. Arief Rachman, Ketua KNIU, memberikan sambutan atas nama Delri setelah keputusan diambil. Demikian kesulitan finansial ini selama masa penugasan sering menjadi bahasan pokok khususnya pada sidang-sidang Badan Eksekutif.

Dalam situasi itulah saya bertugas. Berikut ini catatan mengenai peranan dan komitmen RI serta beberapa capaiannya di UNESCO dari sudut pandang saya yang melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas. Beberapa hal lain menyangkut UNESCO yang tidak saya hadapi secara langsung tidak dituliskan di sini.

Peranan dan Komitmen RI untuk UNESCO

UNESCO merupakan Agen Khusus PBB yang misinya sejalan dengan kepentingan dan tujuan nasional Indonesia khususnya dalam menciptakan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kepentingan umum melalui pembangunan berkelanjutan serta kerja sama dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan serta komunikasi dan informasi. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia meningkatkan peran dan komitmennya dalam badan multilateral UNESCO sekaligus mengambil manfaat bagi kepentingan nasional berdasarkan konvensi, instrumen dan program-programnya.

Dalam kurun waktu penugasan, terdapat beberapa hal yang merupakan tonggak penting bagi perkembangan peningkatan peran dan komitmen RI di UNESCO:

1. Kehadiran Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada salah satu acara dari rangkaian SU ke-36 pada tanggal 2 November 2011 sebagai

salah satu pembicara kunci pada peringatan Konvensi 2005: Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (*Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*). Kehadiran Presiden RI ini di satu pihak menunjukkan komitmen RI pada tingkat tertinggi dalam mendukung peran UNESCO. Di lain pihak, pimpinan UNESCO menunjukkan penghormatan kepada Presiden RI untuk berbicara pada forum tertinggi UNESCO. Pada berbagai kesempatan, Dirjen UNESCO Irina Bokova sering mengutip penggalan-penggalan kalimat yang disampaikan oleh Presiden RI pada acara tersebut.

2. Terpilihnya RI sebagai Anggota Badan Eksekutif (BE) pada SU ke-36 yang memungkinkan RI, dalam Hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Muhammad Nuh, yang bertindak sebagai *representatif* RI dan para *alternates*-nya, berkontribusi di dalam perumusan berbagai kebijakan UNESCO dan percaturan jalannya organisasi. Badan ini terdiri atas 58 *representatif* dari negara-negara anggota yang dipilih untuk masa kerja 4 tahun. Fungsi utamanya adalah memastikan agar manajemen UNESCO secara menyeluruh berjalan dengan baik, termasuk memeriksa program kerja dan anggaran organisasi agar pelaksanaannya oleh Dirjen efektif dan rasional; mempersiapkan SU termasuk mematangkan suatu usulan sebelum dibahas pada SU; mengajukan nama kandidat Dirjen UNESCO untuk ditetapkan oleh SU setiap 4 tahun; serta melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh SU. Khusus pada periode ini tugas BE menjadi lebih berat karena persoalan pengetatan anggaran. Pada tahun 2013 dilakukan pertemuan khusus yang kelima di luar agenda reguler pada bulan Juli guna menentukan prioritas program dan anggaran *biennium* 2014-2015 mengingat keterbatasan dana yang ada.
3. Kunjungan Dirjen UNESCO, Irina Bokova, ke Indonesia selepas SU ke-36 pada bulan November 2011. Setelah menghadiri sidang ICH ke-6 di Bali,

Dirjen UNESCO kemudian memenuhi undangan dan berbicara di forum DPR RI serta bertemu Gubernur DKI Jakarta. Secara khusus juga mengunjungi BMKG guna melihat sistem peringatan dini tsunami yang dibangun di wilayah lautan Hindia melalui kerja sama IOC dengan Jepang, Indonesia, India dan Australia yang pada penancangannya di bulan Oktober 2011 Dewatpri bersama-sama dengan para Duta Besar negara-negara yang terlibat di atas menyaksikan simulasinya melalui telekonferensi bersama-sama dengan Dirjen UNESCO di Paris. Di samping itu Dirjen UNESCO juga melakukan kunjungan ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sedang dibersihkan dengan bantuan pendanaan UNESCO karena tertutup oleh debu kawah Gunung Merapi yang meletus sebelumnya. Lebih lanjut, sebagai tamu pribadi, Dirjen UNESCO Hadir dalam upacara pernikahan putera Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Cipanas, Bogor.

4. Komitmen RI kepada UNESCO ditunjukkan secara lebih kongkrit lagi dengan bantuan pendanaan RI bagi Kas Keadaan Darurat (*Voluntary Emergency Fund*) sebesar USD 6 juta dan *Fund-in-Trust* sebesar USD 4 juta yang alih dananya direalisasikan berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013. Bantuan ini merupakan dukungan kepada UNESCO yang sedang mengalami kesulitan finansial sekaligus juga dimaksudkan untuk berbagi tanggung jawab atas keputusan penerimaan Palestina sebagai Negara Anggota oleh SU ke-36 di mana Indonesia turut berperan aktif mendukung keputusan tersebut. Seperti disebutkan di atas, keputusan penerimaan keanggotaan Palestina ini telah membawa konsekuensi penghentian iuran Amerika Serikat sebagai salah satu Negara Anggota yang jumlahnya cukup signifikan sehingga UNESCO menghadapi kesulitan finansial. Oleh karena itu UNESCO harus melakukan berbagai upaya penyesuaian termasuk *right sizing* dari sisi organisasi sampai ke penghapusan berbagai kegiatan. Indonesia dan beberapa negara lainnya mendukung program *Voluntary Extrabudgetary Fund* yang dicanangkan Dirjen UNESCO yang sampai bulan November 2013 berhasil mengumpulkan dana hampir USD 80 juta dan telah memungkinkan berakhirnya tahun anggaran 2012-2013 tanpa defisit. Sedangkan *Fund-in-Trust* yang diberikan Pemerintah RI dimaksudkan untuk mendanai 8 program yang bersifat *self-benefiting* antara lain menyangkut Pembangunan Pusat Islam Indonesia di Afghanistan, Revitalisasi Kota Tua Batavia, dan Penataan TRHS sebagai salah satu Warisan Dunia agar dapat dikembalikan dari status *In Danger List* ke dalam *Regular List*;
5. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara UNESCO: Sidang Komite ICH ke-6 pada bulan November 2011 serta *Internet*



Kunjungan Dirjen UNESCO ke Candi Borobudur



Foto dokumen arsip dari Prof. Dr. Carmadi Machbub

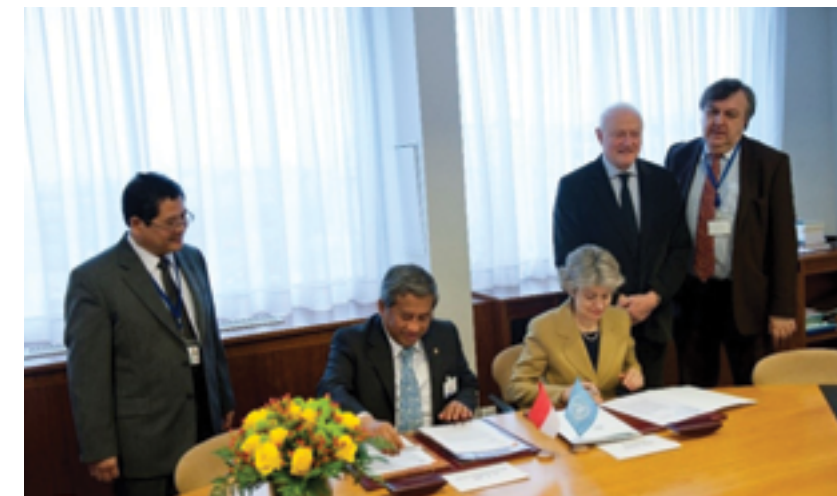


Foto dokumen arsip dari Prof. Dr. Carmadi Machbub

Governance Forum (IGF) ke-8 bulan Oktober 2013 di Bali. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan WCF (*World Culture Forum*) 2013, juga di Bali, yang bersinergi dengan upaya UNESCO untuk memasukkan aspek budaya sebagai bagian integral dari program global PBB Paska 2015. Tentu posisi Presiden RI saat itu dalam kapasitasnya sebagai salah seorang *Co-Chair* dari *High Level Panel on the Eminent Persons to the Post 2015 Development Agenda* yang dibentuk oleh Sekjen PBB memiliki peran dan pengaruh tersendiri dalam upaya tersebut. Selain itu dalam berbagai kesempatan Dirjen UNESCO sering mengemukakan pentingnya peranan Indonesia yang dapat menjadi model negara demokratis yang berhasil mengelola keanekaragaman etnis dan budayanya dalam suasana yang relatif damai dan stabil sehingga memungkinkan dilakukannya pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan bangsa. Kekuatan keanekaragaman budaya dan proses demokratisasi ini menjadi pilar penting diplomasi RI di UNESCO;

6. Indonesia juga memberikan kontribusi positifnya dalam pembahasan multilateral isu-isu terkait pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, serta komunikasi dan informasi melalui perannya yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif Delri pada forum-forum Komite/Dewan dari badan-badan subsider antar-pemerintah di lingkungan UNESCO yang Indonesia menjadi anggotanya. Badan-badan tersebut adalah IOC, ICH, IGBC, serta IFAP. Selanjutnya pada SU ke-37, November 2013, yang pada sidang tersebut Indonesia juga bertugas sebagai salah satu Wakil Ketua, Indonesia terpilih menjadi anggota Komite/Dewan pada MOST, CIGEPS, dan IHP masing-masing untuk periode 2013-2017. Peran Indonesia juga diwujudkan melalui perpanjangan penempatan staf perbantuan di Sekretariat *Teacher Task Force for Education for All*, gugus kerja UNESCO untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru dalam membantu pencapaian target MDG.

Beberapa Capaian

Dalam kurun yang sama, terdapat beberapa upaya penting dan capaian Indonesia dalam memajukan kepentingan nasionalnya dalam bidang-bidang kompetensi UNESCO.

1. Di bidang pendidikan, pada tahun 2012 Indonesia mendapat penghargaan *King Sejong Literacy Prize* atas capaiannya dalam program literasi/pemberantasan buta huruf yang menjadi salah satu dari 6 sasaran program EFA (*Education for All*) yang termasuk dalam target MDG (*Millenium Development Goals*). Indonesia juga tercatat sebagai anggota aktif E-9, 9 negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar dalam kerangka program EFA. Selanjutnya Indonesia juga dipilih sebagai salah satu dari 4 negara yang dijadikan sebagai *pilot project* dalam perumusan dan implementasi *Open Education Resources* (OER) sekaligus *pilot project* untuk riset mengenai implikasi yang timbul dari kebijakan dan penerapan OER yang merupakan program kerja sama UNESCO-OECD serta menjadi *pilot project* untuk uji coba kurikulum *Teaching Respect for All* di beberapa sekolah menengah;
2. Di bidang sains, pada tahun 2012 Taman Nasional Wakatobi berhasil masuk ke dalam Jaringan Cagar Biosfer Dunia menyusul 7 cagar biosfer nasional yang telah masuk sebelumnya. Sementara Kawasan Gunung Batur merupakan kawasan nasional pertama yang masuk ke dalam Jaringan Geopark Dunia (GGN) pada tahun yang sama. Selain itu dua peneliti wanita Indonesia berhasil memperoleh *UNESCO-LOREAL International Fellowships Programme for Young Women in Life Sciences* berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013;
3. Di bidang kebudayaan, Tari Saman Gayo Luwes, Aceh, dan Rajut Noken, Papua, berhasil masuk di dalam daftar Warisan Dunia Takbenda (ICH) masing-masing pada bulan November 2011 di Bali dan November 2012 di Paris. Sementara Bentang

Budaya Subak pada tahun 2012 berhasil diterima masuk ke dalam daftar Warisan Dunia (WH) dalam Sidang Komite WH di St. Petersburg, Rusia. Dalam rangka promosi kebudayaan pada bulan Oktober 2012 Indonesia dipandang sukses dalam penyelenggaraan pentas Wayang Orang di bawah asuhan Dr. Jaya Suprana di Gedung Pusat UNESCO di samping Pameran Budaya Nasional Tak Benda pada saat yang sama;

4. Di bidang komunikasi dan informasi, dua dokumen sejarah Indonesia yakni Babad Diponegoro (*Autobiographical Chronicle of Prince Diponegoro 1785-1855, A Javanese nobleman, Indonesian national hero and pan-Islamist*), yang diajukan bersama oleh Indonesia dan Belanda, dan Nagarakretagama (*Nāgarakretāgama, Description of the Country 1365 AD*) berhasil masuk ke dalam register MOW (*Memory of the World*) pada tahun 2013 menyusul dokumen La Galigo yang telah masuk pada tahun 2011.

Di samping itu menjelang dimulainya Komunitas ASEAN 2015, para Duta Besar negara-negara ASEAN, baik bilateral maupun untuk UNESCO, telah merintis program kerja sama ASEAN-UNESCO dan telah ditandatangani oleh Sekjen ASEAN dan Dirjen UNESCO pada bulan Desember 2013.

Peranan dan capaian yang dikemukakan di atas merupakan hasil dari upaya bersama yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan khususnya di tanah air termasuk upaya yang telah dirintis oleh KWRIU dan pimpinan sebelumnya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KWRIU menjadi salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan peran RI di UNESCO, maupun dalam memaksimalkan terwujudnya kepentingan RI melalui lembaga multilateral ini. Oleh karena itu, peran diplomasi, baik dengan pimpinan UNESCO dan badan-badan subsidiernya dan juga dengan para Duta Besar dan Kantor Delegasi Tetap negara-negara anggota UNESCO, merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan tugas ini. Tugas tersebut antara lain meliputi representasi delegasi permanen RI di UNESCO, pembangunan jejaring, serta penggalangan dukungan untuk suatu usulan tertentu. Banyak pertemuan, seminar, atau kunjungan yang diselenggarakan baik di kantor pusat UNESCO maupun di negara anggota tertentu yang perlu dihadiri. Dalam rangka ini pula Dewatapri terlibat aktif sebagai salah seorang Wakil Ketua *Cercle de Delegués* bersama-sama dengan Duta Besar Lithuania, Belanda, Amerika Serikat, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Brazil, Nigeria, Kongo, Mesir, dan Yaman. Pada saat itu Duta Besar Tiongkok bertindak sebagai Ketua. Pada catatan pengantar disebutkan bahwa saya tidak memenuhi permintaan Duta Besar AS untuk menolak keanggotaan Palestina, namun kami tetap berhubungan baik. Pernah saya diminta menjadi salah seorang panelis dalam suatu acara seminar yang



Foto dokumen arsip dari Prof. Dr. Carmadi Machbub

diselenggarakan oleh Delegasi Permanen AS. Juga tiga kali saya hadir memenuhi undangan makan siang dan resepsi yang diselenggarakan di rumah dinas Dubes AS. Aktivitas seperti ini, makan siang atau makan malam di rumah dinas Duta Besar negara sahabat, atau di rumah makan tertentu, sering dilakukan dan pada gilirannya sangat membantu di dalam penggalangan dukungan pada saat diperlukan. Dewatapri juga sempat mengikuti beberapa acara kunjungan rombongan Duta Besar negara-negara anggota UNESCO ke Oman, turut serta dalam acara dialog antar budaya dan agama di Bangkok dan kemudian di Colombo. Di samping itu dalam upaya memahami berbagai aspek yang diperjuangkan pada badan-badan subsider UNESCO, rombongan KWRIU juga berkunjung ke beberapa situs Warisan Dunia khususnya di Prancis dan ke perpustakaan KITLV di Leiden.

Selama masa penugasan tentu terdapat pula hal-hal yang sedang diperjuangkan seperti usulan pendirian Pusat Kategori 2 *International Centre for Human Evolution Research and World Heritage Management* (ICHERWHM) di Sangiran; Upaya menggalang dukungan nominasi baru situs/eleman/dokumen untuk masuk dalam daftar WH, ICH, MOW, Jaringan Kota Kreatif, Jaringan Cagar Biosfer, dan GGN. Di samping itu terdapat beberapa dokumen nominasi yang masih memerlukan perbaikan yakni dokumen nominasi *Tanah Toraja Settlements* untuk WH, Tenun Sumba untuk ICH yang pada sidang Komite ICH di Baku 2013 belum berhasil masuk dalam daftar ICH, serta Dokumen Makyong untuk MOW. Perbaikan ketiga dokumen nominasi di atas perlu dilakukan dengan cermat sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya penyelesaian masalah TRHS yang telah berada dalam IDL dan upaya mencegah masuknya TNL ke dalam IDL dengan memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh sidang Komite WH di Phnom Penh pada tahun 2013. Serta penggalangan dukungan delegasi negara lain dalam pencalonan Indonesia menjadi anggota Komite WH dan MAB pada SU ke-38 November 2015. Hal lain yang memerlukan perhatian adalah upaya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di Jakarta mengenai Konvensi/Protokol UNESCO yang belum diratifikasi.

Penutup dan Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan Yang Maha Pengasih, yang atas karuniaNya saya berkesempatan menjalankan tugas sebagai Duta Besar/*Alternate Permanent Delegate* Republik Indonesia untuk UNESCO. Tugas ini telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berkontribusi terhadap peningkatan hubungan Indonesia dengan UNESCO dan turut memperjuangkan kepentingan Indonesia pada lembaga multilateral ini. Penugasan ini juga sekaligus memberikan pengalaman yang sangat berharga di dalam memperluas wawasan dan pergaulan internasional.

Sehubungan dengan itu saya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Prof. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Dr. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, untuk mengemban tugas tersebut.

Penghargaan dan terima kasih juga disampaikan kepada Drs. Rezlan IsHar Jenie, Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan RI di Paris/Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, yang selama bertugas di Paris telah banyak memberikan arahan dan dukungan yang sangat berharga. Demikian pula kepada Wakil Kepala Perwakilan RI, Stephanus Yuwono, SH yang kemudian digantikan oleh Drs. Hari Ashariyadi, serta para Koordinator Fungsi dan Atase Teknis serta kepada jajaran staf pusat dan staf setempat KBRI Paris. Demikian pula kepada staf pusat: Dra. Siti Sofia Sudarma, Drs. Yukon Putra, MA, Yosep Trianugra Tutu, MIA, MDip, dan staf setempat: Sdri. Shieni Suni Ratnaningsih, MSS, Sdr. Deddy Ardy, dan Sdr. Alit Suhana yang telah bekerja bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi KWRIU.

Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta hasil yang dicapai juga sangat didukung oleh kerja sama bahu membahu dengan para pemangku kepentingan di Tanah Air. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pimpinan Kemdikbud (Wamenbud, Sesjen, Dirjen Dikti, para Staf Ahli Mendikbud, Karo Kepegawaian, Karo Keuangan, Karo PKLN beserta Staf, dan Direktur INDB beserta Staf), jajaran Pimpinan Kemlu (Wamenlu, Sesjen, Dirjen Multilateral, Sekretaris Ditjen Multilateral, Karo Kepegawaian, Direktur OINB beserta Staf), Ketua Harian KNIU beserta Staf, Ketua LIPI dan para Deputi, Deputi V Kemenkokesra dan staf, berbagai pejabat dan staf di DPR RI, Kemparekraf, Kemkominfo, Kemhut, serta berbagai pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL DELEGASI TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE 2015 s.d. 2017

Prof. Dr. T.A. Fauzi Soelaiman



Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Selama 3 tahun tepat saya di UNESCO, ada beberapa hal yang telah kami perjuangkan agar nama Indonesia tetap harum di UNESCO. Salah satu yang terberat adalah pada saat Indonesia ingin mengajukan diri kembali menjadi anggota badan tertinggi di UNESCO, yaitu Badan Eksekutif UNESCO di tahun 2017. Walaupun kami merasa Indonesia adalah negara besar yang layak untuk duduk disana, namun kami khawatir adanya sentimen positif kepada negara-negara kepulauan yang saat itu turut maju dan bertarung untuk menjadi anggota Badan Eksekutif. Banyak usaha yang kami lakukan untuk memenangkannya termasuk membuat *flyer* posisi Indonesia, melakukan negosiasi dengan banyak sekali negara yang dapat mendukung Indonesia baik di UNESCO ataupun via KBRI, melakukan pameran keberhasilan Indonesia di IFIT, peluncuran buku anak-anak Si Komodo Mau Main Musik dengan 3 bahasa, dan lain-lain, termasuk bantuan dari Kemlu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara, Kemdikbud dan KNIU. Pada akhirnya Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota Badan Eksekutif UNESCO 2017-2021 dengan mendapatkan 160 *vote* dari 195 negara yang tergabung dengan UNESCO. Suatu prestasi yang kami pun terkejut melihat angka yang sangat tinggi ini. Itulah salah satu saat yang paling menegangkan sekaligus membanggakan saat masa jabatan saya di UNESCO.

Selain di Badan Eksekutif, Indonesia juga berhasil menduduki berbagai posisi di badan-badan UNESCO yang diinginkan sepanjang masa tugas kami dari tahun 2015-2018, baik yang diusahakan secara *clean slate* maupun secara *voting*. Hal ini mempertegas posisi Indonesia yang unggul di mata para anggota UNESCO lainnya. Tentunya tidak terhitung upaya dan negosiasi Indonesia saat duduk di badan-badan ini, baik yang dipilih saat Sidang Umum, maupun di sidang lainnya.

Hal lain yang cukup membanggakan adalah dapat lolosnya Indonesia memberikan 4 karya seni Indonesia untuk ditempatkan di Markas Besar UNESCO sehingga pada awal 2018 ada total 7 karya seni Indonesia yang berada di Markas Besar UNESCO. Pemberian karya seni ini tidak mudah karena harus melalui penjurian yang sangat ketat dari beberapa kurator museum dunia, termasuk dari museum terbesar di dunia, *Museum Louvre*. Akhirnya, miniature Kompleks Candi Prambanan, pahatan Samudraraksa pada kayu seberat 200 kg, replika tengkorak Sangiran-12, dan Angklung Robot berhasil diterima dan dipersembahkan ke UNESCO via Direktur Jenderal UNESCO saat itu, Mme. Irina Bokova, dalam upacara yang meriah



Foto dokumen arsip dari Prof. Dr. T.A. Fauzi Soelaiman

yang disertai pertunjukan gamelan secara *live* pada tanggal 18 Oktober 2017. Selama masa jabatan saya disana, mungkin sejak berdirinya UNESCO juga, belum pernah ada negara yang berhasil memberikan 4 karya seni negaranya ke UNESCO dalam satu waktu sekaligus, karena hal ini sangat dibatasi. Perlu dicatat bahwa pemberian karya seni dalam bentuk patung dari Tiongkok dan Filipina untuk UNESCO ditolak pada saat yang sama.

Pada masa jabatan yang sama, nama Indonesia juga terukir di plakat di depan Ruang Sidang Badan Eksekutif (Ruang X) sebagai salah satu donator perbaikan ruangan, menambah plakat yang sudah ada sebelumnya di depan Ruang I yang terpampang sejak pada tahun 1978. Indonesia juga menginisiasi pengumpulan dana untuk perbaikan Ruang II yang sudah perlu diperbaiki, namun belum dimulai. Diharapkan, nama Indonesia akan terpampang pada setiap plakat di luar setiap ruangan besar yang berada di Markas Besar UNESCO.

Pada awal masa jabatan saya di UNESCO, kami identifikasi ternyata ada beberapa piagam inskripsi elemen Indonesia yang tidak ditemukan dan juga tidak berada di Kementerian maupun di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Untuk itu, secara perlahan kami memintakan duplikat dari 10 piagam dan akhirnya di tahun 2017 kami berhasil mengumpulkan semua piagam/surat penting dari semua elemen Indonesia yang tercatat di UNESCO. Kesemua piagam ini kami serahkan ke Indonesia via Kementerian Luar Negeri untuk kemudian diserahkan ke Kementrian terkait, lalu disimpan di ANRI. Seluruh Hasil *scan* dokumen ini kami masukkan ke *website* KWRIU untuk dapat dilihat dan diunduh oleh siapapun. Selain itu, seluruh miniatur dokumen kami bingkai dan kami pajang di dinding kantor baik di KWRIU maupun di KBRI Paris untuk mengingatkan para pengunjung atas keberhasilan Indonesia di UNESCO.



Penyerahan *Indonesian Works of Art* kepada UNESCO, Robot Angklung, Oktober 2017
[photo courtesy of UNESCO / C. ALIX]

Pada akhir 2017, kami juga berhasil menutup kasus terbunuhnya wartawan di Indonesia, alm. Herliyanto, yang telah menjadi perhatian UNESCO sejak 2006 dengan memberikan surat pernyataan bahwa kasus tersebut sudah ditutup di Indonesia.

Selama masa jabatan saya, Indonesia juga berhasil menjadi tuan rumah *World Press Freedom Day* pada bulan Mei 2017 yang dihadiri Dirjen UNESCO, Mme. Irina Bokova; serta peluncuran *Global Education Monitoring (GEM) Report* yang pertama di tanggal 6 September 2016.

Beberapa kegiatan lain yang kami lakukan untuk mempromosikan Indonesia di UNESCO dan Paris adalah Konser Angklung Mang Udjo terbesar di Eropa di salah satu gedung termegah di Paris, yaitu *Theatre Odeon* pada tanggal 17 November 2015; Pameran Arsip *Memory of the World* yang dibuka oleh Presiden RI ke-5, Ibu Megawati pada tanggal 24-28 Oktober 2016; Pentas Sendratari Ramayana dari Prambanan di Ruang II pada tanggal 22 November 2016; Pagelaran *Pencak Silat: Indonesian Martial Art* di Ruang I pada tanggal 9 Mei 2017; pembukaan klub Pencak Silat UNESCO pada tanggal 25 Oktober 2017 dan lain-lainnya.

Secara pribadi, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang sangat berharga berdiplomasi dengan 194 wakil negara lainnya. Posisi UNESCO di badan PBB adalah cukup unik karena negara pemenang Perang Dunia II tidak menjadi negara yang dapat memveto keputusan sidang. Di UNESCO inilah, Palestina dapat menjadi anggota dan belum dapat menjadi anggota di badan PBB lainnya. Hal ini menjadikan sidang-sidang di UNESCO menjadi sangat menarik dan unik, dibandingkan dengan sidang-sidang di badan PBB lainnya.



Delegasi Indonesia di saat sidang *Executive Board*

Di dalam Mukadimah Konsitusi UNESCO, tahun ini sudah 75 tahun berselang dari akhirnya Perang Dunia II, maka dapat disimpulkan bahwa misi utama UNESCO agar tidak terjadi perang dunia berikutnya telah berhasil, dan Indonesia telah mempunyai peranan penting dalam hal ini. Ke depan, saya sangat mengharapkan akan ada orang Indonesia yang mengisi posisi-posisi penting di UNESCO, seperti Ketua *ASPAC Group*, Ketua *G77+Tiongkok*, Presiden Badan Eksekutif, Presiden Sidang Umum, Direktur UNESCO, bahkan Direktur Jenderal UNESCO. Selain itu, Indonesia juga harus mempunyai program-program yang perlu diperjuangkan demi kepentingan Indonesia maupun dunia. Untuk ini, Indonesia harus merencanakannya secara terstruktur dan sistematis.

Akhir kata, kami sampaikan selamat dan terima kasih kepada Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Surya Rosa Putra, serta Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir, atas keberhasilannya dalam menerbitkan buku ini yang sudah ditunggu-tunggu. Selamat membaca. Dirgahayu Indonesia di UNESCO yang ke 70. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL DELEGASI TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE JANUARI 2018 s.d. JULI 2018

Prof. Dr. Bambang Hari Wibisono



Meskipun periode penugasan saya sebagai Deputi Wakil Tetap (DEWATAP) RI untuk UNESCO relatif sangat pendek pada tahun 2018, terdapat beberapa hal penting yang perlu dikemukakan sebagai bagian dari peran dan pengalaman diplomasi Indonesia di UNESCO. Hal pertama adalah masuknya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif (*Executive Board*) UNESCO untuk periode 2017-2021, dalam kepemimpinan UNESCO yang baru yaitu Direktur Jenderal Audrey Azoulay. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO pada periode 2011-2015. Pada sidang *Executive Board* pertama yang diselenggarakan pada bulan April 2018, pidato sambutan delegasi RI disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani, yang intinya menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan Direktur Jenderal, dan anggota Dewan Eksekutif lainnya. Adapun bidang-bidang yang ditekankan di dalam pidato Menko PMK searah dengan prioritas pengembangan sumberdaya manusia dan kebudayaan di Indonesia, yaitu pemerataan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembentukan karakter. Kehadiran pejabat tingkat menteri pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO tersebut sangatlah penting untuk menunjukkan eksistensi dan potensi Indonesia untuk berperan aktif dalam mengembangkan salah satu organisasi di bawah PBB ini.

Hingga kini, sudah terdapat sekitar 10 Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia yang sudah terinskripsi di dalam UNESCO *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, berdasar 2003 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Batik merupakan salah satunya, yang diinskripsi pada tahun 2009. Meskipun sudah terinskripsi di UNESCO, Indonesia sebagai pengusung Warisan Budaya Tak Benda ini tetap memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus menjamin kelestarian dan pelestariannya, salah satunya melalui kegiatan promosi. Upaya yang dilakukan untuk senantiasa melestarikan Batik di lingkungan UNESCO oleh KWRI selama ini dinilai sangat baik, termasuk melalui kegiatan yang diselenggarakan pada bulan Juni 2018, yaitu dalam bentuk penyelenggaraan pameran dan *fashion show*, dengan tajuk “Batik for the World”. Pameran Batik digelar selama seminggu penuh, sedangkan peragaan busana menampilkan tiga perancang busana Indonesia, yaitu Denny Wirawan, Edward Hutabarat, dan Oscar Lawalata, yang menampilkan rancangan busana Batik terkininya. Di dalam pameran, digelar ratusan koleksi kain Batik, mulai dari yang kuno hingga yang kekinian, yang menunjukkan keberlanjutan Batik Indonesia dari masa ke masa. Adapun di sela-sela kegiatan pameran juga diselenggarakan workshop membatik, mengenakan Batik, serta *talkshow* tentang Batik,



Delegasi Indonesia di saat sidang *Executive Board*

yang dihadiri oleh para diplomat dan keluarganya, serta masyarakat umum. *Workshop* menghadirkan pembicara Chantal Vuldy, Oscar Lawalata dan saya sendiri, sebagai Dewatap RI dan yang kebetulan memiliki latar belakang sejarah hidup dan dibesarkan dari keluarga pengusaha Batik, sehingga saya bisa berbagi pengalaman terkait dengan dunia Batik. Penekanan promosi Batik sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang paling utama melalui UNESCO, adalah perlunya menghargai karya adiluhung bangsa kita ini, dengan ‘mengenakan’ Batik yang sesungguhnya, artinya Batik yang dihasilkan melalui proses membatik yang otentik, yaitu dengan menorehkan lilin dan pewarnaan, sebagaimana diinskripsi oleh UNESCO, bukan sekedar tekstil bermotif Batik. Saya yakin bahwa acara-acara semacam ini akan dan selayaknya terus diselenggarakan oleh KWRI di UNESCO, bahkan tidak hanya untuk Batik, tetapi juga untuk seluruh warisan budaya, baik benda maupun tak benda, dan warisan alam Indonesia yang sudah diinskripsi oleh UNESCO.

Pada periode penugasan saya, saya berkesempatan mendampingi Wakil Tetap (WATAP) RI untuk UNESCO, Duta Besar Hotmangaradja Panjaitan, menghadiri 42nd Session of the World Heritage Committee di Manama, Bahrain pada tanggal 24 Juni-4 Juli 2018. Ketika itu Indonesia masih resmi menjadi anggota salah satu committee di UNESCO, yaitu *Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* atau *World Heritage Committee* (WHC) (2015-2019). Salah satu *assignment* yang penting pada sidang tersebut adalah *withdrawal* nominasi Indonesia yaitu “*Age of Trade: Old Town of Jakarta (formerly Old Batavia) and 4 Outlying Islands* (Onrust, Kelor, Cipir and Bidadari)” sebagai *World Heritage*, karena masih adanya sejumlah persyaratan yang belum dapat terpenuhi. Penarikan kembali atas inisiatif Indonesia sendiri merupakan keputusan yang paling tepat agar masih memiliki kesempatan untuk dapat menominasikan kembali setelah seluruh ketentuan WHC terpenuhi.



Acara budaya *Batik for the World* di UNESCO House, Paris, Juni 2018
[photo courtesy of Bakti Budaya Djatung Foundation / Now!JAKARTA]

Sejak persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan sidang di Manama tersebutlah saya yang ketika itu dalam tahap awal penugasan, benar-benar mengalami secara langsung peran dan tugas sebagai Dewatap, khususnya dalam konteks menjadi pihak yang ‘diburu’ banyak perwakilan negara-negara lain yang menghimpun dukungan atas nominasi mereka. Pada kesempatan yang sama, Indonesia pun juga harus melakukan hal yang sama untuk mendapatkan dukungan atas agenda-agenda Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah ketika Indonesia berupaya untuk keluar dari ‘*List of World Heritage in Danger*’ bagi *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra*, atau paling tidak harus mempertahankan status tersebut untuk sementara waktu. Dukungan negara-negara lain tetap diperlukan meskipun *experts* dari Indonesia sudah demikian cermat dalam menyiapkan dokumen tentang berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam pengawasan dan pengelolaan taman-taman nasional yang sebelumnya telah terinskripsi sebagai UNESCO *World Heritage Site* pada tahun 2004, tetapi kemudian dinyatakan diinskripsi sebagai *List of World Heritage in Danger* pada tahun 2011. Posisi Indonesia dalam konteks pelestarian alam hutan tropis ini sangat penting dalam skala global, mengingat semakin berkurangnya luas hutan karena adanya berbagai bentuk ancaman, antara lain kebakaran hutan, penebangan pohon-pohon secara ilegal, perburuan satwa secara liar, dan pembangunan infrastruktur jalan yang melintasi hutan. Dalam hal ini UNESCO bersama dengan salah satu *advisory bodies*-nya yaitu *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), memiliki kepedulian yang demikian besar atas isu global terkait dengan pelestarian alam hutan yang merupakan paru-paru dunia.

Untuk mengakhiri catatan saya, bagi Indonesia UNESCO merupakan organisasi yang sangat diperlukan. Banyak manfaat positif yang bisa dipetik untuk mendukung pelestarian warisan budaya dan alam, dan pengembangan pendidikan dalam arti luas. Khusus terkait dengan



Delegasi Indonesia di Sesi World Heritage Committee ke-42, Manama, Bahrein, 2018

berbagai inskripsi warisan-warisan budaya dan alam, memang hal tersebut hendaknya tidak dijadikan sasaran akhir dari pengelolaan warisan budaya dan alam, melainkan sebagai suatu sarana untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan pengelolaannya. Ketika hendak menominasikan suatu warisan budaya atau alam, kita harus benar-benar sudah siap, termasuk dalam aspek pengelolaannya, dalam arti tidak hanya sebatas konsep ataupun rencana, melainkan telah diimplementasikan dan menunjukkan hasil yang positif. Indonesia tentunya juga harus menunjukkan peran aktifnya untuk senantiasa memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dalam bidang pemajuan budaya dan pendidikan, dalam konteks membangun dan semakin memperkuat perdamaian dunia. Setelah melewati masa 70 tahun keanggotaan RI di UNESCO, semoga di waktu-waktu mendatang Indonesia semakin mampu menunjukkan eksistensi dan peran pentingnya di UNESCO.

CATATAN DUTA BESAR/WAKIL DELEGASI TETAP RI UNTUK UNESCO

PERIODE 2018 s.d. -

Prof. Dr. Surya Rosa Putra



Tahun 2019 adalah akhir *biennium* ke-3 Rencana Strategis UNESCO periode 2014-2021. Program dan aktivitas UNESCO tetap konsisten dengan prioritas Afrika dan kesetaraan gender serta 9 tujuan strategis yang tercantum dalam dokumen 37 C/4 (*Medium-Term Strategy*) yang diluncurkan pada tahun 2013.

Sementara itu, sesuai dengan Rapat KNIU, Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra KBRI, Indonesia tetap fokus pada program-program yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya, yakni yang berkaitan dengan peningkatan jumlah tetapan UNESCO (warisan budaya benda dan tak benda, cagar biosfer, dan geopark), keterlibatan dalam penentuan arah dan kebijakan UNESCO, serta peningkatan hubungan multilateral.

Sepanjang tahun 2019, ada beberapa isu menonjol yang menjadi perhatian negara-negara anggota. Diantaranya adalah pengesahan Konvensi Global tentang *Recognition of Higher Education Qualifications*, pengesahan Rekomendasi tentang *Open Educational Resources*, keinginan UNESCO menyusun Rekomendasi untuk *Open Science*, Transformasi Strategis, perubahan statuta dan prosedur *Memory of the World*, amandemen Konstitusi UNESCO dan pembahasan anggaran 2020-2021.

Berikut ini adalah deskripsi ringkasnya.

1. *Konvensi global tentang Recognition of Higher Education Qualifications*, yang sudah dipersiapkan sejak tahun 2015, disahkan oleh Sidang Umum UNESCO sesi ke-40, November 2019. Konvensi ini membuka peluang untuk meningkatkan kerja sama perguruan tinggi dan mobilitas akademik antar negara pihak yang meratifikasi. Indonesia, yang diwakili staf ahli dari Kemristekdikti dan Kemlu, terlibat aktif dalam penyusunan konvensi ini dan diharapkan segera menyusun kebijakan dan strategi yang relevan.
2. *Open Educational Resources (OER)* adalah material pendukung untuk proses pembelajaran, dalam bentuk digital atau yang lain, yang dapat diakses, digunakan dan diadaptasi oleh publik dengan gratis dan persyaratan mudah. Rekomendasi OER dari UNESCO merupakan rekomendasi OER satu-satunya di dunia yang berisi *standard-setting* pengembangan *capacity building*, kebijakan, model berkelanjutan dan kerja sama internasional dalam bidang OER. Rekomendasi ini juga disahkan dalam sidang ke-40 Sidang Umum UNESCO tahun 2019.



Pidato Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI untuk UNESCO
Arrmanatha Nasir di General Conference ke-40



Delegasi Indonesia saat General Conference ke-40



Acara budaya Presenting Indonesian Heritage to the World di UNESCO House, Paris,
September 2019

Tenaga ahli dari Kemenristekdikti dan Kemdikbud Indonesia juga berperan aktif dalam konsultasi antar negara yang berlangsung pertengahan tahun 2019.

3. *Open Science* adalah gerakan untuk menjadikan data, informasi, dan publikasi ilmiah dapat diakses oleh semua orang. Keinginan UNESCO untuk membuat Rekomendasi *standard-setting* untuk pelaksanaan *Open Science* dimaksudkan, antara lain, untuk menyediakan prinsip-prinsip dan tata nilai implementasi *Open Science* yang bisa dikembangkan oleh negara-negara anggota ke dalam kebijakan dan regulasi nasional mereka. Sidang Umum UNESCO ke-40 tahun 2019 mengesahkan Studi Awal Rekomendasi ini dan meminta Direktur Jenderal menyiapkan *draft* Rekomendasi untuk dibahas pada Sidang Umum UNESCO ke-41 tahun 2021.
4. *Transformasi strategis* UNESCO sebagai bagian dari reformasi PBB dilontarkan pada tahun 2018 oleh Direktur Jenderal sebagai respons dari efisiensi sumber daya, komunikasi dengan negara anggota dan ruang lingkup kerja UNESCO yang lintas sektoral. Program ini mencakup tiga tahapan: pengubahan struktur dan organisasi, peningkatan efisiensi dan metode kerja, dan pengaturan kembali program. Rencananya, proses transformasi ini akan selesai tahun 2019 dan disahkan pada Sidang Umum UNESCO ke-40. Namun, proses ini hanya berjalan sampai tahapan ke-2. Isu-isu yang mengemuka adalah keseimbangan geografis dan mobilisasi staf.
5. *Perubahan Statuta dan Prosedur Program Memory of the World* diawali dengan rekomendasi dari IAC (*International Advisory Committee*) pada tahun 2015 terkait dengan pentingnya komunikasi antara negara pihak dan para ahli. Rekomendasi ini diterima oleh sidang *Executive Board* ke-202 tahun 2015 dan dilaksanakan atas dasar keputusan sidang *Executive Board* sesi ke-205 tahun 2017. Seiring dengan pembahasan perubahan statuta dan prosedur, Direktur Jenderal menghentikan siklus nominasi MoW untuk sementara. Dua

nominasi dari Korea menyangkut *Comfort Woman* ditunda karena ada perbedaan persepsi dengan (tentara) Jepang. Sejak itu, kelanjutan pembahasan perubahan Statuta dan Prosedur MoW dalam *Working Group* selalu macet, karena ada benturan kepentingan antara Korea Selatan dan Jepang, termasuk dalam Sidang Umum UNESCO ke-40 Indonesia, dalam hal ini, ada pada posisi netral.

6. Ada tiga amandemen Konstitusi (*Basic Text*) yang dibahas dalam masa ini, yakni tentang: (a) *term limit* keanggotaan *Executive Board*; (b) Hak dipilih dan Hak voting anggota *Executive Board* yang terkait pembayaran kontribusi (Pasal V) dan; (c) mekanisme pemilihan Direktur Jenderal. Kecuali amandemen Pasal V yang juga disponsori Indonesia, kedua amandemen lain gagal diputuskan dalam Sidang Umum ke-40. Terkait *term limit*, ada upaya dari Jepang, Brazil, India dan negara-negara yang selalu menjadi anggota *Executive Board* agar implementasi *term limit* tersebut ditunda dulu. Indonesia yang ikut mendukung amandemen ini abstain pada saat voting tentang kelanjutan pembahasan amandemen ini tahun 2020. Adapun amandemen tentang mekanisme pemilihan Direktur Jenderal UNESCO gagal karena tidak adanya konsensus tentang dokumen yang digunakan sebagai rujukan: amandemen yang diajukan oleh tiga negara, Qatar, Turki dan El-Salvador atau amandemen atas amandemen yang diajukan oleh Qatar. Untuk menjaga kenetralan, Indonesia pun memilih *abstain* saat voting tentang dilanjutkan atau tidaknya pembahasan amandemen ini.

Kecuali Konvensi Global tentang Pengakuan Kualifikasi Perguruan Tinggi dan Rekomendasi tentang *Open Educational Resources*, isu-isu utama UNESCO tersebut akan dibahas kembali pada tahun 2020.

Terkait dengan Indonesia, selama tahun 2019, Delegasi Tetap RI (Detapri) untuk UNESCO berperan aktif dalam memfasilitasi dan memperjuangkan inskripsi/pendaftaran warisan benda/tak benda, situs/kawasan

biosfer, dan situs/kawasan geopark sebagai tetapan-tetapan baru UNESCO. Delegasi Tetap RI untuk UNESCO juga ikut mengupayakan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota ICC-MAB dan *Headquarter Committee* untuk periode 2019-2023.

Berikut ini adalah deskripsi ringkasnya.

1. *Tambang Batubara Ombilin-Sawahlunto* ditetapkan oleh sidang *World Heritage Committee* ke-43 di Baku Azerbaijan pada bulan juni 2019. Indonesia saat itu termasuk anggota Komite. Detapri pada sidang tersebut memberikan intervensi –karena tidak diperbolehkan– namun meminta Australia, Tiongkok, Irak dan Tunisia untuk memberikan apresiasi dan sambutan.
2. *Tradisi Pencak Silat* disahkan dalam sidang *Intangible Cultural Heritage* ke-13 di Bogota, Kolombia. Proses penetapan berjalan lancar sehingga Detapri cukup memberikan sambutan diakhir sidang. Sebelumnya, pada bulan September 2019, Detapri menyelenggarakan pagelaran *Presenting Indonesian Heritage to the World* kepada UNESCO dengan menampilkan, antara lain, Pencak Silat Sunda dan Minangkabau, yang dimaksudkan untuk promosi Pencak Silat kepada para delegasi negara-negara anggota UNESCO. Pagelaran dihadiri oleh sekitar 1.300 penonton.
3. *Kawasan Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah dan Samota (Saleh-Moyo-Tambora) di NTB* ditetapkan sebagai dua cagar biosfer baru dalam jaringan *Biosphere Reserves Network Man and Biosphere (MAB) Programme* UNESCO pada sidang ICC (*Intergovernmental-Coordinating Country*) MAB ke-31 bulan juli 2019. Detapri ikut memfasilitasi kehadiran beberapa delegasi tanah air yang hadir dalam sidang tersebut, antara lain, delegasi LIPI, delegasi Kementerian KLH, serta delegasi Pemrov Sulteng dan NTB. *Kaldera Toba* yang gagal ditetapkan sebagai UNESCO *Global Geopark* pada tahun 2018 diusulkan kembali pada tahun 2019 setelah pertemuan antara Menpar dengan Sekretariat Program Geopark dan Geosains UNESCO. Detapri memfasilitasi pertemuan ini sekaligus mengawal tindak lanjut pembaruan *dossiers* di Paris. Geopark ini akhirnya direkomendasikan untuk disahkan oleh sidang *Executive Board* tahun 2020 oleh sidang UNESCO *Global Geopark Council* ke-4 di Lombok bulan September 2019.
4. *Keanggotaan Indonesia di Headquarter Committee dan ICC-MAB* untuk periode 2019-2023 disahkan oleh Sidang Umum UNESCO ke-40 bulan November 2019. Indonesia terpilih kembali sebagai wakil grup



Delegasi Indonesia saat Sesi World Heritage Committee ke-43, Baku, Azerbaijan, Juli 2019



ASPAC bersama Bangladesh (untuk *Headquarter Committee*) dan bersama Kazakhstan, Maldive, dan Korea Selatan (untuk ICC-MAB).

Tahun 2020, tepat 70 tahun hubungan Indonesia-UNESCO, pandemi penyakit Covid-19 (Corona virus Disease – Desember 2019) melanda dunia dan menyebabkan krisis multidimensi. Sebagian agenda-agenda UNESCO dialih-fokuskan, antara lain, pada mitigasi dampak pandemi pada keberlanjutan pendidikan, peningkatan kerja sama sains (mikrobiologi) untuk mengatasi pandemi, perlindungan warisan dunia serta peningkatan ketahanan pelaku seni/seniman. Pengalihan fokus ini diupayakan tidak berpengaruh banyak pada rencana anggaran dan sumber daya yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Di sektor Pendidikan, UNESCO membuat sejumlah inisiatif. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan membuat sistem monitor dan evaluasi jumlah siswa terdampak di seluruh dunia (saat puncak pandemi akhir bulan April 2020, sekitar 1,5 juta siswa atau 84% siswa terdaftar dari 163 negara tidak bisa ke sekolah). Langkah berikutnya adalah membentuk *Global Education Coalition* yang melibatkan Menteri-Menteri Pendidikan dan berbagai mitra dan *stakeholder* untuk berdialog tentang kebijakan-kebijakan pendidikan yang berbasis pada pendidikan jarak jauh (*distance learning*). Inisiatif lain, UNESCO menyelenggarakan berbagai pertemuan-pertemuan virtual sebagai platform interaktif berbagi pengalaman praktis dari negara-negara anggota. UNESCO juga memobilisasi pakar dan menyediakan teknik, metode dan *resources* untuk proses belajar mengajar sebagai langkah kongkrit.

Di sektor Sains, UNESCO menitikberatkan inisiatif pada pembangunan jaringan kerja sama Sains di bidang-bidang yang dekat dengan pandemi, seperti Mikrobiologi dan Ilmu Air. Para ilmuwan dihimbau untuk berbagi pengetahuan dan keahlian melalui berbagai platform, antara lain, *Open Science*. UNESCO juga mengadakan dialog dengan Menteri-Menteri yang terkait dengan pengembangan sains dan teknologi untuk saling berbagi keputusan dan kebijakan yang diambil dalam menangani pandemi dan dampaknya ini.

Di sektor kebudayaan, UNESCO juga menyelenggarakan berbagai pertemuan dan dialog virtual dengan para pelaku kebudayaan dunia. Di antaranya adalah dialog dengan Menteri-Menteri Kebudayaan tentang kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam melindungi warisan budaya, pelaku budaya dan seniman. Khusus untuk seniman dan institusi kultural yang terdampak secara ekonomi, UNESCO meluncurkan program ResiliArt untuk arena debat dan diskusi.

Selain membuat inisiatif-inisiatif untuk penanganan pandemi, UNESCO tetap berusaha menyelenggarakan agenda-agenda yang sudah direncanakan. Sebagian ada yang dimodifikasi atau ditunda sampai waktunya memungkinkan, atau dibatalkan sama sekali. Sidang-sidang *Executive Board* tetap dilaksanakan, baik secara virtual (sesi ke-6 *Special Session*) maupun secara *in-presentia* (sesi ke-209 sidang *Executive Board* reguler). Demikian juga dengan sidang ICC-MAB ke-32, sidang ini diselenggarakan secara *virtual* di *Headquarter* Paris (sebelumnya direncanakan di Abuja, Nigeria), dan mengesahkan 3 cagar biosfer Indonesia masing-masing, **Bunaken, Tangkoko-Minahasa, Karimunjawa-Jepara-Muria dan Merapi-Merbabu-Menoreh**. Di luar itu, sidang WHC yang direncanakan berlangsung di Fuzhou China ditunda ke tahun 2021.

Isu-isu utama yang dibahas sepanjang tahun 2020 ini adalah tentang Rencana Jangka Menengah UNESCO 2022-2029, dampak Covid-19 pada program-program UNESCO, dan metoda kerja *Executive Board* dalam masa pandemi/emergensi. Selain itu ada isu-isu luncuran tahun 2019, seperti amandemen Konstitusi.

UNESCO DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

ARAH, TUJUAN, SASARAN PENGEMBANGAN

Dr. Ananto Kusuma Seta

- Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing, Periode 2015-2020
 - Koordinator *Education for Sustainable Development* KNIU
-



Konstitusi mengamanatkan bahwa satu dari empat misi didirikannya negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bagi Indonesia, Pendidikan adalah ibu dari kemajuan peradaban manusia yang ditujukan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pahun 2045, ditargetkan taraf pendidikan rakyat mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, dimana: (1) Rata-rata lama sekolah minimal telah mencapai 12 tahun, atau berpendidikan minimal lulus SMA; (2) Partisipasi Pendidikan tinggi telah mencapai 60%; (3) Tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke atas sebesar 90%, dan; (4) Meningkatkan pendidikan vokasi yang berorientasi *demand-driven*.

Pentingnya UNESCO dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Indonesia
Pengembangan Pendidikan Indonesia tidak bisa lepas dari peran penting UNESCO, dan sebaliknya. Ada *symbiose mutualisme* antara keduanya.

Berdirinya UNESCO pada 16 Nopember 1945 didasarkan atas semangat untuk merekonstruksi sistem pendidikan pasca Perang Dunia II. Segera setelah berdiri, organisasi ini membentuk Komisi untuk menyiapkan program *Fundamental Education* yang menekankan pada memberantas buta huruf pada setengah penduduk dunia.

Pada 1945, ketika memproklamkan kemerdekaannya, lebih dari 90 persen rakyat Indonesia buta huruf. Mengingat adanya kesamaan misi, serta begitu penting dan mendesak amanat untuk mencerdaskan bangsa, Indonesia lebih dulu menjadi anggota UNESCO pada 27 Mei 1950, sebelum menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Juga menjadi catatan sejarah, bahwa Indonesia pernah keluar dari PBB di periode 1965-1967, namun Indonesia belum pernah keluar dari UNESCO.

Setelah menjadi anggota UNESCO, kemajuan perkembangan pendidikan Indonesia begitu cepat, terutama dalam menurunkan angka buta huruf melalui peningkatan akses layanan pendidikan.

International Literacy Day dan Program Wajib Belajar

Segara setelah menjadi anggota UNESCO, pada tahun 1951 pemerintah Indonesia menyusun program Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf. Kemudian setelah UNESCO memproklamirkan *International Literacy Day* pada tahun 1966, Presiden Indonesia mengeluarkan Inpres Nomer 10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia yang anggarannya berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300% dari sebelumnya.

Pada tahun 1984, saat memperingati hari lahir tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Pemerintah mencanangkan Wajib Belajar 6 tahun dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Hasilnya, partisipasi anak usia 6 sampai dengan 12 tahun, yang menikmati pendidikan mencapai lebih dari 90%.

Atas dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan, Presiden Soeharto mendapat penghargaan *Avicenna Medals* sebagai Tokoh Pendidikan Internasional, yang diberikan UNESCO pada 19 Juni 1993. Sejarah mencatat, penghargaan *Avicenna Medals* memiliki peringkat tertinggi bagi UNESCO dan Soeharto adalah presiden pertama penerima *Avicenna Medals*.

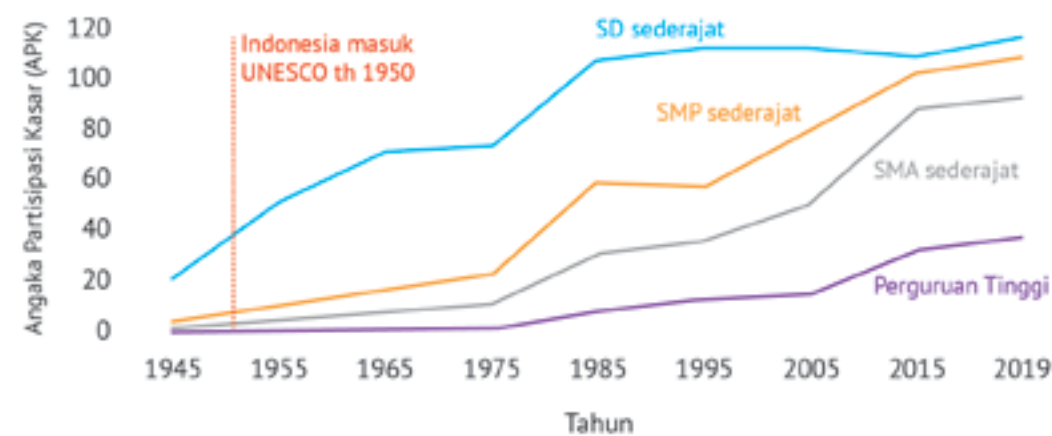
Penghargaan diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal UNESCO, ketika pertama kali berkunjung ke Jakarta. “Presiden Soeharto memiliki konsep universal tentang dunia pendidikan, karena mampu memaparkan secara rinci kendala yang dihadapi bangsanya, sekaligus memiliki konsep penanggulangannya,” kata Direktur Jenderal UNESCO, Prof. Federico Mayor.

Dakkar Framework Education for All dan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD

Pada tahun 2000 UNESCO melaksanakan *World Education Forum* di Dakar, Senegal, yang menghasilkan kesepakatan *Framework for Action* tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All – EFA*). Targetnya adalah pada tahun 2015 semua anak harus punya akses yang sama untuk menikmati layanan pendidikan dasar secara gratis. Target Pendidikan ini kemudian diintegrasikan ke dalam target dalam *Millenium Development Goals* (MDG) yang diadopsi oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Mempertimbangkan urgensi komitmen pendidikan ini, maka pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 1-11 Agustus Tahun 2002, dilakukan perubahan keempat pada UUD 1945. Pada Bab Pendidikan Pasal 31 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Amanah konstitusi ini semakin mempercepat akses layanan pendidikan, tidak hanya untuk pendidikan dasar, namun juga pendidikan menengah dan tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) siswa SD sederajat meningkat tajam dari 21,1% pada tahun 1945 menjadi 114,1% pada tahun 2019. Pada periode yang sama, APK SMP sederajat meningkat tajam dari 2,3% menjadi 106,9%. Demikian juga SM-sederajat, dari 0,6% menjadi 91,6%, dan Perguruan Tinggi dari 0,1% menjadi 36,7%.



Grafik Perkembangan APK siswa tiap jenjang pendidikan setelah masuknya Indonesia menjadi anggota UNESCO tahun 1950



Acara penyerahan Hamdan Prize 2008

Program-program UNESCO yang dilaksanakan di Indonesia

Banyak Program UNESCO yang dilaksanakan di Indonesia yang membawa kemajuan signifikan dan bahkan mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Di samping program-program yang berkaitan dengan pemberantasan buta huruf dan EFA yang telah diuraikan di atas, ada beberapa program lain UNESCO yang dilaksanakan di Indonesia. Diantaranya adalah:

Education for Sustainable Development (ESD)

Program ini telah diimplemetasikan di Indonesia sejak tahun 2000, yakni pengintegrasian konsep ESD pada sekolah formal. Berbagai upaya pengembangan dan integrasi konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ini dilakukan oleh berbagai pihak, dengan beragam metode, termasuk diberikan dalam pelatihan guru. Beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia, bahkan telah mengembangkan ESD dalam kurikulum pendidikan tingginya. Apalagi ESD merupakan amanat yang menjadi target Pendidikan 4.7 dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Global Citizenship Education (GCED)

Program ini bertujuan untuk memberdayakan peserta didik berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi tantangan global dan menjadi kontributor yang proaktif untuk dunia yang lebih damai, toleran, inklusif dan aman, untuk memenuhi target Pendidikan 4.7 dalam SDGs. Indonesia telah mengintegrasikan GCED ke dalam kurikulum sebagai bagian dari pendidikan karakter. perilaku jujur, tanggung jawab dan kepedulian termasuk toleransi dan saling pengertian. Hasil penelitian Universitas Melbourne antara 2008-2011 menunjukkan bahwa program GCED telah menghasilkan perubahan positif dalam kesadaran dan pemahaman tentang isu global pada siswa di Indonesia.

ASPnet

Ada 200 sekolah di Indonesia yang tergabung dalam *UNESCO Association School Project Network (UNESCO ASPnet)*. Tujuan utama ASPnet adalah untuk membangun budaya damai pada tingkat sekolah dan komunitasnya, pada tingkat nasional dan internasional, melalui kegiatan yang dilakukan bersama oleh siswa, dipandu oleh guru dan orangtua murid. Ada empat tema yang diangkat, yakni masalah dunia dan peran PBB, perdamaian dan Hak Asasi Manusia (HAM), belajar antarbudaya, dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD).



Delegasi Indonesia pada penyerahan *Hamdan Prize* 2008

Kontribusi Indonesia untuk UNESCO

Banyak sekali kontribusi Indonesia ke UNESCO, dua diantaranya adalah:

Sumbangan Indonesia USD 10 juta untuk UNESCO

Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sumbangan USD 10 juta untuk UNESCO. Sumbangan tersebut untuk mendukung keuangan UNESCO yang defisit sebesar USD 72 juta akibat keluarnya Amerika Serikat dan Israel dan ditariknya sumbangan mereka ke UNESCO setelah Palestina diterima menjadi anggota UNESCO.

Menjadi anggota Executive Board

Selama masa keanggotaannya di UNESCO, Indonesia telah menjadi anggota *Executive Board* sebanyak delapan kali (tahun 1954-1958, 1958-1962, 1976-1980, 1985-1989, 1995-1999, 2003-2007, 2011-2015, 2017-2021). Ada beberapa program dan inisiatif Indonesia yang menjadi contoh sukses bagi negara lain anggota UNESCO. Misalnya program pemberantasan buta huruf, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola dengan prinsip *school-based management*, serta komitmen negara dalam mendanai pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20% anggaran pembangunan baik di Pusat maupun di daerah.

MILESTONES PENDIDIKAN INDONESIA-UNESCO



Foto dokumen arsip UNESCO, pendidikan di Indonesia

Program keaksaraan dan Wajib Belajar

Pada tahun-tahun awal bergabungnya Indonesia di UNESCO fokus kerja sama pendidikan dengan UNESCO adalah untuk membantu Indonesia membangun pondasi sistem pendidikan melalui dukungan terhadap unsur-unsur pembelajaran yaitu guru, kurikulum, infrastruktur dan fokus subjek mata pelajaran *science education*, dalam bentuk *technical assistance (TA)* masukan dan analisis kebijakan pemerintah, program pelatihan, dan penyediaan peralatan pembelajaran.

Tahun 1951 pemerintah Indonesia menyusun program Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf. Sejumlah bantuan teknis UNESCO disalurkan untuk mendukung di sejumlah program diantaranya:

- *Community Education*, 1956-1962: pilot project di sejumlah provinsi di Indonesia termasuk penyediaan asistensi untuk *audio-visual workers*, *youth workers*, *writers*, *director of provincial training*, *workers of youth activities*, dan untuk *community education*, *community development* dan area lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- *Primary Teacher Training* untuk meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar pada periode tahun 1967-1968;
- *Rural Adult Education*, 1969: untuk mendorong konversi sekolah menjadi *community education* dengan kurikulum yang sesuai perencanaan proyek ke-aksaraan, pengembangan materi baca untuk komunitas buta aksara;
- *Agriculture Education* pada tahun 1969 untuk masyarakat pedesaan;
- Memberi masukan kebijakan program *Book Development*, 1974 khususnya dalam hal, pencetakan, penerbitan dan distribusi buku materi untuk program pemberantasan buta aksara dan pembelajaran siswa di Indonesia;
- *Project IMPACT* untuk pendidikan dasar yang dilakukan secara massal tahun 1974;

Program pemberantasan buta huruf diperkuat pada tahun 1966, melalui Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia. UNESCO memberi dukungan terhadap kebijakan ini melalui dukungan masukan analisis teknis kebijakan *The Indonesian 'INPRES' primary school building programme*, 1976.

Pada tahun 1984, Pemerintah mencanangkan Wajib Belajar 6 tahun dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Hasilnya, partisipasi anak usia 6-12 tahun, yang menikmati pendidikan mencapai lebih dari 90%. Atas dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan, Presiden Soeharto mendapat penghargaan *Avicenna Medals* sebagai Tokoh Pendidikan Internasional, yang diberikan UNESCO pada 19 Juni 1993.



Foto dokumen arsip UNESCO, pendidikan di Indonesia



12th Policy Dialogue Forum on "the Futures of Teaching", Dubai, Desember 2019

Program kerjasama bidang science education

Pada tahun 1953 hingga 1961, UNESCO secara intensif mendukung Indonesia dalam pembangunan pembelajaran *science education*, diantaranya:

- Program dukungan untuk pembelajaran dan pengajaran sains (ilmu alam, fisika, biologi dan kimia) termasuk pendirian, penyusunan kurikulum sains, panduan guru, transalasi, infrastruktur kelas sains dan pendirian pusat pengajaran sains;
- *Advisory body* untuk kementerian Pendidikan mengenai pengajaran sains dan proyek pengajaran sains di sejumlah *pilot project* di Bangli, Sumedang, Salatiga, Tasikmalaya, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bandung dan penyiapan teks panduan pengajaran dalam Bahasa serta untuk seluruh provinsi di Indonesia nantinya;
- Asistensi teknis (TA) untuk pengajaran sains bagi guru-guru sains di Bangli, Sumedang, Salatiga, Tasikmalaya, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bandung; *audiovisual aids*, pelatihan guru dan *education research*, TA untuk *Library Projects on library re-organization, university libraries, school libraries*, dan untuk *Fundamental Education*.
- Pelatihan guru-guru sains melalui PGSLP (satu tahun untuk guru-guru SMP dan SMA) dan pelatihan pengawas sekolah dasar (1957).
- Pendirian *classroom laboratories/science education centers* di Semarang, Malang, Palembang, Bukittinggi, Medan, Singaradja Bali, Bandjarmasin, Makassar, Tondano, dan Ambon;
- Dukungan konsultasi untuk rencana program pengajaran sains dan pengadaan infrastruktur pengajaran sains di Indonesia (umum) dan khususnya di Bandung;

Selain itu, dukungan teknis (TA) untuk pendidikan menengah dan penyusunan kurikulum (1955-1957) yaitu Program penggunaan "Bahasa Ibu" di semua sekolah, penguatan pengajaran mata pelajaran sejarah, penyediaan infrastruktur Pendidikan di tingkat sekolah menengah, pengajaran Bahasa Inggris dan rekomendasi

pendirian pusat pengajaran Bahasa. Program lainnya adalah untuk mengidentifikasi keterampilan vokasi untuk *mass education* dan pengajaran vokasi untuk masyarakat pekerja (*Purworejo Project*) pada tahun 1959-1960 dan pengembangan rencana dasar kurikulum untuk kementerian Pendidikan tahun 1959-1960.

Sedangkan program dukungan teknis (TA) untuk perguruan tinggi pada tahun 1958-1960 yaitu untuk Pendirian universitas Pendidikan untuk *Physics* (Andalas University, Bukittinggi), *Nuclear Physics* (UGM), *Economics* (UGM), *Physiology in Hasanuddin University*, 1958, *Mathematics at the Andalas University*, Bukittinggi, 1958, *Chemistry in University of North Sumatra*, 1957-1960, *University libraries in Gadjah Mada University* (UGM), 1956-1960, *Physics teaching in Faculty of Mathematics and Physics*, Gadjah Mada University (UGM) 1959-1962 memberi rekomendasi termasuk pendirian *microwave Research Laboratory*, *Division between Theoretical and Experimental Physicist*, *Lectures in Theoretical Physics for Students of Mathematics (Applied Mathematics)*, *UNESCO Fellowships*.

Penyusunan kurikulum pendidikan nasional

UNESCO dan UNDP mendukung program *National Education Planning, Evaluation and Curriculum Development* dengan alokasi dana sebesar USD 3 juta selama periode 1979-1983, dengan sasaran diantaranya mendirikan institusi riset untuk kebijakan Pendidikan (Balitbang dikbud) dan pengembangan Kurikulum Pendidikan Nasional.

Proyek pengembangan kurikulum dilakukan melalui *development school project* atau lebih dikenal dengan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) di delapan (8) intitusi keguruan/IKIP yaitu di Bandung, Jakarta, Malang, Padang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Ujung Pandang yang dimulai pada tahun 1972.

Hasil riset eksperimen di delapan sekolah proyek menghasilkan perbedaan yang signifikan, kurikulum

baru menggunakan sistem modul dan berfokus kepada *student-activity oriented and self-instructional*, sedangkan kurikulum nasional berfokus pada *course work directed by teacher*. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, lahirlah kurikulum pendidikan pada tahun 1975, yaitu kurikulum yang berorientasi pada tujuan, menggunakan pendekatan *integrative*, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa, penekanan pada efisiensi dan efektivitas, menggunakan pendekatan sistem instruksional dan penekanan kepada stimulus respons (rangsang-jawab) dan latihan (*drill*).

Convention against Discrimination in Education (1960)

UNESCO *Convention against Discrimination in Education* telah disahkan di UNESCO *Headquarter* pada tanggal 14 Desember 1960. Konvensi bertujuan melindungi hak-hak dasar individu untuk memperoleh akses untuk pendidikan.

Indonesia telah menerima dan menjadi negara pihak di konvensi ini pada tanggal 10 Januari 1967, sehingga berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan konvensi di Indonesia secara berkala kepada UNESCO.

Convention on Technical and Vocational Education (1989)

UNESCO *Convention on Technical and Vocational Education* telah disahkan di UNESCO *Headquarter* pada tanggal 10 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk menetapkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan Teknik untuk dimasukkan dalam sistem Pendidikan untuk peningkatan kemampuan individu dalam hal pengetahuan dan ketrampilan khusus untuk sektor industri, pertanian, perdagangan dan sektor lainnya yang membutuhkan ketrampilan teknis.

Indonesia telah menjadi negara pihak di konvensi ini pada tanggal 30 Januari 2008 dan telah meratifikasi konvensi melalui Peraturan Presiden No 102 Tahun 2007,

mengenai Pengesahan Konvensi mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan. Dengan begitu, Indonesia perlu secara aktif menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan konvensi kepada UNESCO.

UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)

Jejaring Sekolah UNESCO (*ASPnet*) menghubungkan lembaga pendidikan di seluruh dunia dengan tujuan menumbuhkan keinginan untuk menciptakan perdamaian pada diri anak-anak dan remaja. Lebih dari 11.500 sekolah anggota *ASPnet* di 182 negara bekerja sama untuk mendukung penciptaan pemahaman internasional, dalam rangka perwujudan perdamaian, dialog antarbudaya, pembangunan berkelanjutan, dan praktik pendidikan yang berkualitas.

ASPnet –pendorong inovasi dan kualitas dalam pendidikan- diakui sebagai alat yang efektif untuk mencapai target 4.7 tentang Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED) dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 - Pendidikan 2030.

ASPnet menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi yaitu sebagai laboratorium ide, forum untuk meningkatkan kapasitas, pengajaran inovatif dan pembelajaran partisipatif dan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya untuk terhubung dan bertukar pengalaman, pengetahuan, dan praktik yang baik dengan sekolah, individu, komunitas, pembuat kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan. Program *ASPnet* yang masih berjalan saat ini adalah *Arigou International*, *Generation Global* dan *International Education and Research Network (iEARN)*.

Jumlah institusi pendidikan di Indonesia yang telah terdaftar sebagai anggota *ASPnet* adalah 2 institusi Pendidikan Anak Usia Dini, 21 sekolah dasar, 46 sekolah menengah, 4 institusi pelatihan guru, dan 7 sekolah vokasi dan teknik.

Education for Sustainable Development (ESD)

Konsep *Education for Sustainable Development* telah diimplemetasikan di Indonesia sejak tahun 2000, yakni pengintegrasian konsep ESD pada sekolah formal dan melalui kurikulum. Berbagai upaya pengembangan dan integrasi konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ini dilakukan oleh berbagai pihak, dengan beragam metode, termasuk diberikan dalam pelatihan guru. Beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia, bahkan telah mengembangkan ESD dalam kurikulum pendidikan tingginya. ESD merupakan amanat yang menjadi target Pendidikan 4.7 dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Terkait peta jalan *Education for Sustainable Development Agenda 2030*, Delegasi Tetap Indonesia secara aktif terlibat dalam pembahasan *Education for Sustainable Development* (ESD) dari *Global Action Programme (GAP) ESD*. Berdasarkan UNESCO *mid-term review*, implementasi GAP telah mendapatkan evaluasi yang positif dan perlu dilanjutkan guna mendukung pencapaian Target 4.7 SDG 4.

Penempatan Tenaga Ahli Indonesia Pada International Teachers' Task Force

International Task Force on Teachers for Education 2030, umumnya disebut *Teacher Task Force* (TTF) terbentuk tahun 2008 sebagai tindak lanjut Deklarasi Oslo pada 16-18 Desember 2008. TTF adalah aliansi internasional pertama terdiri dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan negara, organisasi lintas pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, lembaga tingkat internasional dan organisasi sektor swasta atau yayasan, bersama mengatasi kesenjangan guru untuk memenuhi Agenda Pendidikan 2030 yang tercantum di dalam UNESCO *Sustainable Development Goal 4 targets* (SDG 4 *Education*).

Sejalan dengan Visi TTF, “mengajar perlu menjadi profesi yang berharga dan dihargai sehingga setiap peserta didik berhak mendapatkan guru yang berkualifikasi, termotivasi dan diberdayakan dalam sistem pendidikan yang memiliki sumber daya yang baik, efisien dan diatur secara efektif. Maka misi TTF adalah memobilisasi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan dan mengembangkan profesi guru dan proses pembelajaran yang bermutu, TTF bertindak sebagai katalisator di tingkat global, regional dan nasional melalui advokasi, kreasi dan berbagi pengetahuan, serta dukungan dan keterlibatan negara anggotanya”.

Indonesia adalah salah satu negara penggagas Deklarasi Oslo yang telah dan terus berperan aktif sejak awal berdirinya TTF. Di fase awal berdirinya TTF, Indonesia diwakili oleh Prof. dr. Fasli Djalal, Ph.D (Wakil Menteri Pendidikan Nasional), Sumarna Surapranata, Ph.D (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional) dan Dr. Ananto Kusuma Seta (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional). Secara bergantian, mereka berperan sebagai Ketua Komite Pengarah (*co-Chair Steering Committee*) TTF periode 2010-2013 bersama dengan *Education Commission*. Indonesia tetap di dalam Komite Pengarah TTF sebagai anggota selama periode 2013-2015. Pada tanggal 13-14 September 2011, Indonesia menjadi tuan rumah dilaksanakannya kegiatan tahunan *Flagship TTF*, yaitu *International Policy Dialogue Forum (PDF)* ke-3 di Bali dengan mengusung tema “Mengembangkan dan Menerapkan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh untuk *Education For All (EFA)*: Mutu dan Kesetaraan Guru”.

Bentuk komitmen dukungan Indonesia pada TTF sebagai aliansi global untuk guru, dibuktikan juga dengan dikirimkannya ketenagaan ahli pendidikan Indonesia (*secondment*) sebagai dukungan bantuan ketenagaan sumber daya manusia untuk Sekretariat TTF sejak 2010. Inisiatif ini telah terbukti memberikan manfaat bagi kedua pihak, yaitu Sekretariat TTF di Kantor Pusat UNESCO dan Republik Indonesia. Secara garis besar kebermanfaatan dimaksud adalah dalam hal peningkatan administrasi dan manajemen *data base* sekretariat TTF, mendukung pengelolaan program pendidikan yang dirumuskan TTF bersama negara dan organisasi anggota termasuk Indonesia, pertukaran sumber daya dan praktik terbaik Indonesia, serta pengakuan dunia Internasional terhadap prestasi dan dedikasi baik individu, kelembagaan, dan Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan khususnya difokuskan pada guru dalam berbagai kegiatan internasional yang dirayakan oleh TTF dan UNESCO.

Daftar Tenaga Ahli Indonesia (Seconded)

Nama	Periode	Penempatan
Gogot Suharwoto	2010-2011	UNESCO HQ
Puji Iryanti	2012-2014	UNESCO HQ
Lukmanul Hakim	2016-2018	UNESCO HQ
Indriyati Rodjan	2016-2018 dan 2019	UNESCO-IICBA Strengthening Teacher Developement in Africa, di Ethiopia
Apriyagung	2018-2021	UNESCO HQ

Selain capaian-capaian di atas, berikut ini adalah catatan partisipasi Republik Indonesia dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan TTF:

2010-2011

1. Ketua Komite Pengarah (*Co-Chair Steering Committee*) TTF;
2. Tenaga ahli Indonesia berperan sebagai *Acting Head of TTF Secretariat*;
3. Indonesia menjadi tuan rumah *Policy Dialogue*



Penyerahan Hamdan Prize 2008 kepada The Diklat Berjenjang Project dari Indonesia

Forum ke-3 di Bali, 13-14 September 2011.

2012-2014:

1. Tahun 2013, wakil *focal point* Indonesia Dr. Poppy Dewi Pupitawati, Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan menghadiri *6th Policy Dialogue Forum International Task Force on Teachers for EFA* di KinsHasa, Republic Democratic of Congo;
2. Desember 2014, Indonesia diwakili oleh Elvira (Ditjen GTK) dan Dr. Sumarno (Kepala PPPPTK BOE) pada forum *7th Policy Dialogue Forum International Task Force on Teachers for EFA* di Rabat, Morocco dengan paparan “*Professional Status of Teachers: Case in Indonesia*”.

2016-2018:

1. Kemenangan UNESCO-Hamdan Prize atas program Indonesia yang didedikasikan untuk guru anak usia dini oleh Dit. Paud dan Dikmas, Ditjen GTK tahun 2018;
2. Partisipasi pembicara Indonesia, Dr. Gatot Hari Priowirjanto, pada Seminar *Cross Border Education* yang diadakan UNESCO IICBA di Markas Besar Africa Union di Addis Ababa pada bulan April 2017;
3. Fasilitator Indonesia pada kegiatan *National Capacity Building Workshop on Prevention of Violence Extremism through Education* di Juba, Sudan Selatan pada bulan Oktober 2018.

2018-2020:

1. Keterlibatan tenaga ahli Indonesia selaku *reviewer* pada penyusunan buku *FAWE's Gender Responsive Pedagogy: A Toolkit for Teachers and Schools* yang dipergunakan sebagai salah satu referensi pendidikan kesetaraan gender di negara negara Afrika. Buku ini dipublikasikan oleh UNESCO IICBA pada takhir tahun 2019;
2. Pertemuan Tingkat Regional Asia-Pacific tanggal



Panel Diskusi saat 12th Policy Dialogue Forum di Dubai

9-11 Oktober 2019 di New Delhi, India dengan judul “*Regional Consultation and Expert Group Meeting on Developing an International Guidance Framework for Professional Teaching Standards*”.

3. Partisipasi Kepala Sekolah Indonesia di “*Roundtable Discussion for the Principals and Teachers Session*” pada kegiatan *12th Policy Dialogue Forum* di Dubai, UAE.
4. Kontribusi atau sumbangsih tulisan oleh Kepala Sekolah Indonesia: Pengalaman Menyikapi Penutupan Sekolah karena Pandemi Covid-19 dan (akan) Kembali Dibukanya Sekolah. *Supporting teachers in back-to-school efforts – A toolkit for school leaders - Second edition including new tips and emerging practices*.
5. TTF bersama UNESCO merayakan Hari Guru se-Dunia (*World Teachers' Day*). Mengusung tema “*World Teachers' Day 2020 - Teachers: Leading in crisis, reimagining the future*”. Indonesia mengangkat Program nasional dan kebijakan Kemendikbud melalui presentasi oleh Dirgen GTK, Dr. Iwan Syahril, Phd.
6. Masih dalam WTD 2020, TTF dan UNESCO memilih dan memberikan apresiasi kepada Guru Indonesia, Ibu Sri Sulistiyani Wakil Kepala Sekolah SMA Balung Jawa Timur, untuk memberikan *Opening Remark* di WTD 2020 dikarenakan antusiasme dan kontribusinya serta kepemimpinannya dalam bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan.

World Education Forum (WEF)

Indonesia aktif di dalam *World Education Forum* (WEF) yang diselenggarakan pada tahun 2015 di Incheon, Republik Korea Selatan. Pada forum tersebut, dibahas rencana adopsi *draft Education 2030 Framework for Action (FFA)*, yang kemudian diadopsi pada Sidang Umum UNESCO ke-38 tahun 2015. Pada Sidang Umum tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI hadir pada acara pengadopsian dokumen *Education 2030 FFA* dan menyampaikan pernyataan singkat tentang komitmen Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan sebagai salah satu prioritas nasional.

Keberhasilan Surabaya Menjadi Anggota UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC)

Surabaya berhasil diterima sebagai salah satu anggota UNESCO *Global Network of Learning Cities* (GNLC) berdasarkan surat Direktur UNESCO *Institute for Lifelong Learning* (UIL) pada tanggal 3 Nopember 2016. Surabaya mendapatkan sertifikat GNLC tertanggal 27 Oktober 2016.

Surabaya merupakan kota pertama di Indonesia yang diterima sebagai anggota UNESCO GNLC. Pada tahun 2017, Surabaya termasuk salah satu dari 16 kota di dunia yang menerima UNESCO *Learning City Award* 2017. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, secara langsung menerima penghargaan ini pada acara *The Third International Conference on Learning Cities* di Cork, Irlandia, pada tanggal 18-20 September 2017. Sebagai catatan, 16 kota yang menerima penghargaan tersebut adalah Bristol (Inggris), Camara de Lobos (Portugal), Contagem (Brazil), Gelsenkirchen (Jerman), Giza (Mesir), Hangzhou (RRT), Larissa (Yunani), Limerick (Irlandia), Mayo-Baleo (Kamerun), N'Zerekore (Guinea), Okayama (Jepang), Pecs (Hungaria), Suwon (Republik Korea Selatan), Tunis (Tunisia), Villa Maria (Argentina), dan Surabaya (Indonesia).

Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualification

Konvensi Global untuk Pengakuan Kualifikasi Pendidikan Tinggi ini dirancang untuk mempromosikan akses inklusif bagi penilaian kualifikasi pendidikan tinggi untuk memfasilitasi mobilitas internasional mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan melalui mekanisme yang adil, transparan dan *non-discriminative*. Konvensi Global diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Negara pertama yang telah meratifikasi Konvensi ini adalah Norwegia.

Dokumen *Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education* telah diadopsi saat Sesi ke-40 UNESCO General Conference pada tanggal 25 November 2019.

Dengan diadopsinya Konvensi, maka Pemri perlu memutuskan untuk ikut tidaknya Indonesia menjadi negara pihak pada konvensi ini. Salah satu catatan dan rekomendasi pada proses negosiasi lalu, yaitu apabila Pemri memutuskan meratifikasi kedua konvensi ini, Hal penting yang perlu diperhatikan adalah Indonesia berkewajiban untuk mempersiapkan secara struktur Institusi Pelaksanaan Nasional yang di dalamnya ada sebuah *National Information Center* (NIC).

UNESCO Mobile Learning Week

Mobile Learning Week (MLW) merupakan salah satu program *Flagship ICT* UNESCO di bidang pendidikan dengan tujuan untuk membantu para pengambil

keputusan dan pembuat perencanaan dalam menghadapi perkembangan teknologi baru dan juga kontribusinya terhadap sistem pendidikan.

Indonesia telah berpartisipasi pada kegiatan *UNESCO Mobile Learning Week 2018- Skills for a Connected World* yang diselenggarakan pada tanggal 26-30 Maret 2018 di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis. Delegasi Indonesiat terdiri dari unsur Pustekkom, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dan *SEAMO Regional Open Distance Learning Centre* (SEAMOLEC).

Pada UNESCO MLW tahun 2020 (bulan Maret), Indonesia telah mengajukan dua platform pembelajaran digital untuk hadir yaitu, Rumah Belajar (Kemdikbud) dan *Ruangguru.com*. Namun karena krisis kesehatan global, COVID-19, kegiatan UNESCO MLW ditunda pelaksanaannya. Sehingga UNESCO MLW 2020 dengan tema “*Beyond Disruption: Technology Enabled Learning Futures*” baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan partisipasi Indonesia oleh *Ruangguru.com*.

UNESCO King Sejong Literacy Prize

UNESCO *King Sejong Literacy Prize* dari UNESCO dibuat pada tahun 1989 atas sponsor Pemerintah Republik Korea Selatan. Penghargaan diberikan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk kontribusinya dalam memberantas buta huruf/keaksaraan melalui penciptaan, pengembangan dan penyebaran bahasa ibu di negara berkembang. *Prize* terdiri dari sejumlah USD 20.000, satu medali perak dan satu sertifikat.

Pada tahun 2012, Penghargaan ini diberikan oleh UNESCO kepada Indonesia yang dinilai berhasil mengurangi jumlah buta huruf lebih cepat daripada waktu yang ditargetkan, yakni 7,5 juta orang pada 2015. Namun, Indonesia sudah bisa mencapainya pada 2010 melalui pendekatan budaya membaca dan program kewirausahaan, terutama kepada kepada 3 juta kaum perempuan. UNESCO juga melihat tingkat literasi Indonesia pada tahun 2009 sudah mencapai 93%.

UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

Penghargaan UNESCO untuk Pendidikan Perempuan dan Perempuan diberikan kepada individu, institusi dan organisasi yang telah memberi kontribusi untuk memajukan pendidikan perempuan dan perempuan. Ini adalah Penghargaan UNESCO pertama untuk mempromosikan pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penghargaan disponsori oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Hadiah ini diberikan setiap tahun kepada dua pemenang dan terdiri dari penghargaan masing-masing sebesar USD 50.000 untuk membantu kontribusi di bidang pendidikan anak perempuan dan perempuan. Penghargaan tersebut pertama kali diberikan oleh Direktur Jenderal UNESCO pada tahun 2016.



Acara penyerahan Hamdan Prize 2008

Pada bulan Juni 2016, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) berhasil meraih penghargaan UNESCO *Prize for Girls’and Women’s Education*. Selain Indonesia, *Female Students Network Trust* dari Zimbabwe juga menerima penghargaan tersebut. Masing-masing penerima penghargaan dari Pemerintah RRT mendapatkan hadiah sebesar USD 50.0000 untuk mendukung kelanjutan program mereka.

UNESCO-Hamdan Prize (2017-2018 Edition)

Penghargaan UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum untuk Praktik dan Kinerja Luar Biasa dalam Meningkatkan Efektivitas Guru diciptakan pada tahun 2008 untuk mendukung peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dalam mencapai tujuan Pendidikan untuk Semua, yang merupakan salah satu prioritas UNESCO .

Diberikan setiap dua tahun, Prize ini disponsori oleh Yang Mulia Sheikh Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum dari Uni Emirat Arab. Jumlahnya mencapai USD 300.000, yang dibagi rata antara tiga pemenang yang proyeknya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas guru di seluruh dunia.

Indonesia telah menerima penghargaan UNESCO-*Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize for outstanding Practice and Performance in EnHancing the Effectiveness of Teachers (2017-2018 edition)* untuk proyek “Diklat Berjenjang” (Kemendikbud) pada Peringatan Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober 2018 di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis.

UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development

Penghargaan UNESCO-Jepang untuk ESD, yang didanai oleh Pemerintah Jepang, terdiri dari tiga penghargaan tahunan sebesar USD 50.000 untuk setiap penerima. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Direktur Jenderal UNESCO pada November 2015.

Para pemenang penghargaan dan penghargaan mengakui peran pendidikan dalam hubungannya dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada periode 2015-2018, Indonesia meraih dua (2) penghargaan UNESCO-*Japan Prize on Education for Sustainable Development* (ESD), yaitu:

- Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan



Penyerahan 2019 UNESCO Confucius Prize for Literacy kepada BasaBali, oleh Stefania Gianini, Wakil Direktur untuk Pendidikan UNESCO

Informal (P2PAUDNI) oleh Jayagiri Centre, Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015

- Program *Environmental Education for the Heart of the Coral Triangle* oleh Yayasan Kalabia Indonesia (YaKIn) tahun 2018.

Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah sebesar USD 50.000 dari Pemerintah Jepang untuk pengembangan program lebih lanjut.

UNESCO Confucius Prize for Literacy

Penghargaan UNESCO *Confucius Prize for Literacy* didirikan pada tahun 2005 dan disponsori oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk menghormati tokoh pendidikan, Confucius.

Penghargaan diberikan kepada individu, pemerintah atau lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berkontribusi di bidang literasi untuk memberikan akses pendidikan literasi bagi orang yang buta aksara di pedesaan dan remaja putus sekolah, terutama wanita dan anak perempuan. Masing-masing hadiah terdiri dari USD 20.000, medali, dan diploma. Selain itu, pemenang akan melakukan kunjungan studi ke lokasi proyek literasi di Tiongkok.

Pada tahun 2019, Yayasan BASABali Wiki berhasil mendapatkan penghargaan UNESCO *Confucius Prizes for Literacy*, karena dinilai pendekatan inovatif yang digunakan BASABali Wiki untuk mempromosikan keaksaraan, dengan menggunakan bahasa lokal d.h.i bahasa Bali untuk melengkapi bahasa nasional dan internasional.

SURABAYA LEARNING CITY

Pada *International Conference on Learning Cities (ICLC)* ke-2 di Cork Republik Irlandia telah menganugerahi Surabaya sebagai UNESCO *Global Network of Learning Cities* tahun 2017. Ibukota Jawa Timur tersebut menjadi perwakilan pertama dari Indonesia dalam Jaringan Global Kota Belajar UNESCO bersama 16 kota lainnya.

Surabaya dinilai UNESCO mempunyai ambisi besar dalam memobilisasi sumber dayanya secara efektif di setiap sektor dalam mempromosikan pembajaran inklusif dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Predikat *Learning City* diperoleh tak lepas dari peran serta aktif *stakeholder* mulai swasta, masyarakat, media dan pemerintah kota Surabaya. Direktur UNESCO *Institute for Lifelong Learning (UIL)* Arne Carlsen berharap penghargaan UNESCO *Learning City* akan memotivasi kota-kota lain di seluruh dunia untuk terus berupaya mencapai pembangunan secara menyeluruh dalam pembelajaran seumur hidup. Konsep Kota Belajar Surabaya berhasil mengajak masyarakat untuk berperan aktif. Di seluruh kampung, ditetapkan waktu belajar anak. Meskipun tidak berada di sekolah, anak dapat tetap belajar secara *non-formal* dalam bentuk permainan. Di setiap kompleks Balai Pemuda dibuka Rumah Bahasa dan Rumah Matematika. Pemerintah kota membangun Taman Baca Masyarakat dan perpustakaan di 1.500 tempat di taman dan di Balai RW. UNESCO menilai Surabaya mampu merevitalisasi pembelajaran dalam keluarga dan masyarakat. Wajib membaca selama 15 menit per hari telah berhasil meningkatkan minat baca dari 28% pada 2009 menjadi 60% pada 2015 dan jumlah pembaca di perpustakaan meningkat tiga kali lipat mencapai 4,7 juta orang pada tahun 2015.

Konsep belajar diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pondok Sosial Kalijudan anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan bekal pelatihan sesuai minat, seperti melukis. Surabaya memberikan fasilitas pembelajaran untuk dan di tempat kerja serta memperluas penggunaan teknologi pembelajaran modern. Pemerintah bekerjasama dengan media dan swasta membangun *Broadband Learning Center (BLC)* di 50 lokasi untuk dimanfaatkan warga untuk belajar komputer dan membangun *co-working* bernama Koridor yang ditujukan pada pelaku industri kreatif dan *start up*.

UNESCO DAN PENGEMBANGAN SAINS INDONESIA

UNESCO DAN PENGEMBANGAN SAINS ALAM INDONESIA

Prof. Dr. Enny Sudarmonowati

- Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI (2014-2019)
- Ketua Komite Nasional MAB Indonesia (2014-2019)
- Chair ICC MAB UNESCO (2018-2020)



Pembangunan dan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), harus sesuai dengan RPJMN dan peraturan yang berlaku di Indonesia lainnya, selain keselarasan dengan Agenda Riset Nasional (ARN), RIRN (Rencana Induk Riset Nasional), serta Prioritas Riset Nasional (PRN). Fokus riset nasional tertuang dalam PRN 2020-2024 yakni pada bidang-bidang:

1. Pangan,
2. Energi,
3. Kesehatan,
4. Transportasi,
5. Produk Rekayasa Keteknikan,
6. Pertahanan Keamanan,
7. Kemaritiman,
8. Sosial Humaniora,
9. Bidang riset lainnya yang menyangkut multidisiplin dan *integrated*.

Sementara itu, program sains UNESCO merujuk Mid-Term Strategy. Untuk periode 2014-2021, sektor sains alam UNESCO memiliki 6 *Main Line Actions* (MLA) yaitu:

1. *Strengthening STI policies, governance and the science-policy-society interface;*
2. *Building institutional capacities in science and engineering;*
3. *Promoting knowledge and capacity for protecting and sustainably managing the ocean and coasts;*
4. *Fostering international science collaboration for earth systems, biodiversity, and disaster risk reduction;*
5. *Strengthening the role of ecological sciences and biosphere reserves;*
6. *Strengthening freshwater security.*

Kerjasama Indonesia-UNESCO, dengan demikian, terkait dengan bidang 7 (kemaritiman) dan bidang riset kebumihan, lingkungan hidup dan kebencanaan yang terangkum dalam bidang 9. Kerja sama tersebut sudah sangat baik, namun perlu dipertajam dan ditingkatkan, terutama kegiatan terintegrasi di lokasi yang ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer atau Global geopark untuk pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya UNESCO untuk pengembangan kerja sama sains di Indonesia

Mengacu pada peraturan, kebijakan, program nasional Indonesia pada periode sebelum dan sesudah ada Jakstranas Iptek hingga RPJMN 2020-2024, pengembangan sains dan teknologi harus dilakukan dengan bekerja sama. Kerja sama dengan UNESCO, sebagai organisasi PBB yang menangani sains dapat berupa pendanaan yang dapat digunakan sebagai “seed money” untuk penelitian peneliti muda dan pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan, maupun berupa peningkatan kapasitas dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah internasional melalui jaringan program-program yang ada di UNESCO serta kegiatan riset bersama yang menghasilkan publikasi ilmiah. Kerja sama atau hubungan yang dibina UNESCO dengan badan dunia lain dan mitra penting termasuk industri/swasta seperti L'Oreal, merupakan nilai tambah.

Pada periode awal tahun 2000, program dan kegiatan UNESCO Jakarta Office di bidang ilmu pengetahuan alam banyak menangani pelestarian ekosistem dan keragaman hayati di kawasan konservasi, misalnya di kawasan yang menjadi zona inti cagar biosfer seperti Cagar Biosfer Pulau Siberut dan Cagar Biosfer Gunung Leuser. Hasil kegiatan riset ini telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang diacu banyak pihak di dunia. Beberapa publikasi dan aspek yang dipublikasikan hasil kerja sama penelitian dengan institusi penelitian di Indonesia termasuk LIPI dari tahun 2006 hingga 2019 sebagai berikut: pada tahun 2006-2007: 1) *Community Based Disaster Management*; 2) Rencana Strategis (Renstra) Taman Nasional Gunung Leuser 2006-2010; 3) *25 years of the Siberut Biosphere Reserve “Saving Siberut and its unique cultural and natural heritage”*; 4) Flora Pegunungan Jawa, kerja sama LIPI dan UNESCO; 4) Gempa Bumi dan Tsunami. *Southeast and East Asian Ecotones*, Ecotone Phase I, 1992-2001: *A Collaborative MAB Programme*, LIPI dan UNESCO.

Beberapa publikasi terkait DRR (*Disaster Risk Management*) dan yang menysasar generasi muda sangat baik untuk diacu yaitu: *A Toolkit on Youth and Young Professionals in Science, Engineering, Technology, and Innovation for Disaster Risk Reduction*. Publikasi lain antara lain:

1. *Climate Change and Successful BR Implementation (2012)*,
2. *Traditional Knowledge in Coastal Ecosystem (2013)* yang berdasarkan kegiatan tahun 2011 yang khusus *Local and Indigenous Knowledge (LINK)* terkait bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim di Indonesia, di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk ketahanan (*resilience*) komunitas;
3. *Ecolabelling*;
4. *BR Management*;
5. Studi terkait hidrologi dan faktor sosial dan ekonomi air dan sanitasi di Medan (Sumut);
6. *E-learning* terkait kebijakan *Renewable Energy* dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan;
7. *Water Science: guidelines for flood and drought*

8. *disaster management*;
8. *Urban Water*;
9. *Karst*;
10. Teknologi ruang angkasa;
11. Publikasi terkait *visibility, branding and communication strategy of BR (2016)*;
12. *Ecotourism*,
13. *Guidebook* tentang Taman Nasional.

Program UNESCO di Indonesia

Program UNESCO di Indonesia terkait ilmu pengetahuan alam mencakup *Man and Biosphere* (MAB), *Intergovernmental Oceanography Commission* (IOC), (*Intergovernmental Hydrology Programme*) IHP. Selain itu, ada APCE (*Asia Pacific Center for Ecohydrogy*) yang merupakan *Center Category 2* untuk mendukung IHP yang diperkuat dengan *regional training centre* MaRBEST serta program UNESCO *Global Geopark*. Program BRES (*Biosphere Reserves for environmental and economic security*) UNESCO pada tahun 2009 sangat baik memadukan kegiatan di cagar biosfer untuk mengatasi perubahan iklim dan pengurangan kemiskinan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertindak sebagai *focal point* lima (5) program UNESCO, tiga (3) diantaranya dalam bidang sains alam (*natural sciences*) yaitu: (MAB), (IOC), (IHP). Walaupun terkendala keterbatasan dana, dengan menggunakan anggaran program yang dapat mengait dengan program UNESCO, Indonesia melalui lembaga penelitian, perguruan tinggi dan institusi lainnya bersama *focal points* program UNESCO di Indonesia, dapat berkiprah nyata dan berkomitmen tinggi.

Program MAB di Indonesia resmi dilaksanakan sejak tahun 1972, setahun setelah Program MAB dibentuk di UNESCO tahun 1971. Ketua Komite Nasional MAB Indonesia adalah *ex officio* Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI. Untuk IOC, Pemerintah Indonesia menjadi anggota Komisi Oseanografi Antar Bangsa (IOC-UNESCO) sejak tahun 1963 dan sejak tahun 1993 Indonesia secara aktif berperan sebagai anggota *Executive Council* bersama dengan 40 negara anggota lainnya. Tahun 2001, Panitia Nasional Komisi Oseanografi antarnegara (IOC-UNESCO) ada di bawah arahan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian-LIPI yang juga sebagai *focal point* Program IHP.

Program MAB-Indonesia

Program MAB Indonesia yang utama adalah penetapan cagar biosfer Indonesia menjadi *Biosphere Reserves* UNESCO dan menjadi bagian dari *World Network of Biosphere Reserves*. Penetapan ini dimaksudkan untuk perlindungan dan pelestarian cagar biosfer sehingga dapat digunakan untuk:

1. tempat konservasi biodiversitas (genetik, spesies dan ekosistem);
2. sebagai laboratorium alam untuk pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pembangunan sumber daya alam, sosial budaya, sosial ekonomi



Rapat persiapan sidang MAB-ICC ke-31 di KBRI Paris, 2019

- dan peningkatan kapasitas;
3. sebagai tempat pembelajaran untuk kesetaraan dan keadilan;
 4. pemanfaatan cagar biosfer sebagai pembangunan berkelanjutan;
 5. sebagai penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Walaupun telah ada sejak tahun 1972, perkembangan pelaksanaan MAB di Indonesia baru terasa sejak 2009. Pengembangan program mengikuti strategi pengembangan MAB UNESCO, mulai dari periode Seville – 1995, Rencana Aksi Madrid (MAP) 2008- 2013 sampai Strategi baru 2016-2025 yaitu Rencana Aksi Lima (LAP). Saat ini Indonesia memiliki 19 cagar biosfer UNESCO.

Roadmap pengembangan cagar biosfer di Indonesia dibagi dalam beberapa periode: periode jangka pendek 2015-2019; periode jangka menengah 2020-2024 dan periode jangka panjang 2025-2045. Target jumlah cagar biosfer Indonesia berjumlah 25 pada 2025 dan mencapai 50 hingga tahun 2045 berdasarkan jumlah kawasan konservasi yang ditetapkan oleh KLHK (54 taman nasional yang dapat dijadikan zona inti, walaupun satu cagar biosfer dapat mempunyai lebih dari satu taman nasional karena berdekatan dalam zonasi).

Program IOC-UNESCO Indonesia

Kegiatan IOC-UNESCO Indonesia memiliki tujuan antara lain:

1. Membantu pemerintah Republik Indonesia dalam kebijakan riset kelautan yang bersinergi dengan riset ditingkat regional maupun global;
2. Mensinkronkan program-program riset kelautan di tingkat nasional;
3. Mengembangkan kerjasama riset diantara Negara-negara anggota IOC-UNESCO dalam kerangka pertukaran ilmu pengetahuan, peningkatan kapasitas riset dan penyadaran publik.

Tahun 1965, IOC mulai program regional di *Western Pacific* lalu 1977 *Regional Committee* untuk *Western Pacific* didirikan. Indonesia sebagai anggota di bawah koordinasi WESTPAC sudah terlibat dan memanfaatkan program WESTPAC yang mencakup: pengembangan dan promosi program riset *oceanographic* internasional; pengembangan pendidikan dan pelatihan dan bantuan teknis; tukar menukar data kelautan, pengetahuan dan informasi; dan perencanaan efektif sistem observasi laut global. Kegiatan Sekretariat Nasional IOC UNESCO telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait pertemuan ditingkat nasional dan regional, serta pelaksanaan pelatihan dan pengusulan peserta pelatihan.

IHP sebagai platform UNESCO yang berkaitan dengan masalah air menuju ketahanan air dan pembangunan keberlanjutan. IHP UNESCO berdiri tahun 1975 dengan 8 fase-nya pada rentang waktu 1975-1980 hingga 2014-2021 (fase 1: 1975-1980, fase 2: 1981-1983, fase 3: 1984-1989, fase 4: 1990-1995, fase 5: 1996-2001, fase 6: 2002-2007, fase 7: 2008-2013, fase 8: 2014-2021) yang masing-masing fase mempunyai fokus/tema berbeda-beda. Komite Nasional Indonesia untuk IHP didirikan pada fase I yaitu periode 1975 - 1980. IHP Indonesia ditangani oleh kementerian atau insitusi tertentu sebagai koordinator yaitu:

1. Kementerian PUPR: bencana terkait air dan perubahan hidrologi;
2. Kementerian ESDM: air tanah di lingkungan yang berubah;
3. Kementerian LHK: menangani kelangkaan air dan kualitas;
4. APCE-UNESCO LIPI: Ekohidrologi, merakit harmonisasi untuk keberlanjutan dunia;
5. Kementerian Dikbud (KNIU): Pendidikan air, kunci untuk ketahanan air.

APCE

Proses pembentukan APCE dimulai sejak tahun 1980 dan dipersiapkan oleh komite APCE di LIPI tahun 2006. APCE ditetapkan pada sesi ke-35 UNESCO General Conference di Paris pada tahun 2009. Pada tahun 2017 APCE menyerahkan *Periodic Review* dan memperoleh *renewal status* tahun 2019. Tujuan APCE adalah menjadi Pusat Asia Pacific dalam Ekohidrologi Urban (perkotaan) dan Rural (pedesaan) yang bereputasi internasional pada 2021.

Roadmap APCE dari 2017-2021 adalah sebagai berikut: program *mapping* strategi dan mendukung mitra strategis untuk meningkatkan penyadartahuan dan memperkuat partisipasi publik (2017); mempersiapkan dan pelaksanaan aktivitas secara substansial dan jangka panjang (2018); implementasi dan bantuan kegiatan terkait aksi afirmatif untuk kebijakan pemerintah (2019); reformulasi program berdasarkan evaluasi hasil, dan melaksanakan aktivitas teknis tahunan (2020); mengimplementasikan acuan/referensi dan model “*best practice*” ekohidrologi berdasarkan penelitian, pertukaran wawasan, sistem informasi dan penyadartahuan publik (2021).

Program dan kegiatan sains alam lain UNESCO di Indonesia, berupa program yang di luar prorgam keberlanjutan yang tercakup dalam program MAB, IOC, dan IHP. Beberapa diantaranya adalah peringatan Hari Air Sedunia dengan Universitas Indonesia dan program *Techno Park* dengan Universitas Pendidikan Indonesia dan Program *L’Oreal for Woman in Science* dengan Universitas Sebelas Maret serta penyelenggaraan *Workhop Nanotechnology* dengan LIPI.

Kontribusi Indonesia untuk UNESCO

Program MAB

Sejak 1968 hingga tahun 2005, tidak banyak program dan kegiatan sains alam yang terstruktur dan jangka panjang. Oleh karena itu penambahan jumlah cagar biosfer Indonesia sangat lambat. Sampai tahun 2009, Indonesia hanya mempunyai 6 cagar biosfer, empat diantaranya ditetapkan tahun 1977: (Cibodas, Tanjung Puting, Lore Lindu) dan 2 lagi pada tahun 1981 (Gunung Leuser dan Pulau Siberut). Peningkatan pesat baru terjadi pada periode 2015-2019, sehingga tahun 2020 ini, Indonesia memiliki 19 Cagar Biosfer UNESCO.

Dengan keberhasilan tersebut, Indonesia dianggap menjadi contoh pengusulan nominasi cagar biosfer yang sangat aktif dan menjadi mentor bagi negara lain terutama di kawasan Asia Pasifik yang belum mempunyai cagar biosfer seperti Myanmar sebelum 2015. Di negara ASEAN, Indonesia memiliki cagar biosfer terbanyak.

Selain capaian cagar biosfer, keterlibatan Indonesia dalam forum regional dan internasional juga sangat aktif memberikan masukan dalam intervensinya di setiap sidang MAB ICC saat menjadi *ICC Member* yaitu pada tahun 2015 – 2019 lalu berhasil terpilih menjadi member kembali berlanjut ke periode 2019 – 2023. Partisipasi aktif di regional forum yaitu SeaBRNet dan beberapa kali menjadi host antara lain tahun 2017 dan 2018 yaitu di Malang Jawa Timur dengan *field trip* ke CB Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno (BTSA) dan di Jakarta. Cagar Biosfer Cibodas telah menjadi model bagi cagar biosfer di ASEAN sehingga telah dikunjungi oleh pengelola cagar biosfer lainnya dan menjadi lokasi pelatihan.

Indonesia merupakan negara ke empat di luar Paris yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan MAB ICC sejak program MAB dicanangkan di UNESCO tahun 1971. Penyelenggaran MAB ICC ke 30 pada tanggal 23-28 Juli 2018 di Palembang, Sumatera Selatan, hingga sekarang masih selalu dipuji saat MAB ICC selanjutnya karena dianggap berhasil dan mengesankan delegasi yang hadir. Pada 30th MAB ICC tersebut, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati dari Indonesia berhasil terpilih sebagai President MAB ICC periode 2018-2020. Kedua keberhasilan tersebut dimungkinkan karena Indonesia telah menjadi anggota ICC MAB sejak tahun 2015 untuk periode 2015-2019, lalu pada 2019 berhasil terpilih kembali menjadi anggota ICC MAB untuk periode 2019-2023.

IOC

Peran Komite Nasional IOC UNESCO adalah mewakili Indonesia dalam mengkoordinasikan dan harmonisasi program sains kelautan antara tingkat nasional dan global. Lebih dari 10 tahun, Indonesia aktif dalam program *coral reef rehabilitation and management program (COREMAP)* untuk mendukung *Regional Coral Triangle Initiative* (CTI). Dengan telah didirikannya



Sidang MAB-ICC ke-30 di Palembang

Regional Training and Research Centre (RTRC) for Tropical Marine Biodiversity and Ecosystem Health tahun 2016, kegiatan pelatihan peneliti muda di kawasan *western* Pasifik, lebih terstruktur serta riset dapat dilaksanakan terpadu, dan pemantauan ekosistem terumbu karang sebagai bagian dari sarana management untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Keterlibatan di forum regional atau international sejak 2016 semakin meningkat, seperti di *Intergovernmental Coordination Group for the Pacific Tsunami Warning and Mitigation System* (ICG/PTWS) *Regional Working Group on Tsunami Warning and Mitigation System in the South Tiongkok Sea Region* (IC/PTWS-WG/SCS-V) di Manila, Philippines, nominasi *expert* untuk anggota dari GEBCO Guiding Committee (GGC) dan GEBCO *Sub-Committee on Undersea Feature Names* (SCUFN).

Masukan dari Indonesia yang penting dan dukungan ke IOC UNESCO antara lain:

1. *Marine biodiversity areas Beyond National Jurisdiction* (BBNJ);
2. *IOC Contribution to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*;
3. *IOC's Role and Involvement in the General Bathymetric Chart of the Oceans* (GEBCO): Keputusan sidang IOC-XXVIII/6.2(II) pada bulan Juni 2015 terkait review proyek IHO-IOC GEBCO selama periode antar waktu (*intersessional period*) yang ditindaklanjuti dengan pembentukan *working group GEBCO*;
4. *The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
5. *Development of the IOC science program and emerging challenges*: Ikut berupaya dalam pengembangan program ilmu kelautan berdasarkan EC-XLV/Dec. 4.4. terkait tiga inisiatif sains yang dimulai mulai 2016 selama 4 tahun:
 - *IOC Group for Marine Ecological Time Series (IGMETS)*;
 - *IOC Working Group to Investigate Climate Change and Global Trend of Phytoplankton in the Ocean* (TrensPO);

- *IOC Global Ocean Oxygen Network* (GO₂NE) dengan mendorong litbang kelautan/oceanografi terlibat di kegiatan science program selama 2016-2020;
6. *Global Climate Observing System* (GCOS): GCOS merupakan suatu program observasi kebumihan yang disponsori oleh WMO, IOC-UNESCO, UNEP dan ICSU;
 7. Pembentukan *Marine Regional Training and Research Center* (MRTRC) on *Marine Biodiversity and Ecosystem Health* (MarBEST Center) tahun 2016.

IHP

IHP Indonesia mendorong dan melakukan kegiatan terkait: mensintesis perbedaan informasi dan wawasan aspek sistem lingkungan air yang penting; mempromosikan pemahaman konsep dan sistem dan mempercepat wawasan terkait sarana dan teknologi untuk pengalaman masa lalu dan proyek yang sedang berlangsung terkait proses ekosistem daratan (*terrestrial*), aspek air di bentangan, sungai, daerah genangan, rawa, bendungan, pesisir dan kawasan urban. Kelompok kerja yang dibentuk mencakup bencana yang disebabkan air dan perubahan hidrologi, air permukaan saat perubahan lingkungan, kelangkaan air dan kualitas air, air dan pemukiman penduduk, ekohidrologi, dan pendidikan air. Kegiatan tersebut melibatkan banyak mitra. Peran Indonesia di IHP antara lain menyarankan perlunya *accumulated data* dan informasi terkait sumber daya air di dunia karena data merupakan basis untuk pengelolaan air berkelanjutan serta penggunaan *big data* dan *satellite data*, ICT, *modelling* dan *forecasting* untuk melindungi dan melestarikan air.

Beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia terkait program adalah melaksanakan Workshop Pelatihan di Danau Manajemen berkolaborasi dengan ILEC Jepang, Komunikasi Publik untuk demosite di Waduk Saguling, Jawa Barat; sebagai *Keynote Speaker* untuk *Symposium Internasional Landscape* di Canberra; sebagai tuan rumah untuk 22th RSC IHP AP dan *Ecohydrology* Kursus Pelatihan, dan *International Conference on Ecohydrology*

(ICE 2014), di Yogyakarta. Selain itu juga menjadi “host” Konferensi Danau Dunia tahun 2016; kegiatan penelitian dukungan untuk APCE-UNESCO bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta; dan berpartisipasi di forum internasional lain.

Sementara Pelaksanaan program tematik IHP di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. **Tema 1:** *water related disaster and hidrological change*: KemenPUPR membangun bendungan untuk mengontrol banjir di Jakarta (bendungan Ciawi dan Sukamahi), juga melakukan normalisasi Sungai Ciliwung yang di lokasi Jakarta *Outer ring road* (JORR) ke Manggarai. BNPB telah berhasil mengembangkan *National Hazard early warning system* MHEWS (akses <http://mhews.bnpb.go.id>);
2. **Tema 2:** *groundwater in a changing environment*: Kementerian ESDM membantu sumur-sumur untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang kurang air di seluruh Indonesia. Sebanyak 138 lubang sumur di 111 kabupaten oleh Badan Geologi. Selain itu, sudah dilakukan *mapping* zona konservasi air tanah;
3. **Tema 3:** *Addressing water scarcity and quality*: Menteri LHK in 2015-2019 mempunyai program untuk memperbaiki kualitas air di 15 sungai prioritas termasuk memasang *on line* sistem monitoring di seluruh sungai, pilot project konstruksi Unit Pengelola limbah air untuk pengelolaan limbah air domestik dan usaha kecil-menengah untuk mengurangi polusi air. Tahun 2018 oleh PUPR program suplai air untuk 4.5 juta penduduk pendapatan rendah dapat akses air. Sejak 2015 sebanyak lebih dari 507 embung dibangun dan 7 infrastruktur pengelolaan sumber daya alam di beberapa provinsi termasuk Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta revitalisasi bendungan di Bali dan sistem monitoring dan teknologi pencegahan polusi lingkungan;
4. **Tema 4:** air dan pemukiman masyarakat di masa depan: Dirjen Perumahan Rakyat, MenPUPR melaksanakan program perumahan di daerah kumuh nama Program KOTAKU, yang merupakan Pembangunan Infrastruktur berbasis komunitas (*Community-based infrasturcture development*) untuk mempercepat penanganan daerah kumuh urban dan gerakan 100-0-100 (100% air bersih, 0 % wilayah kumuh, 100% akses ke sanitasi layak) untuk merealisasikan kebiasaan, produktif dan pemukiman berkelanjutan;
5. **Tema 5:** ekohidrologi: merakit harmoni untuk dunia berkelanjutan: APCE Program: *demo site* pengembangan ekohidrologi di Saguling Reservoir dan inisiasi *demo site* di MTT di Kabupaten TTU, sosialisasi pendekatan ekohidrologi, aksi bersih danau dan beberapa seri workshop terkait pengelolaan sumber daya air dan integrasi penglolaan lingkungan dan air;

6. **Tema 6:** pendidikan air kunci untuk ketahanan air: APCE mendidik masyarakat dan pelajar untuk menggunakan air secara bijaksana, hemat air.

APCE

APCE melakukan riset ekohidrologi dengan output 2016-2019 antara lain: konsep ekohidrologi implementasi di gambut, kawasan *arid* – semi arid, demo site ekohidrologi untuk kuantitas dan kualitas air melibatkan banyak institusi di Indonesia seperti: BRG, IPB, dan UGM. Kegiatan difokuskan pada: sistem irigasi tradisional, zona *arid*-semi *arid*, urban, *watershed*/ daerah tangkapan air sistem, danau, reservoirs, gambut, pulau kecil. Pada periode 2011–2019, banyak MoU ditandatangani baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri seperti dengan USM dan UTM Malaysia.

Selain itu APCE menjadi *host International Conference on 16th World Lake Conference in Bali November 2017*, *International Conference on Ecohydrology in conjunction with 22nd IHP-RSC Meeting in November 2014*. *International Workshop on new ecohydrology demonstration site in March 2011*. APCE juga memperkuat jaringan, paling sedikit 12 institusi/organisasi/program termasuk MAB UNESCO, UNESCO CHair, Kyoto University, ICHARM Japan, ILEC Japan, IUE-CAS Tiongkok, UCWR Iran, ERCE Poland, HTC KL Malaysia, ANU & Univ of Canberra Australia, ICCE Portugal, *K-water* Korea, paling tidak mencakup 7 negara.

Analisis, rekomendasi dan Arah Kerjasama Ke Depan

Analisis

Hubungan Indonesia dan UNESCO yang telah dibina sejak 70 tahun lalu telah menghasilkan banyak capaian dalam bidang ilmu pengetahuan alam walaupun pendanaan yang diperoleh Indonesia umumnya dengan mencari dari pihak donor atau mitra lainnya dan jumlah terbatas serta tidak langsung dari UNESCO. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja sama dengan UNESCO memberikan daya ungkit untuk memperoleh pendanaan dari donor lain dan memberikan nilai tambah pada capaian yang dihasilkan termasuk kualitas riset, publikasi dan perluasan jaringan di kalangan ilmiah.

Indonesia belum optimal memanfaatkan kerja sama dengan UNESCO termasuk pemanfaatan lokasi atau situs yang telah ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer dan geopark yang dapat mengkombinasikan antara pelestarian keragaman hayati, batuan geologi, ekosistem, kawasan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan dengan melakukan penelitian yang akan menarik minat dunia. Indonesia belum memanfaatkan UNESCO *Chairs* dan jaringan yang dibentuk UNESCO dan *centre category 2* yang ada di dunia. Oleh karena itu, apabila pemanfaatan lebih dipacu lagi, Indonesia akan menghasilkan karya yang lebih signifikan dan besar dan bermanfaat bagi pemecahan masalah Indonesia. Dengan lebih terbuka dan mekanisme implementasi



Delegasi Indonesia MAB-ICC di kantor UNESCO Miollis

program di UNESCO yang berubah, UNESCO akan semakin diminati untuk memanfaatkan Indonesia sebagai negara anggota UNESCO.

Banyak program atau kegiatan UNESCO yang tidak diketahui masyarakat ilmiah, sehingga peneliti perlu mencari tahu dengan aktif selain mendorong UNESCO untuk lebih mensosialisasikan program. Walaupun sudah sering dibahas tentang perlunya keterpaduan program-program UNESCO, namun belum diimplementasikan secara nyata di negara anggota UNESCO. Indonesia sudah mengimplementasikan keterpaduan antar program seperti antara MAB dan IHP di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil- Bukit Batu untuk penyediaan air bersih dari air payau. MAB dan MOST terkait pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi. Namun demikian, keterpaduan program masih perlu ditingkatkan di lokasi yang ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer, geopark, dan warisan dunia.

Dengan jabatan Indonesia sebagai *President/Chair* MAB ICC dan *Vice Chair* IOC WESTPAC Region, Indonesia ikut menentukan kebijakan program UNESCO dalam aspek biodiversitas, konservasi baik *marine* dan *terrestrial*, jasa ekosistem, mitigasi bencana, ketahanan air dan lainnya yang tercakup dalam program MAB, IOC, dan IHP. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu memimpin dan disegani dunia dalam bidang sains terutama ilmu pengetahuan alam.

Rekomendasi

Agar UNESCO lebih berkiprah signifikan bagi dunia dan khususnya bagi negara anggotanya, keunikan lingkup area serta meningkatkan peran ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah dunia melalui pencapaian SDGs dengan mekanisme yang inovatif, efisien dan efektif, perlu ditingkatkan. Kerja sama penelitian lebih diarahkan pada program yang sudah masuk di PRN sehingga pendanaan terjamin dikaitkan dengan program yang sedang berjalan. Pengembangan strategi secara nasional dan global membahas isu terkait tiga hal yaitu:

1. Peran program-program UNESCO dalam implementasi agenda 2030 dan SDGs;
2. Pengembangan Program Science dikaitkan dengan tantangan baru termasuk riset *frontier*;
3. Pengembangan riset yang berdampak pada peningkatan ekonomi sekaligus melestarikan sumber daya hayati dan ekosistem, misalnya: pengemasan riset ekohidrologi sesuai “*tagline*” “*Ecohydrology: a new way of ecosystem services*”. Pengembangan riset berbasis sumber daya hayati di cagar biosfer dengan peningkatan nilai tambahnya;



Sidang MAB-ICC ke-31 di UNESCO Headquarters, Paris

4. Integrasi program-program UNESCO yang memungkinkan dilakukan secara terpadu.

Arah kerja sama di masa depan

Kerja sama Indonesia dan UNESCO di masa mendatang, perlu lebih menyesuaikan dengan RPJMN 2020-2024, ARN, RIRN, PRN Indonesia karena mengacu menyelesaikan masalah bangsa dan kelemahan sains Indonesia. Sebagai negara yang kaya keanekaragaman hayati, nomor satu di dunia apabila digabungkan keanekaragaman darat dan laut, kekayaan alam lainnya serta dikombinasikan dengan kearifan masyarakat dalam memanfaatkannya, pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan masalah untuk mengurangi degradasi ekosistem, menjadi prioritas bekerja sama.

Indonesia perlu lebih memanfaatkan UNESCO *Chairs* yang ada yang sesuai atau yang terutama di kawasan Asia seperti: *emergency preparedness, groundwater management*, kerja sama *South-South* terkait science technology untuk atasi perubahan iklim, *water reuse, clean and renewable energy*, di bidang *plant biotechnology* (Tiongkok), *ocean and urban development, landslide risk mitigation, physic astronomi, integrated water resources management, climate science and policy, traditional medicine* (Uzbekistan).

Selain itu, juga pemanfaatan pusat regional seperti yang terkait Taman Science dan Inkubator Teknologi (*Regional Centre for Technology Incubator and Science Park Development* Isfahan) di Iran serta pelatihan-pelatihan seperti yang pernah dilakukan terkait bioteknologi oleh *Training Centre on Science, Technology and Strategy*.

Penelitian terkait MAB masih perlu menyangkut pelestarian sumber daya hayati dan ekosistem namun perlu pendekatan baru yaitu digabungkan dengan pemanfaatan berkelanjutan. Peningkatan nilai produk, mitigasi bencana di kawasan cagar biosfer, penyediaan air bersih dan air minum di kawasan cagar biosfer yang wilayahnya gambut. Penggunaan teknologi molekular termasuk *barcoding* untuk mendeteksi kegiatan ilegal dan untuk menguak potensi manfaat untuk sumber pangan baru, obat-obatan, energi baru dan tebarukan serta material maju lainnya. Pengembangan cagar

biosfer untuk pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya, masih perlu ditelusuri lebih banyak sehingga dapat memberikan dampak berupa *green economy* atau *blue economy*, termasuk peningkatan kapasitas pengelola cagar biosfer.

Di masa mendatang, riset kelautan yang perlu diberi lebih banyak perhatian antara lain: *modelling, deep-sea floor biosphere, land and sea interface, discovering functional biodiversity, global climate change, growth of interdisciplinary, waste disposal, involvement of society, fisheries*. Di samping itu perlu ditingkatkan berbagai kerja sama seperti kerja sama pemecahan pencemaran laut dan kerja sama dalam membuat lebih banyak *demosite* yang lebih spesifik seperti Pulau Kecil *demosite, Karst, Ecohydrology demosite*, Lahan Gambut ekohidrologi *demosite*. Kedepan juga diperlukan penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan:

1. Pengelolaan air berkelanjutan untuk mengembangkan ketahanan kota;
2. *Ecohydrology* untuk ketahanan air di daerah perkotaan dan pedesaan;
3. Pengembangan teknologi tepat guna untuk keamanan air di daerah marginal;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan air bagi masyarakat lokal.

Ucapan Terima kasih: Terima kasih disampaikan kepada Prof. Zainal Arifin (LIPI) yang telah membantu memberikan beberapa bahan terkait IOC dan pelaksanaan program IOC di Indonesia, dan kepada Prof. Ignatius Sutapa (LIPI) yang telah membantu memberikan beberapa bahan terkait IHP dan pelaksanaan program IHP di Indonesia serta tentang APCE sebagai *Centre Category 2 under the auspices of UNESCO* dan kegiatannya. Kepada Ibu Adhe Lignita Wulandari yang telah membantu mencarikan publikasi *UNESCO Jakarta Office* terkait sains.

Management of Social Transformation (MOST) UNESCO : Paradigma Penting bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora di Indonesia

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti

- Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan
- Ketua Komite MOST Indonesia (2016 s.d. -)



Pendahuluan

Program *Management of Social Transformations* (MOST) merupakan program UNESCO yang bertujuan untuk mendorong dan mempromosikan penelitian ilmu sosial sesuai dengan tujuan UNESCO. Program MOST UNESCO diperkenalkan pada tahun 1994 sebagai bagian dari sektor Sosial dan Kemanusiaan atau *the Social and Human Sciences Sector* (SHS) dari UNESCO. Semangat atas program MOST diharapkan memberikan perubahan praktek-praktek kehidupan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan sosial tidaklah dapat serta merta mengalami perubahan, namun setidaknya penerapan pemikiran-pemikiran dan cara pandang kebijakan UNESCO, menjadi bagian dalam pembahasan dan upaya implementasi dalam program yang dijalankan di Indonesia.

Meskipun awalnya, di Indonesia pembahasan kebanyakan masih terbatas dalam ruang-ruang seminar, tetapi dalam perkembangannya program MOST Indonesia menghasilkan masukan kebijakan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Paradigma dan fokus program sebagaimana MOST-UNESCO, disadari atau tidak, ikut mewarnai corak kegiatan bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang berkembang di Indonesia, meskipun itu bukan merupakan kegiatan langsung dari MOST-UNESCO. Pola dan paradigma yang dikembangkan oleh MOST UNESCO, yaitu inklusif, berkelanjutan dan *research based policy*, sudah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia.

Kelembagaan

Indonesia menjadi anggota MOST-UNESCO sejak 2001. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Indonesia telah menjadi anggota *the MOST Intergovernmental Council* (IGC MOST) dan sejak awal telah memiliki Komite Nasional MOST Indonesia. Mengingat arahnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, maka kewenangan untuk memimpin komite tersebut dipercayakan kepada Deputy Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI). Sejak 2013 telah tiga kali berganti kepemimpinan Komite, sesuai dengan pergantian Deputy IPSK-LIPI. Penempatan Deputy Bidang IPSK-LIPI menjadi salah satu Ketua Komite, agaknya tidak lepas dari adanya kebijakan secara nasional bahwa program yang berfokus pada penguatan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu di Indonesia kewenangannya diberikan kepada LIPI.

Komite Nasional MOST Indonesia merupakan komite nasional antar pemerintah dan universitas yang mendorong pengelolaan transformasi sosial berbasis riset ilmu sosial dan humaniora, sekaligus memfasilitasi sinergi dengan pendekatan non-ilmu sosial. MOST UNESCO beranggotakan beragam disiplin ilmu dari berbagai institusi pemerintah, Universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LIPI, UI, UGM, UNPAD, dan LSM Semeru.

MOST Indonesia secara berkala meninjau program-programnya untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah nasional. MOST Indonesia bertujuan untuk mempengaruhi rancangan kebijakan yang dapat mempengaruhi perubahan mendasar dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia di masa depan. Selain itu, MOST Indonesia berkomitmen menyelenggarakan program dan kegiatan untuk meningkatkan upaya penguatan hubungan dengan masyarakat sipil. Dalam perkembangannya, lima tahun terakhir Komite Nasional MOST Indonesia melakukan revitalisasi program, dimana difokuskan pada pembangunan jembatan antara penelitian, kebijakan dan praktek, yang mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti. Ini dikembangkan dalam rencana strategis yang koheren dan menghasilkan pengetahuan yang andal dan relevan bagi pembuat kebijakan.

Secara aktif pula Komite Nasional MOST Indonesia menghadiri dan berpartisipasi pada Sidang-sidang IGC-MOST maupun Sidang Umum UNESCO. Kehadirannya selain menyampaikan progres program di Indonesia, juga mendapat pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan program negara lainnya.

Fokus Program

Program MOST Indonesia sangat erat terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), bahkan merupakan inti dari program MOST Indonesia. Arah fokus sedikit berbeda dengan sebelumnya, yang difokuskan pada isu migrasi internasional maupun antara wilayah dalam negeri. Sejak tahun 2016 MOST Indonesia menegaskan misinya mentransformasikan hasil-hasil penelitian/*(knowledge sharing)* sebagai dasar kebijakan guna mencapai masyarakat inklusif dalam konteks pengurangan resiko bencana (DRR) di Indonesia melalui penelitian.

Tujuan program ini yaitu menegaskan mempromosikan penelitian kepada pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ilmu pengetahuan yang berkelanjutan (*sustainable sciences*). Di samping mendorong terjadinya transformasi kebijakan ke arah masyarakat yang inklusif di Indonesia dalam konteks DRR (*MOST School*). Tentunya juga sekaligus menguatkan literasi hasil-hasil ilmu pengetahuan dalam konteks DRR

kepada semua pihak. Di sini, paradigma keterhubungan antara penelitian dan kebijakan (*research-policy nexus*) dalam mendukung SDGs tahun 2030, khususnya dalam hal inklusif sosial dan pengurangan risiko bencana – mata pencaharian berkelanjutan (DRR-SL). Hal ini menegaskan bahwa MOST memberikan dukungan penuh untuk kepentingan nasional Indonesia, RPJMN 2015-2019 dan strategi MOST UNESCO pada 2014-2021. Ada beberapa kegiatan langsung yang dilakukan MOST Indonesia, tetapi banyak pula kegiatan yang sifatnya mendukung MOST Indonesia. Setidaknya beberapa yang bergaung besar dalam program strategis MOST Indonesia, yaitu:

- Bekerja sama dengan UNESCO Jakarta melaksanakan *Workshop Sustainability Sciences “Linking with Social Action and Policy Making”* di Padang (1 – 2 Februari 2017). *Workshop* dilaksanakan tidak hanya di dalam ruangan tetapi langsung mengunjungi lokasi kegiatan dan bertemu dengan pemangku kepentingan (Dosen-Mahasiswa-LSM-Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Kegiatan itu masih dilanjutkan beberapa kali dan keikutsertaan MOST Indonesia mengirimkan beberapa wakilnya
- Bekerja sama dengan UNESCO Jakarta melaksanakan *MOST School* dengan fokus Revisi RAN Adaptasi Perubahan Iklim. Kegiatan ini secara bertahap pelaksanaannya dan membutuhkan waktu panjang untuk berpengaruh. Terlibat secara aktif yaitu LIPI, BMKG, BNPB, Kemensos, Bappenas, UGM, UI dan Sekretariat RAN API.

Sedangkan Komite Nasional MOST Indonesia mempunyai banyak pengaruh dalam mempromosikan *research base policy* dan paradigma inklusif. Hal itu tercermin dalam kegiatan-kegiatan Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI dan berdampak pada perubahan paradigma di sekitarnya. Oleh karena itu, pentingnya menjembatani kesenjangan antara penelitian dan kebijakan guna menyukseskan target SDGs di Indonesia terutama target 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 10 (Mengurangi ketidaksetaraan), dan 11 (membuat masyarakat inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan).

Foresight MOST Di Indonesia

LIPI atau berbagai pihak pemangku kepentingan mendapat manfaat atas adanya program MOST UNESCO, antara lain mendapatkan informasi tentang kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas jaringan kerja sama internasional dan batuan internasional, menunjang upaya pemeliharaan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional, serta meningkatkan peran dan citra lembaga ilmu pengetahuan di berbagai forum internasional, hubungan antarnegara serta membangun kepercayaan masyarakat internasional.

Namun demikian, kondisi hari ini dalam masa pandemi Covid-19, kerentanan penduduk semakin meningkat, ditambah pula dengan adanya fenomena perubahan



Sesi Intergovernmental Council (IGC) of the Management of Social Transformations (MOST) ke-14, Paris, Maret 2019

iklim terutama cuaca ekstrim yang menurut banyak referensi berdampak tinggi terhadap mata pencaharian masyarakat, baik di pedesaan maupun di wilayah kota. Keadaan semacam itu, MOST UNESCO penting untuk mereformulasi arah kebijakan dan programnya untuk mendorong terbangunnya kebijakan yang inklusif guna meningkatkan daya tahan masyarakat di semua lini kehidupannya. Perhatian tersebut juga terkait erat tentang pemanfaatan teknologi informasi, yang diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu kebijakan dan program.

Disamping itu, penting mempromosikan kearifan dan kearifan lokal untuk meningkatkan kapasitas negara. Indonesia menemukan bahwa pentingnya pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat lokal dalam perancangan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan lindung merupakan salah satu prioritas. Semua intervensi harus menjadi bagian dari revitalisasi ilmu sosial dan humaniora yang berfokus pada membangun jembatan antara keberlanjutan penelitian, kebijakan dan praktik, yang mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, alangkah akan lebih baik jika mandat nasional antarpemerintah dari MOST bisa berkembang secara regional, yang diyakini akan berdampak lebih besar.

SEKILAS TENTANG PROGRAM CAGAR BIOSFER UNESCO



Cagar Biosfer (CB) adalah kawasan ekosistem darat dan pesisir, laut yang diakui keberadaannya di tingkat internasional sebagai bagian dari program UNESCO yang dikenal dengan Program *Man and the Biosphere* (MAB). Program MAB sendiri memiliki visi untuk meningkatkan kesadaran manusia pentingnya tentang masa depan dan interaksi dengan alam sekitar dan bertindak secara kolektif dan bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang hidup secara harmonis di dalam cagar biosfer sesuai dengan visi dari Jaringan Cagar Biosfer Dunia (*World Network of Biosphere Reserves*). Sementara misinya adalah:

- Mengembangkan dan memperkuat model pembangunan berkelanjutan melalui WNBR;
- Mengkomunikasikan pengalaman dan pembelajaran yang didapat, serta memfasilitasi penyebaran informasi dan penerapan model-model MAB;
- Mendukung evaluasi dan manajemen biosfer berkualitas tinggi, strategi dan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan dan perencanaannya, serta institusi yang bertanggung jawab;
- Membantu Negara-negara Anggota dan para pemangku kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait dengan eksplorasi dan pengujian kebijakan, teknologi dan inovasi untuk pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan sumber daya alam serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Konsep Cagar Biosfer pertama kali dikembangkan oleh gugus tugas (*Task Force*) MAB UNESCO tahun 1974 dan diuji coba tahun 1976. Untuk dapat menjadi Cagar Biosfer dan masuk terdaftar *World Network of Biosphere Reserves* (WNBR) suatu situs harus melewati serangkaian prosedur Nominasi seperti berikut;

- 30 September : Batas akhir penyerahan nominasi dan peninjauan berkala
- 30 November : Peninjauan nominasi oleh sekretariat
- Februari : Pertemuan *Advisory Committee* di kantor pusat UNESCO
- 30 Maret : Penyerahan berkas rekomendasi dari *Advisory Committee* kepada pengusul
- 30 Mei : Penyerahan berkas rekomendasi / informasi tambahan kepada sekretariat MAB
- Juni – Juli : Penetapan hasil nominasi atau peninjauan berkala pada saat *CC Meeting*

Penilaian terhadap calon CB didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. memiliki persyaratan dapat mewakili mosaik kenampakan sistem ekologi dan wilayah bio-geografi utama, termasuk gradasi dari intervensi manusia di kawasan tersebut;
2. memiliki nilai konservasi keanekaragaman hayati dan signifikan dan memiliki eksosistem yang unik dan memiliki nilai ekologi yang signifikan dibanding dengan kawasan lainnya;
3. memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kawasan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*) pada skala lokal, regional dan global;
4. memiliki luasan yang cukup untuk berperan sebagai kawasan yang memiliki tiga fungsi cagar biosfer yaitu fungsi konservasi Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) dan ekosistem, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan dukungan logistik (penelitian, pengawasan, evaluasi dan pendidikan);
5. memberikan peluang untuk mengeksplorasi dan mendemonstrasikan berbagai pendekatan ke arah pembangunan berkelanjutan pada skala regional dan kawasan tersebut harus mempunyai luas tertentu untuk mendukung ketiga fungsi cagar biosfer yaitu fungsi konservasi, pembangunan dan logistik;
6. Tata cara keorganisasian harus diterapkan untuk keterlibatan dan partisipasi berbagai otoritas publik, masyarakat lokal dan sektor swasta dalam merancang dan menerapkan fungsi-fungsi cagar biosfer; dan
7. memenuhi persyaratan lain: 1) mekanisme untuk mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan di zona penyangga atau zona-zona lainnya; (2) kebijakan atau rencana pengelolaan kawasan tersebut sebagai cagar biosfer; (3) otoritas atau mekanisme yang diberikan untuk mengimplementasikan kebijakan atau rencana tersebut; dan (4) program-program penelitian, pemantauan, pendidikan dan penelitian.

Sampai tahun 2020, Indonesia telah memiliki 19 Cagar Biosfer. Daftarnya adalah sebagai berikut:

1. Komodo (1977). *Review*: 1999, 2013
2. Tanjung Puting (1997). *Review*: 1998,
3. Cibodas (1977). *Review*: 2011
4. Lore Lindu (1977). *Review*: 1999, 2013
5. Gunung Leuser (1981). *Review*: 1999, 2013
6. Siberut (1981). *Review*: 1999, 2013
7. Giam Siak Kecil – Bukit Batu (26/5/2009)
8. Wakatobi (11/7/2012)
9. Bromo Tengger Semeru – Arjuna (9/6/2015)
10. Taka Bonerata - Kepulauan Selayar (9/6/2015)
11. Belambangan (19/3/2016)
12. Berbak Sembilang (2018)
13. Betung Kerihun Danau Sentarum (2018)
14. Rinjani-Lombok (2018)
15. Saleh-Moyo-Tambara (SAMOTA) (2018)
16. Togean Tojo Una -Una (2019)
17. Bunaken-Tangkoko-Minahasa (2020)
18. Karimunjawa-Jepara-Muria (2020)
19. Merapi-Merbabu-Menoreh (2020)

Deskripsi ringkas masing-masing cagar biosfer tersebut dapat dilihat pada halaman-halaman berikut.

TETAPAN CAGAR BIOSFER INDONESIA DI UNESCO

Disusun berdasarkan artikel-artikel yang ditulis oleh
Prof. Dr. Y. Purwanto,
Direktur Eksekutif Program MAB Indonesia



CAGAR BIOSFER

KOMODO

1977

Terletak di Kabupaten Nusa Tenggara Timur dan berada diantara Pulau Flores dan Pulau Sumbawa, Cagar Biosfer Komodo memiliki luas inti (Taman Nasional Komodo) 173.300 ha, meliputi 40.728 ha wilayah daratan dan 132.572 ha wilayah lautan. Dalam kawasan ini terdapat lima pulau utama yaitu Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Nusa Kode dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan inti dikelilingi oleh 259.680 ha zona penyangga dan 420.451 ha wilayah transisi.

Kepulauan Komodo ditetapkan sebagai Cagar Biosfer sejak tahun 1977, setahun setelah Indonesia menjadi anggota Program MAB UNESCO. Nominasi disusun dan diusulkan oleh LIPI sebagai *focal point* Program MAB UNESCO Indonesia dan Direktorat Kehutanan, Departemen Pertanian pada masa itu.

Komodo ditetapkan sebagai Cagar Biosfer UNESCO antara lain karena memiliki habitat dan fauna/flora yang endemik, unik dan khas. Salah satunya adalah

biawak raksasa, Komodo (*Varanus komodoensis*), yang tidak bisa di tempat lain di dunia, selain di pulau-pulau kawasan Komodo. Hal itu menarik minat peneliti ilmiah terutama dari sudut implikasi evolusinya. Biawak ini, secara umum, dikenal sebagai “*Komodo Dragons*”, karena wujud penampakannya dan perilaku agresifnya, Komodo adalah spesies kadal terbesar yang masih hidup, tumbuh dengan panjang rata-rata 2 hingga 3 meter. Spesies ini adalah representasi terakhir dari populasi peninggalan kadal besar yang pernah hidup di Indonesia dan Australia. Penetapan Cagar Biosfer Komodo, antara lain, dimaksudkan untuk melindungi habitat dan spesies Komodo yang terancam punah.

Selain itu, UNESCO juga melihat bahwa pulau-pulau di kawasan Cagar Biosfer Komodo merupakan salah satu lingkungan laut terkaya di dunia dengan terumbu karangnya yang masih terjaga dengan baik. Cagar biosfer ini terletak di jantung segitiga terumbu karang Asia Pasifik dan memiliki biota bawah laut yang sangat menakjubkan.

Orang-orang dari komunitas setempat sebagian besar memperoleh mata pencaharian dari bertani, sementara mayoritas komunitas pendatang bekerja sebagai nelayan. Pariwisata telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kecenderungan ini sepertinya akan terus berlanjut, karena tujuan lain dari cagar biosfer adalah untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan melalui ekowisata. Cagar Biosfer Komodo dikelola oleh pemerintah pusat Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



CAGAR BIOSFER

TANJUNG PUTING

1977

Cagar Biosfer Tanjung Puting terletak di Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin, dengan luas total 897.943 ha meliputi area inti berupa Taman Nasional Tanjung Puting seluas 371.713 ha, zona penyangga seluas 271.055 ha dan area transisi seluas 215.175 ha. Cagar Biosfer ini merupakan perpaduan antara daerah pesisir dan kawasan hutan gambut tropis dataran rendah

Cagar Biosfer Tanjung Puting ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer pada tahun 1977 bersamaan dengan Cagar Biosfer Komodo. Nominasi juga disusun dan diusulkan oleh LIPI sebagai *focal point* Program MAB UNESCO Indonesia dan Direktorat Kehutanan, Departemen Pertanian pada masa itu.

UNESCO menilai bahwa Cagar Biosfer Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi yang sesuai dengan kriteria-kriteria Cagar Biosfer UNESCO. Di antara keunggulannya adalah keberadaan hutan tropis, baik

sebagai habitat asli orangutan di Indonesia maupun keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Kawasan ini didominasi oleh tanaman hutan dataran rendah seperti Jelutung (*Dyera costulata*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), Meranti (*Shorea sp.*), Keruing (*Dipterocarpus sp.*), dan Rotan.

Selain sebagai cagar Biosfer, Taman Nasional ini juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang memiliki status “*Ramsar Site*”. Beberapa daya tarik Taman Nasional Tanjung Puting antara lain adalah pengunjung dapat menyaksikan langsung pembiakan orangutan dan menyusuri sungai Sekonyer menggunakan kapal klotok, sambil melihat monyet-monyet bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain.

Tanjung Puting juga menyediakan beberapa sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitarnya. Namun, hal itu membutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat,

sehingga ketergantungan masyarakat setempat untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam hutan dapat dikurangi dan agar mereka memiliki perspektif yang lebih positif demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa studi untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan sumber mata pencaharian alternatif telah dilakukan di bidang *agroforestry*, pertanian, dan budidaya ikan. Demikian juga dengan program pengembangan, telah diupayakan langkah-langkah seperti; pendekatan ekosistem lanskap dan pendendalian bahaya kebakaran hutan, meningkatkan penerapan pengelolaan kolaboratif serta merumuskan Rencana Pengelolaan Terintegrasi dan rencana aksi yang implementatif dan berdaya guna tinggi.



CAGAR BIOSFER

CIBODAS

1977

Cagar Biosfer Cibodas terletak di Jawa Barat meliputi wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Cagar Biosfer ini memiliki luas sekitar 167.000 ha yang terdiri atas area inti (*core area*) seluas 24.500 ha (berupa kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Wisata Alam (TWA Jember, Cagar Alam dan TWA Telaga Warna), zona penyangga (*buffer zone*) seluas 54.800 ha (kawasan perkebunan teh, kebun raya, perladangan, persawahan, kawasan pengembangan hortikultura dan pemukiman masyarakat) dan area transisi seluas sekitar 87.700 ha yang didominasi oleh kawasan perladangan, pesawahan dan pemukiman penduduk dan bentuk satuan lingkungan yang lainnya.

Cagar Biosfer Cibodas diusulkan oleh LIPI dan Departemen Pertanian bersama cagar Biosfer Komodo, Tanjung Puting dan Lore Lindu serta juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer UNESCO pada tahun 1977. Cagar Biosfer Cibodas memiliki beberapa

hal yang dinilai memenuhi kriteria sebagai cagar biosfer UNESCO yaitu keadaan alamnya yang khas dan unik menjadikannya salah satu laboratorium alam yang menarik minat para peneliti sejak tahun 1800-an. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, misalnya, memiliki keanekaragaman ekosistem yang terdiri dari ekosistem sub Montana, Montana, sub alpin, danau, rawa dan savana. Taman Nasional yang meliputi gunung berapi kembar dan hutan hujan pegunungan ini juga memiliki banyak spesies endemik di Jawa.

Zona penyangga terdiri dari hutan produksi, perkebunan teh dan ladang hortikultura. Mayoritas area transisi ditutupi oleh sawah irigasi dan pemukiman manusia. Sebagian besar masyarakat di sekitar wilayah Cagar Biosfer Cibodas bergantung pada sumber daya dari daerah inti sebagai mata pencaharian mereka. Sekitar 70% bekerja sebagai petani, tetapi hanya minoritas yang memiliki tanahnya sendiri. Cagar Biosfer Cibodas juga terkenal dengan pengembangan ekowisata,

seperti berbagai atraksi termasuk air terjun, pendidikan lingkungan, berkemah, mengamati burung dan budaya lokal serta yang paling terkenal adalah mendaki gunung ke puncak gunung Gede dan Pangrango.

Keberadaan Cagar Biosfer Cibodas membantu pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan sekitarnya yang memanfaatkan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui sertifikasi, pemberian label, dan *branding* produk baik berbentuk barang maupun jasa dengan menggunakan *brand* cagar biosfer Cibodas. Melalui mekanisme ini, kawasan ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekologi.



CAGAR BIOSFER

LORE LINDU

1977

Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu secara administrasi terletak di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu. Area inti dari Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) adalah Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan luas kawasan seluas 217.991,18 ha. Zona Penyangga CBLL seluas 503.738 ha terletak di Kabuapten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Sedangkan area transisi seluas 1.461.263 ha terletak di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer pada tahun bersama Komodo, Cibodas dan Tanjung Puting setelah diusulkan oleh LIPI dan Kementerian Pertanian.

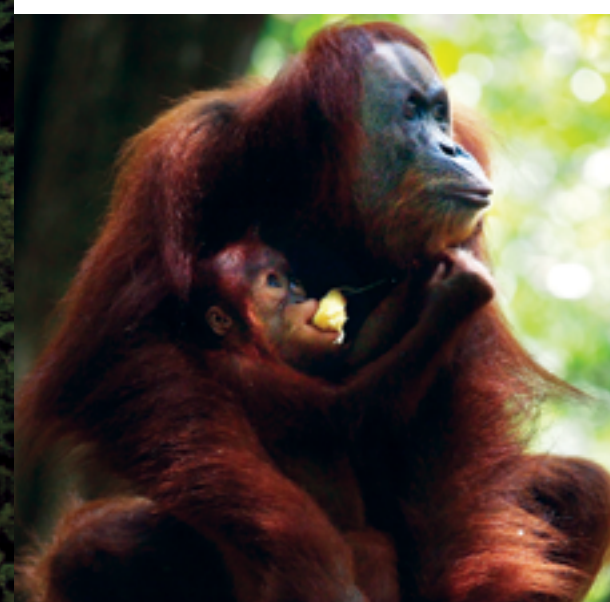
Hal yang membuat Lore Lindu memenuhi kriteria sebagai cagar biosfer UNESCO adalah keberadaan salah satu hutan hujan pegunungan terbesar yang tersisa di Sulawesi. Ini sangat penting dari sisi keanekaragaman

hayati, budaya serta arkeologi. Sekitar 90% areanya merupakan hutan pegunungan di atas ketinggian 1.000 meter, yang mewakili sebagian besar keunikan flora dan fauna pegunungan Sulawesi. Keindahan pemandangan Lore Lindu menyimpan sejumlah besar flora dan fauna endemik dan berada di garis *Wallace* (zona perpindahan antara Asia dan Australia). Di kawasan area inti ini terdapat Danau Lindu dengan luas sekitar 3.000 ha dan merupakan danau air tawar purba.

Ada empat kelompok etnis utama yang mendiami pedesaan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu yakni Kaili, Behoa, Bada, dan Pekurehua. Mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah bertani seperti menanam padi dan jagung dan berkebun kakao.

Lore Lindu telah menghadapi beberapa ancaman akhir-akhir ini, terutama dari penebangan liar dan perburuan liar besar-besaran. Untuk mencegah Taman Nasional Lore Lindu dari kerusakan lebih lanjut akibat aktivitas manusia, maka dilakukan perbaikan pengelolaan

dengan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan visi dan misi taman nasional, pengembangan masyarakat, koordinasi dan kolaborasi pengelolaan menjadi faktor utama pengelolaan taman secara keseluruhan. Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan ini adalah Komite Nasional Program MAB Indonesia, LIPI, Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar TN Lore Lindu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Poso, Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kelompok Masyarakat, LSM, Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi.



CAGAR BIOSFER

GUNUNG LEUSER

1981

Cagar Biosfer Gunung Leuser terletak di dua provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara (30%) yang tersebar di 5 Kabupaten dan Kota dan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (70%) dan tersebar di 14 Kabupaten. Luas total kawasan Ini sekitar 5.290.761,64 ha meliputi: (1) Area inti berupa Taman Nasional Gunung Leuser seluas 1.094.692,00 ha; (2) Zona penyangga seluas 1.494.877,52 ha; dan (3) Area transisi seluas 2.705.192,12 ha.

UNESCO telah menetapkan Gunung Leuser untuk menyandang dua (2) status berskala global yaitu sebagai Cagar Biosfer yang ditetapkan pada tahun 1981 dan sekaligus sebagai Warisan Dunia yang ditetapkan pada tahun 2004. Kedua status tersebut berhasil diraih usulan Pemerintah Indonesia melalui LIPI dan Kementerian Kehutanan saat itu, setelah melalui rangkaian proses seleksi ketat. Menyusul Tsunami Aceh pada tahun 2004, Taman Nasional ini otomatis masuk ke dalam list situs *World Heritage in Danger*.

Gunung Leuser dinilai memenuhi beberapa kriteria sebagai cagar biosfer, salah satunya sebagai hutan lindung terbesar dan terpenting yang tersisa di pulau Sumatera. Keberadaan hutan ini sangat penting sebagai penjaga iklim bagi seluruh spesies yang hidup di dalamnya selama periode evolusi dan, saat ini, sebagai pelindung bagi proses evolusi di masa depan. Sedikitnya 92 spesies endemik lokal telah diidentifikasi, seperti misalnya bunga terbesar di dunia *Rafflesia arnoldi* dan bunga tertinggi *Amorhoph Hallustitanium*.

Gunung Leuser merupakan laboratorium alam yang kaya akan keanekaragaman Hayati sekaligus juga ekosistem yang rentan. Sebagai laboratorium alam, Gunung Leuser merupakan surga bagi para peneliti baik internasional maupun nasional. Pusat Riset Orangutan yang berada di Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara misalnya, telah menjadi salah satu pusat riset terbesar dan berpotensi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu objek dan daya tarik wisata

alam yang terkenal di dalam kawasan Gunung Leuser adalah Pusat Pengamatan Orangutan Sumatera dan daerah Bukit Lawang yang berada di kawasan wisata alam Bukit Lawang - Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Tak kurang dari empat juta jiwa dari etnis yang berbeda tinggal di dalam atau berdekatan dengan kawasan taman nasional ini. Sebagian besar dari mereka adalah petani dan kehidupannya sangat bergantung pada perlindungan taman ini. Gunung Leuser secara konsisten memasok kebutuhan air bagi persawahan, perkebunan tumpang sari, perkebunan karet dan kelapa sawit skala kecil dan menengah.



CAGAR BIOSFER

SIBERUT

1981

Siberut adalah pulau terbesar dalam gugusan empat Kepulauan Mentawai yang terletak di lepas pantai barat Sumatera Barat. Luas kawasan cagar biosfer ini sekitar 403.301 ha meliputi area inti seluas 168.287 Ha, zona penyangga seluas 171.830 ha dan kawasan area transisi seluas 63.184 ha. Pada tahun 1981, Cagar Biosfer ini ditetapkan sebagai salah satu cagar biosfer UNESCO setelah diusulkan oleh LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

UNESCO memutuskan statusnya sebagai cagar biosfer karena memiliki ekosistem dan keragaman hayati yang unik. Dari sudut pandang biogeografi, isolasi dengan pengaruh yang terbatas dari daratan utama menyebabkan flora dan fauna di pulau Siberut telah berevolusi secara terpisah dari kejadian evolusi daratan utama Sunda Besar. Proses isolasi, sebagai sumber kolonisasi flora dan fauna, mendorong terbentuknya tingkat keendemikan yang tinggi dengan keunikan ekologi yang luar biasa. Ini terbukti dengan bentuk fauna yang lebih primitif dan kuno. Sekitar 60% dari spesies fauna di kawasan ini adalah endemik.

Selain itu, di Pulau Siberut tercatat 896 jenis kayu, 31 spesies mamalia, dan 134 spesies burung. Di samping kekayaan keanekaragaman hayatinya, Taman Nasional Siberut merupakan rumah bagi masyarakat Mentawai yang masih hidup secara tradisional dan selaras dengan alam. Dalam banyak hal, masyarakat Mentawai merupakan salah satu dari suku bangsa Indonesia yang masih mempertahankan budaya leluhurnya.

Kearifan tradisional masyarakat setempat memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan dengan cermat. Kegiatan sehari-hari masyarakat di daerah ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, misalnya melalui perburuan, bercocok tanam, berkebun, bertani, memanen cendana dan tebu serta tanaman obat. Mereka sangat tergantung kepada hutan.

Seiring dengan perubahan waktu, situasi sosial, budaya, ekonomi dan kebijakan juga mengalami perubahan. Tata cara baru dalam pemanfaatan eskploitasi sumber daya alam hutan telah diterapkan di sana. Konsesi

penebangan skala besar yang pernah dikeluarkan telah dicabut dan diterbitkan kembali untuk penyesuaian skema pemanfaatan eksploitasi sumber daya dengan prinsip konservasi berkelanjutan demi menjaga keanekaragaman hayati dan budaya. Hal ini yang membuat pulau Siberut itu menjadi unik. Instansi dan pihak yang terlibat dalam pengembangan Siberut adalah Komite Nasional Program MAB Indonesia, LIPI, Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai TN Siberut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Masyarakat, LSM, Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi.



CAGAR BIOSFER

GIAM SIAK KECIL - BUKIT BATU

2009

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) terletak di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Luas kawasan ini sekitar 705.271 ha dengan Area inti (*Core Area*) seluas 178.722 ha dan kawasan lindung untuk konservasi permanen seluas 72.255 ha dalam kawasan hutan produksi.

Giam Siak Kecil ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer pada tanggal 26 Mei 2009 dalam sidang ICC MAB di Pulau Jeju, Korea Selatan, hampir 28 tahun sejak penetapan Cagar Biosfer terakhir untuk Indonesia. Ini adalah Cagar Biosfer pertama yang diusulkan oleh Komite MAB Indonesia.

Kekhasan GSK-BB yang menjadikannya sebagai cagar biosfer adalah karena bentang alamnya yang berupa hutan rawa gambut. Secara ekologis, cagar biosfer ini berperan penting sebagai cadangan karbon bagi lingkungan.

GSK-BB memiliki dua suaka margasatwa, yang merupakan rumah bagi harimau sumatera, gajah, tapir, dan beruang madu. GSK-BB menjadi daerah yang memiliki potensi besar sebagai penghasil produksi perikanan dengan didukung oleh ekosistem yang sangat beragam. Lebih jauh, tiga fungsi dasar Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu adalah sebagai kawasan konservasi untuk melindungi dan melestarikan ekosistem beserta kekayaan hayati dan sumber daya genetik di dalamnya, sebagai penggerak perekonomian dan pengembangan masyarakat, dan sebagai laboratorium alam.

Kegiatan dalam zona inti meliputi pertanian untuk penghidupan, perikanan, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu. Zona penyangganya digunakan terutama untuk perikanan, hutan tanaman, perkebunan kelapa sawit dan komoditas, pertanian untuk penghidupan, dan pengumpulan hasil hutan kayu dan non-kayu. Area transisinya ditujukan terutama untuk pemukiman, pertanian mata pencaharian dan kebutuhan

penghidupan, petani kelapa sawit dan karet, karyawan/ buruh di perkebunan besar, industri berbasis pertanian, industri berbasis hutan, pertambangan, eksploitasi gas dan minyak dan berbagai jenis perdagangan/ penggunaan untuk keperluan komersial. Instansi-institusi yang berperan dalam pengembangan kawasan ini adalah: Komite Nasional Program MAB UNESCO Indonesia, LIPI, Kementerian LHK, pengelola kawasan konservasi (BBKSDA Riau), pemerintah daerah (Provinsi, Pemkab Bengkalis dan Pemkab Siak), perguruan tinggi, lembaga riset, *private sector*, LSM dan masyarakat setempat.



CAGAR BIOSFER WAKATOBI 2012

Wakatobi terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kawasan yang terdiri dari 39 pulau, 3 pulau kering terbakar serta 5 atol (pulau karang rendah), secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Areanya meliputi 1,39 juta ha terdiri dari: (a) Kawasan inti seluas 54.568 ha; (b) Area penyangga seluas 839.732 ha; dan (c) area transisi seluas 495.700 ha. Kawasan ini sebagian besar terdiri dari ekosistem laut pesisir yaitu terumbu karang, lamun, mangrove dan hutan pantai. Luas Kawasan Cagar Biosfer sama persis dengan luas wilayah Kabupaten Wakatobi dan dengan kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Untuk keseimbangan kepentingan ekonomi dan konservasi, pada tahun 2007-2008, Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Balai Taman Nasional Wakatobi yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LIPI, LSM dan masyarakat meminta Komite Nasional Program MAB Indonesia, LIPI, untuk membantu menyusun nominasi dan mengusulkan kawasan Wakatobi sebagai kawasan Cagar Biosfer kepada UNESCO. Setelah melalui penilaian IACBR, direkomendasikan kepada ICC MAB

bahwa kawasan Wakatobi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan Cagar Biosfer Wakatobi. Selanjutnya pada tahun 2012, pada sidang ICC MAB UNESCO ke 22, kawasan Wakatobi resmi ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Wakatobi dan merupakan Cagar Biosfer Indonesia ke-8.

Tiga kepentingan yang mendorong pihak UNESCO menjadikan kawasan perairan laut Wakatobi sebagai cagar biosfer, yaitu kearifan lokal masyarakat Wakatobi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Kearifan lokal yang dilindungi di Wakatobi adalah menyangkut tradisi budaya masyarakat dalam memperlakukan alam dan mengambil sesuatu dari alam. Sedangkan kelestarian lingkungan menyangkut kawasan perairan laut Wakatobi yang memiliki keberagaman terumbu karang dan biota laut yang cukup tinggi dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya yang ada di dunia. Selanjutnya, untuk kepentingan ekonomi, dikembangkan strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan, tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.

Wakatobi memang istimewa karena terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Oleh karena itu kegiatan paling populer adalah menyelam. Hampir seluruh perairan Wakatobi ini bisa menjadi lokasi menyelam atau *snorkeling*. Tetapi yang juga paling populer adalah *Onemohute* yang berada di Wangi-Wangi dan juga *Roma's Reef* di Tomia. Sebagian besar penduduk menggunakan sumber daya laut Wakatobi sebagai sumber pendapatan/mata pencaharian. Perikanan adalah sektor yang paling penting (94%), terutama perikanan laut dan pesisir. Sektor pertanian terutama untuk konsumsi domestik/untuk penghidupan. Petani menanam singkong, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan.



CAGAR BIOSFER

BROMO TENGGER SEMERU - ARJUNA

2015

Bromo Tengger Semeru adalah taman nasional di Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Cagar biosfer tersebut terletak di kawasan pegunungan api aktif, Gunung Bromo (2.392 mdpl), dan Tengger Semeru, Arjuno dan Gunung Welirang. Secara keseluruhan luasnya 413.374,57 ha, meliputi: area inti (78.144,50 ha) yang meliputi beberapa kawasan konservasi, zona penyangga (96.349,56 ha) berupa kawasan hutan produksi dan kawasan budidaya dan area transisi (238.880,51 ha), meliputi kawasan usaha pertanian tanaman pangan, perkampungan, kawasan industridan perkotaan. Kawasan area transisi cagar biosfer ini memiliki karakteristik sebagai kawasan pengembangan dan kegiatan produksi dan sebagai pusat pengembangan ekonomi

Cagar Biosfer BTS-A merupakan cagar biosfer yang diusulkan atas prakarsa Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, pengelola kawasan konservasi Balai TN Bromo Tengger Semeru, dan Kepala Kepala Balai Besar Konservasi Jawa Timur dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timut, Dirjen KSDAE, Kementerian

Kehutanan (KLHK sekarang), LIPI, 8 Pemerintah Kabupaten Kota antara lain: Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, Jombang, Kota Batu, Probolinggo, dan Ponorogo, LSM, Perguruan Tinggi, dan masyarakat di kawasan tersebut. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar biosfer UNESCO pada tahun 2015.

Penetapan UNESO adalah sebagai upaya pelestarian biodiversitas dan pengelolaan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal. Bromo Tengger Semeru merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki lautan pasir sepanjang 10 km bernama Tengger. Di area itu terdapat empat kerucut vulkanik baru, yaitu Gunung Batok (2.470 m), Gunung Kursi (2.581 m), Gunung Watangan (2.661 m), dan Gunung Widodaren (2.650 m). Namun, hanya Gunung Bromo yang masih aktif. Suhu di puncak Gunung Bromo berkisar antara 5-18 derajat Celcius.

Di samping itu, kawasan area inti Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno memiliki keanekaragaman jenis hayati yang tinggi. Tercatat 1.025 jenis flora dan 226 jenis diantaranya termasuk *family Orchidae* dan

260 jenis tanaman obat tradisional dan tanaman hias. Sedangkan hasil inventarisasi jenis fauna tercatat 158 jenis satwa liar terdiri dari 22 jenis mamalia dan 15 jenis diantaranya adalah dilindungi; 130 jenis burung dan 27 jenis diantaranya adalah dilindungi; 6 jenis reptilian.

Pada perkembangannya, Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru dan Arjuno memiliki *branding* “*Excotic Nature Of Ancient Java*” yang memiliki filosofi menggambarkan harmonisasi dalam pengelolaan kawasan dengan unsur-unsur di dalamnya yaitu manusia, budaya dan religi. Kegiatan ekonomi utama adalah pariwisata, pertanian, peternakan, dan pengumpulan Hasil hutan kayu dan non-kayu. Komunitas Tengger memiliki pengetahuan khusus tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terkait, seperti pengetahuan tentang tanda-tanda yang diberikan oleh alam, penggunaan sumber daya alam dan sarana untuk pelestariannya.



CAGAR BIOSFER

TAKA BONARATE - KEPULAUAN SELAYAR

2015

Cagar Biosfer Taka Bonerate Kepulauan Selayar terletak di Sulawesi bagian selatan antara Laut Flores, Laut Jawa dan Laut Banda. Luas area cagar biosfer ini adalah 4.410.736 ha, meliputi area inti seluas 530.765 ha (daratan: 341 ha, dan wilayah laut: 530.424 ha), zona penyangga seluas 702.760 ha (daratan 36.178 ha dan wilayah laut 666.083 ha); dan area transisi seluas 3.177.711 ha (daratan seluas 79.146 ha dan kawasan laut seluas 3.098.565 ha).

Taka Bonerate, bersama dengan Wakatobi, Ambon, Banda, Raja Ampat, dan juga Bunaken serta Kepulauan Derawan di Kalimantan, terletak di jantung Segitiga Terumbu Karang yang membentang dari Kepulauan Solomon di timur, Filipina di utara, Bali, Lombok, Komodo, Flores dan Laut Sawu di selatan. Bagian terakhir ini membentuk dasar dari Segitiga Terumbu Karang yang sangat besar. Selain kepulauan *Atol* (pulau karang rendah), Taka Bonerate ini mempunyai 21 pulau.

Cagar biosfer ini dinobatkan sebagai cagar biosfer UNESCO pada tahun 2015. Ciri khas yang membuatnya begitu istimewa sehingga akhirnya UNESCO menetapkan statusnya sebagai cagar biosfer, adalah

keberadaan *Atol* yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Luas *Atol* tersebut sekitar 220.000 ha, dengan sebaran terumbu karang seluas 500 km². Kondisi ini menghasilkan keanekaragaman jenis karang tertinggi di dunia dan beberapa jenis terumbu karang dunia mungkin hanya terdapat di kawasan ini. Oleh karena itu, kawasan ini sangat layak untuk dilindungi dan dilestarikan.

Berada di area *Coral Triangle Initiative (CTI)*, kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Tak berlebihan apabila kekayaan laut di kawasan yang terletak di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ini menjadikannya sebagai tujuan wisata alam dan bahari yang sangat menarik. Topografi kawasan Taka Bonerate sangat unik di mana *Atol* yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terdiri dari pulau karang kering dan pulau terumbu luas dan tenggelam, membentuk gugusan kepulauan dengan jumlah yang cukup banyak. Taka Bonerate juga merupakan habitat sejumlah spesies burung mulai dari burung darat hingga burung pesisir dan laut yang bermain-main di bukit pasir.

Aktivitas ekonomi utama adalah perikanan diikuti oleh pariwisata. Terdapat 15 buah pulau di Taka Bonerate yang dapat dinikmati untuk kegiatan menyelam, *snorkeling*, dan wisata bahari lainnya. Dengan dijadikannya Taka Bonerate sebagai cagar biosfer, maka Hal tersebut berdampak positif kepada kehidupan masyarakat setempat sebab mereka dapat meningkatkan penghasilan dari sektor pariwisata.

Para pihak yang terlibat di dalam pembangunan dan pengembangan Cagar Biosfer Taka Bonerate-Kepulauan Selayar adalah Balai TN Taka Bonerate, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kementerian KLHK, LIPI, Komite Nasional Program MAB Indonesia, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat di kawasan tersebut. Masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan tugas pokok fungsinya.



CAGAR BIOSFER BELAMBANGAN 2016

Cagar Biosfer Belambangan yang terletak di provinsi Jawa Timur adalah gabungan tiga taman nasional (Alas Purwo, Baluran dan Meru) dan satu cagar alam (Kawah Ijen). Cagar Biosfer Belambangan seluas 778.647,39 ha meliputi are inti sekitar 127.855,62 ha; zona penyangga 230.277,43 ha dan area transisi seluas 320.514,34 ha. Area inti mencakup ke tiga taman nasional dan cagar alam Kawah Ijen. Zona penyangga terdiri dari (1) kawasan produksi yang meliputi: kegiatan pertanian meliputi budidaya tanaman hortikultura, tanaman pangan, *agroforestry*, kegiatan perkebunan dan hutan tanaman industri; dan (2) kawasan pemukiman.

Cagar Biosfer Blambangan ditetapkan sebagai Cagar Biosfer UNESCO pada tahun 2016 dalam sidang *International Coordinating Council (ICC) Program Man and the Biosphere (MAB)* ke-28 yang diadakan di Lima, Peru. Pembangunan dan pengembangan Cagar Biosfer Belambangan ini pertama kali diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur (H. Sukarwo) setelah Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno disetujui UNESCO. Prakarsa dan usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur (Ir. Gatot) yang didukung oleh Komite Nasional Program MAB Indonesia, Direktur

Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kementerian Kehutanan (KLHK sekarang), 4 kawasan konservasi yaitu Balai TN Alas Purwo, Balai TN Baluran, Balai TN Meru Betiri, dan CA Kawah Ijen, Kepala Kepala Balai Besar Konservasi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Pemerintah Kabupaten Jember, LIPI, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat di kawasan tersebut

Area inti dari cagar biosfer ditutupi dengan hutan hujan tropis dengan ketinggian mulai dari 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Cagar alam ini terdiri dari ekosistem darat dan laut yang menampilkan lanskap karst, sabana, dan berbagai jenis hutan termasuk *alpine/subalpine*, *montane* atas (gunung), dataran rendah dan padang lamun. Kawasan ini juga memiliki hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lebih dari 300 spesies ikan telah diidentifikasi dan terumbu didominasi oleh spesies karang dari *genus Acropora*.

Wilayah ini merupakan hotspot keanekaragaman hayati dengan banyak spesies fauna termasuk banteng atau Banteng liar Jawa (*Bos javanicus*), *frigatebird* Natal

(*Fregata andrewsi*), Merak hijau (*Pavo muticus*) dan Macan tutul Jawa yang terancam punah (*Panthera pardus*). Selain itu, empat spesies penyu bersarang di pantai selatan dan timur Taman Nasional Alas Purwo: Penyu zaitun Ridley (*Lepidochelys olivacea*), Penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan Penyu hijau (*Chelonia mydas*).

Kegiatan ekonomi utama cagar biosfer adalah pertanian dan hortikultura, serta agroforestri (jati dan mahoni), terutama di kawasan penyangga dan kawasan transisi. Kedepan pengembangan ekonomi ditekankan kepada ekowisata dan budidaya tanaman yang ramah lingkungan agar perlindungan dan pelestarian cagar biosfer bisa optimal.



CAGAR BIOSFER

BERBAK SEMBILANG

2016

Taman Nasional Berbak Sembilang berada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, serta di Kabupaten Muaro Jambi – Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kawasan ini mencakup kawasan yang mewakili 4 kawasan konservasi (TN Berbak dan Sembilang, Suaka Margasatwa Dangku dan Suaka Margasatwa Bentayan) sebagai area inti dan dikelilingi oleh zona penyangga dan area transisi membentang di empat kabupaten yaitu Musi Bayuasin dan Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Total area Cagar Biosfer Berbak-Sembilang yang diusulkan seluas 3.819.837,28 ha, terdiri dari kawasan inti seluas 502.666,97 ha, zona penyangga seluas 922.965,29 ha, dan kawasan transisi 2.394.205,02 ha.

Topografi cagar biosfer bervariasi. Meskipun sebagian besar tanahnya datar, beberapa lainnya miring (0-20%), dengan ketinggian 0-140 mdpl. Fitur topografinya yang paling khas adalah: (a) lahan basah yang didominasi pohon, dengan hutan rawa air tawar, hutan banjir musiman, dan rawa berhutan di tanah anorganik; (b) danau air tawar *permanen*, seperti danau *oxbow* besar; (c) lahan basah berhutan pasang surut, dengan rawa bakau, rawa nipah dan hutan rawa air tawar pasang surut; (d) sungai / aliran / anak sungai permanen; (e) hutan gambut berhutan; (f) hutan rawa gambut; (g) area lahan basah buatan manusia; dan (i) kawasan hutan hujan dataran rendah.

Kawasan ini diusulkan menjadi Cagar Biosfer UNESCO oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, masyarakat setempat dan pihak lain secara aktif kepada Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional MAB Indonesia. UNESCO akhirnya setuju dan mengukuhkannya pada sidang ke-30 *International Coordinating Council of the Man and Biosphere Programme* (ICC-MAB) yang, kebetulan, berlangsung di Palembang.

UNESCO melihat bahwa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, daerah ini merupakan habitat yang cocok untuk berbagai flora-fauna Sumatera serta spesies langka. Ada 23 spesies palem (*Arecaceae*), 250 spesies burung (22 spesies adalah penyeberang migrasi), 13 spesies reptil, 60.000 ha rawa air tawar dan 1.500 ha hutan bakau yang tercatat. *Delta aluvial* besar di daerah tersebut berfungsi sebagai salah satu habitat paling penting bagi burung yang bermigrasi, yang jumlahnya total sekitar 0,5-1 juta, di Jalur terbang Asia Timur-Australasia. Beberapa spesies yang

dilindungi termasuk Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), Tapir Malaya (*Tapirus Indicus*), Beruang madu Malaya (*Helarctos Malayanus*), Buaya air asin (*Crocodylus Porosus*), Kucing marmer (*Pardofelis Parmorata*), Monyet daun (*Presbytis Rubicunda*).

Di samping itu UNESCO juga mencatat bahwa keberadaan dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Berbak-Sembilang 2018 – 2022 yang diadaptasikan dengan kondisi lokal merupakan merupakan keunggulan Cagar Biosfer ini. UNESCO juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, antara lain, LSM.

Kegiatan manusia di daerah tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan utama, yaitu memancing (90%) dan bertani (9%). Dalam skala kecil, masyarakat juga memanfaatkan daun palem (*Nypa fructican*) dan kayu vegetasi mangrove untuk membuat bagan dan pilar-pilar pendukung untuk jaring ikan.



CAGAR BIOSFER

BETUNG KERIHUN DANAU SENTARUM

2018

Terletak di ujung timur Provinsi Kalimantan Barat, di pulau Kalimantan, cagar biosfer terdiri dari dua taman nasional, Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Luas wilayahnya sekitar 3.115.200,50 ha meliputi: area inti seluas 944,090,96 ha; zona penyangga seluas 919.993,36 ha; dan area transisi seluas 1.251.116,18 ha. Kawasan ini adalah daerah yang sekarang mengalami erosi berkelanjutan. Di dataran tinggi, ada banyak rawa yang sempit dan memanjang dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Rawa-rawa terus dibanjiri air terutama selama periode hujan deras. Dataran tinggi ini berada di ketinggian 4.761 meter.

Cagar Biosfer ini diusulkan atas prakarsa pengelola kawasan konservasi Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum-Kapuas Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kementerian KLHK,

LIPI, Komite Nasional Program MAB Indonesia, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (Universitas Tanjung Pura, Pontianak), LSM, dan masyarakat di kawasan tersebut. UNESCO akhirnya menetapkan dalam Sidang ke-30 *International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme* (ICC-MAB) UNESCO di Palembang menetapkan kawasan Betung Kerihun Danau Sentarum di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sebagai Cagar Biosfer.

Pertimbangan UNESCO, antara lain, adalah kawasan ini merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna karena berbatasan hutan hujan tropis rendah dan gunung yang unik. Ada 1.216 spesies flora yang diidentifikasi di Taman Nasional Betung Kerihun, termasuk 418 genera dan 110 famili. Tujuh puluh lima spesies endemik di Kalimantan, dan 14 spesies baru dicatat. Keanekaragaman fauna juga sangat tinggi, termasuk 48 spesies mamalia, 17 spesies primata, 301 spesies burung, 103 spesies herpetofauna, 112 spesies ikan, dan

170 spesies serangga. Taman Nasional Danau Sentarum adalah habitat sekitar 794 spesies pohon dan spesies anggrek, sekitar 147 spesies mamalia, 67 spesies reptil, 22 spesies amfibi Indonesia, 311 spesies burung, dan 266 spesies ikan.

Kegiatan ekonomi utama masyarakat meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Perkebunan padi, misalnya, menempati area seluas 22.083 ha. Berbagai komoditas perkebunan seperti karet, kelapa, kopi, lada, coklat (kakao), kapas, tebu, minyak sawit, pinang dan jarak (*Ricinus Communis*) telah dikembangkan.



CAGAR BISOFER

RINJANI - LOMBOK

2018

Cagar Biosfer Rinjani Lombok meliputi seluruh area pulau Lombok, NTB. Total area kawasan Cagar ini adalah 459.086,62 ha dengan: area inti: 41.330,00 Ha; zona penyangga 109.443,30 ha; dan area transisi 308.323,32 ha. Area inti adalah Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki kekhasan kawasan konservasi di kawasan pegunungan dan memiliki nilai ekologi, ekonomi dan sosial budaya yang tinggi. Kawasan zona penyangga dan area transisi berpotensi sebagai pusat produksi tanaman hortikultura (sayur mayur dan buah-buahan), palawija (padi, tanaman semusim) dan tanaman perkebunan (kopi, coklat); usaha peternakan (sapi perah, kambing, ayam, dan lain-lain).

Berangkat dari keunikan dan keragaman ekosistem yang dimiliki, kawasan ini diajukan sebagai Cagar Biosfer. Proses pengajuan diawali dengan usulan Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Komite Nasional Program MAB Indonesia dan LIPI. Usulan tersebut diikuti dengan kegiatan sosialisasi kepada para pihak kunci di kawasan tersebut terutama kepada pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dan masyarakat Pulau Lombok. Proses keseluruhan nominasi dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif Komite Nasional Program MAB Indonesia, LIPI yang dibantu oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB dan para pihak lainnya.

UNESCO menetapkan kawasan ini sebagai Cagar Biosfer dalam Sidang ke-30 *International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (ICC-MAB)* UNESCO tahun 2018 di Palembang, bersamaan

dengan penetapan Cagar Biosfer Betung Kerihun - Danau Sentarum.

Dalam penilaian UNESCO, cagar yang diusulkan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan berbagai tipe hutan vegetasi (yaitu vegetasi hutan sabana, hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan). Sekitar 40% dari hutan di kawasan cagar biosfer Rinjani-Lombok yang diusulkan berada di hutan primer. Ciri-ciri flora dan fauna di wilayah cagar yang diusulkan mewakili bentuk spesies Asia dan Australia dengan tingkat endemisme yang tinggi, terhubung ke lokasi area dalam wilayah *Wallacea*. Kawasan penyangga dan kawasan transisi berpotensi menghasilkan tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan), tanaman (padi, tanaman semusim) dan tanaman perkebunan (kopi, kakao), dan peternakan (susu, sapi, kambing, ayam dan lain-lain). Kegiatan pariwisata di daerah ini berangkat dari keindahan pemandangan alam Gunung Rinjani dan budaya Sasak masyarakat yang memiliki keunikan warisan budaya yang terus terjaga berabad-abad hingga hari ini.

Komite Penasihat memuji pihak berwenang Indonesia atas upaya mereka untuk memulihkan hutan terdegradasi. Tercatat bahwa cagar biosfer

yang diusulkan adalah proyek percontohan untuk implementasi REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Hutan Degradasi) di Pulau Lombok. Pendapatan yang dihasilkan dari kompensasi karbon adalah direncanakan sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan untuk cadangan.

Situs yang diusulkan memiliki Rencana Manajemen Terintegrasi awal. Dalam hal ini, Komite mendorong pihak berwenang Indonesia untuk mengembangkan kebijakan dan tindakan khusus untuk dipromosikan dalam pembangunan berkelanjutan. Forum Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Rinjani-Lombok, didirikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, berfungsi sebagai payung untuk mengkoordinasikan perkembangan cagar biosfer.

Komite Penasihat mencatat bahwa semua area yang dicakup oleh biosfer yang diusulkan cagar alam bersifat *terrestrial* dan menyoroti tidak adanya ekosistem laut. Karena itu Komite mendorong otoritas untuk mempertimbangkan masuknya wilayah laut termasuk kawasan *mangrove*.



CAGAR BIOSFER

TOGEAN TOJO UNA - UNA

2019

Cagar Biosfer Togeian Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, terletak di pusat segitiga terumbu karang dunia. memiliki sekitar 482 pulau dan Hanya 7 pulau yang berpenghuni. Luas areanya adalah 2.187.631,5 ha yang terdiri dari area inti (Taman Nasional Kepulauan Togeian dan Cagar Alam Tanjung Api) seluas 368.463,7 ha, zona penyangga seluas 281.135,8 ha dan area transisi seluas 1.538.032 ha. Biosfer adalah rumah bagi sekitar 149.214 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah penduduk lokal (nelayan) di daerah transisi di permukiman utama kota Ampana. Kawasan Taman Nasional Pulau Togeian yang menjadi area inti Cagar Biosfer ini merupakan kepulauan yang berada dalam zona transisi jalur *Wallace* dan *Weber* serta merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang melintasi tengah Teluk Tomini.

UNESCO menetapkan Togeian Tojo Una-Una menjadi cagar biosfer dunia pada sidang ICC MAB ke-31 yang berlangsung pada tanggal 19 Juni 2019 di Paris, Prancis. Cagar Biosfer Togeian Tojo Una-Una diusulkan atas prakarsa pengelola kawasan konservasi Balai TN

Kepulauan Togeian dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mendapat dukungan dari Dirjen KSDAE, Kementerian KLHK, LIPI, Komite Nasional Program MAB Indonesia, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat di kawasan tersebut.

Sebagai negara kepulauan, flora di daerah inti dari kawasan Cagar Biosfer Togeian Tojo Una-Una dikelompokkan menjadi dua, yaitu flora darat dan flora akuatik. Hutan dataran rendah mencakup sebagian wilayah daratan Kepulauan Togeian. Komposisi hutan dan lautan di Kepulauan Togeian dianggap unik karena letak pulau-pulau ini di Garis *Wallacea* dan garis *Weber*, sehingga memengaruhi keanekaragaman Hayati di dalamnya. Berdasarkan survei lapangan dan studi Tim Terpadu 2004, di seluruh Kepulauan Togeian, tercatat 363 spesies flora. Flora di Pulau Togeian termasuk spesies *palapi* (*Heritiera Javanica*), kayu besi (*Intsia Bijuga*), *Siuri / Ranggu* (*Koordersiodendron Pinnatum*), Uru (*Magnolia Vrieseana*), Serpih (*Elmerrillia sp.*), dan beberapa spesies *Dipterocarpaceae* seperti *Shorea sp.*, *Dipterocarpus sp.*, dan *Hopea sp.* Di kawasan hutan

yang dibuka, spesies ditemukan termasuk Pohon Sabun (*Alphitonia Excelsa*), Pohon Cananga (*Cananga Odorata*), Kadam (*Anthocephalus Chinensis*), Jackapple (*Alstonia Spectabilis*), Mallotus *sp.*, Macaranga *sp.*, Yellow Cheesewood (*Nauclea Orientalis*), dan Crima / Bintuang (*Octomeles Sumatrana*).

Penduduk setempat memanfaatkan hutan bakau sebagai tempat memancing kepiting, udang, kerang, ikan, dan lain-lain, juga untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Cagar biosfer Togeian Tojo Una-Una memiliki keanekaragaman spesies ikan yang relatif tinggi (596 spesies ikan). Beberapa ikan dan teripang adalah produk utama bagi masyarakat lokal dan memiliki nilai ekonomi tinggi.



CAGAR BIOSFER

SALEH - MOYO - TAMBORA (SAMOTA)

2019

Teluk Saleh, Moyo, dan Tambora berada di pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat atau NTB, di antara Cagar Biosfer Rinjani-Lombok dan Pulau Komodo. Cagar Biosfer yang disingkat “Samota” meliputi area seluas 724.631,52 ha, dengan luas area inti sekitar 162.947,59 ha, zona penyangga sekitar, 227.739,80 ha dan area transisi 333.944,13 ha.

Cagar Biosfer Samota diusulkan atas usulan Gubernur NTB. Usulan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan menghubungi Komite Nasional Program MAB Indonesia. Proses penyusunan nominasi langsung didukung oleh pengelola kawasan konservasi Balai TN Tambora, Pemerintah Kabupaten Bima. Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumba, Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kementerian KLHK, LIPI, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat di kawasan tersebut.

Penetapan Somota sebagai Cagar Biosfer UNESCO

dilakukan oleh sidang sesi ke-31 of ICC MAB di Paris, Prancis, Rabu, 19 Juni 2019, bersamaan dengan penetapan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una.

Dalam pengamatan dan penilaian UNESCO, Cagar Biosfer Saleh-Moyo-Tambora terdiri dari lima ekosistem utama: pulau-pulau kecil, kawasan pantai bakau, pesisir, hutan dataran rendah dan gunung, serta sabana. Di sepanjang kawasan itu bertebaran 49 pulau kecil (gili), 36 di Sumbawa, tepatnya di Teluk Saleh, 13 di Dompu. Ada 52 desa di lingkaran Samota. Cagar Biosfer adalah rumah bagi 146.000 orang dari berbagai kelompok etnis. Area intinya memainkan peran penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan itu sementara zona penyangga dan daerah transisinya memiliki potensi pertanian untuk produksi buah dan sayuran, serta beras, kopi dan coklat, dan peternakan. Keindahan Pegunungan Tambora memiliki potensi wisata, sementara masyarakat Pulau Sumba menarik wisata budaya.

Masyarakat di sekitar daerah Samota, terutama di zona penyangga dan zona transisi didominasi oleh petani dan nelayan. Khusus untuk masyarakat pedesaan yang berbatasan dengan hutan di kawasan pengelolaan Taman Nasional Gunung Tambora, mereka menggunakan kawasan hutan untuk pertanian, penggembalaan, perburuan, dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu dan rotan. Hanya sebagian kecil orang yang mencari mata di luar beberapa profesi seperti buruh, pengusaha, dan pegawai pemerintah. Ini berarti bahwa mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan Samota terkait erat dengan keberadaan kawasan hutan.



CAGAR BIOSFER

BUNAKEN - TANGKOKO - MINAHASA

2020

Bunaken Tangkoko Minahasa (BTM) adalah kesatuan biosfer yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 5 kawasan, yaitu Taman Nasional Bunaken, Taman dan Hutan Lindung Gunung Tumpa HV Worang, Cagar Alam Gunung Lokok, Hutan Konservasi Tangkoko (terdiri dari Cagar Alam Dua Saudara dan Taman Wisata Alam Batu Putih) dan Cagar Alam Liar Manembo-Nembo. Secara adminitrasi, BTM berada di 6 kabupaten dan kota yaitu Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Manado, Bitung dan Tomohon. Total kawasan biosfer mencapai 746.405,92 ha, yang terdiri dari zona utama seluas 89.686,730 ha, 182.539,905 ha zona penyangga dan 474.169,285 ha adalah zona transisi. Biosfer Bunaken Tangkoko Minahasa adalah konsep gabungan yang terhubung antara konservasi keanekaragaman hayati penelitian dan pengembangan berkelanjutan berbasis komunitas.

Biosfer BTM sedang menghadapi tantangan dari meningkatnya aktifitas manusia di kawasan tersebut dan adanya perubahan iklim global yang mengancam ekosistem keanekaragaman hayati hutan hujan tropis di

Sulawesi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berserta pemerintah kota dan kabupaten terkait bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Sam Ratulangi dan LIPI menekankan pentingnya untuk melindungi kawasan tersebut untuk menjadi UNESCO *biosphere reserve*.

Biosfer BTM resmi menjadi UNESCO *Biosphere Reserve* melalui sidang sesi ke-32 *International Coordination Council of the Man and Biosphere* (32nd ICC MAB) pada tanggal 28 Oktober 2020. Dengan status tersebut, biosfer BTM menjadi anggota *World Network of Biosphere Reserves* (WNBR), jejaring dinamis dan interaktif untuk mendukung harmonisasi integrasi antara masyarakat dan alam untuk keberlangsungan pembangunan dan dukungan kerjasama internasional melalui berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman, peningkatan kapasitas dan praktik baik terkait manusia dan lingkungan (biosfer). Selain itu, dengan status tersebut, memberi kesempatan bagi BTM untuk koordinasi lintas *stakeholders* dapat menyusun rencana pembangunan di tingkat lokal dan nasional terutama di zona pemanfaat

untuk komunitas setempat yaitu zona penyangga dan transisi. Biosfer BTM dapat menjadi area pembelajaran untuk penyusun kebijakan, laboratorium bagi kelompok riset dan ilmuwan, pelaku manajemen lingkungan dan komunitas setempat dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

Biosfer BTM memiliki mosaik sistem ekologi yang mempresentasikan biogeografi regional seperti ekosistem terumbu karang, hutan bakau dan rumput laut yang merupakan habitat binatang yang dilindungi seperti Paus (*Balaenoptera musculus*), Lumba-lumba (*Delphinus Delphis*) dan Hiu (*Rhincodon Typus*). Selain itu memiliki 55 jenis tanaman dan 107 jenis binatang yang ada di kawasan taman nasional, seperti Yaki (*Black Monkey*), burung Raja Udang, Rangkong, Anoa, Maleo, Tangkasi (*Tarsium spectrum*) dan Kuskus (*Phalanger*). Kekayaan BTM membuka peluang untuk dieksplorasi dan dipertunjukkan terutama pada pendekatan pembangunan berkelanjutan pada skala regional.



CAGAR BIOSFER

KARIMUN JAWA - JEPARA - MURIA

2020

Pada sidang sesi ke-32 *International Coordination Council of Man and the Biosphere Programme (32nd ICC MAB)* tanggal 28 Oktober 2020, UNESCO mengesahkan secara resmi Biosfer Karimunjawa Jepara Muria (KJM) sebagai UNESCO *Biosphere Reserve* dan tergabung dalam anggota *World Network of Biosphere Reserves* (WNBR). Dengan status tersebut, melalui jejaring WNBR Biosfer KJM dapat saling bertukar pengalaman dan praktik dengan sesama anggota dari negara lain terutama dalam upaya menjaga keberlangsungan pembangunan yang harmonis antara masyarakat dan alam.

Penetapan ini adalah kerja keras dari Taman Nasional Karimunjawa, Provinsi Jawa Tengah dan LIPI serta didukung penuh oleh Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta LSM dan komunitas lokal. Pengajuan dan penetapan biosfer KJM ini sangat bermakna dalam upaya

perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang tersisa di Jawa Tengah dari ancaman aktivitas manusia dan perubahan iklim global.

Biosfer KJM melingkupi tiga kawasan lindung yaitu Taman Nasional Karimunjawa, Hutan Lindung Gunung Muria dan Cagar Alam Gunung Celering. Secara keseluruhan memiliki luas 1.236.083 juta ha yang terdiri dari 118.965 ha adalah zona inti, 173.273 ha zona penyangga dan 943.777 ha zona transisi. Ketiga cagar alam ini memiliki berbagai macam ekosistem termasuk pulau-pulau kecil, ekosistem laut, hutan bakau, hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan.

Diantara ketiga kawasan lindung tersebut, TN Karimunjawa adalah primadona pariwisata Jawa Tengah. Setiap tahunnya, TN Karimunjawa menghasilkan Rp. 11 Triliun yang berasal dari sektor utama perikanan dan tambahan dari sektor pariwisata. Nilai ekonomi

yang berasal dari kekayaan sumber daya alam dan keindahan alam tersebut dikelola dengan konsep biosfer, yaitu konservasi keanekaragaman hayati untuk penelitian dan pengembangan secara efisiensi dan berkelanjutan, seperti perikanan yang menjadi sumber kehidupan 779 nelayan setempat. Biosfer KJM memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna seperti *Leopard* Jawa, Merak, Ular Sanca, Penyu Hijau, 23 spesies Kupu-kupu, Rusa Jawa, Elang dsb. Selain sebagai laboratorium penelitian, Biosfer KJM juga menjadi pusat pengembangan *ecotourism* dan pariwisata laut yang berbasis komunitas setempat.



CAGAR BIOSFER

MERAPI - MERBABU - MANOREH

2020

Untuk meningkatkan kesadaran pada tanggung-jawab pelestarian sumber daya alam dan ekosistem, pemangku kebijakan yang terkait di kawasan lindung Merapi, Merbabu dan Manoreh telah mengajukan ketiga situs tersebut dalam daftar *Man and Biosphere* (MAB) UNESCO. Program MAB dinilai memiliki keunggulan konsep dalam perangkatnya dan metode pendekatannya untuk memperkuat kerjasama dan tanggung-jawab untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengembangan yang memenuhi prinsip ramah lingkungan sekaligus memadukan potensi sosial-ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan kesinambungan ekosistem di kawasan tersebut.

Cagar Biosfer MMM disahkan secara resmi oleh UNESCO, pada sidang sesi ke-32 *International Coordination Council of Man and Biosphere* (32nd ICC MAB) tanggal 28 Oktober

2020. Bagi pemangku kepentingan, pemerolehan status cagar biosfer semakin memperkuat nilai biosfer-biosfer di Indonesia, sebagai model pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal.

Program pengajuan MMM menjadi biosfer digagas oleh LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Taman Nasional (TN) Gunung Merapi, TN Merbabu, Badan Konservasi Sumber daya Alam Yogyakarta dan didukung oleh Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Semarang, Purworejo, Sleman, Kulon Progo, Kota Magelang dan Salatiga, serta Universitas Sebelas Maret. Manajemen konsep cagar biosfer memperkuat pemangku kepentingan di masing-masing kawasan lindung dalam berkoordinasi, pemahaman satu dengan lainnya, kesatuan kepentingan pengelolaan sumber daya alam untuk masa depan.

Biosfer MMM adalah kombinasi ekosistem alam yang terdiri dari taman nasional, cagar suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung dan ekosistem buatan seperti kawasan pertanian, perkebunan dan hunian yang seluas 254.876,75 ha. Zona inti biosfer yang berupa ekosistem hutan pegunungan seluas 12.447 ha, zona penyangga 108.788 ha dan zona transisi yang berupa lahan garapan seluas 133.640 ha. MMM adalah tempat hidup ekosistem flora dan fauna khas dan unik dari jenis habitat hutan Jawa-Bali dan formasi tanah *karst*.

SEKILAS TENTANG PROGRAM UNESCO GLOBAL GEOPARK



UNESCO *Global Geoparks* (UGGs) adalah satu kesatuan wilayah geografis tunggal di mana situs dan lanskap dengan signifikansi geologi internasional dikelola dengan konsep holistik untuk perlindungan, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. *Geopark Global* UNESCO mengandung warisan geologis, dan semua aspek lain dari warisan alam dan budaya. UGG ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kendala utama yang dihadapi masyarakat, seperti bagaimana menggunakan sumber daya bumi secara berkelanjutan, mengurangi efek perubahan iklim dan mengurangi risiko terkait bencana alam. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan geologis UGGs dalam masyarakat saat ini, UGGs menjadi identitas kebanggaan bagi masyarakat lokal dan memperkuat jati diri masyarakat dengan kawasan tersebut. Melalui upaya tersebut, tidak hanya sumber daya geologi daerah tersebut dilindungi, tapi juga penciptaan sumber ekonomi daerah melalui *geotourism*.

UGG memberdayakan masyarakat lokal dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan kemitraan yang kohesif dengan tujuan bersama untuk mempromosikan warisan proses geologi yang signifikan, lanskap, periode waktu, proses sejarah yang terkait dengan geologi, serta keindahan geologi yang luar biasa. Proses pembentukan UGG membutuhkan komitmen kuat dari komunitas lokal, kemitraan ganda lokal yang kuat dengan dukungan publik dan politik jangka panjang, dan pengembangan strategi komprehensif yang akan memenuhi semua tujuan komunitas sambil menampilkan dan melindungi warisan geologis daerah tersebut.

Geopark yang diajukan haruslah memiliki warisan geologi yang bernilai internasional dan dikelola oleh badan hukum yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang memiliki rencana pengelolaan yang komprehensif, yang meliputi masalah tata kelola, pembangunan, komunikasi, perlindungan, infrastruktur, keuangan, dan kemitraan.

Geopark yang diajukan harus dapat dilihat oleh pengunjung dan masyarakat lokal melalui situs web khusus, selebaran, dan peta detil Geopark yang menghubungkan area geologi dan situs lain. Selain itu kandidat Geopark harus memiliki identitas korporat.

Timeline pengajuan proposal UNESCO Global Geopark dan prosedur evaluasi

Tahapan	Waktu
Kandidat UNESCO Global Geopark mengajukan <i>letter of intent</i>	sebelum 1 Juli
Pengajuan aplikasi	1 Oktober - 30 November
Pemeriksaan verivikasi kelengkapan dokumen	setelah 1 Desember
Evaluasi desktop	sebelum 30 April
Misi untuk penilaian situs	mulai 1 Mei
Rekomendasi terhadap aplikasi oleh Dewan UGGs	September
Keputusan Dewan Eksekutif UNESCO	Maret-Juni (<i>spring session</i>)

Untuk memastikan kualitas UGGs, maka akan dilakukan validasi ulang secara menyeluruh setiap empat tahun untuk memeriksa fungsi dan kualitas UGGs. Sebagai bagian dari proses validasi ulang, UNESCO *Global Geopark* yang sedang ditinjau harus mempersiapkan:

- ringkasan satu halaman dari UNESCO *Global Geopark* untuk diserahkan ke Sekretariat UGG UNESCO satu tahun sebelum validasi ulang;
- laporan kemajuan mengikuti format *template*, formulir evaluasi dan formulir evaluasi kemajuan untuk diserahkan melalui jalur resmi tiga bulan sebelum inspeksi lapangan.

Misi lapangan akan dilakukan oleh dua evaluator untuk memvalidasi kembali kualitas UGGs. Jika, berdasarkan laporan evaluasi lapangan, UNESCO *Global Geopark*:

- terus memenuhi kriteria bahwa kawasan tersebut akan berlanjut sebagai UNESCO *Global Geopark* untuk periode empat tahun berikutnya (statusnya disebut “*green card*”);
- tidak lagi memenuhi kriteria, badan pengelola akan diberitahu untuk mengambil langkah yang tepat dalam periode dua tahun (statusnya disebut “*yellow card*”);
- tidak lagi memenuhi kriteria dalam waktu dua tahun setelah menerima “kartu kuning”, kawasan tersebut akan kehilangan statusnya sebagai UNESCO *Global Geopark* (statusnya disebut “*red card*”).

Saat ini pengelolaan Geopark di Indonesia telah menjadi kebijakan nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Hingga tahun 2020, Indonesia telah memiliki lima (5) UNESCO *Global Geopark*. Daftarnya adalah sebagai berikut:

1. Kaldera Batur Bali (2012)
2. Gunung Sewu (2013)
3. Gunung Ciletuh (2018)
4. Gunung Rinjani (2018)
5. Kaldera Toba (2019)

Deskripsi ringkas masing-masing UGG tersebut dapat dilihat pada halaman-halaman berikut.

TETAPAN UNESCO GLOBAL GEOPARK DI INDONESIA



GLOBAL GEOPARK

KALDERA BATUR - BALI

2012

Gunung Batur Bali menjadi Geopark Dunia pertama dari Indonesia, yang ditetapkan secara resmi di Konferensi Geopark Eropa ke-11 di Geopark Auroca Portugal, pada 20 September 2012. Berada di ketinggian antara 1.000 s.d. 2.172 meter di atas permukaan laut (mdpl), Geopark Batur masuk dalam adminitrasi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Gunung Batur merupakan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia, yang menjadi bagian dari rangkaian “*Ring of Fire*” Pasifik (Cincin Api Pasifik). Sejak 1804, gunung Batur telah meletus sebanyak 26 kali.

Pengajuan Kawasan Gunung Batur untuk masuk ke dalam UNESCO *Global Geopark Network* dimulai dari awal tahun 2012 atas kerjasama antara *Geological Association*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Kabupaten Bangli. Kaldera Gunung Batur Bali pun dinyatakan

resmi tergabung dalam daftar *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO, setelah melalui beberapa penilaian dan studi kelayakan. Gunung Batur dinilai memenuhi beberapa kriteria sebagai *Geopark*, salah satunya adalah keterlibatan masyarakat setempat dalam mempromosikan pembangunan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian budaya, juga sebagai mata pencaharian berkelanjutan.

Beberapa alasan lain, pengajuan Kaldera Batur sebagai Geopark adalah keunikan dan keindahan lanskap geologinya seperti misalnya kawah dan kaldera serta daya tarik danau Batur yang telah menjadi objek wisata andalan di Bali. Endapan abu letusan Gunung Batur Purba telah menghasilkan material padat dan sangat tebal yang hingga saat ini digunakan sebagai bahan bangunan candi, rumah, dan patung. Dari sisi flora dan fauna, gunung Batur memiliki keanekaragaman hayati

seperti spesies tanaman hutan, sekelompok monyet yang hidup di sekitar kawah dan juga anjing khas Kintamani yang dikenal dengan sebutan ‘Gembrong’. Sedangkan dari sisi budayanya, masyarakat setempat memiliki adat istiadat yang unik seperti tradisi pemakaman yang menempatkan jenazah di bawah pohon Tarumenyan (Mepasah).

Melalui UNESCO Global Geopark, geosit Batur menjadi objek konservasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi setempat melalui pariwisata berkelanjutan. UNESCO Global Geopark mengembangkan program “*School to Geopark*” (program jelajah dan mengenal alam untuk pelajar) dan “*Geopark to School*” (program sosialisasi informasi ke sekolah tentang lingkungan alam Batur dan warisan bumi).



GLOBAL GEOPARK

GUNUNG SEWU

2013

Awal mulanya bernama Geopark Pacitan, Gunung Sewu ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 13 Mei 2013 oleh Komite Geopark Indonesia dan selanjutnya diajukan ke UNESCO *Global Geopark* pada September 2013. Pada tanggal 21 September 2015, Gunung Sewu akhirnya resmi ditetapkan sebagai *Geopark Global* UNESCO setelah melengkapi 9 (sembilan) butir rekomendasi GGN-UNESCO, beberapa di antaranya adalah pembangunan dan pengembangan objek konservasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi setempat melalui *geo-tourism* dan *geo-product*.

Terletak di Pegunungan Selatan Jawa Timur, Gunung Sewu membentang dari timur ke barat sepanjang 120 kilometer. Zona depresi yang ditempati oleh gunung berapi aktif Merapi dan Lawu menjadi pembatas di bagian utara, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kawasan Gunung Sewu yang berada di ketinggian antara 5 m s.d. 700 m di atas

permukaan laut (mdpl), memiliki jajaran gunung batu zaman Paleogen Atas dan ribuan perbukitan batu kapur yang berusia lebih muda. Geologi daerah Gunung Sewu merupakan hasil dari berbagai deposisi dan proses tektonik, serta juga dari proses *surface* (permukaan). Proses terakhir ini menghasilkan hamparan bebatuan karbonat dengan variasi bentuk yang mengikuti bentang alam, beragam fosil, struktur deformasi, dan keunikan hidrogeologi.

Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* adalah lanskap *karst* tropis klasik di bagian tengah selatan Pulau Jawa yang terkenal di dunia dan didominasi oleh batu kapur. Batu kapur tersebut berumur Neogen dan terdiri dari fasies klastik berkapur jenis Tufa (formasi Oyo dan Kepek) serta fasies terumbu karang (formasi Wonosari). Sampai hari ini, masih terdapat aktivitas tektonik di wilayah ini karena Gunung Sewu terletak di depan zona subduksi aktif antara Samudra Hindia, Australia,

dan lempeng Eurasia. Peningkatan aktif terjadi sejak 1,8 juta tahun dan menghasilkan teras sungai yang tampak di lembah kering Sadeng serta teras pantai di sepanjang pantai bagian selatan.

Geopark Gunung Sewu menjadi destinasi wisata yang lengkap, mulai dari pantai kawasan Gunung Kidul, beragam jenis goa di Pacitan, hingga industri kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Kawasan Gunung Sewu juga menjadi daerah penelitian berbagai aspek ilmu pengetahuan, seperti geologi, air tanah, biologi, arkeologi, sejarah alam, dan budaya.



GLOBAL GEOPARK

CILETEUH - PELABUHANRATU

2018

Ciletuh Palabuhanratu resmi mendapatkan predikat sebagai UNESCO *Global Geopark* (UGG) dalam sidang *Executive Board UNESCO* ke-204 pada 12 April 2018 di Paris, Prancis. Pengajuan Ciletuh Palabuhanratu sebagai UGG dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah melalui tahap penilaian sejak bulan Agustus 2017.

Ciletuh Palabuhanratu terletak di pulau Jawa, di sebelah barat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Geopark ini terletak di perbatasan zona aktif tektonik: zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, yang terus menyatu 4 milimeter per tahun. Daerah ini ditandai oleh keanekaragaman geologi yang langka dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga zona yaitu zona subduksi batu terangkat, zona lanskap Dataran Tinggi Jampang dan zona pergeseran magmatik kuno dan evolusi *face arc*. Bukti proses subduksi yang terjadi selama zaman Kapur (145-66 juta tahun lalu) ditemukan di daerah Ciletuh dalam bentuk

formasi batuan yang tersimpan di palung subduksi bagian dalam. Formasi batuan tersebut terdiri dari *Ophiolite*, *Metamorf*, batuan sedimen dalam, dan area percampuran bebatuan yang dikenal sebagai formasi batuan permukaan tertua di Jawa Barat.

Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan utama. Wisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan Ciletuh seperti air terjun, pantai, sumber air panas, sungai, gunung, cagar alam, konservasi penyu, serta mengamati langsung kehidupan budaya Sunda. Beberapa aspek dari Ciletuh Palabuhanratu yang dinilai memenuhi persyaratan sebagai UGG antara lain adalah *geodiversity* (keanekaragaman kondisi geologi), *biodiversity* (keanekaragaman hayati) dan *culture diversity* (keanekaragaman budaya).

Dari segi budaya, beberapa komunitas desa masih menjalankan tradisi leluhur Kasepuhan, khususnya

di bidang pertanian yang dikenal dengan Tatanen. Keterlibatan masyarakat setempat dalam inisiatif konservasi, edukasi dan promosi geopark menjadi faktor utama dalam program pembangunan berkelanjutan. Melalui program pemberdayaan masyarakat, Ciletuh Palabuhanratu Geopark bertujuan untuk memberikan akses dan kemandirian yang lebih besar kepada masyarakat.



GLOBAL GEOPARK

RINJANI - LOMBOK

2018

Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditetapkan menjadi *Geopark* Dunia pada sidang UNESCO yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Pengajuan Gunung Rinjani sebagai UNESCO *Global Geopark* telah dimulai sejak 2013 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Dinas Pariwisata NTB.

Gunung Rinjani masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang mencakup empat wilayah administrasi yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Salah satu pesona unggulan TNGR adalah Danau Segara Anak yang berada di ketinggian 2.010 mdpl. Danau Segara Anak berada di tengah kaldera Gunung Rinjani Purba dengan puncak tertinggi Gunung Rinjani mencapai 3.726 mdpl.

Dikenal dengan sebutan “*the tropical bridge between*

Asia and Australia”, Rinjani-Lombok UNESCO *Global Geopark* memiliki bentang alam yang kaya dan beragam jenis hutan mulai dari sabana dan hutan semi gugur, sampai hutan cemara pegunungan rendah dan hutan cemara pegunungan tropis.

Berdasarkan penilaian tim UGG UNESCO, Gunung Rinjani memiliki beberapa poin yang dinilai memenuhi kriteria sebagai UGG, salah satunya adalah keberadaan Rinjani sebagai sumber kehidupan utama masyarakat Lombok. Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 2.800 km² yang dianggap sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, memiliki konsep dan manajemen dalam pengelolaan gunung berbasis *eco-tourism* yang telah diterapkan sejak lama.

Dari segi budaya, terdapat beberapa ritual adat yang diwariskan turun-temurun dan masih ada hingga kini. Beberapa di antaranya adalah upacara perkawinan

adat yang dikenal dengan *Nyongkolanis*, pertarungan adat yang dilakukan oleh Pepadu (pejuang) dengan menggunakan tongkat (rotan), dan tameng yang terbuat dari kulit binatang (ende). Terdapat juga Wayang Sasak yang merupakan permainan wayang kulit tradisional dengan cara pementasan yang unik serta berkaitan dengan Sunan Prapen, tokoh yang memperkenalkan Islam dan Wayang di tanah Lombok.



GLOBAL GEOPARK

KALDERA TOBA

2019

Setelah penantian selama sembilan tahun, Kaldera Toba akhirnya dinobatkan sebagai UNESCO *Global Geopark* di sidang *Executive Board* UNESCO sesi ke-209 di Paris Prancis pada tanggal 2 Juli 2020. Kaldera Toba berhasil masuk daftar UNESCO setelah dinilai dan diputuskan oleh *Global Geoparks Council* UNESCO pada *the 4th UNESCO Global Geoparks International Conference* di Lombok, Indonesia, pada tanggal 31 Agustus – 2 September 2019. Pengajuan Kaldera Toba sebagai UGG merupakan upaya bersama dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat setempat.

Berdasarkan tim penilai UGG, beberapa kriteria telah dipenuhi oleh Kaldera Toba antara lain adalah ukurannya yang memadai sebagai pemenuhan fungsinya dan menyimpan warisan geologi yang dinilai penting secara internasional. Kriteria lainnya seperti keberadaan Kaldera Toba sebagai wilayah geografis tunggal antara situs dan lanskap yang berharga bagi geologi internasional. Kaldera Toba telah dikelola

dengan konsep konservasi, pendidikan, penelitian, dan pembangunan berkelanjutan, melibatkan komunitas setempat dan masyarakat adat secara aktif sebagai pemangku kepentingan utama di *geopark*. Pengelolaan bersama untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi penduduk setempat, serta penataan hukum lokal dan nasional terkait perlindungan warisan geologi.

Terletak di pulau Sumatera, Kaldera Toba terbentuk dari letusan gunung berapi super 74.000 tahun yang lalu. Cekungan kaldera tersebut menjadi danau vulkanik terbesar di Indonesia dengan ketinggian di 904 mdpl. Pulau besar Samosir muncul dari danau yang terletak di tengah kombinasi kontur perbukitan, pegunungan, dan dataran bergelombang. Keberadaan batuan di dasar kaldera mengundang ilmuwan untuk mempelajari bagian benua purba dulu kala berukuran besar yang bernama *Gondwana*. Kawasan ini merupakan rumah bagi masyarakat Toba, Simalungun, Karo dan Pakpak

Batak dan memiliki kekayaan warisan budaya yang dapat dieksplorasi dengan mengunjungi rumah adat dan museum di Geopark.

Sejak diusulkan menjadi *Global Geopark* pada tahun 2011 oleh Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba. Untuk hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan pengembangan sebagai tujuan wisata. Pertama, implementasi kegiatan edukasi terpadu pada masing-masing geo-area dengan tema geopark super *volcano*. Kedua, pemusatan panel edukasi geologi dan informasi secara tematik. Ketiga, pemilihan strategi tepat sasaran dalam pemasaran dan promosi. Keempat, perbaikan dalam pengembangan budaya. Terakhir, keragaman dan kesatuan aktifitas geopark secara harmonis di keempat geo-area, termasuk dari segi aktifitas ekonomi keberlanjutan masyarakat.

UNESCO DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA

PENGANTAR



Acara budaya *Presenting Indonesian Heritage to the World* di UNESCO House, Paris, September 2019

Sektor kebudayaan bisa dikatakan sebagai lokomotif utama bagi hubungan kerjasama Indonesia-UNESCO selama ini. Dua program kerjasama yang monumental adalah: Konferensi Antarpemerintah *ASIACULT* tentang Kebijakan Budaya di Asia yang diselenggarakan pada bulan Desember 1973 di Yogyakarta dan Restorasi Borobudur dari tahun 1973-1983.

ASIACULT memberi inspirasi penyusunan kebijakan kebudayaan nasional negara-negara anggota UNESCO, termasuk Indonesia. *ASIACULT* juga menyoroti untuk pertama kali peran kebijakan kebudayaan dalam membangun hubungan antara kemajuan teknologi dan identitas budaya.

Restorasi candi Borobudur yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1983 diawali dengan evaluasi tentang kondisi candi oleh tim ahli UNESCO yang diundang oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1968. Laporan evaluasi ini menjadi salah satu bahan kampanye UNESCO tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian situs, monumen dan bangunan warisan budaya oleh seluruh warga dunia.

Kampanye pada tahun 1972, dengan tema *International Safeguarding of Borobudur*, berhasil mendapatkan bantuan finansial dari Jepang, Jerman Barat, Belgia, Australia dan Inggris Raya (sebesar USD 6,5 juta). Bantuan ini termasuk salah satu wujud kepedulian dan kerjasama antar negara pertama dalam sejarah perlindungan warisan budaya yang memiliki nilai-nilai universal.

Dengan demikian, kerja sama multilateral dalam restorasi Borobudur bisa dianggap sebagai salah satu tonggak sejarah kelahiran Konvensi 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam (*the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*) atau yang lebih dikenal sebagai Konvensi tentang Warisan Dunia saja. Konvensi ini disahkan pada tahun bersamaan dengan kampanye Borobudur dalam Sidang Umum UNESCO ke-32.

Indonesia sendiri baru meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1989 dan mendaftarkan Borobudur sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Namun, momen bersejarah tersebut telah mendorong pemerintah menjadikan sektor kebudayaan sebagai sektor utama dalam pembangunan nasional, terutama pembangunan identitas dan kepribadian bangsa, dan perlindungan warisan budaya adalah salah satu kendaraan penting untuk tujuan ini.

Menyusul inskripsi Borobudur, Indonesia meningkatkan perlindungan terhadap warisan budaya yang dimiliki melalui upaya penetapan



Acara budaya *Presenting Indonesian Heritage to the World* di UNESCO House, Paris, September 2019

cagar-cagar budaya dan inskripsi warisan budaya Indonesia sebagai warisan dunia UNESCO. Upaya-upaya ini dikembangkan terus menerus sesuai dengan perkembangan *standard-setting* UNESCO. Pada tahun 2007, pemerintah resmi meratifikasi Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda tahun 2003, melalui Perpres No 78 tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012, Indonesia mengesahkan Konvensi UNESCO tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya tahun 2005.

Indonesia sendiri membuat berbagai peraturan perundangan dan lembaga yang mengawal dan mengembangkan kebudayaan, dan menjadi payung dari berbagai konvensi ini. Diantaranya adalah UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada tingkat yang lebih teknis, seperti untuk Warisan Dunia, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keppres No 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Kemenko PMK yang di dalamnya ada organ Deputy Bidang Koordinasi Bidang Kebudayaan, Asdep Warisan Budaya dan Kabid Sejarah dan Warisan Dunia. Di samping itu, Indonesia juga tengah mempersiapkan Badan Pengelola Warisan Dunia yang berfungsi dalam waktu dekat.

Ratifikasi dari konvensi-konvensi ini pada gilirannya tidak hanya menjadikan warisan budaya, dan ekspresi budaya Indonesia sebagai warisan yang harus dilindungi oleh warga dunia, tetapi juga telah mendorong kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosio-ekonomi. Warisan-warisan budaya tak benda dan ekspresi budaya (pertunjukan, kerajinan tangan, festival, dll) telah menjadi aset utama dalam pengembangan ekonomi kreatif.

UNESCO sendiri terkesan dengan pencapaian Indonesia ini, dan pada tahun 2019, melalui ADG Kebudayaan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia dalam penyusunan Resolusi PBB tentang Tahun Ekonomi Kreatif 2021. Hal ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, antara lain pada Sidang WHC ke-43 di Baku, Azerbaijan.

Kerja sama Indonesia-UNESCO dalam kebudayaan tentunya tidak terbatas hanya dalam inskripsi situs, monumen, bangunan maupun elemen kebudayaan. Indonesia juga memanfaatkan *standard-setting* UNESCO untuk pengembangan kebijakan-kebijakan dan panduan kebudayaan. Dengan referensi hasil proyek UNESCO tentang Kebudayaan sebagai Indikator Pembangunan (*Culture for Development Indicators*) yang diselenggarakan antara tahun 2009-2013, Indonesia mengembangkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada tahun 2019. Indeks ini bertujuan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan nasional sesuai amanat UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sejauh ini, IPK Indonesia adalah satu-satunya IPK yang sudah dikembangkan di dunia. Indonesia setapak lebih maju dalam mewujudkan konsep Kebudayaan sebagai roh dan ukuran kemajuan sosial, ekonomi, sains dan pendidikan suatu bangsa seperti gagasan UNESCO. Dirjen Kebudayaan, Dr. Hilmar Farid telah memperkenalkan IPK ini pada UNESCO dalam kesempatan Pertemuan Menteri Kebudayaan di sela-sela Sidang Umum UNESCO ke-40 tahun 2019.

Saat ini, hubungan sektor kebudayaan Indonesia-UNESCO pada respons terhadap wabah Covid-19. Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan *virtual* Menteri Kebudayaan pada bulan April 2020 yang lalu untuk berbagi pemikiran dan praktik baik. Dirjen Kebudayaan dalam kesempatan tersebut menyampaikan empat poin respons Indonesia: respons langsung, prioritas jangka pendek dan jangka menengah, program-program utama, kebijakan dan program kebudayaan pasca Covid-19. Diantara respons langsung adalah pengaktifan saluran media sosial milik pemerintah untuk keperluan aktifitas seniman dan pelaku seni, seperti promosi, distribusi, diskusi, pertunjukan dan lain-lain. Untuk keperluan jangka pendek dan menengah, pemerintah, antara lain melakukan pendataan artis terdampak, penyusunan kebijakan nasional, menciptakan lapangan kerja baru secara masif, dll. Program-program utama yang akan dijalankan mencakup Rekam Pandemi (melibatkan lebih dari 40 ribu pembuat film) dan Jalur Rempah (melibatkan 15 ribu praktisi dan 200 titik rempah dari Papua sampai Amsterdam dan Pasifik Selatan).

Kemajuan kebudayaan adalah wujud kemajuan suatu bangsa dan kemajuan bangsa-bangsa yang harmonis akan menghasilkan dunia yang lebih beradab, damai dan berkelanjutan. Indonesia percaya bahwa kerjasama antar bangsa-bangsa di sektor kebudayaan melalui UNESCO akan mempercepat realisasi konsep filosofis tersebut. Oleh karena itu Indonesia akan selalu hadir dan mendukung UNESCO.

SEKILAS TENTANG WARISAN DUNIA



Dalam perspektif ilmu alam, kunci keberlangsungan hidup dan kehidupan adalah dengan mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman. Setiap individu, setiap kelompok individu, setiap bangsa dan bahkan setiap kelompok bangsa, memiliki identitas yang unik. Perkembangan kehidupan yang harmonis dimungkinkan bila setiap identitas itu hidup dan berkembang secara alamiah. Homogenisasi hanya akan meningkatkan gesekan dan membuat hidup dan kehidupan menjadi tidak stabil.

Warisan adalah identitas peninggalan masa lalu yang mengantarkan kita pada kehidupan sekarang dan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Bentuknya berupa warisan budaya dan warisan alam. Warisan budaya merupakan hasil kreasi manusia yang menggambarkan tata nilai, norma, dan cara hidup. Wujud fisiknya adalah berupa situs, kelompok bangunan dan monumen. Sementara warisan alam adalah formasi fisik, biologis, geologis dan suatu area spesifik yang memiliki nilai-nilai estetis, saintifik, keanekaragaman hayati, ekosistem dan nilai-nilai geologis, serta fenomena alam yang luar biasa. Hutan, habitat binatang langka, danau atau gunung-gunung berapi termasuk kedalam jenis warisan ini.

Gagasan penyelamatan, perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam sebagai tanggung jawab global, Bermula dari kekhawatiran tenggelamnya Biara Abu Simbel akibat pembangunan bendungan Aswan di Mesir, pada tahun 1959. Ketika itu UNESCO mengkampanyekan penyelamatan situs secara internasional dan akhirnya berhasil menggerakkan 50 negara untuk memberikan donasi 50% dari biaya yang dibutuhkan. Biara Abu Simbel selamat dan menjadi warisan milik dunia pertama.

Kisah sukses tentang solidaritas global ini berlanjut dalam menyelamatkan Venesia (Italia), Moenjodaro (Pakistan) dan restorasi Borobudur (Indonesia). Berangkat dari sini, UNESCO dengan bantuan ICOMOS (*the International Council on Monuments and Sites*) menyiapkan Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya.

Gagasan menyatukan warisan budaya dengan warisan alam lahir dari sebuah konferensi di Washington DC, yang dikenal dengan *World Heritage Trust*, pada tahun 1965. Secara paralel ide ini dikembangkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) dalam bentuk proposal yang dipresentasikan pada Sidang PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm Swedia pada tahun 1972.

Dalam sidang umum UNESCO tanggal 16 November 1972, akhirnya negara-negara anggota PBB menyepakati Konvensi tentang Perlindungan

Warisan Budaya dan Warisan Alam. Konvensi ini segera diikuti dengan pembuatan prosedur inskripsi monumen/ situs/bangunan sebagai Warisan Dunia UNESCO serta pembentukan organ *World Heritage Committee*. Tahun 1978, untuk pertama kali 12 (dua belas) *property* terdaftar dalam Warisan Dunia. Borobudur, walaupun termasuk warisan dunia yang diselamatkan UNESCO, baru didaftarkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991.

Proses nominasi warisan dunia ini melibatkan tahapan:

1. Inventarisasi warisan dunia dalam daftar sementara (*tentative list*) yang dilaporkan ke *World Heritage Center* (WHC) UNESCO. Daftar ini dimaksudkan sebagai perencanaan inskripsi lima sampai sepuluh tahun setelah suatu warisan dimasukkan ke dalam daftar. *World Heritage Committee* tidak akan mengevaluasi item yang tidak pernah ada dalam *Tentative List*.
2. Pembuatan berkas nominasi (*nomination file*). WHC menawarkan bantuan dan saran selama proses pembuatan berkas ini, terutama tentang kelengkapan informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
3. Pengajuan nominasi. Pengajuan ini berlangsung selama dua tahun.

Tahapan Proses Nominasi

30 September Tahun I-1	Penerimaan draf nominasi sementara oleh Sekretariat dari negara pengusul
15 November Tahun I-1	Pengiriman tanggapan Sekretariat terhadap draf nominasi, terutama tentang kelengkapan berkas, kepada negara pengusul
1 Februari Tahun I	Deadline penerimaan berkas nominasi lengkap oleh Sekretariat
1 Maret Tahun I	Deadline tanggapan Sekretariat terhadap berkas nominasi pada negara pengusul
Maret Tahun I sampai Mei Tahun II	Evaluasi berkas nominasi oleh Badan Evaluasi (<i>Advisory Bodies</i> , ICOMOS, IUCN atau ICCROM (<i>International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Culture Property</i>))
6 minggu sebelum sidang WHC	Penyerahan hasil evaluasi dari badan evaluasi terkait ke Sekretariat untuk diteruskan kepada anggota WHC
Juni/Juli Tahun II	Sidang tahunan WHC untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap nominasi (<i>inscribed, deffered, not inscribed</i>)

Penilaian nominasi didasarkan pada kandungan *Outstanding Universal Values* (nilai-nilai universal luar biasa), yang tergambar dari pemenuhan, paling tidak, satu dari sepuluh kriteria yang ditetapkan oleh WHC.

Kriteria-kriteria tersebut meliputi: kriteria 1 (terkait dengan *masterpiece*), kriteria 2 (menyangkut jangkauan pengaruh), kriteria 3 (testimoni), kriteria 4 (tipologi, bentuk dan struktur bangunan), kriteria 5 (tata-guna lahan), kriteria 6 (asosiasi dengan berbagai nilai), kriteria 7 (kecantikan alamiah), kriteria 8 (sejarah bumi), kriteria 9 (proses geologis dan ekologis), kriteria 10 (habitat alamiah). Di luar OUV dan kriteria, berkas nominasi juga harus menunjukkan perhatian pada pengelolaan perlindungan, keaslian dan integritas properti.

Sekali properti didaftarkan sebagai Warisan Dunia UNESCO, setiap negara wajib melaporkan keadaan properti secara regular setiap 6 (enam tahun sekali) kepada *World Heritage Center*. Laporan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai *State of Conservation* setiap properti. WHC, badan-badan penilai dan sektor lain di UNESCO juga akan membuat laporan reaktif kepada Komite, terutama terkait pada warisan-warisan dunia yang OUV-nya terancam. Warisan-warisan dunia ini bisa masuk dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya, bila laporan WHC tersebut tidak segera ditanggapi. Bila melewati batas waktu tertentu, properti yang ada dalam daftar ini bisa dikeluarkan sama sekali dari daftar Warisan Dunia.

Sampai saat ini, Indonesia telah mendaftarkan sembilan (9) Warisan Dunia UNESCO, yakni:

Warisan Budaya Dunia (*World Cultural Heritage – WCH*)

1. Kawasan Candi Borobudur (*Borobudur Temple Compounds*) (13/12/1991)
2. Kawasan Candi Prambanan (*Prambanan Temple Compounds*) (13/12/1991)
3. Situs Manusia Purba Sangiran (*Sangiran Early Man Site*) (7/12/1996)
4. Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak Sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Kirana (*Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*) (6/7/2012)
5. Sawahlunto *Ombilin Coal Mining Heritage* (2019)

Warisan Alam Dunia (*World Natural Heritage – WNH*)

1. Taman Nasional Komodo (*Komodo National Park*) (13/12/1991)
2. Taman Nasional Ujung Kulon (*Ujung Kulon National Park*) (13/12/1991)
3. Taman Nasional Lorents (*Lorentz National Park*) (9/12/1999)
4. Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatra-TRHS*) (17/7/2005) – *in danger list since 2011*.

Deskripsi ringkas masing-masing properti tersebut dapat dilihat pada halaman-halaman berikut.

Di luar itu, Indonesia juga memiliki 12 properti yang sudah masuk dalam *Tentative List*.

TETAPAN WARISAN BUDAYA DUNIA DI INDONESIA

Disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Dr. Daud Tanudirjo, Tenaga Ahli Indonesia untuk Warisan Budaya Dunia



WARISAN BUDAYA DUNIA

CANDI BOROBUDUR

1991

Candi Borobudur yang berada di kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur berada di dataran Kedu yaitu dataran subur dan indah yang dikelilingi oleh pegunungan dan diapit oleh dua sungai besar. Berbentuk piramida dengan puncaknya berwujud Stupa, Borobudur adalah wujud keselarasan konsep tempat peribadatan yang menyatu dengan alam dan pegunungan sekitar yaitu Gunung Merapi, Merbabu dan pegunungan Menoreh. Borobudur juga merupakan simbol perpaduan konsep pemuliaan nenek moyang yang adalah tradisi budaya masyarakat setempat di Jawa pada saat itu dengan konsep pencapaian Nirwana berdasarkan Buddhisme.

Kompleks Candi Borobudur terdiri dari tiga rangkaian candi, yaitu Borobudur, Mendut dan Pawon. Dengan fungsi ritual berbeda, ketiga candi tersebut terletak pada garis lurus spiritual. Borobudur telah menjadi identitas bagi masyarakat Indonesia dan memiliki konsepsi falsafah tentang makna menjadi manusia. Tak hanya wisatawan saja, namun juga peziarah yang berasal dari seluruh dunia, setiap tahunnya mengunjungi Borobudur untuk beribadah dan merayakan Hari Waisak atau Hari Kelahiran Siddharta Gautama.

Borobudur merupakan karya arsitektural dan estetis luar biasa yang berhasil mengilhami dan memberikan pengaruh pada perkembangan seni bangun batu di Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Dibangun sekitar tahun 824 Masehi pada masa kerajaan Raja Samaratungga, Borobudur memiliki luas 123 x 123 meter persegi. Candi Borobudur memiliki 1.460 relief yang terbagi dalam 10 tingkatan dan menyimpan 504 patung Buddha, 72 stupa dan 1 induk stupa. Candi Borobudur dibangun kurang lebih selama 75 tahun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma yang menggunakan 60.000 meter kubik batuan vulkanik dari Sungai Elo dan Progo. Sebuah representasi mahakarya yang unik, agung dan penuh misteri yang pernah dibangun di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, kondisi Candi Borobudur sangat memprihatinkan akibat bencana alam, terabaikan sekian lama dan faktor-faktor lainnya. Borobudur mengalami kerusakan dan banyak patung, batu dan relief yang hilang. Hal itu mendorong Direktorat Sejarah dan Kurbakalaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Depdikbud) untuk mengusulkan agar Borobudur dapat masuk menjadi situs warisan dunia. Borobudur bersama kota Venesia Italia dan situs

Mohenjo Daro berhasil menarik perhatian UNESCO untuk diselamatkan. Berkat bantuan internasional, hasil dari usaha keras Indonesia dan UNESCO, akhirnya Candi Borobudur dipugar pada tahun 1973-1983.

Borobudur telah memberikan pengaruh besar terhadap kebangkitan arsitektural pada abad ke-13 dan awal abad ke-16. Selain itu, Candi Borobudur juga cerminan dari perpaduan antara ide pemujaan roh leluhur dan konsep Buddhisme menuju Nirwana dalam 10 tahap kehidupan. Hal-hal tersebut yang menjadi alasan UNESCO memberikan pengakuan Warisan Budaya Dunia pada tahun 1991 kepada Candi Borobudur.

Keberadaan Candi Borobudur yang dikelola dengan baik memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal di mana terjadi banyak perubahan karakteristik lapangan pekerjaan. Banyak masyarakat lokal bekerja di bidang pariwisata semisal pemandu wisata hingga pedagang souvenir khas Candi Borobudur. Pada tahun 2019, Candi Borobudur berhasil menarik pengunjung sebanyak lebih dari 4,6 juta orang.



WARISAN BUDAYA DUNIA

CANDI PRAMBANAN

1991

Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, yang terletak di Kecamatan Prambanan Klaten Provinsi Jawa Tengah. Selain terkenal dengan keindahan arsitektural, Candi Prambanan juga mempresentasikan keindahan kehidupan harmonis antara penganut agama Hindu dan Buddha. Prambanan *Temple Compounds* terdiri dari dua kompleks besar candi Hindu Prambanan dan candi Buddha Sewu, yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9. Keduanya dianggap sebagai karya arsitektur luar biasa berkat penerapan teknologi bangunan batu pada abad ke-8 di Jawa saat itu. Hal ini dapat terlihat dari bentuk candi yang ramping dan menjulang setinggi 47 meter. Sebanyak 244 candi Perwara (pedamping) yang disusun secara *cosmogram* horisontal telah membentuk konfigurasi simbol ajaran Hindu-Buddha.

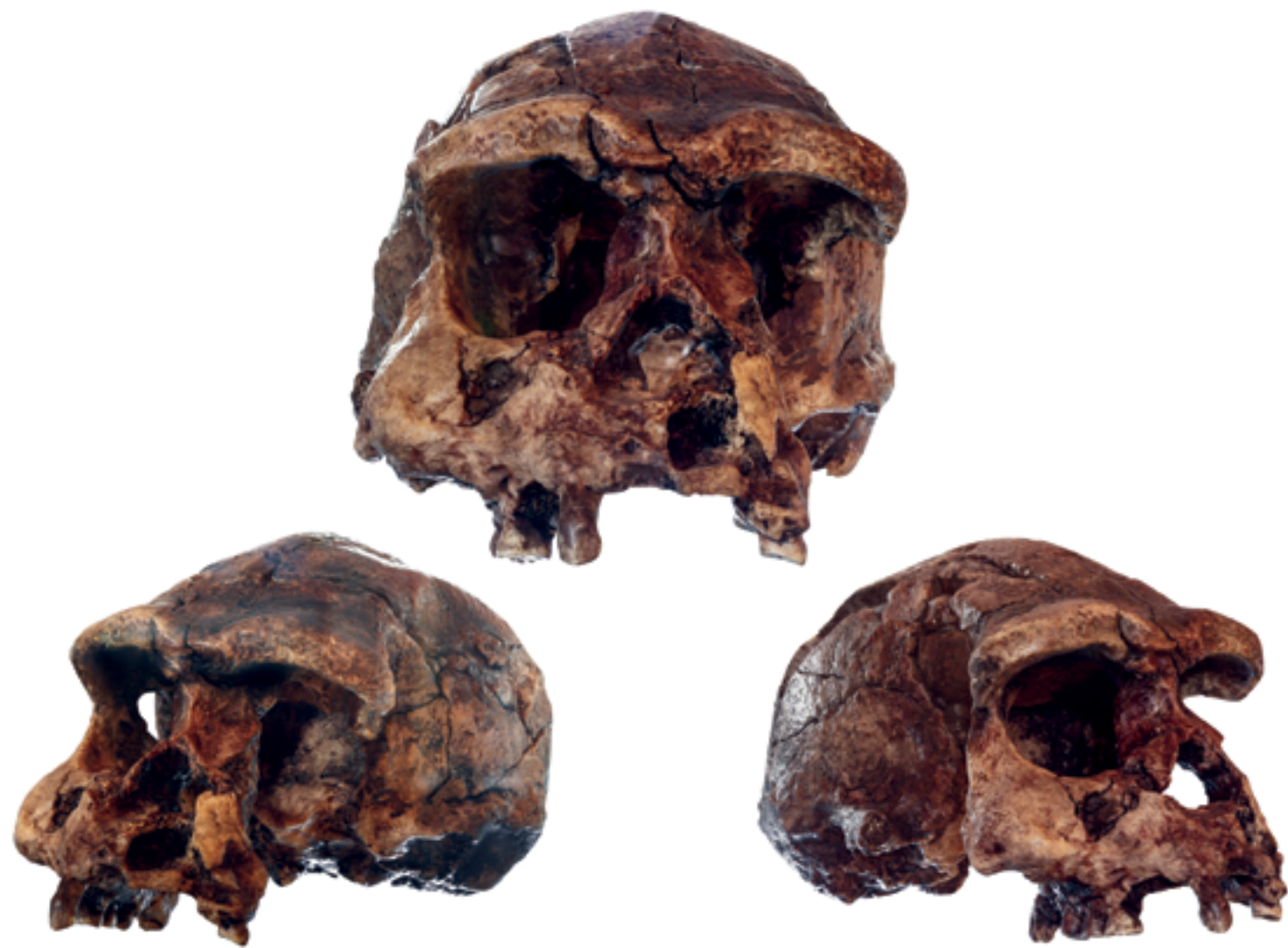
Menurut Hinduisme, Candi Prambanan dipersembahkan untuk tiga dewa utama umat Hindu (Trimurti) yakni Shiva, Vishnu dan Brahma. Pada kompleks Candi

Prambanan terdapat kisah Ramayana dan Krisnayana, yang terpahat di dinding relief dari tiga candi utama tersebut. Hal itu mencerminkan ketrampilan seni pahat batu yang luarbiasa hebat dari segi artistik dan estetik. Bersama dengan Candi Sewu yang berada di sebelah utara, *Temple Compounds* Prambanan menjadi bukti hubungan harmonis antara agama Siwa dan Buddha di Jawa saat itu.

Setelah selesai dipugar pada tahun 1953, Direktorat Sejarah dan Purbakala Depdikbud mengusulkan Prambanan untuk didaftarkan sebagai Warisan Budaya Dunia. Baru pada tahun 1991, UNESCO menetapkan kompleks Candi Prambanan yang meliputi Prambanan, Sewu, Lumbung, dan Bubrah, sebagai Warisan Budaya Dunia dengan nama Prambanan *Temple Compounds*. UNESCO menilai bahwa Candi Prambanan memiliki *Outstanding Universal Value*, yaitu sebagai mahakarya periode klasik di Indonesia yang mempresentasikan kehebatan budaya seni bangun dan seni rupa

peradaban Jawa pada saat itu serta luasnya kompleks peribadatan Candi Prambanan adalah ciri khas dan bentuk perwujudan penganggungan Dewa Siwa di Jawa pada abad ke-10.

Setiap hari Candi Prambanan dipadati oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Selain itu, Prambanan sampai saat ini masih menjadi tempat ziarah dan peribadatan umat Hindu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2017, Candi Prambanan dikunjungi lebih dari 2,7 juta orang. Untuk menjangkau publik internasional lebih luas lagi, berbagai acara tahunan diadakan di taman Candi Prambanan seperti Prambanan *Jazz Festival*. Sejak tahun 2015, Prambanan *Jazz Festival* diadakan sebagai bentuk diplomasi budaya yakni memperkenalkan dunia pariwisata Indonesia, khususnya Candi Prambanan dan sekitarnya ke tingkat dunia.



WARISAN BUDAYA DUNIA

SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

1996

Situs manusia purba Sangiran adalah situs terbesar, terkaya dan terpenting di dunia. Sejak tahun 1930-an, penelitian di situs seluas sekitar 7 x 8 km² tersebut telah menyumbangkan lebih dari 50 % *fossil* manusia purba Homo Erectus di dunia. Situs Sangiran terletak 15 km di utara kota Solo ini memiliki luas 5.600 ha, secara administrasi terletak di dua kabupaten yakni Sragen dan Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Temuan sisa-sisa fauna dan flora purba, pelapisan geologi yang ada, serta temuan artefaktual yang tersebar di situs ini sangat berarti untuk memahami proses panjang evolusi manusia (dalam rekonstruksi evolusi fisik) dan budayanya, serta lingkungan fisik tempat manusia hidup sejak sekitar 2 juta tahun yang lalu.

Keistimewaan Sangiran mendorong Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud bersama para ahli seperti Dr. T. Jacob dari Universitas Negeri Gajah Mada, Dr. Harry Widiyanto dari Puslitarkenas dan Dr. I Gusti Ngurah Atom sebagai Direktur Ditlinbinjarah untuk mengajukan *dossier* nominasi Situs Sangiran sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO pada tahun 1993. Pada tahun

1996, UNESCO memberikan status sebagai Warisan Budaya Dunia yang harus dilindungi dan dilestarikan karena mengingat bahwa Sangiran adalah situs kunci untuk memahami evolusi manusia di dunia pada 2 juta tahun yang lalu dan terus menjadi lokasi penelitian baik ahli dalam negeri maupun luar negeri yang berasal dari berbagai lintas disiplin keilmuan. Sangiran juga dinilai UNESCO memiliki kandungan urutan waktu geologis yang sangat berarti bagi peradaban manusia mulai dari periode Pleistosen Atas hingga Pleistosen Tengah. Selain itu, Sangiran juga menunjukkan berbagai aspek evolusi jangka panjang baik secara fisik maupun budaya manusia purba. Semua itu memberikan sumbangan sangat luar biasa terhadap pemahaman sejarah perkembangan awal umat manusia.

Situs Sangiran meliputi wilayah yang sangat luas dan sebagian besar adalah lahan permukiman dan pertanian yang dikerjakan oleh penduduk setempat sejak dulu. Pengolahan tanah menjadi salah satu aktivitas yang dapat menjadi gangguan. Namun pada saat bersamaan, kegiatan ini juga tidak sedikit berkontribusi dalam

mengungkapkan temuan *fossil*. Pada awalnya, penduduk yang menemukan *fossil* banyak menjualnya kepada pengunjung atau bahkan juga kolektor dan peneliti dari luar negeri.

Pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan properti situs Sangiran dengan mendirikan Badan Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016, dengan tujuan untuk melakukan penanganan dan pengelolaan kelestarian situs tersebut.

Selain sebagai pusat pembelajaran, Situs Sangiran juga menarik perhatian banyak wisatawan. Tercatat terdapat lebih dari 7.000 pengunjung pada awal tahun 2019. Potensi Situs Sangiran sebagai destinasi wisata memiliki dampak positif bagi masyarakat setempat secara ekonomi dan juga meningkatkan kepedulian penduduk setempat akan bernilainya dan pentingnya situs Sangiran.



WARISAN BUDAYA DUNIA

LANDSKAP KULTUR PROVINSI BALI : Subak sebagai perwujudan filosofi Tri Hita Karana

2012

Subak merupakan sistem pengelolaan air untuk persawahan terasiring di Bali. Pengetahuan masyarakat setempat tersebut telah berhasil membuat persawahan menjadi pemandangan alam yang begitu indah. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-9, yang mempratikkan falsafah Tri Hita Karana, yaitu prinsip keseimbangan antara manusia dengan sesamanya, dengan alam dan dengan Tuhan. Konsep Tri Hita Karana lahir dari perpaduan antara kearifan setempat dengan pengaruh budaya dari India. Sampai hari ini, kearifan tersebut tercemin pada keseluruhan peraturan adat masyarakat Hindu Bali (Awig-awig), termasuk manajemen Subak.

Nominasi lanskap Budaya Bali dimulai tahun 2000-an oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sempat terhenti karena kendala kekurangan data dan revisi draf, ahli subak Dr. J. Stephen Lansing dari Universitas

of Arizona dan Stockholm *Resilience Center* membantu penyempurnaan dokumen. Pada tahun 2011, dokumen nominasi terbaru diajukan ke WHC UNESCO. Dokumen tersebut disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali khususnya oleh Dinas Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar.

Pada 20 Juli 2012, UNESCO mengesahkan nominasi *Cultural Landscape of Bali Province* sebagai Daftar Warisan Budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan. UNESCO menilai bahwa budaya tradisi pengelolaan irigasi air melalui lembaga bernama Subak telah memberikan harmonisasi antara alam dan dunia spiritual (ritual, sesajen dan pertunjukkan seni). Selain itu, Subak mempresentasikan sistem demokrasi dan

kesetaraan serta pengelolaan bersifat ekologi yang mengikuti kontur lanskap persawahan. Selama berabad-abad, sistem tersebut membuktikan bahwa pulau Bali telah menjadi lumbung padi yang berhasil memberikan penghidupan bagi penduduknya. Lanskap Subak Bali yang seluas sekitar 20.000 ha tersebut terdiri dari properti yang berupa pura air, sawah berteras dan sarana irigasinya. Subak merupakan sistem pertanian percontohan yang berkelanjutan.

Salah satu contoh kawasan persawahan yang menerapkan sistem subak adalah Jatiluwih. Jatiluwih merupakan persawahan terasiring yang terletak 700 mdpl tepat di kaki Gunung Batukaru, Tabanan Bali. Keindahan persawahan terasiring Jatiluwih berhasil menarik sekitar 200.000 wisatawan asing dan mancanegara setiap tahunnya.



WARISAN BUDAYA DUNIA

TAMBANG BATU BARA OMBILIN SAWAHLUNTO

2019

Situs Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto terletak di Provinsi Sumatera Barat. Pada sidang WHC UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019, Ombilin *Mining Heritage of* Sawahlunto ditetapkan menjadi warisan dunia yang harus dilestarikan dan dilindungi. Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto merupakan sistem terpadu dan menyeluruh mulai dari fasilitas penambangan batubara, pemrosesannya, sampai ke fasilitas pengiriman dan pengapalan hasil tambang.

Properti yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya UNESCO tidak hanya terbatas pada pertambangan dan fasilitas pendukung kehidupan bagi penambang saja, melainkan juga kilang untuk memproses, jalur kereta api untuk mengirimkannya ke Pelabuhan Emmahaven

di Padang, serta fasilitas pelabuhan pengiriman khusus batubara ke luar negeri. Keseluruhan properti tersebut seluas 269 ha dengan luas zona penyangga sekitar 7,3 ha yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota, yaitu Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Kawasan Sawahlunto diberikan status Warisan Budaya Dunia karena memiliki keunikan dan dinilai unggul pada kategori Nilai Universal Luar Biasa (*Outstanding Universal Value*). Sawahlunto adalah bukti adanya pertukaran dan perpaduan, antara pengetahuan dan praktek pengetahuan Eropa dengan kearifan masyarakat setempat yang sudah memiliki kemampuan mengenali kandungan batubara di wilayah tersebut. Ini adalah warisan industri pertambangan batubara pertama di Asia tenggara dan menjadi contoh luar biasa dari sisi keseluruhan teknologi yang dibangun oleh para insinyur Eropa dalam periode industrialisasi dan kolonisasi global pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu, warisan Sawahlunto juga berupa kota pertambangan modern yang dibangun khusus dan terencana bagi 7.000 penduduk. Lengkap dengan semua fasilitas mulai dari perumahan, tempat makan, layanan kesehatan, sekolah, sampai ke fasilitas tempat peribadatan dan rekreasi. Sawahlunto memberikan

gambaran kehidupan para buruh tambang yang terdiri dari masyarakat Minang, Jawa, dan Tionghoa dalam hubungannya dengan pengusaha Eropa. Sejumlah kekhasan itu tidak ditemukan di tempat lain di dunia, sehingga merupakan bukti yang luar biasa dari suatu industri rintisan penerapan teknologi eksplorasi tambang pada masa kolonial di dunia dengan kompleksitas sosial budayanya.

Paska berhentinya perusahaan tambang batubara Ombilin Sawahlunto pada tahun 1999, Pemerintah Kota Sawahlunto bertekad untuk tetap menghidupkan kota ini dengan mengubahnya menjadi kota tujuan wisata warisan budaya pertambangan dengan pembangunan Musuem Tambang Batubara Ombilin.

Gagasan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk menjadikan kota tambang Ombilin Sawahlunto menjadi warisan dunia mulai muncul tahun 2005 dan didukung sejumlah langkah pelestarian warisan tambang yang ada. Selain itu segala persiapan untuk nominasi mulai dilakukan. Langkah strategis lain yang ditempuh adalah menjadikan Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto diusulkan dan berhasil ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2014. Selanjutnya, Januari tahun 2015, usulan pendaftaran ke Daftar Sementara (*Tentative List*) diterima oleh WHC UNESCO dengan judul nominasi: Sawahlunto *Old Coal*

Mining Town.

Proses nominasi Warisan Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto melibatkan banyak pihak seperti ITB, Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, Universitas Padang, Universitas Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Proses pendampingan dan dukungan nominasi banyak dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Unit Pelaksana Teknis-nya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, PT Bukit Asam serta PT dan Kereta Api Indonesia, khususnya Regional II. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia membantu dalam memfasilitasi berbagai proses koordinasi. Pemerintah Kota Sawahlunto mengawal *dossier* nominasi melalui Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto. Bantuan penyediaan data diperoleh dari Pemerintah Belanda melalui kerja sama. Dalam proses penulisan *dossier*, beberapa tenaga ahli warisan budaya dari Jakarta juga terlibat aktif, termasuk dari ICOMOS Indonesia. International *experts* yang banyak membantu adalah Dr. Richard Engelhard dan beberapa pakar dari Belanda di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Museum Nasional Kereta Api Narrow Gauge Valkenburg, serta Arsip Nasional Belanda. Pemetaan dibantu oleh P.T. Buka Peta Media.

TETAPAN WARISAN ALAM DUNIA DI INDONESIA

Disusun berdasarkan data dan informasi
yang diperoleh dari Ir. Wahjudi Wardoyo, M. Sc
Tenaga Ahli Indonesia untuk Warisan Alam Dunia



WARISAN ALAM DUNIA

TAMAN NASIONAL KOMODO

1991

Taman Nasional (TN) Komodo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan kawasan lindung yang terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Komodo, Rinca dan Padar dan pulau-pulau kecil lainnya seluas 21.322 ha. Ketiga pulau tersebut menjadi habitat utama Komodo (*Varanus Komodoensis*), yaitu spesies biawak raksasa langka yang hanya ada di pulau ini. Selain menjadi rumah bagi Komodo, TN Komodo juga melindungi beberapa spesies ekosistem darat langka dan unik lainnya seperti unggas kaki orange (*Megapodius reinwardt*), tikus Rinca (*Rattus rintjanus*), kijang Timor, kerbau air (*Bubalus bubalis*), celeng (*Sus scrofa vittatus*), monyet (*Macaca fascicularis*), kelelawar (*Paradoxurus hermaphroditus lehmanni*). Taman Nasional termasuk salah satu ekosistem laut terkaya yang terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, rumput laut, *seamonts*, dan teluk semi-tertutup. Habitat ini melindungi lebih dari 1.000 spesies ikan, diantaranya 260 spesies ikan

terumbu karang, dan 70 spesies spon, dugong, hiu, ikan pari, dan sekitar 14 spesies paus, lumba-lumba, dan penyu.

Keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di TN Komodo mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 21 September 2009 mengajukan TN Komodo untuk masuk ke dalam Warisan Alam Dunia. Pada tanggal 13 Desember 1991, UNESCO mengesahkan TN Komodo menjadi Warisan Alam Dunia yang harus dilestarikan dan dilindungi. UNESCO menilai bahwa TN Komodo memiliki Nilai Universal Luar Biasa yaitu menjadi habitat alami terpenting dan signifikan untuk kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dan spesies langka yang terancam punah serta menjadi laboratorium untuk penelitian sains. UNESCO juga

menilai bahwa kandungan kekayaan hayati ekosistem darat dan laut yang hidup di gugusan TN Komodo menghadirkan keindahan alam dan bernilai estetika luar biasa yang harus dilestarikan.

Berkat keindahan alam dan keunikan Komodo, taman nasional ini menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. Tahun 2019, tercatat lebih dari 77.000 wisatawan telah berkunjung ke TN Komodo. Berkat pariwisata, masyarakat setempat yang dulu banyak bekerja sebagai nelayan dan pemburu, kini banyak berganti profesi di jasa wisata seperti pemandu, penyedia penginapan, kerajinan tangan untuk souvenir, pekerja hotel, penyedia sewa kapal, pekerja restaurant dan sebagainya.



WARISAN ALAM DUNIA

HUTAN HUJAN TROPIS SUMATERA

2004

Situs Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera (HHTS) mempunyai luas keseluruhan mencapai 2,5 juta ha yang mencakup tiga taman nasional yang tersebar di beberapa provinsi, yaitu Gunung Leuser (Aceh dan Sumatera Utara), Kerinci Seblat (Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan) dan Bukit Barisan Selatan (Lampung). Hutan Hujan Sumatera adalah ekosistem kawasan lindung yang mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa dan unik. Kekayaan hayatinya mempresentasikan 50% dari total flora yang ada di pulau Sumatera. Terdiri dari 10.000 flora, 17 diantaranya adalah endemik, 201 spesies mamalia dan 580 burung.

Hutan Hujan Tropis Sumatera menjadi tempat bagi bunga Kantong Semar (*Rafflesia Arnoldi*) sebagai bunga terbesar di dunia dan (*Amorphophallus titanum*) sebagai bunga tertinggi. Kekayaan dan keunikan lainnya dari

hutan lindung ini adalah 22 spesies mamalia Asia yang tidak ditemukan di tempat lain di luar Indonesia, seperti orangutan, gajah, harimau Sumatera. Kawasan ini telah menjadi bukti proses evolusi biogeografis di pulau Sumatera.

Keberadaan hutan tropis Sumatera ini menjadi sangat penting karena memiliki potensi besar dalam pelestarian jangka panjang keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna khas Sumatera yang terancam punah. Hutan Hujan Tropis Sumatera yang hanya mencakup 2% dari wilayah bumi mampu memberikan kontribusi 50%-70% untuk kehidupan di planet bumi. Oleh karena itu, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Kemenko Kesra, LIPI berinisiatif untuk mendaftarkan Hutan Hujan Sumatera sebagai Warisan Alam Dunia UNESCO. Pada tahun 2004, UNESCO mengesahkan Hutan Hujan Sumatera sebagai daftar

Warisan Dunia dan sejak tahun 2011 kawasan ini sudah masuk dalam “*World Heritage in Danger*”.

Hutan hujan tropis Sumatera yang dulu luas ini, hanya dalam kurun waktu 50 tahun telah menyisakan ekosistem Leuser sebagai hutan terbesar dan paling signifikan. Keindahan pegunungan Bukit Barisan yang dikenal sebagai ‘*Andes of Sumatra*’, terancam oleh pembukaan lahan untuk hunian dan perkebunan. Laporan *state of conservation* dari UNESCO tahun 2019 menyebutkan bahwa Hutan Hujan Sumatera terancam oleh kegiatan-kegiatan seperti pembangunan infrastruktur jalan raya, pertambangan, pembalakan ilegal dan pembukaan lahan untuk hunian dan perkebunan.



WARISAN ALAM DUNIA

TAMAN NASIONAL LORENTZ

1999

Taman Nasional Lorentz yang terletak di Provinsi Papua, memiliki luas 2,35 juta ha. TN Lorentz menjadi kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Nama Lorentz berasal dari nama penjelajah alam Belanda Hendrikus Albertus Lorentz, yang pernah melakukan ekspedisi pada tahun 1909. TN Lorentz membentang lebih dari 150 km dari pegunungan *Cordillera* pusat Irian Jaya di utara hingga Laut Arafura di selatan dan meliputi Puncak Cartenz 4.884 mdpl yang adalah puncak tertinggi di Asia Tenggara.

Terletak di titik pertemuan dua lempeng benua, TN Lorentz memiliki bentukan geologi yang kompleks yang terdiri dari formasi pegunungan aktif dan daerah es salju abadi. TN Lorentz juga mempunyai kandungan fosil yang memberikan bukti evolusi kehidupan di New Guinea, spesies endemik dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Lorentz adalah satu-satunya kawasan lindung di dunia yang menggabungkan transek ekologis berkelanjutan dari pegunungan yang tertutup salju sampai ke ekosistem laut tropis, termasuk lahan basah dataran rendah.

Setelah menjadi Taman Nasional Indonesia pada tahun 1997, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LSM *World Wide Fund for Nature* Indonesia selanjutnya mendaftarkan *dossier* inskripsi TN Lorentz sebagai Warisan Alam Dunia UNESCO pada 7 Desember 1998. Pada tanggal 4 Desember 1999, UNESCO akhirnya menetapkan Taman Nasional Lorentz sebagai Warisan Alam Dunia UNESCO yang diharuskan dilindungi dan dilestarikan. UNESCO menilai bahwa TN Lorentz memiliki ekosistem yang komplit mulai dari pegunungan es, hutan pegunungan, rawa hingga laut dan merupakan habitat alami hutan purba (*nothofagus*). Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan ditunjang keanekaragaman budaya suku setempat.

Lorentz memiliki tiga puluh empat (34) tipe vegetasi, sekitar 123 spesies mamalia yang tercatat, (80% dari total fauna mamalia di Papua) seperti landak paruh pendek (*Tachyglossus aculeatus*), dan landak paruh panjang (*Zaglossus bruijnii*) endemik New Guinea. Selain menjadi rumah bagi 45 spesies burung dan 9 spesies burung endemik, TN Lorentz juga menjadi

kediaman tujuh suku tradisional yaitu suku Amungme (Damal), Dani Barat, Dani Lembah Baliem, Moni dan Nduga yang tinggal di dataran tinggi, dan kelompok suku di dataran rendah seperti suku Asmat, Kamoro dan Sempan. Kemungkinan masih ada lagi masyarakat yang hidup terpencil di hutan belantara ini yang belum mengadakan hubungan dengan manusia modern. Kebudayaan suku pedalaman Papua tersebut diperkirakan telah berumur 30 ribu tahun.



WARISAN ALAM DUNIA

TAMAN NASIONAL UJUNG KULON

1991

Taman Nasional (TN) Ujung Kulon secara administrasi terletak di Provinsi Banten. Taman nasional tersebut meliputi semenanjung Ujung Kulon dan beberapa pulau terdekat seperti Pulau Handeuleum, Pulau Peucang dan Pulau Panaitan serta Gunung Krakatau. Kawasan lindung tersebut berupa hutan dataran rendah yang terbaik yang tersisa di Pulau Jawa. Dengan luas 122,9 ha, TN Ujung Kulon menyimpan keindahan alam luar biasa yang merupakan wujud dari hasil proses evolusi geologis paska letusan Krakatau pada tahun 1883. TN Ujung Kulon adalah salah satu contoh terbaik dan terkenal di dunia dari sebuah formasi pulau pegunungan vulkanik, hutan, garis pantai yang membentuk bentangan alam yang luar biasa indah.

Keberadaan ekosistem darat TN Ujung Kulon juga menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup

fauna yang ada di dalamnya. TN Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir spesies langka badak bercula satu (*Rhinoceros sondaicus*) yang terancam punah. Selain itu, TN Ujung Kulon juga memberikan perlindungan bagi beberapa spesies berharga lainnya seperti 29 spesies mamalia, sembilan spesies di antaranya masuk dalam Daftar Merah IUCN (*The International Union for Conservation of Nature's Red List*) dan tiga spesies yang terancam punah yaitu Macan Tutul (*Panthera pardus*), Gibbon Jawa endemik (*Mylobates moloch*) dan Monyet daun jawa (*Presbytis comata*).

TN Ujung Kulon merupakan salah satu kawasan lindung tertua di Indonesia. Komisi Warisan Dunia diusulkan oleh LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai *Natural World Heritage Site* atau

Warisan Dunia Alam pada tanggal 13 Desember 1991. Dengan status Warisan Dunia Alam ini, TN Ujung Kulon mempunyai dasar hukum kuat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan jangka panjang dalam menjaga kelestarian dan keindahan alam dari aktifitas perambahan hutan dan penangkapan ikan ilegal di kawasan cagar alam.

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi badak di Indonesia (2007-2017) yang dikembangkan dengan proses aktif partisipatif yang dibuka secara luas dan transparan telah membantu keberlangsungan hidup Badak. Strategi tersebut bertujuan untuk mengatasi ancaman seperti *inbreeding* perkawinan sedarah, pemanasan global, dan aktifitas manusia dan termasuk pengembangan tempat perlindungan baru di dalam cagar alam.

SEKILAS TENTANG KONVENSI 2003



Sejak beberapa dekade yang lalu UNESCO memperkenalkan bahwa warisan budaya tidak hanya menyangkut warisan fisik berupa monumen, situs, gedung, bentang alam dan habitat, tetapi juga berupa warisan non-fisik seperti praktik dan kebiasaan, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, termasuk instrument, objek, artefak dan lingkungan terkait. Warisan budaya ini dikenal sebagai warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*).

Isu pentingnya perlindungan warisan budaya tak benda dilontarkan pertama kali oleh pemerintah Bolivia pada tahun 1973 dengan mengusulkan pencantuman perlindungan dunia pada hak cipta kesenian rakyat dalam *Universal Copyright Convention* UNESCO 1952. Proposal ini tidak diterima namun berkembang menjadi pencarian instrumen legal bersama untuk perlindungan hak intelektual ekspresi kultural selama satu dekade.

Istilah Warisan Tak Benda (*Intangible Heritage*) pertama kali diperkenalkan dalam Konferensi dunia tentang kebijakan kebudayaan dunia di Meksiko tahun 1982. Konferensi juga memperbaiki konsep kebudayaan dengan menambahkan cara hidup, hak-hak dasar dalam kehidupan manusia, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan sebagai komponen kebudayaan bersama seni dan tulisan yang sudah didefinisikan sebelumnya.

Pada tahun 1989, sidang umum UNESCO mengesahkan *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*. Rekomendasi ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang besar dan dampak yang luas, namun mendorong banyak negara anggota untuk membuat kebijakan dan manajemen pengelolaan warisan tak benda mereka.

Satu dekade setelah itu, tepatnya tahun 2001, sidang umum UNESCO ke-31 memutuskan untuk mempersiapkan instrumen normatif internasional, berbentuk Konvensi, sebagai pengganti Rekomendasi 1989. Konvensi ini disahkan dalam sidang umum UNESCO ke-32 tahun 2003, dan berlaku mulai 20 April tahun 2006.

Secara umum, konvensi bertujuan untuk:

- Melindungi warisan budaya tak benda
- Menjamin adanya respek pada warisan budaya tak benda komunitas, kelompok masyarakat atau individu-individu tertentu
- Meningkatkan kepedulian masyarakat lokal, nasional dan internasional terhadap pentingnya warisan budaya tak benda, sekaligus menjamin apresiasi bersama
- Menyediakan kerjasama dan bantuan internasional



Saat Pengumuman Pencak Silat sebagai Warisan Tak Benda pada sesi *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* ke-14, Bogota, Colombia, Desember 2019

Dalam konvensi ini, Warisan Budaya Tak Benda dimanifestasikan dalam bentuk :

- tradisi dan ekspresi oral, termasuk Bahasa sebagai kendaraan dari warisan budaya tak benda;
- pertunjukan kesenian;
- praktik-praktik sosial, ritual dan festival rakyat;
- pengetahuan dan praktik-praktik dalam masyarakat yang terkait dengan alam dan semesta;
- kerajinan tradisional;

Warisan budaya ini diturunkan dari generasi ke generasi dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan, interaksi masyarakat dengan alam dan sejarah masyarakat itu sendiri. Warisan budaya ini memberikan identitas dan kelangsungan hidup masyarakat atau kelompok masyarakat, yang pada gilirannya mempromosikan rasa hormat pada keragaman budaya dan kreativitas umat manusia.

Sumber hukum tertinggi dalam Konvensi ini adalah Sidang Umum (*General Assembly*) negara-negara anggota yang ikut meratifikasi (178 negara, meratifikasi pada tanggal 15 Oktober 2007). Sidang ini mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti program dan anggaran, pemilihan anggota Komite, dan perubahan-perubahan peraturan.

Organ pengambil keputusan berikutnya adalah *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (IOC-ICH)* yang bertugas untuk mempromosikan tujuan-tujuan konvensi, menggunakan sumber daya, mendaftarkan warisan budaya tak benda, menyeleksi dan mempromosikan program, proyek dan aktivitas yang diusulkan negara anggota serta mengusulkan akreditasi LSM baru pada *General Assembly*.

Partisipasi utama dari negara anggota dalam mengimplementasikan Konvensi ini adalah dengan mendaftarkan warisan budaya tak bendanya pada Daftar Warisan Budaya tak-Benda UNESCO (*List of Convention*), untuk kemudian ikut bertanggungjawab dalam melindungi dan melestarikannya. Dalam kaitan ini, terdapat dua jenis daftar, yakni *Urgent Safeguarding List* dan *Representative List*. *Urgent Safeguarding List* memuat warisan budaya yang terancam punah akibat faktor-faktor yang tidak bisa diatasi oleh masyarakat setempat atau di luar perkiraan, seperti karena bencana alam, perang dan sebagainya. Sementara, *Representative List* adalah warisan budaya yang masih berkembang dan terjaga baik dalam masyarakat.



Suasana sesi *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* ke-14, Bogota, Colombia, Desember 2019

Proses Nominasi Warisan Budaya Tak Benda

Persiapan dan Pendaftaran	
31 Maret tahun 0	Deadline permintaan bantuan internasional untuk mempersiapkan dokumen nominasi
31 Maret tahun 1	Deadline permintaan bantuan internasional untuk nominasi inskripsi, program dan proyek yang melebihi nilai USD 100,000
30 Juni tahun I	Deadline evaluasi berkas oleh Sekretariat, termasuk komunikasi dengan negara anggota untuk melengkapi berkas
30 Juni tahun II	Deadline penerimaan berkas final oleh Sekretariat
Evaluasi	
Desember Tahun I s/d Mei Tahun II	Evaluasi berkas oleh Badan Evaluasi
April – Juni Tahun II	Rapat Badan Evaluasi
4 minggu sebelum Rapat Komite ICH	Sekretariat mengirim berkas kepada setiap anggota Komite ICH
Penilaian	
November Tahun II	Rapat Komite ICH untuk menilai dan memutuskan nominasi, proposal dan permintaan negara anggota

Untuk bisa didaftarkan ke dalam daftar warisan budaya yang diusulkan oleh negara anggota, secara umum, suatu item harus menggambarkan identitas kultural, kemanusiaan, kreatifitas, rasa hormat terhadap alam, serta memiliki pengaruh sosio-ekonomi kuat dalam masyarakat. Aspek-aspek ini dievaluasi melalui 6 kriteria *Urgent Safeguarding List* (U-kriteria) dan 5 kriteria untuk tertentu *Representative List* (R-kriteria).

Sampai tahun 2020 ini Indonesia telah menginsripsikan 10 properti dalam *Representative List*. Daftarnya adalah sebagai berikut:

1. *Pertunjukan Wayang (Wayang Puppet Theatre) (4/11/2008) – (R)*
2. *Keris Indonesia (Indonesian Kris) (4/11/2008) – (R)*
3. *Batik Indonesia (Indonesian Batik) (30/9/2009) – (R)*
4. *Pendidikan dan pelatihan Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda untuk pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa politeknik yang bekerjasama dengan Museum Batik di Pekalongan (Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational schools and polytechnics students in collaboration with Batik Museum in Pekalongan) (1/10/2009) – (P)*
5. *Angklung Indonesia (Indonesian Angklung) (16/11/2010) – (R)*
6. *Tarian Saman (Saman Dance) (24/11/2011) – (U)*
7. *Tas Noken (Noken multifunction knotted or woven bag, Handcraft of the people of Papua) (4/12/2012) – (U)*
8. *Tiga aliran tarian tradisional di Bali (Three Genres of Traditional Dance in Bali) (2/12/2015)-(R)*
9. *Pinisi (Pinisi, Art of boatbuilding in South Sulawesi) (7/12/2017) – (R)*
10. *Pencak Silat (Traditions of Pencak Silat) (12/12/2019) – (R)*

TETAPAN WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA DI INDONESIA

Disusun berdasarkan data dan informasi
yang diperoleh dari Dr. Harry Waluyo,
Tenaga Ahli Indonesia untuk
Warisan Budaya Dunia Tak Benda



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

KERIS

2005

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak warisan budaya, seperti misalnya senjata tradisional mulai dari tombak, kujang hingga keris. Keberadaan benda-benda tersebut masih digunakan secara turun temurun pada acara-acara tradisional sampai hari ini. Hal ini terlihat pada adat pernikahan suku Jawa, pengantin pria membawa sebilah keris sebagai lambang pusaka dan juga kejantanan. Setiap keris dipercaya mempunyai kandungan spiritualitas dan mitologi yang luar biasa. Keris muncul sekitar pada abad ke-10 di Jawa dan menyebar luas sampai ke Asia Tenggara. Keris juga digunakan sebagai pajangan, sebagai jimat senjata, pusaka yang disucikan, perlengkapan abdi dalem kraton, pembeda status sosial, simbol kepahlawanan dan fungsi lainnya. Keris sudah melekat menjadi identitas budaya bangsa Indonesia.

Bentuk keris biasanya pipih, runcing, berkelok yang disebut pamor dan asimetris. Keris selalu dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu, gading, bahkan emas. Nilai estetika keris terdapat pada bentuk dan desain bilahnya; kurang lebih ada 40 varian bentuk dan 120 varian desain pola dekorasi bilahnya. Selain itu, nilai keris juga diukur dari usia dan asal. Keberadaan seorang

Empu, sebagai pengrajin keris juga memegang sebagai faktor penentu. Sebilah keris berkualitas tinggi ditempa puluhan bahkan ratusan kali dalam mencampurkan logam-logam berkualitas. Untuk menjadi pamor yang indah, seorang Empu harus mempunyai presisi yang baik ditambahkan dengan pengetahuan sastra, sejarah, dan ilmu gaib. Keris adalah simbol mahakarya dari kreatifitas manusia yang berasal dari olah jiwa, pikiran dan rasa.

Pengajuan Keris pada 18 Oktober 2004 sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda UNESCO diinisiasi oleh Deputi Nilai Budaya Seni dan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Meutia F. Swasono. Penelitian dan penyusunan berkas diketuai oleh Haryono Haryoguritno dan dibantu oleh Waluyo Wijayatno, Yaya Mulyadi, Sunyoto Bambang Suseno, Gaura Mancacaritadipura serta melibatkan 15 paguyuban perkerisan dari Jakarta, Jawa tengah, Yogyakarta, Surabaya, Madura, Bali, Lombok, dan Museum Keris serta akademisi dari ISI Surakarta.

Keris ditetapkan sebagai *Masterpiece* pada tanggal 15 Nopember 2005 dan ditetapkan masuk *Representative*

List Warisan Budaya Tak Benda UNESCO Pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) untuk Penyelamatan Warisan Budaya Tak Benda ke-3 di Istanbul Turki, 4 – 8 November 2008. UNESCO menilai Keris memenuhi kriteria *masterpiece* sebagai warisan dunia. Kekayaan warisan budaya *masterpiece* mencerminkan keberagaman budaya-tradisi dan kreatifitas manusia yang mencakup secara komprehensif dan integral seperti sejarah, tradisi, fungsi sosial, teknik tempa, estetika, filsafat, simbol dan mistik perkerisan Indonesia.

Warisan luar biasa ini mendapatkan tantangan besar dalam tiga dekade terakhir ini. Makna sosial dan spiritual keris mulai memudar. Walaupun beberapa Empu yang mempunyai nama besar masih terus berkarya untuk melahirkan keris berkualitas tetapi proses regenerasi sulit dilakukan. Sehingga jumlah Empu mengalami penurunan secara dramatis, yang berdampak pada berhentinya tranfer ilmu, keterampilan dan kearifan lokal kepada generasi muda.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

WAYANG

2003

Wayang merupakan satu dari sekian banyak pertunjukan tradisional rakyat yang berkembang di masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekedar seni bercerita, namun lebih dari itu, wayang adalah representasi dari seni pertunjukan yang utuh dan menyeluruh. Mulai dari dalang, sinden, pengiring gamelan sampai ke lakon wayang yang ditampilkan, semua memiliki nilai-nilai spiritual dan magis yang kental. Berasal dari Jawa, selama sepuluh abad tradisi wayang terjaga dengan baik di dalam istana kerajaan Jawa dan Bali, dan selanjutnya menyebar sampai ke Lombok, Madura, Sumatra dan Kalimantan. Penyebaran yang mendorong perkembangan pada gaya pertunjukan, musik pengiring dan lakon ceritanya. Setiap daerah memiliki gaya khas tersendiri yang memperkaya khasanah perwayangan nusantara.

Pertunjukan wayang adalah seni pementasan kolektif, yang dipimpin oleh satu dalang, didampingi oleh sinden yang melantunkan tembang, dan seperangkat grup yang menabuh gamelan. Selain hafal alur cerita, seorang dalang harus cakap membawakan dialog berdasarkan karakter-karakter wayang, piawai memainkan wayang dan merdu dalam bersenandung. Kisah wayang banyak

berasal dari teks sastra Jawa kuno. Setiap bagian dari pertunjukan wayang memiliki arti dan makna filosofis kuat yang lahir dari budaya asli masyarakat Indonesia.

Wayang diajukan sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada tahun 2002 oleh Deputi Nilai Budaya Seni dan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Sri Hastanto. Penyusunan *dossier* wayang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (SENAWANGI), diketuai oleh Drs. H. Solichin dan dibantu oleh pengurus PEPADI, Sumari, Gaura Mancacaritadipura serta melibatkan akademisi ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, Dalang, Pengrawit, Sinden, Wiraswara, Pengrajin wayang dari 5 gagrak (gaya) yaitu Wayang Kulit Jawa, Wayang Golek Sunda dan Wayang Bali yang berkembang dengan baik, serta Wayang Palembang dan Wayang Banjar yang pada saat itu terancam akan punah. Kelima gaya tersebut mewakili lebih dari 60 jenis wayang yang ada di Indonesia.

Pengajuan Wayang sebagai Warisan Budaya Tak Benda, akhirnya, diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia pada 7 Nopember 2003 oleh UNESCO dan dimasukkan ke dalam *Representative List* di bawah Konvensi 2003

pada saat sidang *Intergovernmental Committee* (IGC) ke-3 di Istanbul Turki, 4 – 8 November 2008. UNESCO mengakui bahwa Wayang adalah karya seni adiluhung yang penuh nilai-nilai filosofis dan ajaran-ajaran moral. Alasan lain pemberian status internasional adalah karena Wayang memiliki nilai filosofis, historis dan sosiologis. Sebagai warisan budaya yang telah diakui oleh dunia, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang. Penetapan Hari Wayang diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam seni pewayangan.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

BATIK

2009

Batik merupakan satu dari sekian banyak kerajinan tangan yang paling populer di Indonesia. Batik hadir di tengah-tengah masyarakat. Hampir seluruh aktifitas masyarakat melibatkan Batik, mulai dari ritual kelahiran, pernikahan sampai kematian. Batik sebagai identitas nasional, dipakai sebagai pakaian resmi mulai dari sekolahan sampai perkantoran atau dalam perjamuan dan persidangan. Selain bernilai seni, Batik adalah pilar utama perekonomian yang terkait erat dengan tradisi, budaya, sejarah dan warisan turun-temurun.

Pengajuan Batik sebagai warisan dunia ini diinisiasi oleh Ketua Yayasan KADIN Indonesia, Imam Sucipto Umar dalam seminar di Museum Batik Pekalongan pada bulan

Juni 2006. Selanjutnya Imam Sucipto Umar membentuk tim inti penyusun *dossier* yang terdiri dari Sutrisno, Fitro dan Gaura Mancacaritadipura (sebagai peneliti dan penulis berkas) dan narasumber utama Bapak Iwan Tirta. Dokumen Batik diajukan ke UNESCO pada bulan Maret 2009 yang melibatkan Aburizal Bakrie (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat), Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan juga Dr. Mohamad Basyir Ahmad dari Pemerintah Kota Pekalongan dan Yayasan Batik Indonesia.

Batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda dan masuk dalam *Representative List Warisan Budaya Tak Benda UNESCO* Pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) untuk Penyelamatan Warisan Budaya Tak Benda ke-4 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, 28 September – 2 Oktober 2009. Penetapan tanggal 2 Oktober 2009 tersebut, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Presiden RI. Pengakuan dunia yang memberi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, terutama memberi dampak signifikan bagi pelaku industri Batik di Indonesia.

Dari 111 nominasi dari 34 negara, *dossier* Batik dinilai yang terbaik dan ditetapkan sebagai teladan untuk diikuti oleh negara lain dalam penyusunan berkas pengajuan. Batik memenuhi semua kriteria sebagai Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda.

UNESCO menilai teknik pembuatan dan simbol-simbol pada Batik adalah cerminan kreatifitas manusia Indonesia. Kekayaan pola-pola Batik adalah simbol yang mempunyai makna filosofi, mitologi dan seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita spiritual yang hidup di masyarakat.

Batik dibuat dengan menorehkan malam cair ke dalam kain sutra atau katun dengan cara ditulis/dilukis dan atau dicap tangan sesuai dengan pola-pola khas yang mencerminkan atau menceritakan suatu budaya tertentu. Masing-masing tempat, daerah dan atau pengrajin memiliki pola sendiri yang dapat dibedakan dari warnanya, motifnya, goresannya dan sebagainya. Pola-pola Batik awalnya diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga, lalu akhirnya menyebar keluar seiring dengan membesarnya anggota keluarga.

Meluasnya tradisi membatik tersebut melahirkan kekayaan instrisik Batik itu sendiri. Keragaman pola juga dipengaruhi oleh pendatang dari luar, mulai dari kaligrafi Arab, karangan bunga Eropa dan burung Phoenix Tiongkok hingga bunga sakura Jepang dan burung Merak India atau Persia. Dari generasi ke generasi makna simbolis warna beserta desain motifnya mengekspresikan kreatifitas dan spiritualitas pengrajin Batik.

Produksi dan pemakaian batik adalah bagian penting dari identitas Indonesia yang terintegrasi dengan sistem pendidikan. Budaya membatik juga telah terintegrasi dengan baik ke dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif di beberapa kota di Indonesia misalnya kota Pekalongan, yang dikenal sebagai kota Batik. Tradisi Batik menjadi perpaduan unik antara seni, kerajinan, dan sumber pendapatan masyarakat. Sehingga diperlukan pengembangan infrastruktur sosial, budaya dan ekonomi yang terkait dengan proses pendidikan pembuatan Batik sebagai transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Batik juga telah berkembang menjadi disiplin ilmu oleh karena itu harus memperkuat kelembagaan terkait demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong bidang edukasi Batik, sebagai upaya untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya Batik yang ramah lingkungan.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN BATIK BAGI SISWA SEKOLAH DASAR, MENENGAH DAN KEJURUAN BEKERJASAMA DENGAN MUSEUM BATIK PEKALONGAN

2009

Pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) untuk Penyelamatan Warisan Budaya Tak Benda ke-4 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, 28 September – 2 Oktober 2009, UNESCO memasukkan *Best Practice* Diklat Warisan Budaya Batik dengan judul “Pendidikan dan Pelatihan Budaya Batik bagi murid SD, SMP, SMA, Kejuruan dan Politeknik, Bekerjasama dengan Museum Batik Pekalongan” dalam Daftar Praktik Terbaik sesuai Pencapaian Prinsip Konvensi 2003 UNESCO.

Pengakuan internasional yang diberikan oleh UNESCO ini terwujud berkat inisiatif dari Mr. Frank Proschan dari Sekretariat UNESCO yang menghadiri dan melihat pendidikan dan pelatihan Batik di Museum Batik Pekalongan pada bulan April 2008. Selanjutnya, Gaura Mancacaritadipura dengan didukung oleh Pemkot Pekalongan dan Museum Batik Pekalongan menyusun berkas diklat pelatihan tersebut. Berkas *Best Practice* Diklat Batik untuk siswa sekolah tersebut diajukan bersamaan nominasi Batik pada komite ICH UNESCO.

UNESCO membiayai pembuatan bahan promosi berupa buku, pembuatan dua film pendek dan panjang serta materi untuk pameran demi mempromosikan *Best Practice* ini pada dunia. UNESCO menganggap praktik pembuatan Batik ini sebagai bagian dari pendidikan formal yang dapat diterapkan dalam upaya menyelamatkan warisan budaya di seluruh dunia. Oleh karena itu, tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya Batik Indonesia di kalangan generasi muda, mengenai nilai sejarah, nilai budaya dan keterampilan tradisionalnya.

Komunitas Batik menilai minat generasi muda terhadap Batik semakin berkurang dan diperlukan upaya peningkatan transfer pengetahuan untuk mewariskan budaya Batik keberlangsungan Batik di masa depan. Batik Indonesia memiliki keunggulan dalam teknik pembuatan dan penggunaan bahan alami yang tidak luntur. Kerajinan tangan tradisional adihung tersebut

memiliki kekayaan akan nilai budaya tak benda, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, di pulau Jawa dan di tempat lain sejak awal abad ke-19.

Demi menjaga kelestariannya, UU No 20 tahun 2003 memungkinkan budaya Batik dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sebagai ‘muatan lokal’ di daerah yang memiliki Cagar Budaya Batik, seperti misalnya di Kota Pekalongan. Pada tahun 2005, Museum Batik memprakarsai program Diklat Batik, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan terus berkembang sampai ke Kabupaten Batang, Pemalang dan Tegal.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

ANGKLUNG

2010

Angklung adalah alat musik yang terdiri dari dua hingga empat tabung bambu yang digantung di dalam rangka bambu dan dijalin dengan tali rotan. Tabung bambu tersebut dipotong sedemikian rupa untuk menghasilkan satu nada dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Dalam pembuatan Angklung, masyarakat memiliki kearifan lokal. Bambu hitam khusus untuk membuat Angklung dipanen selama dua minggu dalam setahun sekali pada saat musim jangkrik bernyanyi. Bambu dipotong setidaknya tiga ruas di atas tanah, untuk memastikan agar akarnya tetap hidup.

Ukuran Angklung yang berbeda-beda mengeluarkan bunyi nada yang berbeda mulai dari dua nada, tiga nada, empat nada dan lima nada (pentatonik). Setiap Angklung memiliki satu *note* nada. Untuk memainkan sebuah lagu/melodi, beberapa pemain harus melakukan kolaborasi bersama. Angklung tradisional menggunakan tangga nada pentatonik, tetapi pada tahun 1938 musisi Daeng Soetigna memperkenalkan Angklung dengan menggunakan tangga nada diatonis, yang dikenal sebagai Angklung Pak Daeng.

Berkembang luas di tengah-tengah masyarakat Sunda, Angklung sangat erat kaitannya dengan adat istiadat tradisional, seni dan identitas budaya di Indonesia khususnya Sunda. Angklung dimainkan pada upacara-upacara tradisional seperti menanam padi, panen dan acara khitanan. Masyarakat Sunda memainkan

Angklung pada tradisi tanam dan panen padi untuk mengundang Dewi Sri agar berkenan turun ke Bumi, memberikan berkah kesuburan dan kemakmuran.

Sejak tahun 1960-an, Angklung telah ditetapkan pemerintah sebagai sarana pendidikan meskipun belum masuk dalam kurikulum pendidikan formal sebagai muatan lokal. Proses pengajuan Angklung sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda UNESCO melibatkan banyak pihak seperti Puslitbang Kebudayaan, pakar ICH-UNESCO, penerus Angklung dan praktisi Angklung. Harry Waluyo selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan menjadi ketua tim penyusun berkas Angklung dibantu oleh Noegroho, Agus Sudarmaji sebagai tim administrasi, Dloyana Kusumah, Wawan Gunawan, Ihya Ulumuddin dan Gaura Mancacaritadipura sebagai tim peneliti, serta Taufik Udjo sebagai penerus tradisi Angklung dari Saung Udjo dan Obby AR. Wiramihardja selaku Master Angklung.

Pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) untuk Penyelamatan Warisan Budaya Tak Benda ke-5 di Nairobi Kenya, 15 – 19 November 2010, UNESCO mengakui Angklung dan memasukannya dalam *Representative List* Warisan Budaya Tak Benda Manusia. Angklung dan musikalitasnya dinilai sebagai bagian inti dari identitas budaya masyarakat di Jawa Barat dan Banten. Memainkan Angklung mengandung nilai-nilai dasar kerjasama, saling menghormati dan

keharmonisan sosial. Dimasukkannya Angklung, dalam Daftar Representatif UNESCO, dapat berkontribusi pada kesadaran yang lebih besar akan pentingnya Warisan Budaya Tak Benda dan mempromosikan nilai-nilai di dalamnya.

Pengakuan dunia ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara pelaku, penggiat, penerus dan otoritas terkait di berbagai tingkatan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian Angklung dengan pendidikan formal atau non-formal, melalui pertunjukkan dan mendorong adanya keahlian pembuatan Angklung dan budidaya bambu yang berkelanjutan. Angklung dapat menjadi media pembelajaran karena musik angklung bersifat kolaboratif. Antar pemain dalam satu grup didorong untuk kerja sama dan saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, konsentrasi, merangsang pengembangan imajinasi dan ingatan, serta perasaan seni dan musik.

Secara membanggakan, Angklung pernah ditampilkan di berbagai acara internasional semisal Forum Regional ASEAN yang ke-18 di Bali tahun 2011 yang dihadiri Sekretaris Negara Amerika Serikat, Hillary Clinton dan pada saat Hari Ulang Tahun ke-5 Hari Angklung Nasional, pada tanggal 17 Nopember 2015, Angklung tampil di teater prestisius Odeon Paris Prancis.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

TARI SAMAN

2011

Tari Saman merupakan warisan budaya asli masyarakat Gayo Aceh di Sumatera. Tari Saman biasanya dibawa oleh anak-anak atau pemuda secara kolektif dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk memainkan Saman, penari harus duduk bertumpu pada tumit atau lutut dalam barisan yang rapat. Para penari mengenakan pakaian adat bersulamkan motif dan pola khas Gayo yang identik warna-warni melambangkan keindahan alam dan nilai luhur budaya setempat.

Pemimpin penari duduk di tengah barisan dan menyanyikan syair-syair, kebanyakan berbahasa Gayo. Nyanyian tersebut biasanya adalah ajaran-ajaran agama, cerita romantis hingga kisah-kisah yang mengundang gelak tawa. Seluruh penari menari dengan bertepuk tangan, menepuk paha, bahkan menepuk lantai, dada sambil bergoyang dan memutar tubuh dan kepala. Pemimpin penari menentukan ritme gerakan dan memandu formasi posisi pemain dalam barisan. Gerakan-gerakan pada Tari Saman sendiri melambangkan kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo dalam hubungannya dengan alam setempat.

Pertunjukan Tari Saman diadakan biasanya pada hari libur nasional dan hari raya keagamaan. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antar penduduk atau masyarakat desa, dengan cara saling mengundang di dalam sebuah acara desa. Seiring dengan perubahan zaman, penari Saman banyak yang sudah tua dan tidak memiliki penerus, sehingga pementasan Tari Saman jarang terlihat dan digantikan oleh jenis hiburan baru atau pertunjukan lain yang berasal dari luar. Transmisi sebagai transfer pengetahuan dan ketrampilan kepada generasi muda juga mendapatkan hambatan besar karena banyak anak muda yang meninggalkan desa untuk melanjutkan studi atau kerja. Selain itu, biaya pembuatan kostum dan pertunjukan tarian juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pengajuan Tari Saman sebagai Warisan Dunia Tak Benda berawal dari keresahan Dr. Risman Musa, selaku Staf Ahli Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, pada Tari Saman yang terancam punah. Atas dasar keresahan ini, Dr. Risman Musa menyelenggarakan rapat internal. Rapat memutuskan berdasarkan pertimbangan

bahwa Tari Saman kondisinya hampir punah sehingga perlu diusulkan dalam Daftar yang Memerlukan Pelindungan Mendesak (*Urgent Safeguarding List*). Proses penyusunan berkas dipimpin oleh Harry Waluyo selaku Kepala Puslitbang Kebudayaan dan dibantu oleh Ihya Ulumuddin, Nur Swarningdyah (almarhum), Titi Lestari, Aseli Kusumah dan melibatkan Gaura Mancacaritadipura selaku pakar ICH-UNESCO.

Pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) untuk Penyelamatan Warisan Budaya Tak Benda ke-6 di Bali Indonesia, tanggal 22 – 29 November 2011, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda yang memerlukan pelestarian dan perlindungan. UNESCO menilai Tari Saman Saman mempromosikan persahabatan, persaudaraan dan berhasil memperkuat kesadaran akan identitas demi keberlanjutan sejarah dan budaya masyarakat Gayo. Pengakuan internasional ini membuat pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta seluruh lapisan masyarakat seperti komunitas, peminat, tokoh agama, tokoh adat, guru harus bekerjasama untuk melestarikan warisan budaya adiluhung Tari Saman.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

NOKEN PAPUA

2012

Noken ditetapkan sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) ke-7 di Paris Prancis, 3-7 September 2012.

Terdaftar tahun 2012 di dalam *Urgent Safeguarding List*, Noken adalah tas anyaman buatan tangan dari serat kayu atau daun oleh masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia. Pengusulan dilakukan oleh Puslitbang Kebudayaan bersama Kemendikbud didampingi oleh

Titus Pekei ahli lingkungan dan ahli Noken Papua. Setelah melalui proses panjang diusulkanlah Noken untuk diinskripsi sebagai ICH-UNESCO mewakili Provinsi Papua dan Papua Barat yang terbagi ke dalam 7 wilayah adat dengan ragamnya warisan budaya yang ada.

Beberapa pihak yang berjasa dengan didaftarkanya Noken di dalam ICH UNESCO adalah Yulianus (tokoh Papua Kemendikbud), Harry Waluyo (Kepala Puslitbang Kebudayaan) bersama dengan Tim administrative dan tim penelitiannya, diantaranya Teguh Harisusanto (tim administrative), Apolos (BPNB Papua dan Papua Barat), Ihya Ulumuddin, Damarjati, Bakti Utama, Dede dan Herfan (ISBI Bandung), dan Gaura Mancacaritadipura (Pakar ICH-UNESCO).

Layaknya hasil kreasi asli budaya lokal, Noken pun memiliki manfaat praktis bagi keseharian masyarakatnya dan juga memiliki makna simbolis yang masih dipegang teguh. Baik laki-laki dan perempuan memanfaatkan Noken sebagai tas yang digantung di kepala untuk membawa hasil perkebunan, tangkapan hasil laut, kayu bakar, hewan kecil, bahkan berfungsi

sebagai gendongan bayi. Tas unik ini kerap kali dibawa berbelanja dan berfungsi sebagai tas menyimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Noken juga dapat dimanfaatkan sebagai hadiah pada acara perayaan tradisional atau persembahan dikarenakan memiliki makna perdamaian dan kesuburan yang diakui oleh 250 suku yang tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pembuatan Noken bervariasi baik teknik maupun bahannya antarsuku yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Umumnya Noken berasal dari serat kulit pohon atau jenis semak tertentu. Tahap awal biasanya ranting atau batang pohon yang ditebang dipanaskan di atas api dan direndam dalam air. Serat kayu yang tersisa dikeringkan kemudian dipintal menjadi benang atau tali yang kuat, yang terkadang diwarnai dengan pewarna alami. Tali ini diikat dengan tangan untuk membuat kantong jaring dengan berbagai pola dan ukuran. Untuk dapat menguasai keahlian ini, dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dapat terasah dengan baik, diiringi dengan kesabaran, perhatian dan cita rasa artistik yang baik.

Tantangan ke depan adalah surutnya dan pengrajin Noken dan antusiasme masyarakat menggunakan Noken. Terdapat beberapa alasan. Selain dibutuhkan keahlian khusus untuk membuatnya, kurangnya kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya melestarikan budaya dan karya budaya lokal, lemahnya transmisi tradisional, persaingan pasar dengan tas pabrik yang dibuat secara massal, dan ketersediaan bahan baku dan akses untuk mendapatkannya. Semua ini memberikan pengaruh pada pergeseran nilai-nilai budaya dan manfaat Noken.

Diharapkan dengan terdافتarnya Noken sebagai “Warisan Budaya Tak Benda yang Perlu Dijaga secara Mendesak” di UNESCO sejak 2012 baik Pemerintah bersama masyarakat dapat kembali menggalakkan pemberdayaan Noken yang telah diakui Dunia.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

TIGA GENRE TARI BALI

2015

Tiga Genre Tari Bali ditetapkan sebagai ICH UNESCO pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) ke-10 di Windhoek, Namibia 30 November-3 Desember 2015.

Tiga Genre Tari Bali terbukti telah memenuhi lima kriteria penilaian dalam ICH-UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Tiga Genre Tari Bali yang diakui oleh UNESCO berjumlah 9 jenis Tari Bali pilihan yang merepresentasikan ribuan tari Bali yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kote se-Bali dengan tiga genre berbeda.

Berikut daftar tarian dengan masing-masing genrenya:

- Tarian Sakral (Wai)
 1. Tari Rejang
 2. Tari Baris Rejang
 3. Tari Sanghyang Dadari
- Tarian Semi-Sakral (Bebali)
 1. Sendra Tari Wong
 2. Tari Topeng Sidhakarya
 3. Sendratari Gambuh

- Tarian Hiburan (Balih-balihan)
 1. Legong Keraton
 2. Barong
 3. Jaged Bumbum

Pengakuan oleh UNESCO ini adalah usaha panjang dan dedikasi banyak pihak yang telah dimulai sejak 2010, di antaranya adalah Kacung Maridjan (Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kemendikbud), Harry Waluyo (Kepala Puslitbang Kebudayaan, Kemendikbud) beserta tim administratif dan tim penelitiannya yaitu Ihya Ulumuddin, Damarjati, Bakti Utama, Nur Swarningdyah (Almarhum), Gaura Mancacaritadipura, dan narasumber utama, yaitu Dr. I Wayan Dibya dan I Made Bandem (ISI Denpasar). Dukungan juga diberikan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Dinas Kebudayaan Bali beserta akademisi, tokoh agama, dan perwakilan komunitas Tari Bali.

Menilik karakteristiknya, Tiga *Genre* Tari Bali dapat dipentaskan baik oleh penari pria maupun wanita yang mengenakan kostum tradisional berupa kain berwarna emas cerah bermotif flora dan fauna, dengan aksesoris

daun emas dan permata. Tari Bali terinspirasi oleh alam dan melambangkan tradisi, adat istiadat dan nilai agama masyarakat Bali. Tari Bali adalah manifestasi berbagai gerakan yang berbeda dengan posisi kuda-kuda, yaitu posisi lutut menekuk dan perut dalam posisi tegang atau tegap, melakukan gerakan layaknya lokomotif dengan tempo dan arah gerakan yang beragam. Setiap perubahan atau transisi gerakan dilakukan secara dinamis dengan ekspresi wajah dan pandangan atau gerakan bola mata yang mengungkapkan emosi penari akan kebahagiaan, kesedihan, amarah, ketakutan bahkan cinta. Semua olah gerak ini diiringi dengan alunan musik gamelan.

Kelestarian Tarian tradisional Bali dipercaya membuktikan tingginya rasa identitas budaya yang kuat di masyarakat Bali. Diharapkan dengan diakuiinya Tiga *Genre* Tari Bali di dalam ICH-UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak benda lebih melancarkan proses re-generasi untuk terus melestarikan dan mengangkat Tari Bali sebagai kebudayaan Indonesia di tingkat Internasional sekaligus melindungi Tari Bali dari klaim kepemilikan warisan budaya oleh pihak lain atau negara tetangga.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

SENI PEMBUATAN KAPAL PINISI

2017

Pinisi ditetapkan sebagai ICH UNESCO pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) ke-12 di Pulau Jeju, Korsel, 4-9 Desember 2017.

Pinisi diinformasikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud kepada Puslitbang Kebudayaan, Kemendikbud. Selanjutnya, mengacu pada jenis sistem layar (*rig*) dan layar 'sekunar Sulawesi', Pinisi dinominasikan ke dalam ICH UNESCO. Pinisi resmi tercantum di daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Manusia tahun 2017.

Pengakuan oleh UNESCO ini tentunya setelah melalui proses penyeleksian yang ketat dan dedikasi tinggi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Puslitbang Kebudayaan, Kemendikbud dan beberapa pihak lainnya sejak tahun 2014. Di antaranya adalah Kepala Puslitbang Kebudayaan, Dr. Hurip Danu Ismadi beserta tim administratif dan tim penelitiannya, yaitu Ihya Ulumuddin, Darmadjati Kun Marjanto dan diperkuat oleh narasumber utama, H. Abdullah dan H. Muslim Baso. Selanjutnya berkas nominasi Pinisi yang lengkap dikoordinasikan dengan Direktorat Internalisasi Nilali

dan Diplomasi Budaya (INDB), Ditjen Kebudayaan khususnya dengan Direktur INDB, Dyah Hariati didampingi oleh Erry Rosdi, Maya Khrisna. Koordinasi dimaksud termasuk melakukan kunjungan penelitian ke Bulukumba untuk memastikan kelengkapan berkas nominasi Pinisi.

Hasil penelitian selanjutnya diverifikasi dan divalidasi dengan dukungan tokoh agama, akademisi, dinas kebudayaan, dinas kehutanan, Pantrita Llopi, Sawi, Sambalu dan pemerhati Pinisi.

Usaha tim membuah hasil dimana bukti dan berkas terkait Pinisi, berhasil memenuhi kriteria 1, 3 dan 5 ICH sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ICH UNESCO.

Pengakuan seni pembuatan perahu Pinisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda diberikan karena arti penting pengetahuan akan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia dan diturunkan dari generasi ke generasi dan terus berkembang hingga sekarang.

Kapal kebanggaan masyarakat Bugis ini dibuat dengan material kayu tanpa menggunakan paku. Meskipun semua material dasar berasal dari kayu, perahu Pinisi dikenal sebagai penjelajah samudra yang sangat tangguh sejak abad ke-14. Saat ini, pusat-pusat pembuatan kapal berlokasi di Tana Beru, Bira dan Batu Licin dan sekitar 70% populasi memiliki mata pencaharian dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan kapal dan navigasi. Pekerjaan membuat kapal dan pelayaran, selain sebagai andalan ekonomi, namun juga menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat lokal. Transmisi pengetahuan dan keterampilan atau seni membuat Kapal Pinisi terus dilakukan dari generasi ke generasi, baik melalui inisiatif pemasaran dan media lainnya seperti penerbitan buku tentang Kapal Pinisi atau Seni Membuat Kapal Pinisi.



WARISAN BUDAYA DUNIA TAK BENDA

PENCAK SILAT

2019

Pada sidang Komite *Intergovernmental Committee* (IGC) ke-14 di Bogota, Kolombia, 9-14 Desember 2019.

Tercatat di *Representative List* Warisan Budaya Tak Benda ICH UNESCO tahun 2019, tradisi Pencak Silat telah menjadi Cabang Olahraga di Asean Games. Namun disayangkan sebagai tradisi belum mendapatkan pembinaan secara penuh oleh Pemerintah Indonesia.

Pencak Silat yang diusulkan untuk diinskripsi sebagai ICH UNESCO adalah Pencak Silat Tradisi dimana proses pengajuannya diseleksi dari WBTB Indonesia yang telah ditetapkan sebagai WBTB Nasional oleh Tim Nominasi untuk ICH UNESCO. Beberapa pihak yang berjasa adalah Eddy Nalapraya, sesepuh Pencak Silat, Edy Sedyawati (Mantan Dirjen Kebudayaan, Wiendu Nuryanti (mantan

Wakil Menteri Bidang Kebudayaan), Harry Waluyo sebagai Fasilitator ICH UNESCO wilayah Asia Pasifik beserta tim nominasi di antaranya Lien Dwiari, Maya Hartanti, Henry Manurung, Ihya Ulumuddin, Damarjati, Dede dan Herfan.

Pencak Silat Tradisi berhasil memenuhi Kriteria 1-5 ICH sehingga valid untuk dimasukkan ke dalam *Representative List* ICH UNESCO namun dengan catatan khusus pada kriteria nomor 5 tentang pemutakhiran data inventaris.

Secara penelusuran istilah, kata 'pencak' lebih dikenal di Pulau Jawa, sedangkan istilah kata 'silat' lebih dikenal khususnya di Provinsi Sumatera Barat, keduanya merepresentasikan kegiatan pencak silat yang memiliki

kemiripan. Selain istilah lokal, setiap daerah memiliki keunikan gerak, gaya, iringan musik, dan perlengkapan pendukungnya masing-masing, termasuk dalam hal ini kostum, alat musik, dan senjata tradisional yang digunakan. Pencak Silat Tradisi tidak hanya bersifat 'menyerang' tapi secara simbolis juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, manusia, dan alam. Pencak Silat Tradisi, adalah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, dan membela kebenaran dan membangun persahabatan.

SEKILAS TENTANG KONVENSI 2005



Acara Promoting the Creative/Orange Economies yang diselenggarakan oleh Delegasi Tetap Colombia, Indonesia dan UAE di UNESCO Headquarters, 2019

Deskripsi

Secara historis, lahirnya Konvensi 2005 bermula dari Deklarasi UNESCO pada tahun 2001 tentang *Cultural Diversity*. Deklarasi ini untuk pertama kali mengakui bahwa keragaman kultural merupakan warisan kemanusiaan bersama (*common heritage of humanity*). Keragaman kultural itu sendiri merupakan bagian dari pluralitas yang merupakan tonggak utama kehidupan demokrasi dunia. Perlindungan keragaman kultural, dengan demikian, berarti menjamin keberlanjutan kehidupan dunia yang bebas dan demokratis. Keragaman kultural ini akan dijamin dengan adanya kebebasan berekspresi, multibahasa, pluralisme media, akses yang setara terhadap ekspresi artistik, pengetahuan ilmiah dan teknologi, serta kesempatan berbagai budaya untuk tampil dalam berbagai media ekspresi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan-kebijakan budaya sebagai pendorong, terutama untuk produksi dan penyebaran keanekaragaman barang dan jasa budaya.

Deklarasi UNESCO tersebut segera diikuti dengan beberapa inisiatif internasional dalam kerangka membuat *standard-setting global*. Pada tahun 2005, konvensi yang diberi nama *The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions* ini ditetapkan pada *General Conference UNESCO* sesi ke-33 di Paris. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, untuk memastikan seniman, profesional budaya, praktisi dan warga negara di seluruh dunia dapat membuat, memproduksi, menyebarkan dan menikmati berbagai barang budaya, layanan dan kegiatan, termasuk milik mereka sendiri.

Tujuan konvensi, antara lain, adalah untuk melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya, menciptakan kondisi budaya yang kondusif, mendorong dialog antar budaya, menumbuhkan *spirit* pertukaran budaya, menghormati keragaman ekspresi budaya dan meningkatkan kesadaran akan nilainya di tingkat lokal, nasional dan internasional serta menegaskan kembali pentingnya hubungan antara budaya dan pembangunan untuk semua negara, terutama untuk negara berkembang. Sementara, prinsip-prinsip yang dianut di antaranya adalah prinsip penghormatan terhadap

hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, prinsip kedaulatan, kesetaraan martabat dan penghormatan terhadap semua budaya, prinsip solidaritas dan kerja sama internasional, serta prinsip ekonomi dan budaya pembangunan.

Isu penting dari konvensi ini adalah kesadaran bahwa produk, kegiatan dan jasa budaya memiliki nilai ekonomi yang penting. Mereka bukan hanya sekedar objek perdagangan atau produk samping dari pembangunan, tetapi juga berpotensi sebagai sumber daya utama untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut UNESCO, sektor budaya dan industri kreatif adalah salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Perputaran uang di sektor ini secara global mencapai USD 4,3 triliun per tahun, dengan lebih dari 30 juta pekerja aktif, serta menyumbang pertumbuhan ekonomi global dunia sebesar 6,1%. Sektor budaya dan industri kreatif telah menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketidaksetaraan, dan memenuhi Agenda 2030. Konvensi 2005 menjadi 'jantung' bagi perkembangan budaya dan ekonomi kreatif di dunia.

Setiap negara yang meratifikasi konvensi ini berhak dan berkewajiban untuk membuat payung hukum, mengintegrasikan budaya dalam kebijakan nasional, membuat laporan berkala setiap 4 tahun sekali (*quadrennial periodic report*, QPR), membuat program sosialisasi, dan membayar iuran tahunan sebesar 1% iuran UNESCO. UNESCO akan memberikan bantuan, dalam bentuk program *capacity building* dan pendanaan melalui badan IFCD (*International Fund for Cultural Diversity*). Implementasi Konvensi dievaluasi dalam sidang *Intergovernmental Committee*/Komite Antarpemerintah (IGC) yang diselenggarakan setiap tahun.

IGC Konvensi 2005 bertindak atas wewenang *Conference of Parties*. Badan ini beranggotakan 24 negara yang dipilih setiap 4 tahun sekali. Selain bertugas mengevaluasi, *Intergovernmental Committee* juga dapat mengembangkan dan merevisi pedoman operasional konvensi.

Indonesia dan Konvensi 2005

Konvensi ini diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2012 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 2012 Tentang Pengesahan *Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions*. Konvensi dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai rujukan untuk pembuatan kebijakan dan langkah-langkah pengembangan kebudayaan nasional.

Beberapa *milestones* yang bisa dicatat adalah sebagai berikut:

- Pada Sidang Umum ke-5 IGC Konvensi tahun 2015, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite IGC Konvensi. Kesempatan ini digunakan Indonesia untuk memberikan gagasan dan ide untuk pengembangan implementasi Konvensi hingga mencapai tujuan yang sudah digariskan.
- Melalui proyek yang didanai oleh Swedia, UNESCO memberikan bantuan peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan kebudayaan dan pelaporan implementasi Konvensi 2005. Proyek ini memberikan kesempatan pada Indonesia untuk mensinergikan berbagai inisiatif implementasi konvensi, menetapkan *base-line* program, memperkuat sistem informasi keragaman ekspresi budaya, membangun dialog kebijakan terbuka tentang budaya melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan sektor budaya, dan mendefinisikan tindakan prioritas untuk rencana di tahun-tahun berikutnya. Proyek ini berjalan dari tahun 2016-2018 dengan tiga mekanisme, yaitu: melaksanakan pertemuan konsultasi dengan berbagai *stakeholder*; menyelenggarakan lokakarya; serta membuat laporan dan presentasi.

Hasil-hasil utama dari proyek ini adalah tersedianya QPR Indonesia yang komprehensif. Secara tidak langsung, proyek ini menjadi salah satu acuan untuk pembuatan kebijakan nasional yang mengintegrasikan kebudayaan, turis dan ekonomi kreatif. Tahun 2018, Indonesia melakukan survei

dan riset besar-besaran terhadap 350-500 daerah untuk melihat sumber daya kebudayaan, infrastruktur serta potensi kontribusinya terhadap pengurangan angka kemiskinan, kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Survei ini adalah bentuk implementasi Konvensi 2005 dan juga menjadi rujukan untuk pembuatan Rencana Pembangunan Nasional.

- Berbasis *Culture for Development Indicators* (CDIs) UNESCO yang dimulai tahun 2009, Indonesia juga telah mengembangkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang merupakan satu-satunya di dunia. IPK yang diluncurkan tahun 2019 yang lalu ini diukur melalui indikator ekonomi, pendidikan, tata pamong, ketahanan sosio-kultural, kebebasan ekspresi, budaya membaca dan melek aksara serta warisan budaya. IPK memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan Kebudayaan dalam pengembangan kebijakan-kebijakan nasional.
- Atas inisiatif Kolombia, Indonesia dan Uni Emirat Arab bersama-sama menyelenggarakan *side event* untuk mempromosikan Ekonomi Kreatif berbasis kebebasan ekspresi budaya kepada partisipan dari *13th Session of the 2005 Convention Committee on Protection and Promotion of the diversity of cultural expressions* tanggal 12 Februari 2020. Seperti diketahui, ketiga negara berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif dunia. Indonesia menjadi tuan rumah *1st World Conference on Creative Economy di Bali, 2018*, dan inisiator resolusi PBB tentang *2021 as International Year of Creative Economy for Sustainable Development*. Kolombia menyelenggarakan *World Summit on Creative Economy tahun 2019*, dan UEA adalah calon tuan rumah *2nd World Conference on Creative Economy*.

Side event dihadiri oleh sekitar 200 partisipan pertemuan Konvensi 2005, dan diisi dengan presentasi perkembangan ekonomi kreatif dari masing-masing negara penyelenggara, dan *cocktail* dengan makanan khas dari Indonesia, Kolombia dan UEA. Indonesia diwakili oleh Wadetap RI untuk UNESCO. Kolombia menampilkan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif mereka. Sementara Uni Emirat Arab juga diwakili oleh Dewatap mereka untuk UNESCO.

SEKILAS TENTANG PROGRAM JEJARING KOTA KREATIF UNESCO

Jejaring Kota Kreatif UNESCO (*The UNESCO Creative Cities Network / UCCN*) didirikan pada tahun 2004 untuk mempromosikan kerjasama dengan dan antarkota yang telah dinilai memiliki kreativitas sebagai faktor strategis untuk pembangunan kota yang berkelanjutan.

Jejaring 246 kota saat ini bekerjasama menuju tujuan yang sama: menempatkan kreativitas dan industri budaya di jantung rencana pembangunannya di tingkat lokal dan bekerjasama secara aktif di tingkat internasional.

Dengan bergabung dalam jejaring, kota-kota tersebut berkomitmen untuk membagikan praktik baik mereka dan mengembangkan kemitraan yang melibatkan sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil untuk memperkuat penciptaan, produksi, distribusi dan penyebaran kegiatan budaya, barang dan jasa; mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi dan memperluas peluang bagi para pencipta dan profesional di sektor budaya; meningkatkan akses dan partisipasi dalam kehidupan budaya, khususnya untuk kelompok dan individu yang terpinggirkan atau rentan; dan mengintegrasikan budaya dan kreativitas sepenuhnya ke dalam rencana pembangunan berkelanjutan.

Jejaring ini mencakup tujuh bidang kreatif: Kriya dan Seni Rakyat, Seni Media, Film, Desain, Gastronomi, Sastra dan Musik.

Jejaring Kota Kreatif adalah mitra istimewa UNESCO, tidak hanya sebagai *platform* untuk refleksi tentang peran kreativitas sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan tetapi juga sebagai tempat berkembang biak tindakan dan inovasi, terutama untuk implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Saat ini sudah terdapat tiga (3) kota di Indonesia yang dinilai memiliki unsur kreativitas yang tinggi dan telah bergabung di dalam jejaring UCCN, yaitu kota Pekalongan, Bandung dan Ambon.



KOTA KREATIF UNESCO DI INDONESIA

AMBON, KOTA MUSIK

Ambon mempunyai akar kuat dalam budaya bermusik. Musik tidak hanya sekedar hiburan, tetapi gaya hidup. Dalam rangka Hari Kota Dunia (*World Cities Day*) tanggal 31 Oktober 2019, Direktur Jenderal Audrey Azoulay mengumumkan 66 kota sebagai anggota baru yang tergabung dalam 246 kota Jaringan Kota Kreatif UNESCO (*Creative Cities Network*). Ambon masuk dalam Jaringan Kota Kreatif UNESCO sebagai Kota Musik. Dirjen UNESCO Audrey Azoulay mengatakan bahwa kota-kota di Jaringan Kota Kreatif yang tersebar di seluruh dunia, menjadikan budaya bukan hanya sebagai asesoris namun sebagai pilar strategi. Itu adalah bentuk komitmen inovasi kebijakan politik dan sosial serta penanda kuat bagi generasi mudanya.

“Hanya menggunakan perut, orang Ambon sudah bisa bernyanyi dan bersenandung” merupakan ungkapan

untuk masyarakat Ambon yang sebagian besar memiliki suara yang merdu. Musik dan Ambon tampaknya tidak dapat dipisahkan karena merupakan denyut nadi dari pergerakan sebuah kota yang dikenal sebagai Ambon Manise karena “intuisi musikal” secara lahiriah tertanam dalam darah dan denyut nadi orang Ambon.

Tidak hanya sebatas seni, bagi masyarakat Ambon musik telah menjadi budaya yang merepresentasikan masyarakatnya. Sebagian besar musisi-musisi handal di Indonesia pun berasal atau setidaknya memiliki darah Ambon.

UNESCO mengatakan kota yang terletak di Provinsi Maluku ini memiliki masyarakat yang menjadikan budaya sebagai pilar dan strategi dalam pembangunan berkelanjutan. Ambon sendiri telah memiliki lima pilar

utama sebagai Kota Musik Dunia yakni melatih sumber daya manusia di bidang musik, instruktur musik, studio rekaman, sekolah musik, dan nilai sosial budaya dari musik.

Saat ini, musik telah menjadi ikon dan kendaraan untuk menciptakan kerukunan antaragama dan budaya di Ambon dan Indonesia. Musik menjadi alat perdamaian sementara yang digunakan sebagai “nilai tambah” dan “karakteristik kota Ambon” untuk disandingkan dengan kota-kota musik dunia lainnya.



KOTA KREATIF UNESCO DI INDONESIA

BANDUNG, KOTA KREATIF DESAIN

"Penilaian sangat ketat, persiapannya sangat panjang. Ini membuktikan energi kreatif Bandung tidak hanya diakui oleh nasional tapi secara internasional, sehingga memang harus dibuktikan Bandung memang laik naik kelas di kelas dunia" – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (14/12/2015)

Pada tanggal 11 Desember 2015, kota Bandung Indonesia, bersama 47 kota dari 33 negara, secara resmi disahkan oleh Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova sebagai anggota baru Jaringan Kota Kreatif UNESCO. Bandung mendapatkan predikat sebagai Kota Kreatif bidang Desain. Irina Bokova menyambut baik jaringan kota kreatif UNESCO yang makin kaya dengan keragamannya dan sekaligus juga mempresentasikan potensi besar peran budaya sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pada 14 Desember 2015: 'Penilaian sangat ketat, persiapannya sangat panjang. Ini membuktikan energi kreatif Bandung tidak hanya diakui oleh nasional tapi secara internasional, sehingga

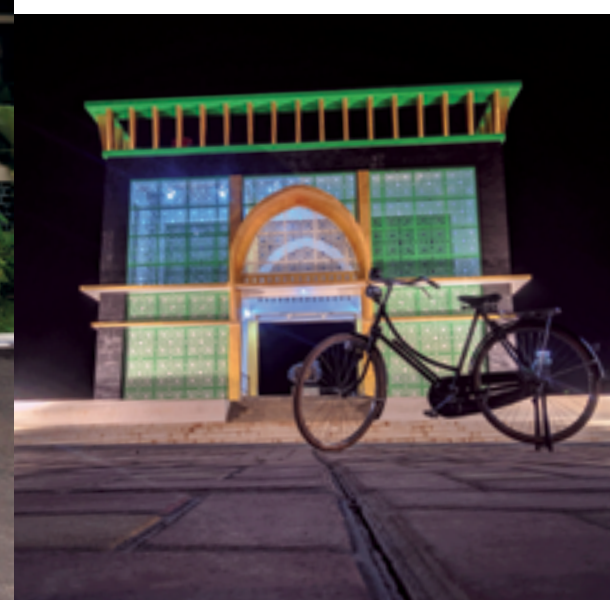
memang harus dibuktikan Bandung memang laik naik kelas di kelas dunia'.

Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, secara nasional sudah memiliki reputasi sebagai pusat inovasi dalam kreativitas dan kewirausahaan yang banyak digerakkan oleh anak muda. Bandung tidak henti mengadakan workshop, konferensi, pameran dan festival yang semuanya mendorong pengembangan kreativitas dalam desain produk atau *prototype*. 56% kegiatan ekonomi Bandung terkait dengan desain, mode, grafis dan media digital yang menjelma menjadi sub sektor ketiga teratas dalam bidang ekonomi kreatif lokal.

Dengan delapan (8) kecamatan yang telah ditetapkan sebagai desa kreatif, semakin memperkuat kota Bandung sebagai ahli pengembangan pembangunan kota kreatif. Keahlian dan pengetahuan yang dimiliki Bandung dituangkan dalam acara *Helarfest*, program andalan Bandung *Creative City Forum* yang bertujuan membina jejaring antar kota kreatif. Melalui program

Design Action, Bandung berharap menemukan solusi konkret untuk masalah perkotaan dengan melibatkan masyarakat. Dengan *Bandung Creative Center (BCC)*, Bandung menjadi hub pertukaran pengalaman dan ide kreatif bagi para pemangku kepentingan publik baik nasional maupun internasional.

Dengan penetapan sebagai Kota Desain, Bandung berencana membangun taman tematik yang dipersembahkan untuk UNESCO *Creative Cities Network* sebagai ruang pamer publik berbagai bentuk seni urban. Bandung juga meningkatkan kolaborasi dengan Kota Kreatif lainnya melalui festival kreatif, karnaval Asia-Afrika sebagai promosi kota-kota yang kurang terwakili dan sebagai bentuk kerjasama antar negara ketiga. Bandung akan membangun 30 *Creative Hub* dan mendukung penciptaan 100.000 wirausahawan baru serta pembuatan *platform Little Bandung Initiative* sebagai bentuk pertukaran produk bersama, workshop, dan acara lainnya dengan kota-kota kreatif lainnya.



KOTA KREATIF UNESCO DI INDONESIA

PEKALONGAN, KOTA KREATIF KERAJINAN DAN KESENIAN RAKYAT

“Jaringan kota kreatif UNESCO sungguh luar biasa sebagai wadah kerjasama. Hal itu mencerminkan tekad kami untuk mendukung potensi kreatif dan inovatif sebagai jalan untuk memperluas pembangunan berkelanjutan”, sambutan Irina Bokova Direktur Jenderal UNESCO pada peringatan 10 tahun UCCN (UNESCO *Creative City Network*) sekaligus pengumuman 28 kota sebagai anggota baru Jaringan UNESCO Kota Kreatif pada tanggal 1 Desember 2020.

Mendapatkan julukan sebagai Kota Batik di tingkat nasional, Pekalongan secara terhormat menjadi anggota UCCN (UNESCO *Creative City Network*) pada 1 Desember 2014 dengan menyandang predikat *Craft and Folk Art City* (Kota Kerajinan dan Kesenian Rakyat). Berkat Batik, UNESCO menilai Pekalongan memiliki potensi kuat dalam kemandirian ekonomi dan jiwa inovatif dalam kreasi kesenian rakyat. Melalui label Kota Kreatif Kerajinan dan Kesenian Rakyat, dunia hendak belajar dari Pekalongan bagaimana Batik dapat menjadi faktor kunci dan strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi

berkelanjutan. Pekalongan telah menjadi *benchmark* percontohan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan.

Terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah bagian pesisir utara, tidak jauh dari ibukota Semarang, posisi strategis kota Pekalongan telah menjadi titik perlintasan dan titik pertemuan pedagang dari penjuru dunia pada masa lalu. Setiap suku bangsa yang singgah lalu menetap memberikan pengaruh kepada dunia perdagangan dan juga kepada warna kesenian rakyat yang telah ada. Pekalongan telah menjadi rumah bagi suku etnis berbeda yang hidup bersama untuk berdagang, berkarya dan berbudaya. Batik berhasil menjadi identitas penyatu dan juga menjadi media sekaligus sumber inspirasi dalam berkesenian.

Pekalongan adalah simbol dari kota yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan Batik. Menjaga dan mengembangkan budaya Batik dan desa kerajinan Batik telah menjadi prioritas kota Pekalongan.

Museum Batik dan tempat *workshop* untuk pelajar sebagai pusat berkreasi dan berkesenian merupakan hal yang sangat penting dan telah diakui sebagai *Best Safeguarding Practice of Intangible Heritage* (Cara Praktis Terbaik dalam Melindungi Warisan Tak benda). Dengan tergabung dalam UNCC, Pekalongan terus berupaya meningkatkan mutu dan nilai sebagai Kota Kerajinan dan Kesenian Rakyat dengan cara mempertahankan tradisi Batik, mempromosikannya dalam kreasi seni, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pekalongan juga berupaya memperkuat kompetensi intitusi Batik, mendukung penelitian ilmuwan yang terkait, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai daya dukung pengembangan Batik serta mengkampanyekan industri Batik ramah lingkungan. Pekalongan akan menjadi pusat spesialisasi Batik dengan mempromosikan Batik di tingkat, lokal, nasional, regional dan global.

UNESCO DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI INDONESIA

PENGANTAR

UNESCO berupaya mendorong kebebasan berekspresi, pengembangan media, dan akses terhadap informasi dan pengetahuan sejalan dengan mandat UNESCO yaitu *“to promote the free flow of ideas by word and image”*. Upaya ini turut berkontribusi untuk mencapai SDGs (Goal 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16 dan 17) yang ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada bidang sosial, bidang politik dan bidang ekonomi dari era digital.

Fokus UNESCO untuk sektor komunikasi dan informasi adalah mengedepankan kebebasan berekspresi dan keamanan jurnalis secara *online* dan *offline*, khususnya dalam kerangka Rencana Aksi PBB tentang Keamanan Jurnalis. Selain itu, fokus lainnya adalah memerangi ujaran kebencian di media sosial *online*, serta informasi yang kurang tepat dan informasi yang salah melalui inisiatif untuk meningkatkan kesadaran, pemantauan, serta program peningkatan kapasitas, dan dukungan teknis kepada negara-negara Anggota.

UNESCO juga mendukung akses universal terhadap informasi dan pengetahuan melalui gerakan keterbukaan solusi, termasuk keterbukaan Sumber Daya Pendidikan, akses untuk orang-orang yang terpinggirkan serta multibahasa di dunia maya.

UNESCO selain itu mendorong inklusivitas di dalam sektor informasi dan komunikasi melalui upaya diantaranya mengembangkan kurikulum literasi media dan informasi, kesetaraan gender dalam operasional dan konten media, dan mendorong liputan media pada keadaan krisis dan situasi darurat. Melalui pendekatan holistiknya, UNESCO berkontribusi pada keragaman media dan pluralisme dengan mendorong keanekaragaman konten, audiens, sumber, dan sistem.

World Press Freedom Day

Tercatat, Indonesia pernah menjadi tuan rumah *World Press Freedom Day* pada bulan Mei 2017. Acara ini dihadiri oleh Dirjen UNESCO ketika itu, Irina Bokova, dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan ditutup oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Presiden RI Joko Widodo Hadir pada saat penyerahan penghargaan UNESCO/*Guillermo Cano World Press Freedom Prize* kepada Dawit Isaak, jurnalis Swedia keturunan *Eritrea* yang ditangkap oleh Pemerintah *Eritrea* pada tahun 2001 dan berstatus hilang. Penghargaan diterima oleh putri Dawit Isaak.

Open Educational Resources (OER)

Dalam upaya mendorong keterbukaan dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil dan berkelanjutan, Sektor CI UNESCO telah mengadopsi *Recommendation on Open Educational Resources (OER)* melalui sidang *General Conference* sesi ke-40 pada bulan November 2019.

Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan penyusunan dokumen OER. Dengan diadopsinya Rekomendasi ini, maka Pemri perlu memutuskan untuk ikut tidaknya Indonesia menjadi negara pihak pada Rekomendasi ini.

Rekomendasi OER dapat mendorong pelaksanaan kerjasama internasional dalam bidang *learning contents and resources* serta memberikan akses pendidikan terbuka yang inklusif, adil dan berkelanjutan serta pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*) bagi seluruh peserta didik termasuk anak putus sekolah dan kaum marginal.

Memory of The World (Mow) Programme

UNESCO meluncurkan *Memory of the World Programme* pada tahun 1992. Inisiasi itu awalnya berasal dari kesadaran yang semakin meningkat akan pelestarian, dan akses ke warisan dokumenter peristiwa dan sejarah penting di berbagai belahan dunia. Koleksi warisan dokumentasi dan arsip sejarah penting di seluruh dunia telah mengalami berbagai proses seperti penjarahan dan pembubaran, perdagangan ilegal, perusakan, penempatan pada *repository* dan pendanaan yang tidak memadai. Banyak warisan arsip dan dokumentasi yang telah lenyap dan terancam punah. Tidak jarang, warisan dokumenter yang hilang terkadang ditemukan kembali.

Visi utama *Memory of the World Program* adalah pemahaman bahwa warisan dokumenter dunia adalah milik semua, harus dilestarikan sepenuhnya dan dilindungi dengan tetap memperhatikan hak atas adat istiadat dan budaya, serta harus dapat diakses secara permanen oleh semua tanpa hambatan.

Misi dari *Memory of the World Program* adalah memfasilitasi pelestarian warisan dokumenter dunia, mendukung akses universal ke warisan dokumenter; serta meningkatkan kesadaran di seluruh dunia tentang keberadaan dan pentingnya warisan dokumenter termasuk mengembangkan register Memori Dunia, media, serta publikasi promosi dan informasi, pelestarian dan akses.

Registrasi MoW

Nominasi untuk registrasi MoW *programme* dapat diajukan oleh setiap orang atau organisasi, termasuk pemerintah dan LSM. Namun, prioritas akan diberikan kepada nominasi yang dibuat oleh atau melalui komite Memori Dunia regional atau nasional yang relevan, jika ada, atau jika tidak, melalui Komisi Nasional UNESCO yang relevan.

Secara umum, nominasi tunggal akan dibatasi untuk dua nominasi per negara setiap dua tahun, namun, dua atau lebih negara dapat mengajukan nominasi bersama di mana koleksi dibagi di antara beberapa *owners*/pihak. Dalam kasus di mana *heritage* ada di beberapa lokasi, atau memiliki beberapa *owners*/pihak, rincian lengkap dari setiap komponen, *owners*/pihak harus dicantumkan. Nominasi juga harus diajukan atas nama, dan dengan

dukungan yang terdokumentasi, dari semua pihak yang terlibat. Tidak ada batasan jumlah nominasi tersebut, atau jumlah mitra yang terlibat.

Pencatatan warisan dokumenter dalam daftar MoW tidak memiliki konsekuensi hukum *prima facie* atau konsekuensi finansial. Ini tidak secara resmi mempengaruhi kepemilikan, hak pemeliharaan atau penggunaan materi.

Warisan dokumenter yang dinominasikan harus terbatas dan didefinisikan dengan tepat; nominasi luas, umum, atau terbuka tidak akan diterima. Register tidak memasukkan semua catatan dalam arsip publik dan pribadi, tidak peduli betapa pentingnya badan atau individu tersebut. Repositori harus mencalonkan untuk dimasukkan dalam Daftar hanya dokumen-dokumen yang jelas-jelas penting bagi dunia. Setelah ditambahkan ke *Memory of the World Register*, grup dokumen tidak dapat divariasikan atau didefinisikan ulang seiring waktu.

UNESCO/Jikji Memory of the World Prize

Prize diberikan dalam rangka mendorong akses universal ke informasi dan pengetahuan. Prize ini terdiri dari penghargaan dua tahunan sebesar USD 30.000 kepada individu atau lembaga yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian dan aksesibilitas warisan dokumenter.

Pembiayaan operasional *prize* serta semua biaya yang terkait dengan upacara pemberian prize didanai oleh Republik Korea Selatan. Prize ini terbuka untuk *member states* dan organisasi internasional non-pemerintah (LSM) yang terkait dengan UNESCO.

Inskripsi Dokumen Sejarah Indonesia di dalam Memory of the World Programme

Sejak tahun 2017 hingga kini, Indonesia telah mendaftarkan delapan (8) arsip sejarah Indonesia, yaitu:

1. Arsip Konservasi Candi Borobudur oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud, tahun 2017
2. Manuskrip Cerita Panji oleh Perpustakaan Nasional, tahun 2017
3. Arsip Tsunami Samudera Hindia oleh ANRI dan Provinsi DI Aceh, tahun 2017
4. Arsip Konferensi Asia Afrika oleh ANRI, tahun 2015
5. Babad Diponegoro oleh Perpustakaan Nasional, tahun 2013
6. Nagarakretagama oleh Perpustakaan Nasional, tahun 2013
7. La Galigo oleh Museum La Galigo, tahun 2011
8. Arsip VOC oleh ANRI, tahun 2004

Deskripsi ringkas masing-masing arsip sejarah Indonesia tersebut dapat dilihat pada halaman-halaman berikut.

TETAPAN ARSIP SEJARAH INDONESIA DI DALAM MEMORY OF THE WORLD REGISTER



ARSIP SEJARAH INDONESIA

ARSIP VOC (VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE) (ARCHIVES OF THE DUTCH EAST INDIA COMPANY)

2003

VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*), sebagai perusahaan Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan dilikuidasi pada tahun 1795 merupakan perusahaan perdagangan Eropa modern yang pertama dan terbesar yang pernah beroperasi di Asia. Arsip VOC ini diusulkan oleh Belanda serta didukung oleh India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Sri Lanka sebagai *Memory of the World* UNESCO. Warisan ini direkomendasikan masuk dalam kategori Ingatan Dunia pada tahun 2003.

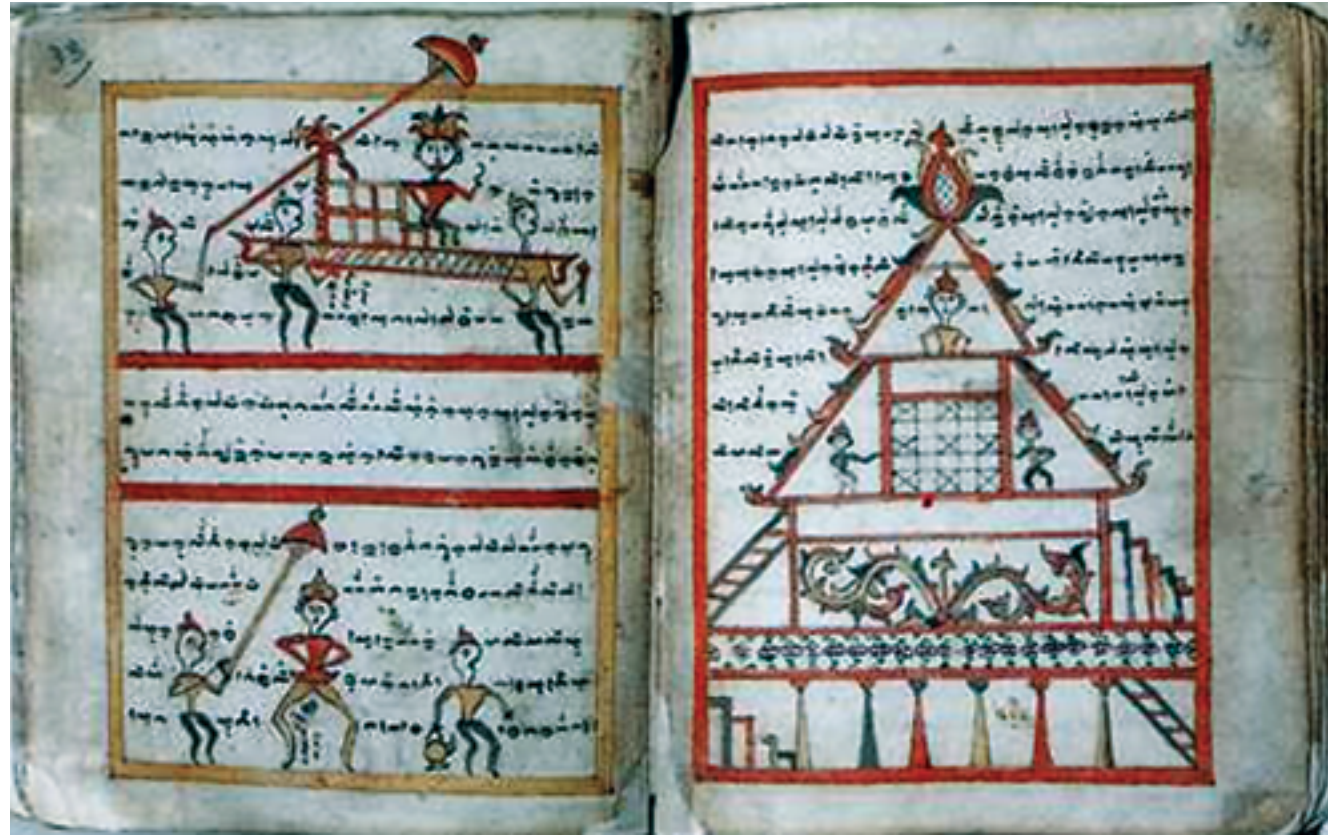
Terdapat sekitar 25 juta halaman catatan VOC telah disimpan dalam repositori di Jakarta, Kolombo, Chennai,



Cape Town, dan Den Haag. Arsip VOC merupakan sumber yang paling lengkap dan luas mengenai awal sejarah dunia modern dengan data yang berhubungan dengan sejarah ratusan daerah perdagangan serta politik di Asia dan Afrika pada masa lampau.

Arsip VOC berisi soal sosial, agama, budaya, politik, geografis, militer dan informasi ekonomi dari dan tentang banyak negara di Asia, Afrika Selatan dan Belanda. Arsip VOC mencerminkan sejarah ekspansi Eropa serta sejarah wilayah tempat VOC mendirikan pos perdagangan. Perusahaan Dagang Hindia Belanda

ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia dan dengan perkembangan saham dan pemegang saham pada saat itu merupakan tolak ukur penting dalam pengembangan instrumen keuangan modern.



ARSIP SEJARAH INDONESIA

LA GALIGO

2011

La Galigo adalah teks puisi yang menggunakan kosakata bahasa Bugis lama. Teks puisi tersebut sangat panjang dan berbahasanya yang sangat indah dan juga sulit. Karya ini juga dikenal dengan nama *Sureq Galigo* yang berasal dari sekitar abad ke-14 dengan bentuk awal tradisi lisan. Isinya mengenai pra-Islam dan bersifat epik-mitologis berkualitas sastra tinggi. La Galigo ini secara utuh sangat besar (kira-kira sepanjang 6000 halaman folio) dan dapat dianggap sebagai karya sastra yang paling besar di dunia.



Naskah La Galigo ditulis di Makassar sekitar 1852-1858 oleh Colliq Pujié (Arung Pancana Toa), Ratu Tanete dari suatu kerajaan kecil di Sulawesi Selatan. Naskah ini pun menjadi inspirasi di dunia seni lainnya. La Galigo juga dikenal sebagai I La Galigo, suatu karya musik oleh Robert Wilson, seniman dan Direktur Teater Avant-Garde Amerika.

Warisan dokumenter La Galigo ini diusulkan oleh Indonesia bersama dengan Belanda dan ditetapkan masuk dalam Ingatan Dunia UNESCO pada tahun

2011. Pada tahun yang sama, La Galigo ditetapkan sebagai Ingatan Dunia. Naskah La Galigo, sudah bisa diakses secara *online* di seluruh dunia. Di samping itu perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, telah membuat versi digitalnya.



ARSIP SEJARAH INDONESIA

BABAD DIPONEGORO

2013

Babad Diponegoro merupakan autobiografi seorang bangsawan Jawa, pahlawan nasional Indonesia dan pan-Islamis, yakni Pangeran Diponegoro. Babad Diponegoro adalah hasil karya besar puitis yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pahlawan nasional, mistik Jawa, dan Muslim yang soleh. Pangeran Diponegoro memimpin “Holy War” melawan pemerintahan kolonialisme Belanda di Jawa antara tahun 1825-1830. Autobiografi ini berasal dari Yogyakarta dan ditulis oleh Pangeran Diponegoro saat



ia dalam pengasingan di Sulawesi Utara pada 1831-1832. Naskah ini merupakan catatan pribadi seorang tokoh kunci dalam sejarah Indonesia modern. Naskah ini juga merupakan autobiografi pertama dalam sastra Jawa modern yang memperlihatkan kepekaan pada kondisi sosial pada masanya.

Warisan dokumenter ini telah diusulkan oleh Indonesia bersama dengan Belanda untuk direkomendasikan agar masuk dalam Ingatan Dunia pada tahun 2013

dan disahkan bersama naskah Negarakertagama selama Sesi ke-11 “International Advisory Committee” untuk program *Memory of the World* UNESCO di Kota Metropolitan Gwangju, Korea Selatan, pada 18-21 Juni 2013.



ARSIP SEJARAH INDONESIA

NAGARAKRETAGAMA

2013

Indonesia mengusulkan warisan dokumenter Nagarakretagama untuk masuk dalam Ingatan Dunia UNESCO pada tahun 2013. Nagarakretagama ditulis oleh Mpu Prapanca yang mengamati dan kemudian menuliskan *blusukan* (mengunjungi daerah-daerah) Raja Hayam Wuruk pada awal abad ke-14 di Kerajaan Majapahit yang menjadi cikal bakal Indonesia saat ini.

Kekuasaan Majapahit dalam kitab Nagarakretagama ini tercatat hingga berada di luar wilayah Indonesia saat ini, mencakup Malaysia dan Singapura. Lebih jauh, arsip Nagarakretagama memberikan kesaksian pada masa



pemerintahan seorang raja di Indonesia pada abad ke-14 yang memiliki ide-ide modern tentang keadilan sosial, kebebasan beragama, keamanan pribadi, dan kesejahteraan rakyat. Arsip ini juga memberikan kesaksian tentang sikap demokratis dan keterbukaan otoritas meskipun rakyat pada masa itu masih berpegang pada hak-hak mutlak kerajaan.

Kitab Nagarakretagama ini ditulis di atas daun lontar, berbahasa dan beraksara Jawa kuno dengan bentuk kakawin alias syair dengan ungkapan yang unik. Nagarakretagama ditemukan peneliti Belanda

tahun 1890-an yang kemudian dibawa ke Belanda. Beberapa puluh tahun kemudian, dengan upaya diplomasi akhirnya kitab ini dikembalikan dari Belanda, bersamaan dengan harta pusaka lainnya, termasuk pelana kuda Pangeran Diponegoro. Kini, naskah asli kitab Nagarakretagama tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.



ARSIP SEJARAH INDONESIA

ARSIP KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA)

2015

Pada 8 Oktober 2015, UNESCO mengumumkan Arsip KAA (Konferensi Asia-Afrika) sebagai Warisan Ingatan Dunia. Sebanyak 565 lembar arsip foto, 7 reel arsip film, dan 37 berkas arsip tekstual setebal 1778 lembar menjadi saksi sejarah berlangsungnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 18-24 April 1955. Arsip KAA mulai dari potret para delegasi, notulensi rapat, rekaman pidato, hingga surat menyurat, terdokumentasi dengan baik dalam koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Konferensi tersebut merupakan konferensi internasional pertama yang diikuti oleh negara-negara di Asia dan Afrika yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia dan kerja sama serta kebebasan dari kolonialisme dan *imperialisme*.

Sepanjang peradaban dunia modern, KAA



menjadi konferensi internasional pertama yang mempertemukan antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Pencetusnya adalah Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) yang diwakili perdana menteri masing-masing (Ali Sastroamidjojo, Pandit Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali, Sir John Kotelawala, dan U Nu). Kelima negara sponsor itu mempersiapkan KAA dalam Konferensi Panca Negara yang diadakan di Bogor tahun 1954. Para tokoh-tokoh penting tersebut mengupayakan forum yang bisa merepresentasikan suara rakyat Asia dan Afrika di tengah-tengah dominasi bangsa kulit putih dan Perang Dingin. Dari 29 negara peserta dan 200 delegasi itu lahirlah manifesto Dasasila Bandung. Sepuluh prinsip yang termaktub dalam Dasasila Bandung mencerminkan cita-cita luhur seluruh peserta KAA, yakni merdeka dari *imperialisme* dan hidup berdampingan secara damai.

Arsip KAA ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang mampu menginspirasi bangsa-bangsa lain untuk memerdekakan diri dari jeratan kolonialisme. Dari perspektif kearsipan, konten dan konteks KAA memiliki nilai historis yang sangat tinggi dan penting. KAA adalah peristiwa yang langka karena setelah itu tidak ada lagi konferensi yang bertajuk seperti Konferensi Asia Afrika. Sehingga, arsip KAA ini sangat bernilai.



ARSIP SEJARAH INDONESIA

BABAD PANJI

2017

Kamboja, Indonesia, Belanda, Malaysia dan Inggris Raya, pada tahun 2016, mengajukan bersama pendaftaran naskah Babad Panji untuk dimasukkan dalam *Memory of the World* (Ingatan Dunia) dan pada tahun 2017, UNESCO mengesahkan dokumen tersebut.

Kisah Panji adalah cerita dari abad ke-13 yang banyak menceritakan petualangan Pangeran Panji, seorang pahlawan Jawa yang mencari kekasihnya, Puteri Candra Kirana, dengan melakukan berbagai penyamaran dengan menggunakan nama yang berbeda. Penyamaran tersebut yang melahirkan banyak versi Kisah Panji



di beberapa daerah. Babad Panji menjadi penanda perkembangan sastra Jawa yang tidak lagi dipengaruhi oleh epos besar Ramayana dan Mahabharata dari India yang dikenal di Jawa sejak abad ke-12.

Pada masa kerajaan Majapahit (abad ke-14 dan 15), kisah Panji banyak disebarkan oleh pelaut-pedagang dan menjadi salah satu sastra terpopuler di Asia tenggara selama abad ke-17 s.d. ke-18, mulai dari Jawa hingga Bali, dan daerah-daerah Melayu, Thailand, Myanmar, Kamboja dan Filipina. Sejarawan spesialis Asia Tenggara *Adrian Vickers* menggambarkan

pengaruh Babad Panji sebagai “Peradaban Panji di Asia Tenggara”. Panji adalah wujud tradisi sastra Jawa yang penyebarannya telah menjadi warisan identitas budaya yang unik di Asia Tenggara.



Photo courtesy : Adek Berry / AFP

ARSIP SEJARAH INDONESIA

ARSIP TSUNAMI SAMUDRA HINDIA

2017

Arsip Tsunami Samudra Hindia telah diakui UNESCO sebagai *Memory of the World* Tahun 2017 oleh *International Advisory Committee* (IAC) dalam pertemuan terakhir 20 – 24 Oktober 2017 di Paris. Arsip Tsunami Samudra Hindia diajukan sebagai *joint nomination* antara Indonesia dan Sri Lanka untuk mengangkat rekaman arsip Tsunami sebagai memori dunia yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Peristiwa Tsunami di wilayah Samudera Hindia pada tahun 2004 adalah bencana dahsyat dan mematikan. Arsip ini mengajarkan kita tentang bencana, pengembangan teknologi, kemanusiaan, dan penanggulangan bencana.



Photo courtesy : AusAid

Pentingnya keberadaan arsip Tsunami Samudera Hindia untuk masyarakat dunia menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menominasikan arsip tersebut sebagai Ingatan Dunia dalam program *Memory of the World* UNESCO. Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dengan ketinggian gelombang melebihi 30 meter, menyebabkan kehancuran luar biasa di Bangladesh, Indonesia, India, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thailand dan 12 negara lainnya dan merenggut lebih dari 310.000 jiwa. Arsip tersebut berada di beberapa negara

yang terkena dampak tsunami seperti Indonesia, India, Malaysia, Sri Lanka, dan Thailand. Jumlah arsipnya adalah 9.311 meter linier, 500 foto, 196 kaset audio, 1.230 CD/DVD elektronik, dan 13 video magnetik.



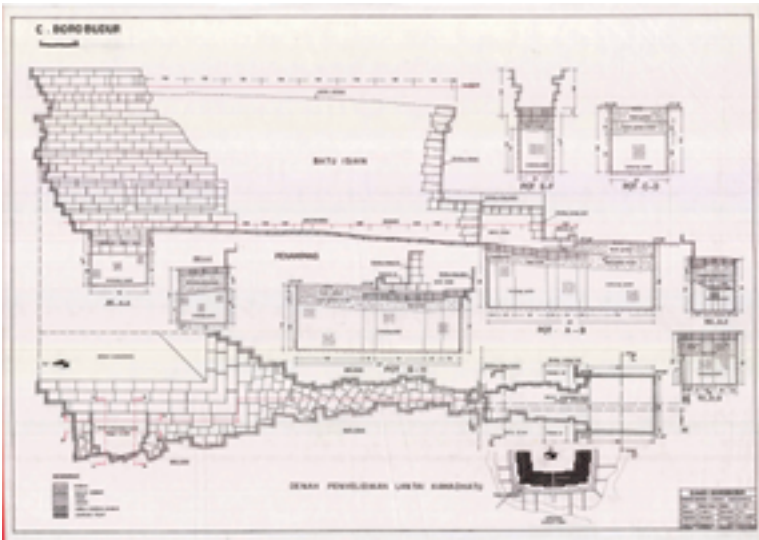
ARSIP SEJARAH INDONESIA

ARSIP BOROBUDUR

2017

Arsip Borobudur telah diakui oleh UNESCO sebagai *Memory of the World* pada tahun 2017. Nominasi dokumen bersejarah yang diajukan pada tahun 2016 tersebut, digagas oleh Balai Konservasi Borobudur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Arsip Borobudur berisi laporan-laporan dan foto-foto pemugaran Candi Buddha ini.

Semua dokumen yang terdiri dari 71.851 lembar foto, 6.043 lembar gambar, 7.024 lembar kaca negatif, 13.512 slide film positif, 65.741 ekspos film negatif, 21 gulungan film seluloid dan 425 nomor dokumen proyek sudah diubah ke dalam bentuk digital.



Arsip Konservasi Borobudur adalah seperangkat dokumen yang terkait dengan konservasi Candi Borobudur sebagai salah satu kampanye internasional paling awal, yang dimulai pada 1960-an dan berjalan hingga 1980-an, untuk melestarikan situs budaya yang didanai oleh komunitas internasional bekerja sama dengan Pemri.

Kampanye dan Proyek Restorasi Borobudur (1973-1983), adalah salah satu perintis pembentukan Konvensi Warisan Dunia. Borobudur adalah proyek pertama yang melibatkan penggunaan teknik modern untuk konservasi monumen. Dengan adanya pengakuan

terhadap Arsip Konservasi Borobudur, maka hal tersebut akan berperan penting dalam pengembangan ilmu konservasi terkini.

UNESCO DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN MULTILATERAL INDONESIA

Arah Kebijakan dan Capaian Program Indonesia-UNESCO di Bidang Hubungan Multilateral

Kamapradipta Isnomo, BA, MA

- Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia
- Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri RI. Periode 2017-2020



Bergabungnya Indonesia sebagai anggota UNESCO sejak 27 Mei 1950 tidak terlepas dari pandangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta pandangan bahwa *multilateralisme* merupakan landasan Indonesia dalam mengembangkan kerja sama global. Di samping itu, keputusan bergabungnya Indonesia pada UNESCO juga mempertimbangkan misi utama UNESCO sebagaimana tercantum dalam Konstitusi UNESCO tahun 1946 yaitu menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berlandaskan pada prinsip dan norma universal, *shared values*, dan penghormatan kepada hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Mukadimah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, bahwa tujuan utama negara Indonesia adalah untuk "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...".

Pada tahun 2020 ini, telah terdapat 193 negara anggota dan 11 anggota asosiasi UNESCO. Hal tersebut tentu membawa manfaat bagi pengembangan hubungan multilateral Indonesia, antara lain dengan penguatan kerja sama dan sikap saling menghormati antarnegara dari kesepakatan yang dihasilkan dalam forum-forum UNESCO. Keanggotaan Indonesia pada UNESCO juga berguna bagi Indonesia dengan misi UNESCO "*to contribute to the building of peace, the eradication of poverty, sustainable development, and intercultural dialogue*" yang sejalan dengan kepentingan Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat beragam.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mendukung multilateralisme, mendorong tercapainya kepentingan nasional Indonesia, serta meningkatkan *profiling* Indonesia pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi, dan demi pencapaian pembangunan berkelanjutan, Indonesia senantiasa berperan aktif dalam menjalankan mandat dan program-program UNESCO.

Kontribusi Indonesia untuk Mendukung Mandat UNESCO

Upaya utama Indonesia dalam menjalankan mandat UNESCO adalah dengan pembentukan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) pada 11 Juli 1977 yang bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan UNESCO pada empat area kerja yaitu di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal VII Konstitusi UNESCO. UNESCO merupakan satu-satunya badan PBB yang memiliki jejaring global dari



General Conference ke-40, UNESCO Headquarters, 2019



Sesi World Heritage Committee ke-43, Baku, Azerbaijan, 2019



Pidato Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI untuk UNESCO Arrmanatha Nasir saat General Conference ke-40

Komisi Nasional masing-masing negara. Adapun saat ini telah terdapat 199 Komisi Nasional untuk UNESCO di seluruh dunia.

Kontribusi Indonesia dalam mendukung mandat UNESCO pun tercermin dalam jumlah tetapan Indonesia di UNESCO dalam berbagai kategori. Saat ini, untuk kategori Warisan Dunia UNESCO, Indonesia telah berhasil memasukkan 5 (lima) warisan budaya dan 4 (empat) warisan alam. Di samping itu, Indonesia juga telah berhasil mendapat pengakuan untuk sepuluh (10) warisan budaya tak benda, delapan (8) dokumen Indonesia sebagai *Memory of the World*, enam belas (16) *Man and Biosphere Reserves*, lima (5) *Geopark* Indonesia sebagai UNESCO *Global Geoparks*, tiga (3) kota di Indonesia dalam UNESCO *Creative Cities Network*, serta berbagai UNESCO *Prizes* dan *Awards*. Sejumlah pengakuan UNESCO tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung mandat UNESCO untuk mendorong kemajuan di bidang-bidang yang diampu oleh UNESCO.

Selanjutnya, sebagaimana keanggotaan pada forum *multilateral* lainnya, keanggotaan Indonesia pada UNESCO pun bertujuan untuk penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria, khususnya di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Sehubungan dengan itu, komitmen Indonesia dalam mendukung mandat UNESCO juga dapat dilihat dari pengesahan dan implementasi konvensi dan protokol UNESCO. Sejauh ini, setidaknya terdapat 13 (tiga belas) konvensi dan protokol UNESCO yang telah disahkan oleh Indonesia, baik itu dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), maupun penerimaan (*acceptance*).

Kontribusi Indonesia pada UNESCO juga terwujud dengan menjadikannya Indonesia sebagai anggota *Executive Board* UNESCO periode 2017-2021, di mana Indonesia memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan UNESCO, termasuk menentukan agenda pembahasan *General Conference* dan program-program UNESCO ke depannya. Khususnya pada tahun 2020 ini,

di saat pandemi COVID-19 melanda dunia, Indonesia turut menekankan pentingnya peran UNESCO dalam memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, serta komunikasi dan informasi pada Pertemuan Daring *The 6th Special Session of Executive Board of UNESCO*. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menekankan agar UNESCO dapat mengadaptasi metode kerjanya, sehingga dapat bekerja secara lebih efektif dan produktif dengan tetap mempertahankan inklusivitas di masa krisis.

Program-program UNESCO di Indonesia

Selain mendukung mandat-mandat UNESCO, Indonesia juga senantiasa menerima manfaat dari program-program UNESCO sejak menjadi anggota organisasi ini 70 tahun yang lalu. Salah satu manfaat utama yang dirasakan oleh Indonesia adalah melalui Program Literasi UNESCO yang telah dimanfaatkan sebagai pedoman pengentasan buta aksara di Indonesia. Setelah tiga tahun bergabungnya Indonesia pada UNESCO, tepatnya pada tahun 1953, angka buta aksara di Indonesia menurun dari 97% menjadi 65,9%. Hingga tahun 2019 lalu, jumlah buta aksara di Indonesia hanya sebesar 1,93%. Tentu saja, di samping Program Literasi juga terdapat manfaat lain dari program-program UNESCO di Indonesia sesuai masing-masing mandat.

Program-program UNESCO di Indonesia dikoordinasikan oleh Kantor UNESCO Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1951. Selain difokuskan untuk memberikan kontribusi pada pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, program-program UNESCO yang dilaksanakan di negara-negara anggotanya juga memperhatikan kebutuhan dan prioritas nasional negara tersebut.

Di Indonesia, pendidikan merupakan isu sentral dalam agenda pembangunan yang terwujud dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan. Untuk itu, Kantor UNESCO Jakarta mendukung upaya Pemri

dalam mencapai pendidikan berkualitas dengan mendorong reformasi dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, Kantor UNESCO Jakarta juga berfokus untuk menghilangkan hambatan dalam proses pembelajaran, serta mendorong Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), Pelatihan Pendidikan Teknis dan Kejuruan (TVET), perencanaan pendidikan, dan pedagogi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dalam bidang ilmu pengetahuan alam, program-program utama UNESCO di Indonesia turut mencakup pengurangan risiko bencana, serta ilmu lingkungan dan air. Pengurangan risiko bencana diperlukan mengingat Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, antara lain banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Sementara itu, ilmu lingkungan dan air diperlukan mengingat Indonesia tengah mengalami tingkat kerusakan sumber daya alam yang tinggi, termasuk penipisan hutan hujan primer melalui penggundulan dan kebakaran hutan, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran sistem perairan. Untuk itu, program dalam bidang ilmu pengetahuan alam difokuskan pada penguatan ketahanan masyarakat, peningkatan kapasitas untuk meminimalisir risiko bencana, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mencapai target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan konservasi alam. Adapun contoh program yang mendukung tujuan tersebut antara lain adalah *the Man and the Biosphere Programme* (MAB), *the International Hydrological Programme* (IHP), dan *International Geoscience and Geoparks Programme* (IGGP).

Dalam bidang ilmu pengetahuan sosial, Indonesia mengalami tantangan dengan keberagaman masyarakat yang ada. Sehubungan dengan itu, program-program UNESCO di Indonesia juga ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan manusia untuk menghasilkan, mengelola, dan menerapkan pengetahuan untuk menyampaikan target-target Agenda 2030 yang terkait dengan inklusi sosial, pengurangan ketidaksetaraan, peningkatan kesehatan, kebijakan yang inklusif, serta pembuatan keputusan yang partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, program yang dilaksanakan antara lain adalah *Management of Social Transformations* (MOST) *Programme*.

Sementara itu, bidang budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan Indonesia yang turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai negara multikultural dengan keanekaragaman alam dan budaya yang melimpah, Indonesia perlu untuk menjaga kelestarian kekayaan warisan alam dan budaya, baik budaya benda maupun tak benda. Sehubungan dengan itu, Indonesia



Sidang MAB-ICC ke-31 yang diketuai oleh Prof. Dr. Enny Sudarmonowati



Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI untuk UNESCO Arrmanatha Nasir saat pemilihan anggota Komite Intangible Cultural Heritage (ICH) di sidang General Assembly ICH, 8-10 September 2020

telah meratifikasi konvensi-konvensi terkait, seperti *the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its protocols* (1967); *the 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (1989), *the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* and *the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. Karenanya, program-program UNESCO di Indonesia dalam bidang budaya bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan mewariskan budaya; serta membina kreativitas dan keragaman ekspresi budaya.

Terakhir, di bidang komunikasi dan informasi, kebebasan pers di Indonesia telah meningkat mengiringi transisi Indonesia menuju demokrasi sejak tahun 1998. Prioritas Nasional Indonesia untuk membangun tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya berkorelasi dengan Strategi UNESCO Jangka Menengah 2014-2021 (dokumen 37C/4) Tujuan Strategis nomor 9 (SO 9). Sehubungan dengan itu, program-program UNESCO di Indonesia juga ditujukan untuk mempromosikan kebebasan berekspresi, pengembangan media, serta akses terhadap informasi dan pengetahuan.

Rekomendasi Kerja Sama Multilateral Indonesia-UNESCO

Dalam menjalankan kerja sama multilateral dengan UNESCO, kiranya koordinasi antara kementerian dan lembaga negara yang terkait dapat lebih diperkuat, mengingat isu-isu yang ditangani UNESCO diampu oleh berbagai kementerian dan lembaga negara sebagai instansi penjuror. Kontribusi Indonesia dalam mendukung mandat-mandat UNESCO juga perlu diimbangi dengan pemanfaatan secara maksimal berbagai program UNESCO yang dilaksanakan di Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam mendukung mandat dan program-program UNESCO telah tercermin

dari berbagai konvensi dan protokol UNESCO yang telah disahkan oleh Indonesia, baik itu dalam bentuk ratifikasi, akses, maupun penerimaan. Kiranya dapat dipertimbangkan ke depannya, agar Indonesia dapat mensahkan beberapa konvensi lainnya, antara lain *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property* (1970), *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects* (1995), dan *Convention on Underwater Cultural Heritage* (2001). Disahkannya konvensi-konvensi dimaksud dapat memperkuat upaya perlindungan warisan budaya dan alam Indonesia, selain itu juga meningkatkan kontribusi Indonesia dalam perlindungan warisan budaya dunia dari pemindahtanganan secara ilegal.

Dalam kaitan ini, perlu juga ditekankan bahwa komitmen Indonesia bukan hanya untuk menambah jumlah inskripsi pada berbagai platform UNESCO, tetapi juga untuk menjaganya agar tetap sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh UNESCO. Bahwa upaya dalam mendapatkan sejumlah pengakuan internasional dalam kerangka UNESCO tersebut tidak berhenti sampai saat inskripsi, namun perlu dikapitalisasi lebih lanjut di tingkat nasional guna mendapatkan manfaat konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Formulasi kepentingan Indonesia di UNESCO juga perlu lebih dikonsolidasikan agar keanggotaan strategis Indonesia pada berbagai platform di UNESCO dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan nasional dan guna meningkatkan sumbangsih Indonesia terhadap pencapaian tujuan-tujuan global khususnya pada kerangka UNESCO.

Ke depan, Indonesia perlu lebih mendorong relevansi dan *value-added* UNESCO dalam pencapaian kepentingan nasional serta mendorong sinergi dan kolaborasi UNESCO dengan badan-badan PBB lainnya secara lebih erat dalam pencapaian visi dan misi UNESCO.

KEANGGOTAAN INDONESIA PADA BADAN SUBSIDIER UNESCO

Executive Board (EXB)

Executive Board (EXB) merupakan salah satu dari organ utama UNESCO yang berperan untuk memastikan pelaksanaan program UNESCO dan pengelolaan organisasi UNESCO khususnya hasil keputusan *General Conference*. EXB memiliki 58 anggota yang dipilih melalui sidang *General Conference* yang merupakan keterwakilan semua region. Sidang EXB dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk meriviu implementasi dan evaluasi program serta memberikan rekomendasi pelaksanaan program selanjutnya.

Indonesia sudah delapan kali menjadi anggota *Executive Board* yakni pada periode 1954-1958, 1958-1962, 1976-1980, 1985-1989, 1995-1999, 2003-2005, 2011-2015 dan saat ini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Headquarter Committee (HQ)

HQ mempunyai mandat untuk memberikan masukan, saran, usulan dan rekomendasi kepada DG pada pertanyaan-pertanyaan yang timbul berkaitan dengan organisasi-organisasi *headquarter* yang diajukan oleh direktur jenderal maupun negara-negara anggota.

Saat ini, anggota HQ berjumlah 24 negara yang dipilih setiap 4 tahun sekali. Indonesia saat ini menjadi salah satu anggota. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota pada kelembagaan tahun 1994-1998, 2015-2019.

International Coordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere (MAB)

ICC MAB adalah badan subsidier UNESCO yang berfokus untuk menciptakan landasan ilmiah untuk meningkatkan keseimbangan antara *human livelihoods* dan lingkungannya (*natural science*). Misi dari badan subsidier ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus terciptanya kelestarian sumber daya alam hayati.

Jumlah anggota ICC-MAB adalah 34 negara. Indonesia menjadi anggota pada tahun 1971-1972, 1974-1976, 1978-1983, 1991-1999, 2001-2005, 2007-2011, 2015-2019 dan 2019-2024.

Indonesia terpilih sebagai Ketua ICC MAB pada Sidang Sesi ke-30 *International Coordinating Council (ICC) to the Man of Biosphere (MAB) Programme*, di Palembang, Indonesia 23-28 Juli 2018.

Intergovernmental Council of the Management of Social Transformation (MOST) Programme

Management of Social Transformations (MOST) Programme memiliki visi untuk memperkuat relasi penelitian dan kebijakan serta pengetahuan dan aksi dalam rangka menumbuhkan perubahan sosial yang berdampak positif di dalam masyarakat menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Intergovernmental Council (IGC) MOST terdiri dari 35 negara anggota yang dipilih melalui Sidang UNESCO *General Conference* yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. MOST Indonesia tergabung dalam *the Intergovernmental Council (IGC) MOST* sejak tahun 2001. Saat ini Indonesia merupakan anggota IGC MOST dari Grup Asia Pasifik periode 2017-2021. Komisi Nasional MOST Indonesia merupakan Komisi yang pertama kali terbentuk di Asia Tenggara dan dipegang oleh Deputi IPSK-LIPI. Indonesia tergabung sejak periode berikut ini: 2001-2005, 2007-2011, 2013-2017 dan sejak 2017 sampai 2021.

IOC Executive Council

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) merupakan badan UN yang bertanggung jawab untuk mendukung layanan dan sains kelautan global. IOC memiliki anggota 150 negara yang bekerjasama untuk melindungi laut dengan melakukan koordinasi di sejumlah program diantaranya observasi kelautan, *tsunami warnings* dan *marine spatial planning*. IOC dibentuk pada tahun 1960 dan memiliki fokus memahami dan meningkatkan kapasitas pengelolaan laut, pantai dan ekosistem laut. Hingga kini, IOC telah mendukung negara anggotanya untuk meningkatkan kapasitas ilmiah dan Institusional guna pencapaian UN SDG Goal 14 yaitu *“to conserve and sustainably manage ocean and marine resources by 2030”*.

Jumlah anggota Dewan Eksekutif IOC berjumlah 40 negara. Indonesia menjadi anggota pada Dewan ini pada 2017-2019. Selain itu Indonesia pernah menjabat sebagai *Chair Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS-XII)* periode 2017-2019.

World Heritage Committee (WHC)

The World Heritage Committee (WHC) memiliki tanggungjawab melaksanakan konvensi World Heritage 1972 serta menetapkan pengelolaan *World Heritage Fund*. Komite WHC terdiri dari perwakilan dari 21 *state parties* dari Konvensi 1972 dan bertemu setiap tahun sekali untuk membahas berbagai perkembangan terkait pelaksanaan Konvensi. Selain itu Komite WHC bertugas untuk mendiskusikan dan menetapkan properti warisan dunia yang diusulkan oleh *state parties* dan menetapkan status dari properti warisan dunia yang tidak dikelola dengan baik.

Keterlibatan Indonesia pada WHC adalah pada periode 1990-1995 dan 2015-2019.

Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression

Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression bekerja di bawah wewenang Badan pengambil Keputusan Tertinggi Para Pihak (*Conference of Parties*) untuk mempromosikan dan melaksanakan Konvensi 2005. Komite terdiri dari 24 *state parties* dari Konvensi 2005

yang bertugas untuk masa jabatan empat tahun, bertemu setiap dua tahun untuk memastikan bahwa implementasi Konvensi tetap relevan di dunia yang terus berkembang. Atas permintaan Konferensi Para Pihak, Komite juga dapat mengembangkan dan merevisi pedoman operasional.

Indonesia anggota pada *Cultural Diversity* ini pada periode 2016-2019.

International Bureau of Education (IBE)

Visi dari badan ini adalah bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan yang relevan, berkualitas serta pembelajaran seumur hidup. Misinya adalah untuk mendukung dan mempromosikan solusi inovatif pada masalah-masalah yang dihadapi kementerian pendidikan dan pemerintah setempat guna meningkatkan kesetaraan, kualitas, relevansi dan efektivitas kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, serta proses dan hasil evaluasi. *International Bureau of Education (IBE)* merupakan organisasi Antarpemerintah pertama yang didirikan pada tahun 1929, dan melebur ke dalam UNESCO pada tahun 1969 sebagai pusat keunggulan global untuk kurikulum pendidikan. IBE *Council* terdiri dari 12 perwakilan yang ditunjuk oleh *General Conference* UNESCO untuk masa jabatan

Mandat IBE saat ini adalah untuk memperkuat kapasitas member states untuk merancang, mengembangkan dan menerapkan kurikulum pembelajaran relevan dengan kondisi saat ini, berkualitas, berkesetaraan, dan efisiensi sumber daya dan sistem pendidikan. Mandat tersebut difokuskan pula untuk mendukung upaya *member states* dalam pencapaian SDG Goal 4 *“Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”*.

Indonesia pernah menjadi anggota pada badan ini pada periode; 1974-1978, 1999-2003, 2007-2011.

Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS)

Komite Antarpemerintah untuk Pendidikan Jasmani dan Olahraga (CIGEPS) didirikan pada tahun 1978 dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan peran dan nilai olahraga. CIGEPS terdiri dari perwakilan 18 Negara Anggota UNESCO, pakar di bidang pendidikan jasmani dan olahraga, yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Dewan Penasihat Permanen (PAC), yang terdiri dari federasi olahraga, badan-badan PBB dan LSM, memberikan dukungan teknis dan memberi masukan kepada Komite.

Indonesia pernah menjadi salah satu negara anggota pada 2003-2007.

Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme (IHP)

International Hydrological Programme (IHP) adalah



Intervensi Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI untuk UNESCO Arrmanatha Nasir di Sesi *Executive Board* ke-207

program antar pemerintah yang ditujukan untuk penelitian air, pengelolaan sumber daya air, dan pendidikan dan peningkatan kapasitas terkait pengetahuan mengenai air. Sejak tahun 1975, IHP telah berkembang dari sebuah program penelitian hidrologi terkoordinasi internasional menjadi program holistik untuk memfasilitasi pendidikan dan pengembangan kapasitas, dan meningkatkan pengelolaan dan tata kelola sumber daya air.

Perencanaan, definisi prioritas, dan pengawasan pelaksanaan IHP dijamin oleh *Intergovernmental Council of IHP*. Dewan ini terdiri dari 36 Negara Anggota UNESCO yang dipilih oleh UNESCO *General Conference* setiap dua tahun sekali berdasarkan distribusi geografis dan rotasi yang tepat untuk menjamin komposisi Dewan yang adil. Masa jabatan anggota Dewan adalah empat tahun, dan anggota yang memenuhi syarat berkesempatan untuk dipilih kembali. Dewan biasanya bertemu dalam sesi pleno setiap dua tahun sekali. Sesi luar biasa diselenggarakan di bawah kondisi yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Tata Tertib.

Indonesia telah membentuk Komite Nasional Program IHP pada periode tahun 1975-1980 dengan tujuan untuk mendukung seluruh program atau isu-isu yang memadukan informasi dan kesenjangan pengetahuan konsep dan sistem lingkungan air.

Pada badan ini, Indonesia telah menjadi anggota pada periode: 1964-1968, 1974-1978, 1993-2001, 2007-2011 dan 2013-2017.

Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)

International Bioethic Committee (IBC) merupakan badan yang tersusun dari 36 pakar independen yang mengikuti kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan penerapannya. IBC adalah satu-satunya forum global yang fokus pada bioetika. Tugas dari IBC adalah mempromosikan refleksi atas masalah etika dan hukum yang timbul dari penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan penerapannya, mendorong pertukaran ide dan informasi, meningkatkan kesadaran di kalangan

masyarakat umum dan para pengambil kebijakan yang terlibat dalam isu bioetika, bekerja sama dengan organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional yang fokus pada bidang bioetika serta dengan komite bioetika nasional dan regional atau lembaga terkait, berkontribusi pada penyebaran prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi UNESCO di bidang bioetika.

Indonesia, telah 3 kali menjadi anggota pada badan ini yaitu pada periode 2001-2005, 2007-2011 dan 2011 sampai dengan 2015.

Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (IPDC)

International Programme for Development of Communication adalah satu-satunya forum multilateral dalam sistem PBB yang dirancang untuk memobilisasi masyarakat internasional guna membahas dan mempromosikan pembangunan media di negara-negara berkembang. Program ini tidak hanya memberikan dukungan untuk proyek-proyek media, namun juga berupaya mencari kesepakatan untuk menjamin lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan media yang bebas dan pluralistik di negara berkembang.

Intergovernmental Council of IPDC terdiri dari 39 negara anggota dipilih melalui UNESCO *General Conference* dari masing-masing electoral group untuk memastikan distribusi geografis dan rotasi yang adil. *Intergovernmental Council of IPDC* bertemu dua tahun sekali untuk merivui program IPDC, menetapkan prioritas program, termasuk perencanaan dan implementasi program serta *policy-making*.

Upaya dari IPDC memiliki dampak penting pada berbagai bidang yang meliputi, antara lain promosi independensi media dan pluralisme, pembangunan media komunitas, organisasi radio dan televisi, modernisasi kantor berita nasional dan regional, serta pelatihan untuk profesional media.



Suasana sidang *Executive Board* UNESCO

Pada badan ini, Indonesia telah menjadi anggota pada periode: 1980-1989 dan 1993-2001.

Intergovernmental Council for the Information for All Programme (IFAP)

Information for All Programme (IFAP) adalah program antar pemerintah yang didirikan pada tahun 2000. Melalui IFAP, Pemerintah dunia telah berjanji untuk memanfaatkan peluang baru dari era informasi untuk menciptakan masyarakat yang adil melalui akses yang lebih baik ke informasi.

Information for All Programme terintegrasi erat dengan program reguler UNESCO, terutama di bidang komunikasi dan informasi. IFAP bekerja sama dengan organisasi lain antar pemerintah dan LSM internasional, terutama mereka dengan keahlian manajemen informasi dan pelestarian, seperti *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)* dan *International Council on Archives (ICA)*.

Intergovernmental Council for IFAP terdiri dari 26 *member states* UNESCO yang ditetapkan pada UNESCO *General Conference* dengan memastikan distribusi geografis dan rotasi yang adil. Council bertugas diantaranya untuk menilai proposal untuk pengembangan dan adaptasi program IFAP, meriviu program IFAP, meningkatkan partisipasi negara anggota, dan memberikan rekomendasi guna pelaksanaan IFAP.

Indonesia menjadi anggota pada badan ini pada periode 2003-2015.

Staff Pension Committee (Pension)

The UNESCO Staff Pension Committee adalah organ administratif di dalam UNESCO dan merupakan bagian dari *United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF)*. Komite Ini diberi kewenangan untuk mengatur pengelolaan dana pensiun organisasi. Komite ini terdiri dari sembilan anggota: tiga anggota (dan tiga *alternates*) dipilih oleh UNESCO *General Conference* untuk jangka

waktu dua tahun; tiga anggota (dan tiga *alternates*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; (mereka harus berafiliasi dengan Dana Pensiun dan menjadi anggota Sekretariat UNESCO); tiga anggota (dan tiga *alternates*) dipilih oleh anggota staf.

Pada badan ini, Indonesia menjadi anggota periode 1995-1999.

Intergovernmental Council for the General Information Programme (PGI)

General Information Programme (PGI) dibentuk guna memastikan keselarasan program UNESCO pada bidang informasi saintifik dan teknologi khususnya terkait kebijakan, metoda, standar pengelolaan data dan Informasi, koleksi dan akses data dan informasi, dokumentasi, libraries dan kearsipan UNESCO bidang pendidikan, budaya, komunikasi dan sains alam serta sains sosial. PGI ditetapkan melalui Sidang *General Conference* UNESCO tahun 1976.

Pada badan ini, Indonesia menjadi anggota periode 1976-1984.

Advisory Committee on Program and Budget (ACPB)

Komite ACPB berfungsi memberi masukan berupa kebijakan terkait pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran organisasi.

Pada badan ini, Indonesia menjadi anggota periode 1952-1954.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)

Komite ini bertujuan untuk mempromosikan pelaksanaan Konvensi 2003, menyediakan panduan mengenai *best practices* dan membuat rekomendasi langkah-langkah perlindungan warisan budaya tak benda. Secara berkala komite bertemu untuk membahas usulan warisan budaya tak benda dari negara anggota, mengevaluasi program dan kegiatan yang terkait dengan Implementasi Konvensi 2003. Komite terdiri dari 24 anggota dengan komposisi minimal tiga (3) wakil dari *electoral group*.

Pada badan ini, Indonesia menjadi anggota periode 2010-2014.

BEBERAPA CATATAN PERAN INDONESIA DALAM PERTEMUAN ORGAN-ORGAN PENGARAH UNESCO

Selain untuk pengembangan sektor-sektor kompetensi UNESCO di Indonesia, keberadaan Indonesia di UNESCO juga dimaksudkan untuk ikut mempengaruhi kebijakan, strategi dan program-program UNESCO, demi kepentingan Indonesia dan dunia, dengan mengusung semangat multilateralisme. Untuk itu, Indonesia selalu aktif memberikan statemen, intervensi dan opini, baik dalam setiap sidang resmi dalam organ-organ pengarah UNESCO (*General Conference*, *Executive Board*, dan badan-badan pengarah antar negara), maupun dalam pertemuan *working group* atau pertemuan-pertemuan informal menjelang atau sesudah sidang-sidang resmi tersebut.

Tentunya pengaruh Indonesia terhadap kebijakan, strategi dan program-program UNESCO itu tidak bisa diquantifikasi secara eksak. Beberapa *general statement* Indonesia di *Executive Board* dan catatan dari sidang World Heritage Committee di Baku, Azerbaijan, tahun 2019 berikut ini hanya sebagian kecil contoh yang terekam.

PERNYATAAN UMUM INDONESIA DALAM GENERAL CONFERENCE

Pernyataan umum Indonesia dalam General Conference ke-40 yang disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Duta Besar Arrmanatha C Nasir.



*National Statement Of The Republic Of Indonesia
At The 40th General Conference
Delivered By H.E. Ambassador Arrmanatha Nasir*

President of the General Conference, Chair of the Executive Board, Madame Director-General, Excellencies, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen

It is my great honour, on behalf of the Government of Indonesia, to address the 40th session of the UNESCO General Conference.

Indonesia is highly committed, together with other Member States, to the work of UNESCO, especially as a current member of the Executive Board. Indonesia in particular, welcomes UNESCO's contribution towards achieving tangible and sustainable progress in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

With nearly a third of the time to achieve the SDGs has elapsed, we are faced with daunting challenges. Continued high population growth, growing inequality, climate change, growing cases of radicalism, intolerance and violent extremism, and the rise various socio-economy injustices around the world, requires us to do more.

As no one country can address these global challenges alone, we call on greater global cooperation and collaboration. Key to this Mr. President, is multilateral cooperation. As a member of the international community, we all have the responsibility to harness, nurture and strengthen multilateral cooperation.

In the context of UNESCO, our multilateral shared responsibility is to shape the future of humankind, by ensuring that the 9,8 billion people in 2050, are equipped with quality skills that match the day challenges. We must also ensure that future humankind uphold values of mutual respect, tolerance, and cultural diversity. These are also key to for sustainable development.

In this regard, UNESCO, as the specialized UN Agency for education, science, culture and communication, must strengthen its role to address these global challenges.

Excellencies, Ladies and Gentlemen,

Indonesia is in harmony with UNESCO, in its vision, initiatives, values, and aspirations, where a quality education is a necessary foundation for a lifelong learning in a complex and rapidly changing world.

A renewed emphasis on advancement of culture promotes an inclusive universal basic right to happiness and peace for all as the supreme goal of all development.

That collaboration in science sector is a principle requirement for innovation to address global challenges today and in the future.

That free exchange of ideas, as enshrined in the Constitution of UNESCO, is a solid foundation for peace, cooperation, development and economic growth.

Towards this end, allow me to share our commitment and progress made in advancing UNESCO vision, values and aspiration.

First, I am proud to announce that Indonesia has achieved significant progress in the education sector.

The Government has revolutionized national curriculum by integrating it with character education and the 21st century competencies and literacies.

One of the flagship initiatives made is the National Literacy Movement Program that not only attaches basic, but also

advanced literacy, including literacy in science and technology, digital and numeracy, culture, and civic.

Secondly, I am also privileged to announce several important breakthroughs in mainstreaming culture as a driver and enabler of sustainable development.

In enhancing governance of culture, the Government of Indonesia has adopted National Law on Cultural Advancement in 2017 that clarifies the value chain of culture, acknowledges the protection of intellectual property rights and its interface with cultural heritage. This has strengthens its contribution to sustainable tourism and economic development.

In line with the Law, a policy framework called Cultural Strategy was formulated and would be integrated into the 2020-2024 National Development Plan.

I am also pleased to inform this august conference that recently, the Government of Indonesia has launched the Cultural Development Index - the first Index in the world that measures progress of development at the national and provincial level, in the context of cultural advancement.

In 2021 Indonesia will be hosting World Cultural Forum, and we look forward to welcoming you all in Indonesia.

Third, with regard to science sector, we remain engaged with the international community in the advancement of science. Indonesia is particularly interested in the ongoing deliberations on the ethical perspective of artificial intelligence as well as life science.

Fourth, on communication and information, Indonesia remains steadfast in safeguarding the freedom of expression as we believe that a vibrant democracy can only be further cultivated and strengthen with a free and responsible media and journalism.

As such, Indonesia shall continue to empower its people by fostering the free flow of ideas, access to information and knowledge while placing the necessary legal framework to integrate information technology.

Excellencies, Ladies and Gentlemen,

In conclusion, Indonesia shall remain a credible and reliable partner of UNESCO, in strengthening all-inclusiveness and transparency of the Organization and its reform steps reflecting the spirit of the times and reality, while reinforcing the strategic goals of the Organization.

Finally, allow me to take this opportunity to seek your invaluable support for Indonesia re-election as Member of ICC-MAB for the period of 2019- 2024, at the election to be held on 21 November 2019.

I thank you.





*National Statement
Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP Minister of Education
and Culture The Republic of Indonesia At the 39th Session of
the UNESCO General Conference 2 November, 2017*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Good Morning

*President of the General Conference,
Chairman of the Executive Board,
Director-General of UNESCO,*

Excellencies, Ladies and Gentlemen

Let me begin by joining others in congratulating your Excellency Madame Zohour Alaoui, on your election as the President of the 39th Session of the General Conference.

I would like to congratulate His Excellency Ambassador Michael Worbs for leading the Executive Board for the past two years.

I also take this opportunity to express our deep appreciation for the Director-General Madame Irina Bokova, for her excellent and inspiring leadership of this Organization for the past 8 years.

We will welcome and congratulate the new Director General to be elected later in this session.

Excellencies,

It has been two years the new Agenda 2030 for Sustainable Development were unanimously adopted, and we commit ourselves to working tirelessly for the full implementation of this Agenda.

It is time for us to reflect on what we have achieved, and what must be accomplished in the future.

Indonesia built a legal base for the implementation of SDGs by enacting a Presidential Decree in July this year, followed by the establishment of the National Coordination Team.

Indonesia has achieved significant progress in education sector.

Those enrolling in early childhood education has reached 72.3 percent.

Earlier this year, Indonesia was awarded the first edition of UNESCO Prize for Girl's and Women's Education, for its outstanding programme in gender mainstreaming.

Primary school Gross Enrolment have reached more than 100 percent, and dropout rate reduced to 0.26 percent. The youth literacy rate has reached almost 100 percent.

These are the outcome of the "Smart Indonesia Program", a pro poor policy which warranties every child from poor family can continue education until grade twelve.

We have also revitalized the national curriculum by integrating characters, competencies and literacies, to equip students with the twenty-first century skills. Revitalization of vocational education is another top priority that we have just commenced.

Indonesia is actively strengthening its capacities in science and technology. A pivotal element for a knowledge-based economy.

We are hosting the Asia Pacific Centre for Eco-hydrology and the Regional Training for Marine Biodiversity.

Indonesia remains committed to preserve the Outstanding Universal Values of the Tropical Rainforests Heritage.

We just hosted UNESCO World Press Freedom Day 2017, showing our strong commitment to build a free, independent, and responsible journalism.

Recognizing that culture as a DNA of sustainable development, Indonesia organized the World Culture Forum in Bali in 2013 and 2016. The Forum adopted "Bali Declaration", which reemphasized our commitment to mainstream culture into policy.

Excellencies,

Looking ahead, Indonesia wishes to highlight that attaining the SDGs is indeed a critical agenda for UNESCO.

UNESCO must be at the forefront in devising new and creative ways in encouraging reform of education, to ensure our younger generation is ready to enter a more digitalized and technology-driven economies.

UNESCO must also ahead of solving current global challenges: growing inequality, the spread of radicalism and extremism, and the rise of racism and prejudice, and continued degradation of the ecosystem.

As a responsible member of the international community, Indonesia stands ready to

contribute to the global discourse in finding the best possible ways for UNESCO to help create a better world for living.

Finally, I have the honour to announce Indonesia's candidacy to the Executive Board of UNESCO, for the period of 2017 – 2021. We certainly appreciate full support from UNESCO members to our candidacy.

Let us make UNESCO as Home of hope, peace and humanity.

I thank you.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





209th Session Of The Executive Board
Of Unesco General Statement
The Republic Of Indonesia
Delivered By H.E. Ambassador Arrmanatha Nasir

Chair of the Executive Board,
President of the General Conference,
Director General of UNESCO,
Distinguished Members of the Executive Board,

This year marks 70 years of Indonesia-UNESCO relations. Since our membership, UNESCO has influenced the construction of educational, social, cultural and scientific paradigms in Indonesia. While Covid-19 has cancelled, the many planned events to commemorate Indonesia-UNESCO 70th anniversary. Indonesia reaffirm its commitment to UNESCO, as we address the proliferation of challenges of our time, that require strong partnerships, solidarity and innovative solutions.

Mr. Chairperson,

The ongoing COVID-19 pandemic has highlighted the importance of global solidarity, scientific cooperation, as well as accurate and reliable information and communication. As a strong believer in multilateralism, Indonesia stresses the importance for UNESCO to play its parts, to contribute to global mitigation and adaptation efforts of a COVID-19 world. Our 209th session is therefore important, to chart a concrete path for UNESCO's response, and to ensure the continued relevance of our beloved organization. In this context, readjusting our priorities, synchronizing of our programs and budget, and adapting the way UNESCO work, is key.

Mr. Chairperson,

Education is one sector that has suffered tremendously in light of the pandemic. UNESCO's leadership and support to ensure continuation and quality education is critical. We encourage programs that supports countries to implement and strengthen distance or remote learning. In Indonesia for example, the pandemic has disrupted education for around 45 million students. Various initiatives have been taken to ensure educational activities continues, including through digital platforms such as RUMAH BELAJAR, SPADA, and Guru Berbagi....

Through the national broadcaster, Indonesia is also conducting distancing learning programs for very remote areas. Our experience shows that a strong public-private partnership is important to ensure success of digital distance learning programs. No doubt that unique condition of specific regions areas also requires adjustment to approaches in distance learning mechanisms. For Indonesia, as we move forward to make distance learning a more permanent feature in our education system, we are taking steps to strengthen distance learning program including through, training teachers to conduct distance learning; and ensuring greater and more stable digital access to all students.

Mr. Chairperson,

Indonesia acknowledge the importance of Future Education initiatives, in the context of the Global Education Monitoring Report to be published in 2021. This initiative is not only important for preparing future education in a post- Covid-19 pandemic world. But it is also to anticipate the future of society values, ethics and norms, resulting from developments such as climate change, social fragmentation, advances in digital communication, artificial intelligence as well as in biotechnology.

Indonesia also underlines the essential role of cultural expressions in strengthening humanitarian spirit and solidarity, fostering social cohesion and bringing resilience to societies. The closure of world heritage properties, and cultural events and facilities have resulted in adverse impact to the cultural sectors and tourism.

It is therefore important for us to take measures to support cultural professionals and creative industries, including by facilitating virtual cultural expressions and performance during pandemic. With regards to the reports for this session, Indonesia appreciates the comprehensive and detailed nature of the reports submitted by the secretariat.

The Programme Implementation Report (PIR) provides important developments in cooperation, partnerships and fund mobilization, as well as a useful overview of UNESCO's work.

We welcome the inter-sectoral collaboration highlighted in the report. We encourage early inter-sectoral collaboration and coordination, such as during the setting performance indicators and targets.

With regards to the Strategic Results Report (SRR), Indonesia acknowledges the Secretariat initiatives, notably, in organizing various dialogues with member states in order to shape and seize the Mid-Term Strategy 2022-2029.

While we note the SRR is a performance report, it would be beneficial for the report to have a stronger focus on future trends, partnership and challenges.

On the Report on Management Issues, Indonesia reiterates its commitment to support continuous efforts of UNESCO in increasing efficient and effective resource mobilization, in implementing Structured Financing Dialogues as well as in achieving Strategic Transformation targets.

We look forward to a fruitful, consensus driven meeting for every item in the agenda including the inscription of the new UNESCO Global Geopark.

In this regard, Indonesia looks forward to the inscription of Caldera Toba as the new UNESCO Global Geopark.

Mr. Chairperson

Within the UN family, UNESCO's comparative advantages is in education, culture, science, media development and freedom of expression.

Indonesia therefore welcomes UNESCO's efforts to enhance synergies with international stakeholders, especially within the UN system, on UNESCO's key issues.

This is essential to response to the future challenges in a world of increase of inequalities, complexity and uncertainty.

I thank you.





Pernyataan Yang Mulia Puan Maharani Menteri Koordinator
Bidang pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Ketua Delegasi Republik Indonesia
Pada Sidang Ke -204 Dewan Eksekutif Unesco Tahun 2018

Pimpinan/Ketua Dewan Eksekutif,
Presiden Sidang Umum,
Direktur Jenderal UNESCO,
Para Delegasi Dewan Eksekutif yang saya hormati,

Selamat Pagi,

Saya akan memulai dengan mengucapkan selamat kepada Madam Audrey Azoulay sebagai Direktur Jenderal UNESCO yang baru. Ini adalah pertemuan pertama bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif untuk periode 2017-2021, dan saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan Direktur Jenderal, dan anggota Dewan Eksekutif lainnya.

Indonesia menyambut baik bahwa UNESCO terus berkomitmen untuk memajukan Tujuan 4 dari Agenda 2030. Pendidikan yang berkualitas sangat penting karena banyak negara berkembang akan mendapatkan bonus demografi, seperti Indonesia. Dalam waktu dekat, generasi muda kita akan menghadapi tantangan utama otomatisasi kerja, yang akan mengubah karakter dari lapangan kerja yang tersedia, dan makin diperberat dengan datangnya Industri 4.0.

Pendidikan dan kebudayaan adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya penting untuk pengembangan manusia, dan oleh karenanya baik pendidikan maupun budaya harus ditangani secara komprehensif. Kita semua harus mengantisipasi perkembangan ini. Indonesia telah memprioritaskan pemerataan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembentukan karakter.

Dalam memastikan akses inklusif bagi semua, Pemerintah Indonesia terus menerapkan kebijakan dan program yang pro-masyarakat miskin dan berinvestasi lebih banyak untuk pengembangan pendidikan di daerah-daerah yang kurang terlayani. Berkenaan dengan pelatihan keterampilan, Indonesia telah melakukan reformasi secara komprehensif terhadap kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan (*Technical and Vocational Education and Training/TVET*), yang sejalan dengan Strategi UNESCO untuk TVET 2016-2021.

TVET telah berhasil memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada kaum muda. Program ini mengembangkan kewirausahaan, yang berperan sebagai jembatan antara pendidikan dan pekerjaan.

Pembangunan karakter perlu dimasukkan dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan, karena penting untuk mengembangkan toleransi dan kerja sama dalam keberagaman.

Dalam mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia telah mengintegrasikan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, atau (*Education for Sustainable Development-ESD*), ke dalam kurikulum kami, dengan perhatian khusus pada pengembangan karakter, pengurangan kemiskinan, kewirausahaan, kesehatan, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, kami melihat manfaat dari keberlanjutan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan/ESD paska 2019 dan mendukung proposal keberlanjutannya. Para Hadirin yang saya hormati, Sains, teknologi, dan inovasi juga penting dalam mencapai 2030 Agenda. Meskipun kami melihat ada hambatan tertentu dalam menerapkan IMS, Indonesia percaya bahwa UNESCO perlu mengeksplorasi lebih lanjut, cara-cara strategis untuk melakukan berbagi sumber daya dalam kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda ke dua contoh utama kolaborasi multipihak, dimana Indonesia memiliki komitmen kuat, yaitu UNESCO Global Geopark dan UNESCO Asia Pacific Center for Ecohydrology yang terletak di Science and Techno Park (STP) di Indonesia. Kami mengundang UNESCO dan semua anggota untuk mengambil keuntungan dari pusat-pusat ini.

Para Hadirin yang saya hormati, Sebagai negara kepulauan, Indonesia ingin melihat lebih banyak publikasi

ahli UNESCO tentang ilmu dan penelitian laut, termasuk pencemaran laut, pengelolaan pesisir dan dampak perubahan iklim, dan hubungannya dengan Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim. Kami mencatat persiapan yang dilakukan oleh IOC untuk Dekade Sains Laut PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021-2030.

Para Hadirin yang saya hormati,

Peran UNESCO dalam menyebarkan perdamaian melalui Ingatan Kolektif Dunia/*Memory of the World*, juga harus ditingkatkan dengan menggarisbawahi warisan bersama kita semua.

Budaya merupakan komponen kunci untuk membangun rasa hormat, toleransi, dan pengertian. Dalam hal ini, UNESCO harus memainkan peran yang lebih strategis lagi, selain membantu Negara-negara dalam melestarikan warisan budaya mereka, tapi juga dalam mencapai perdamaian dan harmoni.

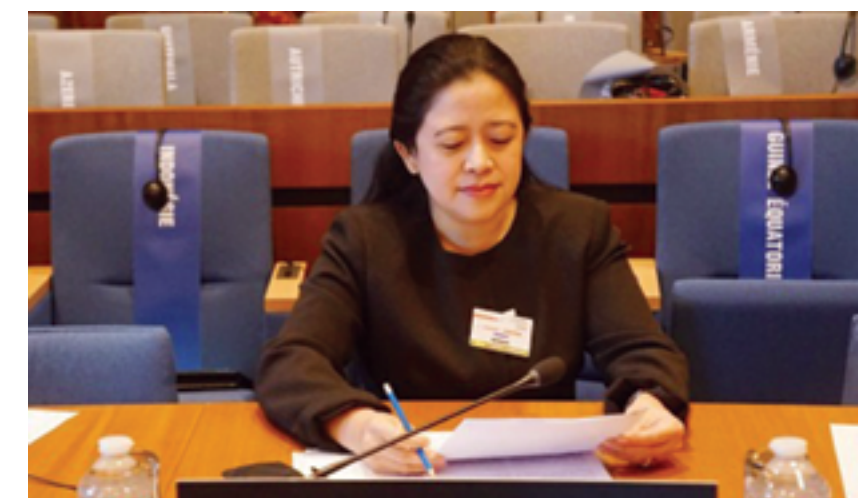
Kami percaya bahwa pendidikan tidak hanya perlu membuat seseorang menjadi pandai, namun juga untuk membuat orang tersebut menjadi berbudaya. Kami melihat UNESCO perlu ikut mengambil peran untuk menjadikan pembangunan budaya masuk dalam *platform* pendidikan. Kami siap bekerjasama dengan UNESCO untuk mencapai tujuan ini.

Kami dengan senang hati akan membagikan pengalaman kami dalam hal ini, termasuk untuk mempromosikan dialog antar agama dan antar budaya, untuk membantu membangun perdamaian di dalam pikiran pria dan wanita (*peace in the minds of men and women*-slogan resmi UNESCO).

Para Hadirin yang saya hormati,

Sebelumnya hari ini di Bali, Indonesia, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Forum Indonesia - Afrika, acara pertama yang berfokus pada kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Afrika dalam berbagai masalah, termasuk kapasitas manusia, kewirausahaan, ekonomi digital, dan kerjasama teknis. Tindak lanjut dari inisiatif ini, Indonesia berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan UNESCO, melalui berbagai kemungkinan mekanisme, termasuk kerja sama Selatan-Selatan dan triangular.

Terima kasih.



CATATAN AKTIFITAS DELEGASI INDONESIA DALAM PERTEMUAN *WORLD HERITAGE COMMITTEE* KE-43, BAKU, AZERBAIJAN, 2019

WHC adalah Komite Pengarah Konvensi UNESCO tahun 1972 tentang Proteksi Warisan Budaya dan Alam Dunia. Anggotanya terdiri dari 21 negara yang dipilih mewakili wilayah - wilayah di Eropa, Asia – Pasifik (ASPAC), Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Setiap anggota bertugas selama 4 tahun. Indonesia pernah menjadi anggota mewakili ASPAC pada periode 1990-1995 dan 2015-2019.

Komite bersidang setiap tahun dan dihadiri oleh jajaran pimpinan *World Heritage Center*, lembaga-lembaga konsultatif *World Heritage (International Council of Monuments and Sites (ICOMOS)*, *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* dan *International Centre for Study of the Preservation and Restoration of Culture Property (ICCROM)*, seluruh perwakilan negara yang meratifikasi konvensi (saat ini, 193 negara), dan perwakilan lembaga non - pemerintah dari beberapa negara. Sidang membahas tiga agenda utama yakni: (a) kondisi warisan-warisan dunia (*state of conservation*) yang ada dalam daftar properti terancam (*in danger list*) dan yang akan dimasukkan ke dalam *in danger list*; (b) nominasi warisan dunia baru; (c) laporan pelaksanaan program kerja *World Heritage Center* dan beberapa grup kerja *ad-hoc*.

Salah satu contoh peran dan kontribusi Indonesia adalah dalam Sidang *World Heritage Committee (WHC)* UNESCO ke-43 dilangsungkan di Baku, Azerbaidjan dari tanggal 30 Juni 2019 sampai tanggal 10 Juli 2020. Sidang terakhir bagi Indonesia untuk periode 2015-2019 ini memiliki 17 item agenda. Item utama adalah item 7 dan 8, masing-masing menyangkut *State of Conservation* 25 warisan dunia *in danger* dan status nominasi 35 warisan dunia baru, termasuk Tambang Batubara Ombilin-Sawahlunto. Pembahasan didasarkan pada rekomendasi dari lembaga konsultatif terkait. Keputusan Komite diambil dengan konsensus setelah debat dan lobi di antara anggota.

Sebagai anggota Komite, Indonesia dituntut untuk berperan dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk mendukung ini, delegasi Indonesia melibatkan tenaga-tenaga ahli saintifik dan politik luar negeri. Diantaranya adalah Ir. Wahjudi Wardjo (ahli warisan alam) dan Dr. Daud A. Tanudirjo (ahli warisan budaya).

Dalam sidang item 7 dan 8 ini, Indonesia mendukung amandemen rekomendasi lembaga konsultatif untuk 12 warisan dunia dari 12 negara dan mengajukan 2 amandemen rekomendasi untuk 2 warisan dunia, masing-masing untuk situs Vietnam dan situs Thailand. Dukungan diberikan atas permintaan pemerintah masing-masing negara melalui Dubes atau Menterinya, baik di UNESCO maupun selama sidang berlangsung. Semua amandemen yang didukung Indonesia, kecuali amandemen untuk Thailand, disetujui setelah perdebatan sengit di antara negara anggota. Amandemen untuk Thailand yang meminta situs Thailand diubah dari *non inscribed* menjadi *inscribed* akhirnya diputuskan menjadi *deffered* (ditunda).

Rekomendasi nominasi Tambang Batubara Ombilin-Sawahlunto yang juga dibahas pada sidang WHC tersebut tidak diperdebatkan karena tdk ada yang meminta amandemen. Demikian juga dengan rekomendasi tentang *Tropical Rain forest Heritage of Sumatera (TRHS)* dan Taman Nasional Lorentz.

Di luar item 7 dan 8, sidang membahas item-item report *WH center*, terutama yang berhubungan dengan dialog antara negara anggota dan lembaga konsultatif sebelum rekomendasi terhadap suatu properti warisan dunia dibuat, perbaikan prosedur dan petunjuk *state of conservation* dan nominasi, sinergi Konvensi 1972 dengan Konvensi Dunia lainnya (seperti sasaran-sasaran SDGs 2030), serta sinkronisasi dan keseimbangan tujuan Konvensi 1972 dengan kebutuhan pengembangan negara anggota. Indonesia berperan aktif dalam sidang dengan memberikan beberapa masukan.

Sebagai anggota Biro WHC mewakili ASPAC, Indonesia juga diminta menyampaikan *remarks* pada acara *side-event* mengenai *Periodic Reporting in the Asia-Pacific Region*, yang diselenggarakan oleh Desk Asia Pasifik Sekretariat World Heritage Centre (WHC) UNESCO pada tanggal 7 Juli 2019. Dalam *remarks*-nya, Ketua Delri menyampaikan apresiasi dan pujian terhadap kemajuan implementasi Rencana Aksi Regional dari Siklus Kedua *Periodic Reporting*. Dalam kapasitas sebagai *Vice-Chair* WHC ke-43 mewakili Kawasan Asia Pasifik, Wakil Delegasi Tetap RI juga untuk UNESCO menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Jepang, Malaysia, Belanda, Republik Korea dan Amerika Serikat atas kontribusi mereka dalam mendukung tindak lanjut pada Siklus Kedua *Periodic Reporting* di kawasan Asia Pasifik.

Catatan menarik dari sidang kali ini adalah pertarungan klasik antara kubu konservatif Eropa+Australia dan kubu progresif ASPAC, Arab dan Amerika Latin (Kubu Afrika yang biasanya solid, terbelah). Kubu konservatif tetap melihat warisan dunia sebagai properti yang tidak boleh diganggu gugat, kecuali untuk keperluan proteksi dan konservasi. Pendapat ini, terutama diwakili oleh Norwegia, Hungaria dan Australia. Sebaliknya, kubu lain, melihat warisan dunia sebagai aset untuk pengembangan sosio-budaya-ekonomi.

PENUTUP

Pemaparan ringkas catatan para Wakil Tetap dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, sekilas perkembangan kebijakan dan program hubungan UNESCO-Indonesia, beberapa tonggak sejarah luaran dan manfaat kerjasama UNESCO-Indonesia, serta deskripsi tetapan-tetapan UNESCO (warisan dunia, warisan dunia tak benda, cagar biosfer, geopark, dan ingatan dunia) yang tertera dalam buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana peran Indonesia dalam membangun perdamaian dunia melalui UNESCO. Pemanfaatan UNESCO untuk pengembangan pendidikan Indonesia adalah refleksi upaya Indonesia untuk membangun kerangka berpikir dan karakter *universal* yang dibutuhkan untuk pembangunan peradaban. Aktifitas Indonesia dalam bidang sains UNESCO bisa dilihat sebagai bagian dari usaha untuk memperluas jaringan kerja sama multilateral dengan pendekatan ilmiah. Ratifikasi dan implementasi konvensi-konvensi UNESCO yang berhubungan dengan kebudayaan merupakan manifestasi dari keinginan untuk menjadikan identitas dan tata-nilai Indonesia sebagai salah satu bangunan keragaman kebudayaan dunia, roh utama menuju dunia yang stabil dan berkelanjutan.

Pencapaian-pencapaian Indonesia dalam mewujudkan peran tersebut selain menghasilkan luaran dan manfaat, juga memberikan implikasi dan konsekuensi. Pencapaian-pencapaian dalam bidang pendidikan menjadikan Indonesia setapak lebih maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain, paling tidak di bidang *basic literacy* dan pendidikan anak usia dini serta pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, sudah waktunya Indonesia untuk membantu UNESCO dengan berbagi pengalaman dan gagasan.

Keberhasilan-keberhasilan di sektor kerjasama sains, terutama sains hayati dan kelautan, membuka peluang Indonesia sebagai *leader* kerjasama multilateral, paling tidak untuk wilayah ASEAN atau ASPAC. Di sisi lain, tetapan-tetapan cagar biosfer dan geopark menuntut konsistensi Indonesia dalam perlindungan dan pelestarian sekaligus mengembangkan aktivitas sosio-ekonomi yang ramah lingkungan bagi masyarakat sekitarnya.

Capaian-capaian di sektor kebudayaan, terutama dalam bentuk jumlah tetapan-tetapan UNESCO, menuntut Indonesia untuk fokus pada perlindungan dan pelestarian warisan nenek moyang sebagai upaya menjaga identitas dan tata nilai bangsa. Manfaat-manfaat sosio-ekonomi dari tetapan warisan-warisan tersebut seyogyanya tidak dilihat sebagai tujuan utama, namun sebagai efek positif dari upaya-upaya perlindungan dan pelestarian tersebut.

Sekali lagi, data dan informasi di dalam Buku 70 tahun Hubungan Indonesia-UNESCO ini tentunya tidaklah cukup untuk menggambarkan rekaman seluruh kiprah Indonesia di UNESCO serta seluruh manfaat yang sudah dirasakan Indonesia sebagai anggota UNESCO. Rekam jejak yang lengkap bisa ditemukan pada arsip, laporan, dan dokumen yang dimiliki oleh seluruh pelaksana kerjasama UNESCO di Indonesia. Komite-Komite Program UNESCO di Indonesia, *National Contact Point*, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait, pemerintah-pemerintah

daerah, kelompok-kelompok masyarakat dan LSM-LSM sebagai eksekutor kunci keberhasilan hubungan Indonesia-UNESCO adalah sumber-sumber rujukan data dan informasi terbaik.

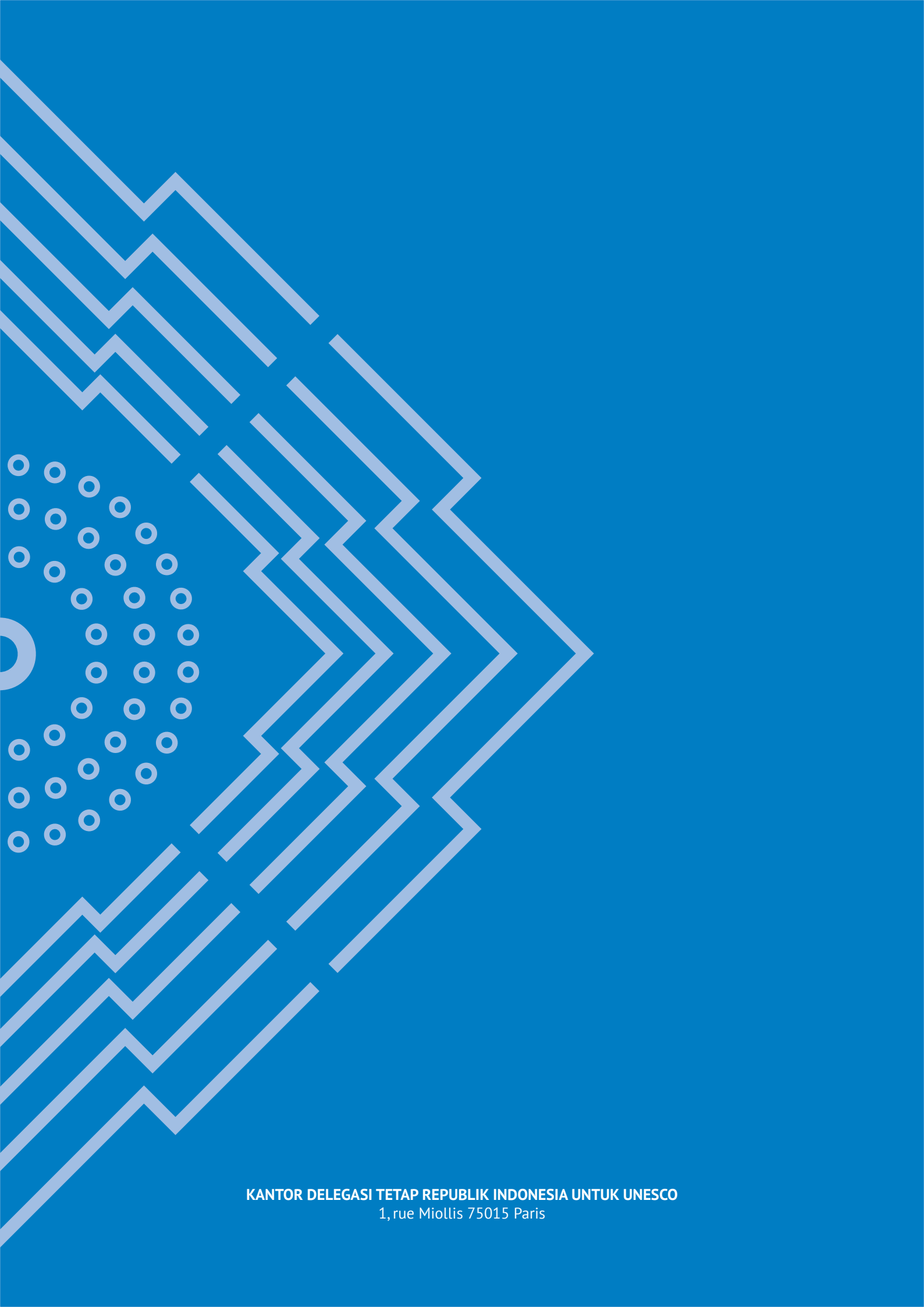
Menyusul pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease – December 2019*), jejak Indonesia-UNESCO ke depan mungkin akan melewati jalan dan mekanisme berbeda sama sekali. Teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan, mesin pembelajar, internet, dan *big data* yang berkembang pesat dalam memitigasi dampak pandemi akan memicu perubahan cara hidup dan kehidupan dunia, termasuk aktivitas UNESCO. Pertemuan-pertemuan dan aktivitas-aktivitas virtual akan menjadi pilihan utama. Dari sisi substansi, implementasi gagasan-gagasan UNESCO yang berhubungan dengan *standard-setting Future Education* (pendidikan), *Open Science* (sains), *Artificial Intelligence* (sains sosial), *Digital Culture Environment* (kebudayaan), dan Indikator *Internet Universal* (komunikasi dan informasi) akan dipercepat.

Bagi Indonesia, ini akan menyangkut perubahan tata kelola, tata kerja dan program-program prioritas. Peningkatan kecepatan, efisiensi dan efektifitas koordinasi dan sinergi di antara semua pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak. Mudah-mudahan pengalaman dan praktik baik hubungan Indonesia-UNESCO selama 70 tahun ini menjadi rujukan utama untuk mengantisipasi berbagai perubahan tersebut.

REFERENSI UTAMA

Tautan

1. <http://en.unesco.org>
2. <http://e9.depdiknas.go.id>
3. <http://ksdae.menlhk.go.id>
4. <https://www.indonesia.go.id>
5. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>
6. <https://teachertaskforce.org>
7. <https://kwriu.kemdikbud.go.id>
8. <http://blog.jawi.or.id/mengenal-cagar-biosfer-blambangan/>
9. <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2018/07/11/perubahan-mata-pencaharian-warga-kampung-komodo-kawasan-taman-nasional-komodo/>
10. <https://www.pikiran-rakyat.com/properti/pr-01332757/kapal-pinisi-kapal-legendaris-asal-bugis-sejak-abad-ke-14>
11. <http://www.zonareferensi.com/sejarah-candi-borobudur/>
12. <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/>
13. <https://en.unesco.org/programme/mow>
14. <https://unesdoc.unesco.org/permalink/P-46e7deae-5020-4a70-90e5-0cfb2e9fc4d8>
15. <https://digital.archives.unesco.org/en/collection/photos/?mode=gallery&view=horizontal&q=indonesia&page=1&reverse=0>
16. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090895.locale=en>
17. https://pax.unesco.org/la/conventions_by_country.asp?contr=ID&language=E&typeconv=1
18. https://pax.unesco.org/la/conventions_by_country.asp?contr=ID&language=E&typeconv=0
19. <https://en.unesco.org/mab>
20. <https://en.unesco.org/creative-cities/home>
21. <https://en.unesco.org/themes/communication-and-information>
22. <https://whc.unesco.org/en/>
23. <https://whc.unesco.org/en/convention/>
24. <https://whc.unesco.org/en/list/>
25. <https://aspnet.unesco.org/en-us/>
26. <https://ich.unesco.org/>
27. <https://nowjakarta.co.id/>
28. <https://universiteitleiden.nl/>
29. <https://lagaligofoundation.com/>



KANTOR DELEGASI TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK UNESCO
1, rue Miollis 75015 Paris